



e ISSN 2614-8935

p ISSN 2615-3815

# INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Vol. 18 No. 1, Mei 2021

**Kesiapan Perguruan Tinggi di Sumatera Utara Menghadapi Era New Normal Covid 19 Dalam Perspektif Manajemen Lingkungan Kampus**

*(Ismail Efendy, Arifa Devi Fitriani, Endang Maryanti, Rika Fitri Ilvira, dan Azizul Kholis)*

**Pemenuhan Guru Produktif SMK di Era Revolusi Industri 4.0**

*(Jonni Sitorus, Muhammad Kaulan Karima, dan Beta Rapita Silalahi)*

**Pengembangan Tipologi Inovasi Pelayanan Publik: Studi Layanan Administrasi Kependudukan di Indonesia**

*(Wisber Wiryanto)*

**Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi Daerah Kabupaten Banggai**

*(Irwan Moridu)*

**Model Ekosistem Bisnis Pariwisata Terpadu Berbasis Strategi 5 Jalur**

*(Edhie Baskoro Yudhoyono, Hermanto Siregar, Noer Azam Achsani dan Tony Irawan)*

**Kinerja Usaha Dalam Perikanan Tangkap Jaring Pukat Cincin**

*(Herna Octivia Damayanti)*

**Komunikasi Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Inses di Kecamatan Tanjung Tiram**

*(Hasan Sazali)*

**Strategi Percepatan Pengentasan Backlog Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Daerah Perkotaan di Sumatera Utara**

*(Dumora Jenny Margaretha Siagian, Porman Juanda Marpomari Mahulaa, dan Sahat Christian Simanjuntak)*

**Kebijakan Pemanfaatan Media Sosial Website, Facebook, dan Youtube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya**

*(Rio Febriannur Rachman dan Kacung Marijan)*

**Persepsi Pengunjung Terhadap Fasilitas, Kondisi Lingkungan dan Kesiediaan Membayar Di Kawasan Aek Nauli Elephant Conservation Camp**

*(Freddy J. Hutapea, Johansen Silalahi, dan Wanda Kuswanda)*

Diterbitkan oleh :

**Badan Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Sumatera Utara**

Inovasi	Vol. 18	No. 1	Hal. 1 - 122	Medan Mei 2021	e ISSN 2614-8935 p ISSN 2615-3815
---------	---------	-------	-----------------	-------------------	--------------------------------------

Terakreditasi sebagai Jurnal Ilmiah  
Terakreditasi Peringkat 2 dengan  
Nomor Akreditasi : 200/M/KPT/2020



# INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

**Volume 18, Nomor 1**

**Mei 2021**

**e-ISSN 2614-8935**

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan adalah jurnal ilmiah bidang ilmu politik dan kebijakan yang Terakreditasi Peringkat 2 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 200/M/KPT/2020 tanggal 23 Desember 2020.

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan sebagai media litbang Provinsi Sumatera Utara memuat karya tulis ilmiah hasil penelitian atau tinjauan kepustakaan dalam bidang pemerintahan dan masyarakat, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, sumberdaya alam dan maritim sebagai bahan kebijakan dan wawasan berpolitik, yang terbit dua kali dalam setahun setiap bulan Mei dan Oktober.

**Pengarah/Penanggung Jawab** Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

**Penanggung Jawab** Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi

**Redaktur** Nobrya Husni, ST., M.Si

**Editor** Ir. Abdurrozaq Hasibuan, MT., IPM  
Anton Parlindungan Sinaga, ST  
Dumora Jenny Margaretha Siagian, ST  
Porman Juanda Marpomari Mahulae, ST  
Silvia Darina, SP  
Sahat Christina Simanjuntak, ST

**Layouter** Boy Utomo Manalu, S.TI  
Agus Ertiawan Debatara, S.Kom

**Sekretariat Redaksi** Emma Kemalasar, S.Si., M.Si  
Deni Syahputra, ST  
Yanita, SE

***Mitra Bestari Volume 18, Nomor 1, Mei 2021***

Dr. Jonni Sitorus, ST., M.Pd (*Pendidikan*, Balitbang Provinsi Sumatera Utara)  
Dr. Lukitaningsih, Dra., M.Hum (*Sosial*, Universitas Negeri Medan)  
Hanifa Mutia Z. N. Amrul, S. Si., M.Si (*Biologi*, Universitas Panca Budi)  
Dr. Herie Saksono (*Kebijakan Publik*, Balitbang Kemendagri)  
Dr. Dra. Nina Siti Salmaniah Slegar, M.Si (*Sosial*, Universitas Medan Area)  
Prof. Dr. Nurdin Bukit, M.Sc (*Pendidikan*, Universitas Negeri Medan)  
Dr. Wahyu Ario Pratomo, SE., M.Ec (*Ekonomi Pembangunan*, Universitas Sumatera Utara)  
Suzanna Eddyono, S.Sos, M.Si, MA (*Sosial*, Universitas Gadjah Mada)

Alamat Penerbit :

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Sisingamangaraja No. 198 Medan 20126  
Tel. (061) 7866225; 7883016 - Fax. (061) 7866248  
Website: <http://jurnal.balitbang.sumutprov.go.id>  
Email: [inovasibpp@gmail.com](mailto:inovasibpp@gmail.com)

## PENGANTAR REDAKSI

HORAS.....

Pembaca yang terhormat,

Memasuki tahun ke-2 Pandemi COVID-19 yang melanda dunia tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap berkontribusi pada aspek literasi ilmiah. Kebiasaan baru dalam menjalankan aktivitas seperti penerapan protokol kesehatan, perlahan namun pasti menjadi suatu keharusan dalam era *New Normal* saat ini. Begitupun semangat redaksi dalam mengelola INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan. Berkat kerjasama yang baik antara penulis dan redaksi selama ini, INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, berhasil mempertahankan reputasi sebagai jurnal terakreditasi peringkat (S2) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 200/M/KPT/2020 tanggal 23 Desember 2020.

Edisi Mei 2021 kali ini menampilkan 10 (tulisan) dari berbagai disiplin keilmuan. Mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, pariwisata, ekonomi, sosial, dan budaya. Masih menyoroti pandemi COVID-19, artikel tentang kesiapan Perguruan Tinggi di Sumatera Utara dalam menghadapi *New Normal*, menjadi artikel pembuka. Artikel berikutnya adalah tentang pemenuhan guru pada Sekolah Menengah Kejuruan pada era revolusi industri. Artikel tentang inovasi yang turut meramaikan edisi Mei 2021 yaitu, partisipasi masyarakat terhadap inovasi serta inovasi pada pelayanan publik.

Tulisan lain yang turut meramaikan INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan Edisi Mei 2021, yaitu: pengembangan ekosistem bisnis pariwisata; kinerja usaha perikanan tangkap jaring pukat cincin; komunikasi kebijakan publik dalam penanggulangan inses; strategi percepatan pengentasan backlog kepemilikan rumah; kebijakan pada perpustakaan dan kearsipan; serta, persepsi pengunjung pada kawasan Aek Nauli Elephant Conservation Camp (ANECC).

Semoga artikel yang kami suguhkan kali ini menjadi sumbangsih dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara guna mendukung SUMUT BERMARTABAT serta menjadi sumbangan keilmuan bagi masyarakat ilmiah.

Terima kasih dan selamat membaca.

-Dewan Redaksi-



# INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 18, Nomor 1

Mei 2021

e-ISSN 2614-8935

*Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/dicopy tanpa ijin dan biaya.*

DDC 300.6

Ismail Efendy, Arifa Devi Fitriani, Endang Maryanti, Rika Fitri Ilvira dan Azizul Kholis

Kesiapan Perguruan Tinggi di Sumatera Utara Menghadapi Era *New Normal Covid 19* Dalam Perspektif Manajemen Lingkungan Kampus

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2021, Vol 18, No. 1, halaman 1 - 8

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Utara dalam memasuki Kebiasaan baru (*New Normal*) dalam situasi penanganan Covid-19 dengan perspektif Manajemen Lingkungan Kampus/Perguruan Tinggi. Studi dilaksanakan sejak 1 Juni sampai dengan 30 Agustus 2020 pada PTN dan PTS yang ada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pertimbangan (*Judgment Sampling*). Penelitian ini menggunakan pendekatan stakeholder teori yang menguraikan seluruh pemangku kepentingan terhadap lingkungan kampus berdasarkan pendapat dan persepsi responden. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi berganda dengan menggunakan Aplikasi *Wrapp Partial Least Square (PLS)*. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antar variable independen dengan variable dependen yaitu faktor manajemen, Dosen, Mahasiswa dan Pegawai yang mempengaruhi kesiapan Perguruan Tinggi dalam menghadapi *New Normal*. Sementara itu tidak terdapat perbedaan kesiapan manajemen antara kampus PTN dibandingkan kampus PTS secara signifikan dalam hal kesiapan pengelolaan lingkungan untuk mendukung kondisi Kebiasaan baru (*new normal*). Variabel yang diuji secara regresi berganda menunjukkan kesiapan dalam pengelolaan lingkungan kampus yang meliputi Dukungan Pimpinan Universitas, Dukungan staf pengajar, dukungan peraturan kampus, sangat membantu untuk mendukung manajemen lingkungan pada PTN dan PTS. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam hal kebijakan manajemen lingkungan di kampus untuk jangka panjang.

Kata kunci: kampus, manajemen lingkungan, Covid-19

DDC 370.7

Jonni Sitorus, Muhammad Kaulan Karima, dan Beta Rapita Silalahi

Pemenuhan Guru Produktif SMK di Era Revolusi Industri 4.0

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2021, Vol 18, No. 1, halaman 9 - 19

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan kondisi eksisting guru SMK dan pemenuhan guru produktif SMK di era revolusi industri 4.0, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian merupakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian dilakukan di 4 (empat) kabupaten/kota, yaitu: Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Medan, dan Deli Serdang. Direkomendasikan untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur atau Surat Keputusan Bersama dalam rangka kerjasama dan fasilitasi guru magang di industri, guru berkolaborasi dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), pelatihan di DUDI, guru tamu, dan Prakerin Siswa SMK di DUDI, yang dalam regulasi tersebut melibatkan beberapa OPD teknis, misalnya: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, sesuai Tugas dan Fungsi masing-masing OPD.

Kata kunci: pemenuhan guru, Guru produktif, SMK, revolusi industri

DDC 352.14

Wisber Wiryanto

Pengembangan Tipologi Inovasi Pelayanan Publik: Studi Layanan Administrasi Kependudukan di Indonesia

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2021, Vol 18, No. 1, halaman 21 - 34

Tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan pengembangan tipologi inovasi pelayanan publik. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan melakukan telaahan terhadap beberapa referensi, dokumen, informasi dan data yang relevan. Sampel diambil dengan teknik *accidental sampling*, sebagai sumber data. Sampel yang diambil sebanyak 23 instansi yang telah melakukan inovasi pelayanan publik yaitu inovasi pelayanan *adminduk*. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi tipologi inovasi pelayanan *adminduk*. Penelitian dilakukan pada semester pertama tahun 2020. Hasil studi menunjukkan, tipologi inovasi pelayanan *adminduk*, terdiri dari 8 tipe inovasi, yaitu: inovasi input, inovasi proses, inovasi output, inovasi sistem, inovasi konsep, inovasi administrasi, inovasi teknologi, dan inovasi tatakelola. Instansi dinas kependudukan dan catatan sipil yang bersangkutan perlu mengidentifikasi baik tipologi maupun jenis inovasi pelayanan *adminduk* yang dibutuhkan daerah sehingga proses inisiasi inovasi ataupun replikasi model inovasi dari daerah lain dapat diterapkan secara efisien dan efektif.

Kata kunci: administrasi kependudukan, inovasi, pelayanan publik, tipologi

DDC 302.14

Irwan Moridu

Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi Daerah Kabupaten Banggai

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2021, Vol 18, No. 1, halaman 35 - 45

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi masyarakat serta strategi dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada berbagai program inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode analisis SWOT. Sampel yang dipergunakan berjumlah 100 orang yang tersebar di 5 Kecamatan terdekat dan paling terdampak pada Inovasi Daerah Kabupaten Banggai dimana masing-masing kecamatan diwakili oleh 20 Orang serta dari berbagai Inovasi Daerah yang ada penulis memilih 8 Sampel Inovasi Daerah yang paling banyak berhubungan langsung dengan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis SWOT Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai memiliki kekuatan yang dapat dipakai pada stretegi tertentu serta memanfaatkan peluang yang tepat dan secara bersamaan meminimalkan atau menghindari kelemahan dan ancaman yang ada.

Kata kunci: partisipasi, masyarakat, inovasi, SWOT

DDC 650.07

Edhie Baskoro Yudhoyono, Hermanto Siregar, Noer Azam Achsan dan Tony Irawan

Model Ekosistem Bisnis Pariwisata Terpadu Berbasis Strategi 5 Jalur

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2021, Vol 18, No. 1, halaman 47 - 61

Penulisan ini merupakan hasil pemikiran yang didasarkan pada studi literatur dari berbagai sumber, termasuk didalamnya hasil kajian empirik dari beberapa penelitian sebelumnya. Strategi 5 (lima) jalur merupakan pengembangan dari strategi 4 (empat) jalur yang terdiri dari pro growth, pro job, pro poor, dan pro-environment yang merupakan pemikiran dan kebijakan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam periode kepemimpinannya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat, maka strategi ini ditambahkan strategi jalur yang ke-5 yaitu pro technology. Strategi ini diterapkan dalam model ekosistem pariwisata terpadu agar meningkatkan permintaan barang dan jasa pada sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja serta mengurangi kemiskinan daerah lokasi pariwisata dengan pemanfaatan TIK dalam peningkatan kinerja pariwisata serta mendorong pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Ekosistem bisnis pariwisata harus dapat dipahami dengan baik agar dapat mengalokasikan sumber daya tepat sasaran dengan memilih prioritas yang dikembangkan terlebih dahulu didalam pariwisata. Pariwisata akan berkontribusi maksimal pada perekonomian negara, bila dikembangkan secara berencana dan terpadu, serta diperlukan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan. Pariwisata terpadu harus mengoptimalkan sumber daya lokal, kegiatan, produk, industri produksi dan jasa, dan masyarakat lokal yang partisipatif sebagai upaya untuk memadukan pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan fasilitas ekonomi lainnya di dalam satu kawasan sebagai sebuah destinasi pariwisata.

Kata kunci: ekosistem, bisnis, pariwisata, strategi 5 jalur

DDC 639.2

Herna Octavia Damayanti

Kinerja Usaha Dalam Perikanan Tangkap Jaring Pukat Cincin

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2021, Vol 18, No. 1, halaman 63 - 77

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis rasio R/C, faktor-faktor produksi yang berpengaruh, skala hasil (return to scale) dan tingkat efisiensi dari usaha perikanan tangkap jaring pukat

cincin. Metode pengambilan sampel yaitu simple random sampling dengan 56 sampel nelayan jaring pukat cincin. Analisis data dengan Revenue-Cost Ratio (rasio R/C) dan fungsi produksi Stochastic Frontier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio  $r/C > 1$  sehingga layak untuk dijalankan. Faktor produksi yang signifikan 99% yaitu GT kapal, solar, oli, konsumsi dan jumlah ABK. Faktor produksi yang signifikan 95% yaitu luas jaring dan jumlah lampu dengan skala hasil (Return to Scale) adalah 1,276 yang berarti skala hasil yang meningkat. Tingkat efisiensi menunjukkan belum efisien. Rekomendasi penelitian yaitu perlu dibuat peraturan (dapat berupa Perda) untuk mengendalikan dan membuat upaya penangkapan, dan perlu adanya pelatihan tentang manajemen usaha agar pelaku usaha perikanan khususnya jaring pukat cincin agar dapat menjalankan usahanya secara profesional dan efisien.

Kata kunci: efisiensi, pukat cincin, rasio R/C, skala hasil, *Stochastic Frontier Production*

DDC 302.2

Hasan Sazali

Komunikasi Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Inses di Kecamatan Tanjung Tiram

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2021, Vol 18, No. 1, halaman 79 - 87

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komunikasi kebijakan publik dalam penanggulangan inses. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu melalui observasi, wawancara dan fokus grup diskusi. Analisis data hasil penelitian dilakukan berdasarkan sumber informasi transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah, dan menyusun data yang ada, selanjutnya data disusun berdasarkan sumber informasi, dan membaca keseluruhan data. Kemudian, menganalisis lebih detail dengan mengkodekan-data, mempertimbangkan petunjuk-petunjuk secara detail yang dapat membantu proses coding sewaktu menganalisa dari data yang ada. Terakhir mendeskripsikan temuan-temuan data dalam bentuk naratif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa permasalahan terjadinya inses adalah kurangnya peran pemerintah dalam komunikasi kebijakan publik dan dalam memberikan perlindungan secara hukum. Selain itu, dalam komunikasi kebijakan publik untuk menanggulangi terjadinya inses diperlukan pertukaran informasi dan menjalin hubungan komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Dalam implementasi kebijakan publik yang dilakukan pemerintah belum dapat menyentuh korban-korban inses untuk melaporkan kejadian yang dialaminya karena ketakutan tidak adanya perlindungan bagi korban.

Kata kunci: komunikasi, kebijakan publik, inses

DDC 363.5

Dumora Jenny Margaretha Siagian, Porman Juanda Marpomari Mahulaa, dan Sahat Christian Simanjuntak

Strategi Percepatan Pengentasan Backlog Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Daerah Perkotaan di Sumatera Utara

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2021, Vol 18, No. 1, halaman 89 - 102

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai permasalahan dalam upaya pengentasan backlog perumahan, serta menyusun strategi untuk mengentaskan permasalahan backlog kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan utama adalah

pendekatan kualitatif, yang dilengkapi dan diperkuat pula dengan data yang bersifat kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (pengamatan), wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD) dan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pengentasan backlog kepemilikan rumah bagi MBR diantaranya adalah belum jadi prioritas pembangunan daerah, lembaga kemitraan pembangunan bidang perumahan di daerah belum berjalan secara efektif, keterbatasan lahan dan anggaran di daerah, tidak tersedianya basis data MBR, serta kesulitan yang dialami perbankan untuk menyalurkan dana KPR FLPP kepada masyarakat pekerja informal dan berpenghasilan tidak tetap. Berdasarkan hasil analisis dengan strategi matriks SWOT, disimpulkan bahwa isu backlog perumahan bagi MBR harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, sehingga perlu adanya optimalisasi program pengembangan perumahan oleh Pemerintah Daerah dan Pusat untuk menambah hunian baru bagi MBR, membentuk Lembaga kemitraan PKP daerah yang efektif dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan penyaluran pembiayaan perumahan bagi MBR, penambahan alokasi ruang kawasan pemukiman perkotaan dalam RTRW, serta peningkatan keberdayaan MBR perkotaan.

Kata kunci: backlog kepemilikan rumah, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), perkotaan

---

DDC 302.23

Rio Febriannur Rachman dan Kacung Marijan

Kebijakan Pemanfaatan Media Sosial Website, Facebook, dan Youtube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2021, Vol 18, No. 1, halaman 103 - 111

Studi ini membahas bagaimana kebijakan berbasis teknologi, khususnya di bidang pemanfaatan media sosial website, facebook, dan youtube, yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya, dibuat dan diimplementasikan untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Penelitian dalam studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap tiga orang informan, observasi pada media sosial, dan penelusuran melalui literatur maupun dokumen lainnya. Teknik analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan perumusan kesimpulan. Studi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial website, facebook, dan youtube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya telah berjalan secara baik dan memberi dampak positif. Implementasi kebijakan publik ini juga selaras dengan apa yang dirumuskan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang digariskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meski demikian, perlu ada pembenahan di sejumlah aspek, antara lain, penambahan frekuensi pembaruan konten di media sosial website, facebook, dan youtube. Penambahan konten bisa menjadi salah satu cara untuk membangun kedekatan antara instansi tersebut dengan masyarakat. Selain itu, penambahan jumlah mitra kolaborasi dalam program-program berbasis media sosial juga diperlukan demi mengoptimalkan pelayanan publik.

Kata kunci: determinasi teknologi, media sosial, kebijakan publik, tujuan pembangunan berkelanjutan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya

---

DDC 639.9

Freddy J. Hutapea, Johansen Silalahi, dan Wanda Kuswanda

Persepsi Pengunjung Terhadap Fasilitas, Kondisi Lingkungan dan Kesiapan Membayar Di Kawasan Aek Nauli Elephant Conservation Camp

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2021, Vol 18, No. 1, halaman 113 - 122

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pengunjung terhadap fasilitas, kualitas ekologi dan kesiapan membayar di ANECC (Aek Nauli Elephant Conservation Camp), Kawasan dengan Tujuan Khusus Aek Nauli. Penelitian dilaksanakan pada Bulan September sampai dengan Nopember 2018. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden yaitu pengunjung ANECC. Pemilihan responden dilakukan secara purposive random sampling dan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Persepsi pengunjung terhadap fasilitas di ANECC sudah tergolong baik meskipun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Alasan utama pengunjung mendatangi ANECC adalah untuk melihat gajah (72%), menikmati suasana alam (27%), dan menikmati pemandangan yang indah di KHDTK Aek Nauli (23%). 76% responden setuju jika manajemen ANECC mengenakan tiket masuk dan sekitar 43% bersedia membayar Rp.5.000,-. Namun demikian, manajemen ANECC perlu menetapkan harga tiket yang terjangkau bagi para pengunjung. Hampir semua pengunjung (92%) bersedia membayar untuk membantu konservasi gajah. Apabila terdapat atraksi menunggang gajah, mayoritas pengunjung bersedia mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp.30.000 - Rp. 39.000 selama 10-15 menit, diluar tiket masuk. Kesiapan membayar mayoritas pengunjung untuk melihat pertunjukan atraksi gajah berkisar antara Rp.10.000 - Rp.15.000,-, meskipun 33% responden bersedia membayar Rp.20.000 - Rp.25.000. Kondisi ini menunjukkan bahwa atraksi gajah memiliki daya tarik yang cukup tinggi bagi para pengunjung. Namun demikian, pengunjung mengharapkan juga manajemen ANECC untuk meningkatkan fasilitas, menjaga kualitas lingkungan untuk meningkatkan daya tarik pengunjung sehingga ANECC bisa menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kata kunci: persepsi, kesiapan membayar, gajah, ANECC, Aek Nauli

---





# INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 18, No. 1

May 2021

e-ISSN 2614-8935

*The discriptors given are keywords. The abstrack sheet may by reproduced/ copied without permission or charge*

DDC 300.6

Ismail Efendy, Arifa Devi Fitriani, Endang Maryanti, Rika Fitri Ilvira dan Azizul Kholis

*Readiness of Universities in North Sumatra Facing The Era of New Normal COVID 19: The Perspective of Campus Environmental Management*

*INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2021, Vol 18, No. 1, p. 1 - 8*

*This study aims to determine the readiness of universities in North Sumatra Province to enter a new habit (New Normal) in the Covid-19 handling situation with the perspective of Campus/College Environmental Management. The study was carried out from 1 June to 30 August 2020 at state universities and private universities in Medan City, North Sumatra Province. The sampling technique used in this study was judgment sampling. This technique was used due to the conditions of the Covid 19 pandemic. The samples of this study were public and private universities in the city of Medan. This study uses a stakeholder theory approach which describes all stakeholders in the campus environment based on the respondents' opinions and perceptions. The analysis technique used is multiple regression analysis using the Wrapp Partial Least Square (PLS) application. The results of the study prove that there is a significant influence between the independent variables and the dependent variable, namely management, lecturers, students and employees factors that affect the readiness of higher education in facing the New Normal. Meanwhile, there is no significant difference in management readiness between state universities and private universities in terms of environmental management readiness to support new habitual conditions (new normal).*

*Keywords: campus, environmental management, Covid-19*

DDC 370.7

Jonni Sitorus, Muhammad Kaulan Karima, dan Beta Rapita Silalahi

*Fulfilling The Productive Teacher of Vocational School in Industry Revolution 4.0 Era*

*INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2021, Vol 18, No. 1, p. 9 - 19*

*The research objective is to describe the existing conditions of SMK teachers and the fulfillment of productive vocational teachers in the era of the industrial revolution 4.0, both quantitatively and qualitatively. This is a qualitative research with a descriptive approach. It was conducted in 4 districts/cities, namely: Tebing Tinggi, Medan, Pematangsiantar, and Deli Serdang. It is recommended to issue a Governor Regulation or Joint Decree in the context of cooperation and facilitation for apprentice teachers in industry, teachers collaborating with Business/Industrial World (B/IW), training at (B/IW), guest teachers, and Vocational School Internship in*

*(B/IW), which in this regulation involve several technical Regional Apparatus Organization (RAO), for example: Industry and Trade Office, Cooperatives and Small and Medium Enterprises Office, Manpower Office, Education Office, in according to the Duties and Functions of each RAO.*

*Keywords: teacher's fulfillment, productive teacher, vocational school, industrial revolution*

DDC 352.14

Wisber Wiryanto

*The Development of A Typology of Public Service Innovation: A Study of Population Administrative Services in Indonesia*

*INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2021, Vol 18, No. 1, p. 21 - 34*

*The aim of this research, namely to description the development of public service innovation typology. The research method uses a library research by doing a review of some relevant references, documents, information and data. The sample was taken using accidental sampling technique, as the data source. The sample of this research in total 23 agencies that carry out public service innovation namely adminduk service innovation. A Qualitative descriptive data analysis was used to identify a typology of adminduk service innovation. The research was conducted in the first semester of the year 2020. The results of this study shown, a typology of adminduk public service innovation, consisting of 8 types of innovation, namely: innovation inputs, innovation process, innovation outputs, innovation system, innovation concepts, innovation administration, innovation technologies, as well as innovation governance. The relevant population and civil registration agency need to identify both typologies and variant of innovation as needed before the process of initiation or replication of innovation is carried out in order to reach efficient and effective results.*

*Keywords: innovation, population administration, public service, typology*

DDC 302.14

Irwan Moridu

*Strategy for Increasing Community Participation for Banggai Regional Innovation*

*INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2021, Vol 18, No. 1, p. 35 - 45*

*The main objective of this research is to identify the supporting and inhibiting factors in community participation as well as strategies in increasing community participation in various innovative programs of the Regional Government of Banggai Regency. The research method uses descriptive method with the SWOT analysis method. The sample used amounted to 100 people*

spread in the 5 closest districts and most affected in the Regional Innovation of Banggai Regency where each district was represented by 20 people and from various Regional Innovations there the authors chose 8 Regional Innovation Samples that most directly related to the community. Based on the results of the SWOT analysis the Regional Government of Banggai Regency has strengths that can be used in certain strategies and take advantage of the right opportunities while simultaneously minimizing or avoiding existing weaknesses and threats.

Keywords: participation, society, innovation, SWOT

---

DDC 650.07

Edhie Baskoro Yudhoyono, Hermanto Siregar, Noer Azam Achsan dan Tony Irawan

*Integrated Tourism Business Ecosystem Model Based on 5-Track Strategy*

*INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2021, Vol 18, No. 1, p. 47 - 61*

This writing is the result of thinking based on literature studies from various sources, including the results of empirical studies from several previous studies. The 5 (five) track strategy is the development of a 4 (four) track strategy consisting of pro growth, pro job, pro poor, and pro-environment which are the thoughts and policies of President Susilo Bambang Yudhoyono during his leadership period. Along with the rapid development of information technology, this strategy is added to the 5th track strategy, namely pro technology. This strategy is applied in the model of an integrated tourism ecosystem in order to increase demand for goods and services in the tourism sector and other sectors that have an impact on increasing economic growth, absorption of labor and reducing poverty in tourism locations by utilizing ICT in improving tourism performance and encouraging more development. environmentally friendly. The tourism business ecosystem must be well understood in order to allocate resources right on target by selecting priorities to be developed first in tourism. Tourism will contribute maximally to the country's economy, if it is developed in a planned and integrated manner, and collaboration between all stakeholders is required. Integrated tourism must optimize local resources, activities, products, production and service industries, and participatory local communities as an effort to integrate the development and management of tourist attractions, tourism facilities and other economic facilities in one area as a tourism destination.

Keywords: ecosystem, business, tourism, 5 track strategy

---

DDC 639.2

Herna Octavia Damayanti

*Business Performance in Capture Fisheries of Purse Seine Nets*

*INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2021, Vol 18, No. 1, p. 63 - 77*

The research objective was to analyze the R/C ratio, the influencing production factors return to scale and the efficiency level of capture fisheries business of Purse Seine nets. Sampling was simple random sampling with 56 Purse Seine fishermen samples. Data analysis with Revenue-Cost Ratio (R/C Ratio) and Stochastic Frontier Production Function. Research result showed that R/C ratio > 1, feasible to run. The 99% significant production factors, namely GT boats, diesel fuel, oil, consumption and the number of crew members. 95% significant production factors, namely large of the net and the number of lights with Return to Scale 1.276 means increasing return to scale. The level of efficiency shows inefficient. Research recommendations are regulations (in the form of local regulations) need to be made to control and limit fishing efforts and there is a need for training on business management so that fisheries businesses, especially

Purse Seine nets, can conduct their business professionally and efficiently.

Keywords: efficiency, Purse Seine, R/C ratio, return to scale, Stochastic Frontier Production

---

DDC 302.2

Hasan Sazali

*The effect of local financial performance on poverty: case studies of regencies and municipals in central Sulawesi province*

*INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2021, Vol 18, No. 1, p. 79 - 87*

The purpose of this study is to analyze public policy communication in dealing with incest. This type of research is qualitative research. The data collection technique was carried out in three stages, namely through observation, interviews, and focus group discussions. The data analysis of the research results was carried out based on the source of the interview transcription information, scanning the material, typing in the field data, or sorting and compiling the existing data, then the data was compiled based on the information source, second, reading the entire data. Then, analyze in more detail by coding-data, considering detailed instructions that can help the coding process when analyzing the existing data. Finally, describe the data findings in a narrative form. The results of this study found that the problem with incest was the lack of the government's role in public policy communication and in providing legal protection. In addition, in public policy communication to combat incest, it is necessary to exchange information and establish a two-way communication relationship between the public and the government. In the implementation of public policies carried out, the government has not been able to touch incest victims to report the events they experienced because of fear of the lack of protection for victims.

Keywords: communication, public policy, incest

---

DDC 363.5

Dumora Jenny Margaretha Siagian, Porman Juanda Marpomari Mahulala, dan Sahat Christian Simanjuntak

*Acceleration Strategy for The Alleviation of Home Ownership Backlog for Low-Income Communities of Urban Areas in North Sumatera*

*INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2021, Vol 18, No. 1, p. 89 - 102*

This study aims to understand the various problems in efforts to alleviate the housing backlog, as well as to present a strategy to alleviate the problem of housing backlog for low-income households in North Sumatra. This research uses descriptive method with the main approach is a qualitative approach, which is complemented and strengthened by quantitative data. The data collection techniques used were observation (observation), in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD) and literature study. The results showed that the problems with alleviation the home ownership backlog for MBR include not being a priority for regional development, institution of development partnerships in the housing sector in the regions have not been running effectively, limited land and budget in the regions, the unavailability of MBR databases, and difficulties experienced by banks to channeling FLPP KPR funds to informal workers and irregular income people. Based on the results of the analysis with the SWOT matrix strategy, it was concluded that the issue of housing backlog for low-income families should be one of the regional development priorities, so it is necessary to optimize housing development programs by the Regional and Central Governments to add new housing for low-income people, to form an effective regional PKP partnership institution in efforts to control the rate of population growth and distribution of housing

finance for low-income households, increase the allocation of space for urban residential areas in the RTRW, and increase the empowerment of urban MBR.

Keywords: perception, willingness to pay, elephant, ANECC, Aek Nauli

Keywords: home ownership backlog, low income community (MBR), urban

---

DDC 302.23

Rio Febriannur Rachman dan Kacung Marijan

*Utilization Policy of Social Media Website, Facebook, and Youtube of Surabaya's Library and Archives Agency*

*INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2021, Vol 18, No. 1, p. 103 - 111*

*This study aims to analyze socio-economic indicators consisting of poverty, unemployment, health, education, and income for HDI in North Sumatra Province. This study uses cross section data sourced from publications published by the Central Bureau of Statistics describing the conditions of urban districts in North Sumatra Province. This research is a method of multiple linear regression analysis. The achievement of increased human development as the implementation of sustainable development goals must be a priority scale in the formulation of policies and regional development planning for the Province of North Sumatra, especially in the aspects of health, education and community income. Improvements in the aspects of health, education and economic growth will encourage the achievement of quality human development in North Sumatra.*

Keywords: HDI, poverty, healthy, unemployment, education, income

---

DDC 639.9

Freddy J. Hutapea, Johansen Silalahi, dan Wanda Kuswanda

*Visitors's Perception Towards Infrastructure, Ecological Quality, and The Willingness to Pay in The Aek Nauli Elephant Conservation Camp*

*INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2021, Vol 18, No. 1, p. 113 - 122*

*The purpose of this study was to determine visitor perceptions toward facilities, ecological quality, and willingness to pay at ANECC (Aek Nauli Elephant Conservation Camp), Special Purpose Forest of Aek Nauli. The study was conducted from September to November 2018. This study applied a qualitative approach. The data were collected from primary data (interviews with ANECC visitors). Respondents selection was carried out by purposive random sampling, and the data were analyzed using qualitative descriptive techniques. Visitor's perceptions toward the facilities at ANECC are good, although there were several things needed to be improved. The main reasons for visitors came to ANECC are seeing the elephants (72%), enjoying the natural atmosphere (27%), and enjoying the beautiful scenery at the KHDTK of Aek Nauli (23%). 76% of respondents agreed that ANECC management needs to charge an entry ticket and around 43% were willing to pay 5,000 IDR. However, management of ANECC needs to set the price of the ticket that is affordable to all visitors. Almost all visitors (92%) were willing to spend extra money on elephant conservation. If elephant riding attractions are available, most visitors were willing to pay 30,000 IDR - 39,000 IDR, - for 10-15 minutes of riding, excluding the entry ticket. The willingness to pay for most visitors who want to see the elephant attraction was 10,000 IDR - 15,000 IDR, although 33% of respondents were willing to pay 20,000 IDR - 25,000 IDR. This information reveals that elephant attraction is quite attractive to the visitors. Nevertheless, visitors expected ANECC management to improve its facilities, and maintain the environmental quality so that ANECC can become a source of non-tax revenue.*





# INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 18, Nomor 1

MEI 2021

e-ISSN 2614-8935

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
✂ <b>Kesiapan Perguruan Tinggi di Sumatera Utara Menghadapi Era New Normal Covid 19 Dalam Perspektif Manajemen Lingkungan Kampus</b> <i>(Ismail Efendy, Arifa Devi Fitriani, Endang Maryanti, Rika Fitri Ilvira, dan Azizul Kholis)</i>	1 - 8
✂ <b>Pemenuhan Guru Produktif SMK di Era Revolusi Industri 4.0</b> <i>(Jonni Sitorus, Muhammad Kaulan Karima, dan Beta Rapita Silalahi)</i>	9 - 19
✂ <b>Pengembangan Tipologi Inovasi Pelayanan Publik: Studi Layanan Administrasi Kependudukan di Indonesia</b> <i>(Wisber Wiryanto)</i>	21 - 34
✂ <b>Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi Daerah Kabupaten Banggai</b> <i>(Irwan Moridu)</i>	35 - 45
✂ <b>Model Ekosistem Bisnis Pariwisata Terpadu Berbasis Strategi 5 Jalur</b> <i>(Edhie Baskoro Yudhoyono, Hermanto Siregar, Noer Azam Achsani dan Tony Irawan)</i>	47 - 61
✂ <b>Kinerja Usaha Dalam Perikanan Tangkap Jaring Pukat Cincin</b> <i>(Herna Octivia Damayanti)</i>	63 - 77
✂ <b>Komunikasi Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Inses di Kecamatan Tanjung Tiram</b> <i>(Hasan Sazali)</i>	79 - 87
✂ <b>Strategi Percepatan Pengentasan Backlog Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Daerah Perkotaan di Sumatera Utara</b> <i>(Dumora Jenny Margaretha Siagian, Porman Juanda Marpomari Mahulae, dan Sahat Christian Simanjuntak)</i>	89 - 102
✂ <b>Kebijakan Pemanfaatan Media Sosial Website, Facebook, dan Youtube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya</b> <i>(Rio Febriannur Rachman dan Kacung Marijan)</i>	103 - 111
✂ <b>Persepsi Pengunjung Terhadap Fasilitas, Kondisi Lingkungan dan Ketersediaan Membayar Di Kawasan Aek Nauli Elephant Conservation Camp</b> <i>(Freddy J. Hutapea, Johansen Silalahi, dan Wanda Kuswanda)</i>	113 - 122

## Hasil Penelitian

# KESIAPAN PERGURUAN TINGGI DI SUMATERA UTARA MENGHADAPI ERA *NEW NORMAL COVID 19* DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN LINGKUNGAN KAMPUS

## *(READINESS OF UNIVERSITIES IN NORTH SUMATRA FACING THE ERA OF NEW NORMAL COVID 19: THE PERSPECTIVE OF CAMPUS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT)*

*Ismail Efendy\**, *Arifa Devi Fitriani\**, *Endang Maryanti\**,  
*Rika Fitri Ilvira\*\**, *Azizul Kholis\*\*\**

\*Institut Kesehatan Helvetia Medan  
Jl. Sumarsono No. 107 Helvetia, Kabupaten Deli Serdang 20124  
Sumatera Utara - Indonesia  
Email: ismailefendy@helvetia.ac.id

\*\*Universitas Medan Area  
Jl. Setia Budi No. 79 B Tanjung Rejo, Kota Medan 20112  
Sumatera Utara - Indonesia

\*\*\*Universitas Negeri Medan  
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang 20371  
Sumatera Utara - Indonesia

*Diterima: 29 September 2020; Direvisi: 18 Januari 2021; Disetujui: 28 Januari 2021*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Utara dalam memasuki Kebiasaan baru (*New Normal*) dalam situasi penanganan Covid-19 dengan perspektif Manajemen Lingkungan Kampus/Perguruan Tinggi. Studi dilaksanakan sejak 1 Juni sampai dengan 30 Agustus 2020 pada PTN dan PTS yang ada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pertimbangan (*Judgment Sampling*). Teknik ini digunakan karena kondisi pandemi Covid 19. Sampel penelitian ini adalah perguruan tinggi Negeri dan Swasta yang ada di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan stakeholder teori yang menguraikan seluruh pemangku kepentingan terhadap lingkungan kampus berdasarkan pendapat dan persepsi responden. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi berganda dengan menggunakan Aplikasi *Wrapp Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antar variable independen dengan variable dependen yaitu faktor manajemen, Dosen, Mahasiswa dan Pegawai yang mempengaruhi kesiapan Perguruan Tinggi dalam menghadapi *New Normal*. Sementara itu tidak terdapat perbedaan kesiapan manajemen antara kampus PTN dibandingkan kampus PTS secara signifikan dalam hal kesiapan pengelolaan lingkungan untuk mendukung kondisi Kebiasaan baru (*new normal*). Variabel yang diuji secara regresi berganda menunjukkan kesiapan dalam pengelolaan lingkungan kampus yang meliputi Dukungan Pimpinan Universitas, Dukungan staf pengajar, dukungan peraturan kampus, sangat membantu untuk mendukung manajemen lingkungan pada PTN dan PTS. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam hal kebijakan manajemen lingkungan di kampus untuk jangka panjang. Keterbatasan Penelitian adalah pada sampel hanya 5 (lima) Perguruan tinggi Swasta dan 3 (tiga) perguruan Tinggi Negeri saja mengingat keterbatasan waktu penelitian dalam kondisi Covid 19. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah agar dapat menambah jumlah sampel pada tema penelitian yang sama dan memperluas cakupan penelitian agar memiliki daya generalisasi yang cukup luas.

**Kata kunci:** kampus, manajemen lingkungan, Covid-19

## ABSTRACT

*This study aims to determine the readiness of universities in North Sumatra Province to enter a new habit (New Normal) in the Covid-19 handling situation with the perspective of Campus/College Environmental Management. The study was carried out from 1 June to 30 August 2020 at state universities and private universities in Medan City, North Sumatra Province. The sampling technique used in this study was judgment sampling. This technique was used due to the conditions of the Covid 19 pandemic. The samples of this study were public and private universities in the city of Medan. This study uses a stakeholder theory approach which describes all stakeholders in the campus environment based on the respondents' opinions and perceptions. The analysis technique used is multiple regression analysis using the Wrapp Partial Least Square (PLS) application. The results of the study prove that there is a significant influence between the independent variables and the dependent variable, namely management, lecturers, students and employees factors that affect the readiness of higher education in facing the New Normal. Meanwhile, there is no significant difference in management readiness between state universities and private universities in terms of environmental management readiness to support new habitual conditions (new normal). The variables tested by multiple regression indicate readiness in the management of the campus environment which includes University Leadership Support, teaching staff support, campus regulatory support, which are very helpful for supporting environmental management in state universities and private universities. The results of this study are expected to become a reference in terms of environmental management policies on campus for the long term. The limitations of the research are that in the sample only 5 (five) private universities and 3 (three) state universities are given the limited time for research in the Covid 19 conditions, in order to have a fairly broad generalizability.*

**Keywords:** *campus, environmental management, Covid-19*

## PENDAHULUAN

Lingkungan kampus adalah titik pertemuan antara mahasiswa, dosen, pegawai, dan lainnya. Bagi mahasiswa, kampus adalah tempat utama untuk berkuliah. Meskipun kampus hanya menjadi tempat kuliah, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kecelakaan diantaranya dapat terjadi di laboratorium, ruang kelas, ruang pegawai, kantin, lapangan parkir kampus dan lainnya. Bencana alam tidak terkecuali bisa saja menimpa lingkungan kampus yang dapat menghambat aktivitas di lingkungan kampus. Pada saat ini dunia sedang dilanda musibah besar dengan munculnya corona virus disease 2019 (Covid-19) yang memberikan dampak besar bagi dunia, begitu juga perguruan tinggi yang turut terkena dampak pandemi covid -19 ini.

Munculnya bencana pandemi covid-19 mengharuskan aktivitas di perguruan tinggi ditutup sementara mahasiswa dihimbau untuk meninggalkan kampus sebagai bentuk penanganan pemutus mata rantai penyebaran covid-19. Pemerintah pusat memberlakukan adaptasi kebiasaan baru di tengah wabah pandemi covid-19 dengan sebutan New Normal. kondisi ini menuntut masyarakat untuk mampu beradaptasi dengan situasi dan lingkungan yang baru. Masyarakat harus mampu beradaptasi dalam aktifitas dengan mengurangi kontak fisik, menghindari kerumunan, bekerja dan bersekolah dari rumah saja. New normal menuntut adanya transformasi perilaku, budaya, dan nilai-nilai yang ikut tergerus dalam proses transformasi. Di sinilah peran pendidikan tinggi sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi

yang benar kepada masyarakat agar mereka mampu bertransformasi secara baik dalam menghadapi Covid-19.

Peran aktif dunia pendidikan tinggi (kampus) untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap tatanan kehidupan normal baru (new normal) terkait pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan. Sebab, perguruan tinggi memiliki banyak pemangku kepentingan, dimana mahasiswa sarjana dan pascasarjana belajar dan mengajar serta melakukan penelitian. Sehingga perguruan tinggi dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara menghadapi pandemi covid-19 ini. Menurut Rahman, Maipita dan Kholis (2020) tiga aspek penting yang berkenaan dengan covid adalah kesehatan, pendidikan, ekonomi sosial dan lingkungan harus diperhatikan oleh perguruan tinggi. Menurut Efendy dan Ilvira (2020) Perguruan tinggi harus memperhatikan, menjaga perguruan tinggi khususnya yang berkenaan dengan lingkungan kampus, agar diperoleh lingkungan yang terjaga dan lingkungan yang bermutu khususnya dalam situasi pandemi covid.

Dalam beberapa bulan terakhir selama Covid-19 terjadi, masyarakat sebenarnya sudah mengimplementasikan new normal tersebut sesuai dengan anjuran hidup sehat. Misalnya, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker saat di luar rumah, menjaga jarak sosial dan fisik, serta menghindari kerumunan massa. Sedangkan, di kalangan kampus, skenario new normal ini sudah mulai diimplementasikan dengan berbagai cara. Salah satu di antaranya adalah

proses belajar mengajar dengan sistem daring. Berdasarkan pengamatannya, transformasi tatanan kehidupan normal baru ini masih saja mendapat resistensi, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat umum. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan perubahan perilaku, kebiasaan, dan juga budaya. Tentu saja butuh waktu untuk mengadopsi tatanan kehidupan normal baru ini. Untuk itu, edukasi terus menerus sangat dibutuhkan. Di sinilah peran penting Perguruan Tinggi untuk ikut terlibat secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar mampu mengadopsi tatanan kehidupan normal baru secara baik

Cara mudah untuk memulai menentukan bahaya dapat dilakukan dengan membagi area lingkungan kampus berdasarkan aktivitas (praktikum, kuliah, kepegawaian), lokasi (kelas, laboratorium, perpustakaan, gudang, lapangan), infrastruktur material (peralatan kelas, barang elektronik), dan yang terakhir fungsi atau proses (administrasi, kearsipan, pelayanan kampus).

Lingkungan yang kondusif menurut Indonesia sehat 2010 adalah lingkungan yang bebas dari polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai. Pertama, sikap tidak nyaman ditunjukkan berkaitan dengan kondisi areal pintu gerbang kampus yang kurang tertib dan nyaman. Kedua, sikap senang yang ditunjukkan dosen adalah dengan adanya program penghijauan di kampus menambah suasana yang teduh dan asri.

Kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka secara langsung, dimana pendidik dan peserta didik hadir secara fisik di ruang-ruang kelas dan tempat-tempat belajar, kini digantikan dengan kegiatan pembelajaran melalui media elektronik (*e-learning*) baik secara sinkron ataupun secara nir-sinkron. *E-learning* nir-sinkron dapat dilakukan secara dalam jaringan (daring) maupun secara luar jaringan (luring).

Pada pembelajaran daring, pendidik dan peserta didik pada waktu yang sama berada dalam aplikasi atau platform internet yang sama dan dapat berinteraksi satu sama lain layaknya pembelajaran konvensional yang dilakukan selama ini. Sedangkan pada pembelajaran luring, pendidik melakukan pengunggahan materi melalui web, mengirim lewat surat elektronik (e-mail) ataupun mengunggahnya melalui media sosial untuk kemudian dapat diunduh oleh peserta didik.

Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 oleh Mendikbud dan diberlakukan beberapa hari kemudian, seluruh kegiatan belajar mengajar baik di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi dilaksanakan secara

daring sebagai upaya pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran pandemi Covid-19. Tidak ada yang bisa menjangka kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Namun demikian, pascapandemi Covid-19 nantinya, new normal pendidikan yang telah dimulai seharusnya diteruskan dan disempurnakan hingga memenuhi konsep *blended learning*, yakni sebuah konsep pendidikan yang mengkombinasikan metode kuliah tatap muka di ruang kelas dengan *e-learning*, dan pada gilirannya, dunia pendidikan akan benar-benar berada dalam era education 4.0. Terkait *e-learning* di perguruan tinggi, jika yang menjadi ukuran adalah "dapat dilakukan", maka tidak bisa dipungkiri bahwa semua kampus dapat melakukannya.

Konsep standar ISO 14001, mendefinisikan kinerja lingkungan sebagai hasil sistem manajemen lingkungan yang dapat diukur yang berkaitan dengan pengendalian dari organisasi terhadap aspek lingkungannya, didasarkan kepada kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran lingkungan yaitu hasil yang diperoleh dari kegiatan, produk dan jasa suatu institusi/perusahaan yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Penerapan SNI ISO 21001 dapat diintegrasikan dengan standar sistem manajemen lain, seperti SNI ISO 9001 (sistem manajemen mutu), SNI ISO 45001 (Sistem Manajemen K3) termasuk peraturan yang berlaku di sebuah negara, seperti 24 SN dikti (standar Nasional Pendidikan Tinggi) yang berlaku wajib di Indonesia. Struktur standar seperti ini disebut sebagai *High Level Structure* (HLS) atau struktur level tinggi.

Pandemi Covid-19, secara sosiologis, merupakan tantangan kemanusiaan sekaligus koreksi terhadap gagasan-gagasan besar sistem teknologi yang dicanangkan institusi pendidikan Perguruan Tinggi seperti misi *Cyber University* dan model pembelajaran daring dengan *distance learning*. Fakta menunjukkan bahwa sistem pembelajaran daring berbasis digital yang diandalkan memiliki kelemahan, yakni akses jaringan belum memadai, sehingga konsep besar *Cyber University* yang diharapkan menawarkan pembelajaran daring dengan sistem *distance learning* bagi mahasiswa di pelosok-pelosok masih jauh dari kenyataan.

Kelemahan lainnya datang dari segi budaya dosen maupun mahasiswa. Terlepas dari beberapa kelemahan tersebut, pendidikan tinggi di tengah pandemi menunjukkan beberapa dinamika positif seperti ruang akademik virtual bagi dosen dan mahasiswa beraktualisasi melalui webinar (seminar online) dan diskusi via instagram serta mobilitas peningkatan

literasi digital secara masif di tengah pandemik Covid-19.

Menurut penelitian Karim (2020) pendidikan Perguruan Tinggi era 4.0 dalam pandemi Covid-19 menunjukkan dinamika yang kompleks. Dalam konteks revolusi industri 4.0, pendidikan Perguruan Tinggi diharapkan menjadi instrumen utama pemajuan potensi bangsa berbasis digital yang mendorong sumber daya manusia Indonesia untuk memenuhi kualifikasi kompetensi teknologi di semua bidang akademik. Sejalan dengan itu, tantangan baru muncul di saat mewabahnya Covid-19 menjadi cobaan sekaligus instrumen ujicoba gagasan-gagasan besar sistem teknologi yang dicanangkan istitusi pendidikan Perguruan Tinggi seperti misi *Cyber University* dan model pembelajaran daring dengan *distance learning*.

Rabiah (2019) dalam Penelitian berjudul "Manajemen Pendidikan Tinggi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan" mengungkapkan bahwa Kinerja merupakan kegiatan yang telah dicapai seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Keberhasilan manajemen mutu dalam pendidikan tinggi dapat diukur melalui tingkat kepuasan pelanggan. Pendidikan tinggi dapat dikatakan berhasil jika mampu memberikan layanan sesuai harapan "pelanggan pendidikan" dan menghasilkan produk yang memuaskan, khususnya masyarakat pengguna jasa pendidikan.

Menurut Indrawati (2020) Tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi di masa pandemi covid-19, dihadapi dengan penerapan perkuliahan jarak jauh online, hal ini menunjukkan pemanfaatan teknologi yang semakin meningkat sekarang dan diharapkan lagi nanti di masa yang akan datang. Untuk itu peluang bagi pendidikan tinggi dalam masa dan pasca pandemi sebagai berikut: a) Peluang kampus sebagai perguruan tinggi berbasis IT yang lebih berkualitas; b) Peluang memungkinkan kampus naik peringkat, sebagai akibat dari data-data kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi yang tercatat lengkap; c) Peluang kampus untuk segera mengambil kebijakan yang lebih strategis, dalam menyesuaikan dengan kondisi riel pandemi covid-19; d) Peluang kampus untuk dapat menyelenggarakan perkuliahan jarak jauh; dan, e) Peluang kampus untuk meningkatkan penerimaan mahasiswa melalui perkuliahan kelas karyawan secara online.

Aulawi (2017) dalam penelitian berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Dipengaruhi Oleh Lingkungan Kampus mengatakan bahwa dalam menentukan motivasi belajar mahasiswa di kampus yang berkaitan dengan lingkungan

kampus adalah yang pertama hubungan antara mahasiswa dengan dosen, yang kedua fasilitas internet kampus, yang ketiga hubungan antar mahasiswa, yang keempat fasilitas perpustakaan, yang kelima suhu udara kelas, yang keenam kebersihan kampus, yang ketujuh tingkat kebisingan suara, yang kedelapan tata letak kelas, yang kesembilan ukuran kelas. Penting bagi pihak penyelenggara pendidikan untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut yang berdampak pada meningkatnya motivasi belajar mahasiswa dikampus.

Menurut Dwiyatmo (2007), lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Berlia (2011) menyatakan bahwa pendidikan lingkungan hidup harus dapat mendidik individu-individu yang responsif terhadap laju perkembangan teknologi, memahami masalah-masalah di biosfer dan berketerampilan siap guna yang produktif untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian alam.

Illanes, Dkk (2020) berpendapat bahwa salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi adalah dengan melakukan 4 tindakan "D", *discover* (temukan), *decide* (putuskan), *design* (rancang), dan *deliver* (berikan). *Pertama, Discover* (temukan). Membentuk pandangan yang akurat tentang situasi dan bagaimana hal itu berubah, sambil mengintegrasikan informasi epidemiologi, ekonomi, dan politik terkini. Minta masukan dari pimpinan senior, mahasiswa, dosen, staf, orang tua, alumni, dan pemangku kepentingan lainnya.

*Kedua, Decide*, Putuskan apa yang akan dilakukan, dengan cepat, sambil memastikan uji stres hipotesis yang memadai dan kepatuhan terhadap nilai-nilai universitas dan komunitas. Jangan menunggu sampai semua fakta masuk – mungkin tidak akan pernah – untuk bertindak. Dalam suatu krisis, kebaikan sekarang lebih baik daripada sempurna nanti. *Ketiga, Design*, rancang portofolio tindakan, langsung dan strategis, yang meminimalkan optimisme palsu, memaksimalkan kecepatan, dan memasang model operasi pragmatis. Bersiaplah untuk mengubah jadwal dan anggaran saat keadaan berubah. *Keempat, Deliver*, berikan solusi dengan cara yang disiplin dan efisien. Ingatlah bahwa kegagalan kecil dapat menyebabkan kegagalan yang lebih besar, jadi tetaplah fleksibel.

**COVID-19 nerve-center actions**



**Gambar 1.** Kerangka Konsep strategi terpusat pengendalian Covid-19

Melakukan evaluasi secara teratur tindakan yang sedang berlangsung dan tindakan potensial berdasarkan informasi baru dan putuskan apakah rencana perlu dimodifikasi, diadopsi, atau dibatalkan. Belajar dari masa lalu itu penting seperti yang pasti diketahui oleh universitas. Namun, sama pentingnya untuk bersedia menerima wawasan baru, meski bertentangan dengan yang sebelumnya. Mendorong sedikit keraguan yang sehat menjadikan kebiasaan pikiran ini sebagai bagian rutin dari proses pengambilan keputusan. Syaiful Bahri (2013) menyatakan bahwa ketidakseimbangan ekosistem kampus dikarenakan rendahnya perilaku arif di kalangan mahasiswa. Pengembangan model pelatihan PLH berbasis Eco Campus dapat meningkatkan perilaku arif mahasiswa yang memberikan nilai positif terhadap perguruan tinggi.

Karena semakin banyak perguruan tinggi dan universitas yang terus terpengaruh oleh pandemi global virus corona (COVID-19), penyedia solusi pendidikan tinggi telah melangkah dengan meluncurkan perangkat lunak manajemen perguruan tinggi gratis dan sumber daya lain untuk administrator bersama

dengan berbagai sumber daya fakultas , seperti perkuliahan secara daring (online).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian Karim (2020), Indrawati (2020), mengungkapkan bahwa pandemi covid-19 mendorong perguruan tinggi menerapkan revolusi industri 4.0 dimana proses pendidikan dilaksanakan berbasis digital. Penelitian Rabiah (2019) dan Aulawi (2017) meneliti bahwa pelayanan lingkungan kampus yang baik akan meningkatkan mutu pendidikan.

Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana peran dan kesiapan perguruan tinggi dalam menghadapi new normal di tengah pandemi covid-19 dalam menerapkan pendidikan yang berbasis digital dengan memperhatikan manajemen lingkungan kampus tersebut. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kesiapan perguruan tinggi yang didasari dengan manajemen lingkungan kampus.

Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah terdapat pengaruh Manajemen, Dosen, Mahasiswa dan Pegawai terhadap kesiapan Perguruan tinggi dalam memasuki new normal?, serta 2) Apakah terdapat perbedaan manajemen

antara perguruan tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta dalam menghadapi new normal? Penelitian ini diharapkan dapat membantu perguruan tinggi membuat keputusan dalam merumuskan strategi yang sesuai dengan tujuan dan prioritas perguruan tinggi agar bisa kembali beraktivitas ke kampus setelah pandemi COVID-19.

**METODE**

Penelitian ini dilakukan pada perguruan tinggi negeri maupun swasta di Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan studi dilaksanakan sejak 1 Juni sd 30 Agustus 2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pertimbangan (*Judgment Sampling*). Teknik ini digunakan karena kondisi protokol Covid 19. Sampel penelitian ini adalah perguruan tinggi Negeri dan Swasta yang ada di Kota Medan yang terdiri dari 3 (tiga) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 2 (dua) Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian deskriptif yang berdasarkan tujuan, yaitu bertujuan untuk memberikan deskriptif, gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena, atau untuk menentukan frekuensi distribusi suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain (Silaen, 2013).

Analisis data untuk pengujian hipotesis menggunakan pengujian analisis regresi yang diuji dengan 3 (tiga) model persamaan. Persoalan distribusi normalitas data dan asumsi klasik model dengan kombinasi pengujian bestfit model juga dilakukan untuk memastikan persamaan regresi yang diuji memenuhi ketentuan dan syarat pengujian statistik. Aplikasi dalam analisis data yang digunakan adalah aplikasi *Wrapp Partial Least Square* (PLS). Alasan penggunaan aplikasi ini karena hubungan antar variabel yang saling terkait

dapat dilakukan pengujian sekaligus untuk mendapatkan hubungan partial dan simultan keseluruhan variabel dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Persamaan regresi seperti pada persamaan (1). Sedangkan untuk membandingkan kesiapan antara manajemen kampus PTN dibandingkan kampus PTS menggunakan *analisis of variance* dengan teknik *two independent sample test*.

Model:

$$KPT = \alpha + \beta MAN + \beta DOS + \beta MAH + \beta PEG + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- $\alpha$  : konstanta
- $\beta$  : koefisien Regresi
- KPT : Kesiapan Perguruan Tinggi
- MAN: Manajemen
- DOS : Dosen
- MAH: Mahasiswa
- PEG : Pegawai

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel independen dengan variabel dependen yaitu faktor manajemen, Dosen, Mahasiswa dan Pegawai mempengaruhi kesiapan Perguruan Tinggi dalam menghadapi New Normal dengan nilai estimasi persamaan regresi. Berdasarkan tabulasi hasil pengujian hipotesis sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa dari sebanyak 4 (empat) hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, Semuanya dapat diterima dan berpengaruh secara signifikan.

Hasil penelitian uji beda berdasarkan nilai signifikansi  $T_{hitung}$  2 sample membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan kesiapan manajemen antara kampus PTN dibandingkan kampus PTS secara signifikan dalam hal kesiapan pengelolaan lingkungan untuk mendukung kondisi new normal. Variabel yang diuji secara regresi berganda menunjukkan kesiapan dalam pengelolaan lingkungan kampus yang meliputi dukungan Pimpinan Universitas, dukungan staf pengajar, dukungan peraturan kampus, sangat membantu untuk mendukung manajemen lingkungan pada PTN dan PTS yang ada.

**Tabel 1.** Hasil Persamaan Regresi

Hipotesis	Hubungan antar variabel		Coefficients	T Statistics	P Values	Hasil Penelitian
	Dari	Ke				
H1	Manajemen	Kesiapan Perguruan Tinggi	0,187	1,738	0,004	Hipotesis Diterima
H2	Dosen	Kesiapan Perguruan Tinggi	0,193	1,101	0,000	Hipotesis Diterima
H3	Mahasiswa	Kesiapan Perguruan Tinggi	0,115	1,750	0,000	Hipotesis Diterima
H4	Pegawai	Kesiapan Perguruan Tinggi	0,167	1,780	0,000	Hipotesis Diterima

Sistem Manajemen Lingkungan atau Environment Management System (EMS) merupakan bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, rencana kegiatan, tanggung jawab, latihan atau praktek, prosedur, proses dan sumber daya untuk pengembangan, penerapan, evaluasi dan pemeliharaan kebijakan lingkungan (ISO 14001, 1996). Pada prinsipnya, ISO 14001 berisi syarat atau aturan komprehensif bagi suatu organisasi dalam mengembangkan sistem pengelolaan dampak lingkungan yang baik dan menyeimbangkan dengan kepentingan bisnis, sehingga upaya perbaikan kinerja yang dilakukan akan disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dalam penerapannya ISO 14001 bersifat sukarela (voluntary), tidak ada hukum yang mengikat yang mengharuskan dalam penerapannya (ISO 14001, 2004).

Perlu kita perhatikan, tidak ada perguruan tinggi yang sendirian dalam mengatasi COVID-19. Lembaga sejawat bergulat dengan masalah yang sama pada saat yang sama. Ini merupakan kesempatan unik untuk belajar dari satu sama lain dalam waktu nyata, dan untuk berkolaborasi. Salah satu contohnya mungkin membuat kemitraan pendidikan, seperti perguruan tinggi kecil yang bersatu untuk memberikan pembelajaran online, atau mendukung kemampuan lembaga yang lebih besar.

Mungkin juga ada cara untuk menciptakan kemitraan strategis — bergabung bersama untuk mendukung kebijakan tertentu atau untuk mengkoordinasikan komunikasi atau inisiatif tenaga kerja. Ini adalah waktu bagi universitas untuk menerima gagasan menjadi rekan dalam misi pendidikan yang sama — tidak hanya sebagai pesaing bagi siswa dan staf. Terakhir, penting untuk mengingat peran universitas dalam komunitas yang lebih luas. Saat kampus menjadi sepi, universitas mengandalkan aset fisik yang terbukti sangat penting dalam membantu pemerintah daerah dan petugas layanan kesehatan merespons.

Ada dua cara yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Pertama, melakukan perencanaan secara mendalam tentang bagaimana pelaksanaan sistem pembelajaran secara tatap muka dan sistem administrasi perguruan tinggi yang sesuai dengan kondisi pandemi covid-19 dengan mempertimbangkan manajemen kampus yang baik. Kedua, perlu ada cara untuk merefleksikan bagaimana krisis COVID-19 dapat dan harus mengubah cara universitas beroperasi di masa depan. Krisis dapat memberikan kesempatan

untuk berpikir baru — mungkin untuk menilai kembali elemen pengalaman siswa, penerimaan, persyaratan kelulusan, ujian, dan banyak lagi.

Neliwati (2018) menyatakan sikap dosen dan mahasiswa tentang kebersihan trotoar jalan dan halaman sekitar kampus UIN SU, pertama, sikap tidak nyaman ditunjukkan berkaitan dengan kondisi areal pintu gerbang kampus yang kurang tertib dan nyaman. Kedua, sikap senang yang ditunjukkan dosen adalah dengan adanya program penghijauan di kampus menambah suasana yang teduh dan asri.

Pasca pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia yang kemudian pertengahan Maret 2020 untuk menekan angka penderita Covid 19, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menghasilkan kebijakan dalam dunia pendidikan yaitu meniadakan sementara pembelajaran tatap muka diganti dengan pembelajaran online baik tingkat sekolah maupun tingkat perguruan tinggi, diwujudkan dalam suatu sistem yang disebut *electronic university* (e-University). Pengembangan e-University bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, sehingga perguruan tinggi dapat menyediakan layanan informasi yang lebih baik kepada komunitasnya, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi tersebut melalui internet. Layanan pendidikan lain yang bisa dilaksanakan melalui sarana internet yaitu dengan menyediakan materi kuliah secara online dan materi kuliah tersebut dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan.

Perguruan tinggi baik negeri maupun swasta secara terus menerus melakukan mobilisasi terhadap pendidikan khususnya dimasa pandemi covid-19 ini. Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) merupakan solusi pembelajaran untuk sekarang ini. Keadaan ini menuntut kepada semua mahasiswa dan dosen untuk mampu menggunakan IT sesuai dengan perkembangan zaman yang telah memasuki revolusi industri 4.0.

Secara keseluruhan kampus PTN dan PTS masing-masing telah melakukan persiapan pembelajaran yang dilaksanakan secara online, seminar dan konferensi dilaksanakan secara online, pengurusan dokumen dan kelengkapan prasyarat perkuliahan berbasis online serta kegiatan penunjang lainnya dilaksanakan secara online. Hal ini merupakan salah satu bentuk kesiapan perguruan tinggi dalam menghadapi pandemi covid-19 ini, dimana semua kegiatan dilaksanakan berbasis online dengan memperhatikan peraturan kampus masing-masing.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dia tas maka dapat disimpulkan ada 4 (empat) faktor penentu kesiapan perguruan tinggi dalam menghadapi new normal yaitu: Manajemen, Dosen, Mahasiswa dan Pegawai yang berpengaruh secara signifikan terhadap kesiapan perguruan tinggi. Pada pengujian lainnya ditemukan bahwa terkait Manajemen perguruan tinggi dalam menghadapi new normal tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara PTN dan PTS. Artinya secara kelembagaan intitusi perguruan tinggi yang ada di Provinsi Sumatera Utara sudah siap memasuki era new normal dengan menerapkan protokol kesehatan di kampus masing-masing. Perguruan tinggi memiliki peran aktif dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dimasa pandemi covid-19 mengharuskan setiap elemen untuk melakukan suatu kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, yang kemudian disebut sebagai *new normal*. Setiap perguruan tinggi harus memiliki cara berpikir yang baru agar tetap beroperasi, dan perguruan tinggi diharapkan terus beroperasi sesuai dengan ketentuan tatanan kehidupan *new normal*. Perguruan tinggi diharapkan melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut terkait solusi menghadapi covid-19.

## REKOMENDASI

1. Perguruan Tinggi harus terus mengikuti perkembangan persoalan Covid 19 baik tingkat Internasional, nasional maupun Lokal;
2. Perguruan Tinggi harus mencermati dinamika persoalan Covid dan masalah-masalah aktual yang muncul di masyarakat terkait penanganan Covid 19;
3. Perguruan Tinggi harus mendukung penerapan New Normal dengan mengedepankan Protokol Kesehatan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pimpinan-pimpinan perguruan tinggi atas kerjasama yang baik dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulawi, Hanif. 2017. Peningkatan Motivasi Belajar Dipengaruhi Oleh Lingkungan Kampus. *Jurnal Administrasi Kantor*. 5 (1).
- Bahri, Syaiful. 2013. Model Pelatihan Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Eco Campus Untuk Meningkatkan Perilaku Arif Lingkungan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Dwiyatmo, Kus. 2007. Pencemaran Lingkungan dan Penanganannya. Yogyakarta: PT. Citra Aji Parama.

Efendy, Ismail. Ilvira, Rika Fitri. 2020. Implementasi Kesehatan Lingkungan Kampus Dalam Pandemi Covid-19 Untuk Mendukung SDM Unggul, Indonesia Maju. *Prosiding Webinar Nasional*.

Illanes Pablo, Jonathan Law, Ana Mendy, Saurabh Sanghvi, dan Jimmy Sarakatsannis. 2020. Coronavirus And The Campus: How Can US Higher Education Organize To Respond? Public And Social Sector. McKinsey & Company.

Indrawati, Budi. 2020. Tantangan Dan Peluang Pendidikan Tinggi Dalam Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI)*.

Jerichomanuel. 2019. Penerapan proses manajemen K3 di Lingkungan Kampus. [Online] Dari: <https://www.kompasiana.com/jerichomanuel/5dcbf570d541df7d636f2a13/penerapan-proses-manajemen-k3-di-lingkungan-kampus> [Diakses: 5 Juni 2020]

Karim, Bisyri Abdul. 2020. Pendidikan Perguruan Tinggi Era 4.0 Dalam Pandemi Covid-19 (Refleksi Sosiologis). *Education and Learning Journal*. 1(2).

L. Barlia. 2011. Konstruktivisme dalam pembelajaran sains di SD: Tinjauan Epistemologi, ontologi dan keraguan dalam praksisnya. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Neliwati. 2018. Sikap Masyarakat Kampus (Mahasiswa dan Dosen) Tentang Kebersihan Lingkungan Kampus UIN Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Medan Agama*. 9(2).

Rabiah, Siti. 2019. Manajemen Pendidikan Tinggi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Sinar Manajemen*. 6(1).

Rahman, Haikal. Maipita, Indra. Kholis, Azizul. 2020. Dukungan Dunia Usaha Terhadap Sustainability Evelopment Dan Corporate Social Responsibility Dalam Masa Pandemi Covid 19 Di Sumatera Utara. *Prosiding Webinar Nasional*

Silaen, S. dan W. 2013. Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta: In Media.

UIN Raden Intan Lampung. 2020. UIN akan terapkan ISO 14001:2015 tentang sistem manajemen lingkungan. [Online] Dari: <https://www.radenintan.ac.id/uin-akan-terapkan-iso-140012015-tentang-sistem-manajemen-lingkungan/> [Diakses: 8 Juni 2020]

## Hasil Penelitian

### PEMENUHAN GURU PRODUKTIF SMK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

#### *(FULFILLING THE PRODUCTIVE TEACHER OF VOCATIONAL SCHOOL IN INDUSTRY REVOLUTION 4.0 ERA)*

*Jonni Sitorus\**, *Muhammad Kaulan Karima\*\**, *Beta Rapita Silalahi\*\*\**

\*Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara  
Jl. Sisingamangaraja No. 198 Medan 20126  
Sumatera Utara - Indonesia  
Email: sitorus\_jonni@yahoo.co.id

\*\*Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Ittihadiyah  
Jl. Madrasah Islamiyah, Lintas Sumatera No. 210 Guntung Saga, Kabupaten Labuhanbatu Utara  
Sumatera Utara – Indonesia

\*\*\*Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan  
Jalan Garu II A, Harjosari I Medan Amplas, Kota Medan 20147  
Sumatera Utara - Indonesia

*Diterima: 10 Desember 2020; Direvisi: 18 Januari 2021; Disetujui: 09 Maret 2021*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan kondisi eksisting guru SMK dan pemenuhan guru produktif SMK di era revolusi industri 4.0, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian merupakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan di 4 (empat) kabupaten/kota, yaitu: Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Medan, dan Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa % jumlah guru produktif SMK dari jumlah seluruh guru di masing-masing SMKN/S tidak merata, yaitu antara 35% - lebih 50an%. Hampir semua SMK mengalami kekurangan guru produktif, kecuali: SMKN 1 Pematangsiantar; SMKS Ar-Rahman Medan; dan, SMKN 3 Tebing Tinggi. Jumlah kekurangan guru produktif SMK tidak merata, yaitu antara 2 sampai 26 orang. Pemenuhan kuantitas guru produktif SMK di Sumatera Utara memiliki 10 pola, yaitu: Pengangkatan guru dari Program CPNS; Pengangkatan guru melalui Ikatan Dinas D3 Jakarta; Guru yang pernah mengikuti Program Keahlian Ganda; Pengangkatan guru melalui Program Alih Fungsi pegawai; Pengangkatan guru melalui Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi; Pengangkatan guru melalui GTT yang dibiayai SPP; Pengangkatan guru melalui GTT yang dibiayai Dana BOS; Pengangkatan guru sebagai Guru Tetap Yayasan; Pengangkatan guru melalui Program magang mahasiswa PPG; dan Program Guru Tamu. Program Magang Mahasiswa PPG; Program Penyetaraan Guru; Program Keahlian Ganda; dan Program Guru Tamu, telah bertransformasi sebagai tuntutan revolusi industri 4.0. Pemenuhan kualitas guru produktif SMK di Sumatera Utara memiliki 5 pola, yaitu peningkatan kompetensi guru melalui: pemanfaatan SIM GPO/PKB; aktif di Forum MGMP/KKG; pelatihan; magang di industri; dan kolaborasi dengan Industri, Kelima pola tersebut telah bertransformasi sesuai tuntutan revolusi industri 4.0. Direkomendasikan untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur atau Surat Keputusan Bersama dalam rangka kerjasama dan fasilitasi guru magang di industri, guru berkolaborasi dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), pelatihan di DUDI, guru tamu, dan Prakerin Siswa SMK di DUDI, yang dalam regulasi tersebut melibatkan beberapa OPD teknis, misalnya: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, sesuai Tugas dan Fungsi masing-masing OPD.

**Kata kunci:** pemenuhan guru, Guru produktif, SMK, revolusi industri

### ABSTRACT

*The research objective is to describe the existing conditions of SMK teachers and the fulfillment of productive vocational teachers in the era of the industrial revolution 4.0, both quantitatively*

and qualitatively. This is a qualitative research with a descriptive approach. It was conducted in 4 districts/cities, namely: Tebing Tinggi, Medan, Pematangsiantar, and Deli Serdang. The results showed that the % number of productive vocational teachers from the total number of teachers in each SMKN / S is not evenly distributed, namely the range between 35% - more than 50%. Almost all SMK schools experience a shortage of productive teacher, exception of SMKN 1 Pematangsiantar, SMKS Ar Rahman Medan, dan SMKN 3 Tebing Tinggi. The fulfillment of the Productive Teachers quantity at vocational school in North Sumatra has 11 patterns, namely: Teacher Recruitment Program from CPNS Program; D3 Jakarta Program; Dual/Transfer Skill Program; Function Transfer Program; Provincial Honorarium Teacher; Teacher honored from tuition; Teacher honored from school operational costs; Foundation Teacher; Student Apprenticeship Program; and Visiting Teacher Program. Teacher Apprenticeship Program, Teacher Equalization Program; Dual/Transfer Skill Program; and Visiting Teacher Program have been transformed as the demands of the 4.0 industrial revolution. There are 5 patterns of fulfilling the quality of Productive Teachers for vocational school, namely: the use of SIM GPO/PKB; active in MGMP/KKG Forum; training; an internship in industry; and collaboration with Industry. The five patterns have been transformed according to the demands of the 4.0 industrial revolution. It is recommended to issue a Governor Regulation or Joint Decree in the context of cooperation and facilitation for apprentice teachers in industry, teachers collaborating with Business/Industrial World (B/IW), training at (B/IW), guest teachers, and Vocational School Internship in (B/IW), which in this regulation involve several technical Regional Apparatus Organization (RAO), for example: Industry and Trade Office, Cooperatives and Small and Medium Enterprises Office, Manpower Office, Education Office, in according to the Duties and Functions of each RAO.

**Keywords:** teacher's fulfillment, productive teacher, vocational school, industrial revolution

## PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0 merupakan sistem yang mengintegrasikan dunia *online* dengan produksi industri dengan penggunaan teknologi digital dan otomatisasi (Prasetyo & Sutopo, 2018; Merkel, 2017; Schlechtendahl, dkk, 2015; Wuriyanto, 2018; Hermann, dkk, 2016; Lifter & Tschieer, 2013). Dunia industri mulai menyentuh dunia virtual artinya dunia tidak nyata, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data. Era revolusi industri 4.0 mengubah konsep dan struktur pekerjaan, serta kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Era revolusi industri 4.0 juga mengubah cara pandang terhadap konsep pendidikan itu sendiri, salah satunya pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Bukit (2014) menjelaskan bahwa SMK merupakan pendidikan menengah yang berorientasi pada kinerja individu dalam dunia kerja serta pada kebutuhan nyata di lapangan. Tolak ukur keberhasilan SMK tidak hanya terbatas di sekolah, akan tetapi juga pada kepekaan terhadap perkembangan dunia kerja. Kedudukan SMK diperkuat dengan adanya Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia dalam hal peningkatan jumlah dan kompetensi pendidik serta kerjasama dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).

Menurut Waidl (2018), salah satu permasalahan pada pendidikan SMK adalah pemenuhan guru produktif yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah guru normatif dan adaptif, yaitu 78% guru SMK merupakan guru normatif-adaptif dan hanya 22% guru produktif yang mengajar mata pelajaran

kejuruan/keteknikan (guru normatif: guru PKN, guru agama, guru Bahasa Indonesia, dan lain-lain yang sejenis; guru adaptif: guru fisika, guru MM, guru biologi, guru kimia, dll yang sejenis (Zamtinah, dkk, 2011). Hal ini tentunya tidak sebanding dengan struktur kurikulum SMK, dimana jumlah mata pelajaran keteknikan/kejuruan sebesar 60% lebih dari jumlah seluruh mata pelajaran yang ada. Artinya bahwa jumlah guru produktif harusnya lebih banyak dari jumlah guru normatif dan adaptif.

Selain kuantitas guru produktif SMK kurang, kualitasnya pun juga minim. Menurut Firdausi & Barnawi (2012), keterampilan guru untuk mengajar mata pelajaran produktif kurang; beberapa guru SMK belum tahu perkembangan teknologi; kinerja guru kurang maksimal di bidang kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional; serta tidak banyak guru bersertifikat pendidik yang menguasai mesin/peralatan berbasis teknologi canggih.

Dalam *Roadmap* Kebijakan Pengembangan Vokasi Indonesia tahun 2017 sampai 2025, pemerintah mencermati beberapa hal: minimnya ketersediaan alat dan guru kejuruan; peran guru dan standardisasi konten pendidikan; tersedianya konten media pendidikan di internet; pengajaran tentang kewirausahaan, inkubasi, dan *teaching factory*; dan program pemagangan siswa (Afrina, dkk, 2018). Menurut Afriani, beberapa kebijakan mendasar yang harus dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait dalam rangka pengembangan vokasi adalah pemenuhan guru produktif dengan cara membuat aturan agar tenaga pengajar terampil dalam mengajar; peningkatan mutu sarana dan prasarana peralatan praktik yang sesuai dengan kebutuhan

DUDI; kolaborasi antara lembaga pendidikan vokasi dan DUDI melalui pemagangan; dan memperkuat keterlibatan asosiasi, industri, dan masyarakat dalam pengembangan vokasi.

Menurut Mulyadi (2010), pemenuhan guru produktif SMKN dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan melakukan redistribusi guru kejuruan dari kota besar ke daerah, melakukan alih kompetensi mengajar guru adaptif/normatif menjadi guru produktif atau melakukan rekrutmen guru produktif baru, dan melakukan KKN tematik bagi mahasiswa pada program keahlian yang relevan dengan SMK.

Menurut Ismara, dkk, (2018), setidaknya ada 3 elemen penting yang harus ditransformasi dalam menjalankan pendidikan SMK di era revolusi industri 4.0, yaitu: sistem pembelajaran yang lebih inovatif seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran; rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan vokasi yang adaptif dan responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan transdisiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan; dan persiapan sumber daya manusia yang responsif, adaptif dan handal untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Selain itu, peremajaan sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur pendidikan juga perlu dilakukan untuk menopang kualitas pendidikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi eksisting guru SMK dan pemenuhan guru produktif SMK di era revolusi industri 4.0, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

## METODE

Provinsi Sumatera Utara memiliki 1.000 SMK, yaitu 268 SMK negeri dan 732 SMK swasta. Penelitian dilakukan di 4 kabupaten/kota, yaitu: Kota Tebing Tinggi, Kota Pematangsiantar, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang, dengan nama-nama SMK di masing-masing daerah disajikan pada Tabel 1.

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskripsi, yaitu serangkaian peristiwa terkait pemenuhan guru produktif SMK di era revolusi industri 4.0 di Sumatera Utara. Penelitian tidak semata-mata hanya mementingkan hasil saja, melainkan aspek proses adalah sesuatu yang lebih utama (Bogdan & Tylor, 1993). Subjek penelitian adalah Kadis, KaCabdis, Kabid, Kasi, kepala sekolah SMK, dan guru SMK. Guru SMK yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah guru produktif SMK, yaitu guru yang mengajar mata pelajaran kejuruan/keteknikan.

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan: 1) observasi, yaitu tim peneliti melakukan pengamatan langsung ke SMK lokasi

penelitian. Hal yang diobservasi adalah kondisi fasilitas sekolah, misalnya: laptop, komputer, laboratorium, bengkel, layanan internet, dan lain sebagainya; 2) studi dokumen sekolah berupa: daftar Bidang/Program/Kompetensi keahlian, daftar sarana prasarana sekolah, daftar guru, profil sekolah/Dinas Pendidikan, program dan kegiatan, dokumen kolaborasi SMK dengan DUDI; 3) pengisian kuesioner, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan guru/kepala sekolah di era revolusi industri 4.0; dan 4) interview personal, yaitu dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur. Hal-hal yang ditanyakan adalah: kebijakan Pemda/sekolah dalam pemenuhan guru produktif SMK di era revolusi industri 4.0. Data yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dokumen dan kuesioner dianalisis secara kualitatif.

**Tabel 1.** SMK Negeri dan Swasta sebagai Lokasi Penelitian

No.	Kabupaten/Kota	Nama SMK Lokasi Penelitian
1.	Tebing Tinggi	SMKN 2; SMKN 3; SMKN 4; SMKS Taman Siswa
2.	Pematangsiantar	SMKN 1; SMKN 2; SMKN 3; SMKS Persiapan
3.	Medan	SMKN 8; SMKN 9; SMKN 13; SMKS Ar Rahman
4.	Deli Serdang	SMKN 1 Kutalimbaru; SMKN 1 Pancurbatu; SMKN 1 Patumbak; SMKS Istiqlal Deli Tua

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Kondisi Eksisting Jumlah Guru Produktif SMK.** Berdasarkan hasil wawancara, dokumen, dan kuesioner, diperoleh data dan informasi terkait kondisi eksisting jumlah guru, baik guru normatif, adaptif, maupun produktif, disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa % jumlah guru produktif SMK dari jumlah seluruh guru di masing-masing SMKN/S tidak merata, yaitu kisaran antara 35% - lebih 50an%. SMK idealnya memiliki jumlah guru produktif lebih banyak atau minimal 60% dari jumlah seluruh guru di masing-masing SMK bila merujuk pada struktur kurikulum SMK. Artinya bahwa jumlah guru produktif harusnya lebih banyak dari akumulasi jumlah guru normatif dan adaptif, akan tetapi pada kenyataannya justru berbanding terbalik untuk beberapa SMK sebagaimana dipaparkan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Kondisi Eksisting Jumlah Guru SMK

No.	Nama SMK	Jumlah Guru SMK Yang Ada Saat ini (orang)			Jumlah Guru Produktif SMK yang Ada saat ini dari Jumlah Seluruh Guru (%)	Jumlah Guru Produktif SMK Yang Kurang (orang)
		Normatif	Adaaktif	Produktif		
1.	Kota Tebing Tinggi					
	SMKN 2	17	19	36	50,00	2
	SMKN 3	11	12	24	51,06	0
	SMKN 4	27	8	20	36,36	7
	SMKS Taman Siswa	9	10	12	38,71	5
2.	Kota Medan					
	SMKN 8	26	23	51	51,00	20
	SMKN 9	28	26	41	43,16	26
	SMKN 13	21	22	37	46,25	22
	SMKS Ar Rahman	15	12	17	38,64	0
3.	Kota Pematangsiantar					
	SMKN 1	26	11	41	52,56	0
	SMKN 2	32	30	40	39,22	19
	SMKN 3	22	23	49	52,13	4
	SMKS Persiapan	18	16	20	37,04	3
4.	Kabupaten Deli Serdang					
	SMKN 1 Patumbak	16	23	23	37,10	13
	SMKN 1 Kutalimbaru	19	27	28	37,84	13
	SMKN 1 Pancurbatu	7	4	13	54,17	13
	SMKS Istiqlal Deli Tua	42	4	25	35,21	12

Sumber: Data Penelitian (2020)

Fenomena lain yang dapat dianalisis dari Tabel 2 di atas adalah ditinjau dari topologi Kota Medan yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara, yang secara umum kota ini memiliki jumlah SMK dan guru produktifnya jauh lebih banyak dibanding dengan jumlah SMK dan guru produktifnya di kabupaten/kota lain yang ada di Sumatera Utara. Dengan begitu, secara logika tentunya pihak SMK di Kota Medan akan lebih mudah untuk memenuhi jumlah guru produktif ideal, akan tetapi fakta sebagaimana pada Tabel 2 menginformasikan bahwa 4 SMK lokasi penelitian di Kota Medan memiliki % jumlah guru produktif di bawah 60% dari jumlah seluruh guru di masing-masing SMK yang ada. Artinya, pihak SMK di Kota Medan tidak sertamerta dengan mudah untuk memenuhi jumlah guru produktif ideal.

Tabel 2 menggambarkan bahwa hampir semua SMK mengalami kekurangan guru produktif kecuali, SMKN 1 Pematangsiantar, SMKS Ar Rahman Medan, dan SMKN 3 Tebing Tinggi. Jumlah kekurangan guru produktif SMK tidak merata, yaitu kisaran antara 2 sampai 26 orang. Jumlah kekurangan guru produktif SMK di atas merujuk pada kondisi eksisting jumlah guru produktif SMK saat ini saat penelitian dilakukan yaitu tahun 2020, dan belum mempertimbangkan jumlah guru produktif yang akan pensiun tahun depannya. Misalnya: SMKN 2 memiliki 4 (empat) guru produktif yang mendekati masa pensiun tahun ini. Artinya bahwa dari jumlah guru produktif yang ada saat

ini tentunya akan berkurang sebanyak 4 orang di tahun ini, sehingga jumlah kekurangan guru produktif tentunya bertambah 4 (empat) orang guru produktif untuk tahun depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala sekolah dan guru SMK diperoleh informasi bahwa kendati SMK kekurangan banyak guru produktif, akan tetapi proses belajar mengajar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kepala SMK melakukan berbagai cara di lapangan untuk memenuhi guru produktif, diantaranya: pemanfaatan guru lain yang serumpun meskipun kadang keahlian guru tersebut tidak sesuai dengan mata ajar yang diampunya; pengoptimalan jam mengajar guru produktif yang ada sampai 40 jam mengajar per minggu; perekrutan guru baru, dan lain sebagainya.

Kondisi eksisting guru produktif SMK sebagaimana dijelaskan di atas masih dilihat dari beberapa sampel SMKN/S di Sumatera Utara, dan belum melihat kondisi guru produktif di semua SMK di Sumatera Utara, apalagi SMK yang lokasi sekolahnya berada jauh dari ibukota kabupaten/kota atau ibukota kecamatan, yang diperkirakan jauh dari kondisi pemenuhan guru produktif yang mencukupi.

**Pemenuhan Kuantitas Guru Produktif SMK di Era Revolusi Industri 4.0.** Berdasarkan hasil data dokumen, wawancara, dan kuesioner diperoleh informasi terkait pola pemenuhan kuantitas guru produktif SMK seperti disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Pola Pemenuhan Kuantitas Guru Produktif SMK

No.	Pola Pemenuhan Guru Produktif	Jumlah Guru Produktif (orang)															
		Kota Medan				*Kota P.siantar				Kota T.Tinggi				Kab. Deli Serdang			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengangkatan guru dari Program CPNS	36	19	4	-	√	√	√	-	31	19	15	-	10	3	11	1
2.	Pengangkatan guru melalui Ikatan Dinas D3 Jakarta	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Guru yang pernah mengikuti Program Keahlian Ganda/Alih Keahlian	1	-	-	-	2	1	3	-	9	4	3	-	-	-	3	-
4.	Pengangkatan guru melalui Program Alih Fungsi pegawai umum	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pengangkatan guru melalui Guru Tidak Tetap (GTT) Provinsi	5	14	7	-	8	29	10	-	5	4	-	-	4	5	6	-
6.	Pengangkatan guru melalui GTT yang dibiayai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	10	7	23	6	4	9	-	-	1	-	-	-	9	6	5	15
7.	Pengangkatan guru melalui GTT yang dibiayai Dana BOS	-	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10
8.	Pengangkatan guru sebagai Guru Tetap Yayasan (Guru Swasta yang sertifikasi berasal dari sekolah yang bersangkutan)	-	-	-	11	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pengangkatan guru melalui Program magang mahasiswa PPG (Pendidikan Profesi Guru)	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
10.	Program Guru Tamu	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√

Sumber: Data Penelitian (2020)

Keterangan:

- = Tidak ada; √ = Ada \* = Sumber data hanya dari hasil wawancara

Kota Medan

1. SMKN 8
2. SMKN 9
3. SMKN 13
4. SMKS Ar Rahman

Kota Pematangsiantar

1. SMKN 1
2. SMKN 2
3. SMKN 3
4. SMKS Persiapan

Kota Tebing Tinggi

1. SMKN 2
2. SMKN 3
3. SMKN 4
4. SMKS Taman Siswa

Kabupaten Deli Serdang

1. SMKN 1 Patumbak
2. SMKN 1 Pancurbatu
3. SMKN 1 Kutalimbaru
4. SMKS Istiqlal Deli Tua

*Pertama*, pengangkatan guru baru melalui Program CPNS. Cara ini merupakan pola lama pemenuhan kuantitas guru di sekolah, yang tidak hanya untuk guru produktif SMK akan tetapi juga di semua tingkatan baik di SD, SMP, SMA, maupun SMK. Pola pemenuhan ini tentu bukan sesuatu yang ideal. Pemerintah terkendala dengan adanya moratorium pegawai negeri. Andaikan ada pengangkatan guru baru, jumlahnya pun juga akan sangat terbatas, sehingga kebutuhan sekolah umumnya sangat tidak sebanding dengan jumlah formasi yang ada. Hal ini mendorong untuk bisa segera memenuhi kekurangan guru produktif SMK dengan menerapkan kebijakan-kebijakan baru lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa ujian CPNS dinilai hanya menguji pengetahuan calon guru saja, sementara untuk menjadi seorang guru tidak cukup hanya memiliki pengetahuan akan tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat diuji melalui praktek mengajar. Asesmen rekrutmen guru melalui program CPNS perlu ditambah untuk menguji kompetensi dan keterampilan mengajar CPNS formasi guru. Program CPNS dinilai hanya dapat memenuhi sebagian kuantitas guru produktif, akan tetapi kurang terhadap pemenuhan kualitas guru produktif.

Guna meningkatkan keterampilan mengajar, khususnya guru yang baru lulus CPNS, yang notabeneanya guru tersebut belum/kurang pengalaman mengajar, maka perlu dilakukan Program Induksi bagi guru pemula, yaitu kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran dan bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada SMK di tempat tugasnya.

*Kedua*, Program Keahlian Ganda/Alih Keahlian. Salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kuantitas guru produktif di SMK untuk program jangka pendek yang dinilai sangat efektif dan efisien adalah program keahlian ganda, yaitu seorang guru memiliki 2 atau lebih keahlian dalam mengajar sekaligus, misalnya: seorang guru mengajar mata pelajaran IPA (keahlian sebelum mengikuti Program Keahlian Ganda), sekaligus mengajar mata pelajaran Tata Boga, Tata Kecantikan, atau Tata Busana (keahlian baru pasca Program Keahlian Ganda). Sedangkan Program Alih Keahlian adalah guru hanya beralih keahlian ke keahlian lain dari Jenis Kelompok Keahlian yang sama. Si guru hanya memiliki 1 keahlian mengajar, yaitu keahlian yang baru pasca dilakukan Program Alih Keahlian. Misalnya si guru beralih keahlian dari Multimedia ke Rekayasa Perangkat Lunak.

Kedua keahlian “Multimedia dan Rekayasa Perangkat Lunak” berasal dari 1 Jenis Kelompok Keahlian yang sama yaitu Teknologi Komputer dan Informatika.

Program Keahlian Ganda memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan kompetensi keahlian baru bagi guru produktif. Penambahan pembekalan pengetahuan dan keterampilan produktif baru yang dibutuhkan SMK diberikan kepada guru-guru normatif, adaptif, dan produktif dengan tingkat kejenuhan sangat tinggi (jumlah lebih) melalui Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMK/SMA (Keahlian Ganda). Guru adaptif, normatif, dan produktif di SMA dan SMK yang kelebihan guru diberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan kompetensi keahlian baru melalui pendidikan dan pelatihan di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK).

*Ketiga*, Program Alih Fungsi Pegawai Umum menjadi Pegawai Fungsional (guru). Berdasarkan data pada Tabel 4 di atas bahwa SMKN 1 Pematangsiantar memiliki 1 guru produktif yang berasal dari pegawai umum. Berbeda halnya di SMKN 3 Pematangsiantar yang justru berbanding terbalik. Menurut guru produktif SMKN 3 Pematangsiantar bahwa ada beberapa guru yang ingin beralih profesi dari fungsional guru menjadi pegawai umum. Hal ini tentunya menjadi ancaman akan keberadaan jumlah guru produktif yang sampai saat ini dirasa masih kurang.

*Keempat*, Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT). GTT dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan sumber penggajian dan pengSK-an guru, yaitu: 1) GTT Provinsi, yaitu guru honorer yang diangkat oleh Gubernur melalui SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan gajinya diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara. GTT Provinsi merupakan usulan daerah tahun 2017, sementara pengangkatan GTT Provinsi sampai tahun 2020 diberhentikan; 2) GTT yang dibiayai dari SPP, yaitu guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah melalui SK Kepala Sekolah, dan besaran gaji diberikan berdasarkan keputusan dan kesepakatan Komite Sekolah; dan 3) GTT Dana BOS, yaitu guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah melalui SK Kepala Sekolah, dan sumber gaji berasal dari Dana BOS berdasarkan keputusan dan kesepakatan Kepala Sekolah.

Terkait pemberhentian pengangkatan GTT Provinsi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan PP Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, pada pasal 59 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib mengisi kekosongan guru demi

kelangsungan proses belajar mengajar, sementara pada UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 6 disebutkan bahwa jenis pegawai ASN hanya PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang. Artinya bahwa UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN tidak mengenal pegawai honor atau GTT. Pro dan kontra pada 2 regulasi tersebut menjadikan beberapa Pemerintah Daerah, termasuk Provinsi Sumatera Utara menghentikan pengangkatan GTT Provinsi, bahkan beberapa Pemerintah Daerah lainnya berencana memberhentikan GTT tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa tidak semua guru honor dapat digaji dari Dana BOS. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler bahwa pembiayaan pembayaran honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2019; 2) belum mendapatkan tunjangan profesi; dan, 3) memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Permasalahannya adalah bahwa beberapa guru produktif SMK belum masuk ke daftar Dapodik, sehingga tidak bisa digaji dari Dana BOS.

*Kelima*, Program Guru Tamu, yaitu program kolaborasi mengajar bagi guru SMK yang mengajar mata pelajaran produktif di SMK pada kompetensi keahlian yang mempunyai karakteristik tertentu. Kriteria guru tamu yang layak dijadikan sebagai narasumber dalam pembelajaran, yaitu: memiliki pendidikan minimal tamatan Sekolah Teknik Menengah/Sekolah Menengah Kejuruan; telah bekerja minimal 5 tahun dibidangnya; industri/perusahaan/bengkel tempat narasumber bekerja tergolong maju; mampu untuk membimbing siswa, orang ini biasanya ditempatkan dibagian training atau kepala mekanik dari suatu industri/perusahaan/bengkel tempatnya bekerja; telah terjalin kerjasama antara sekolah dengan institusi tempatnya bekerja, misalnya dalam hal Praktek Kerja Industri (Prakerin), magang siswa dan sebagainya.

Firdaus (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa guru tamu adalah orang luar

(bukan guru) yang memberikan pelajaran kepada siswa sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Orang luar ini diharapkan memiliki keahlian khusus misalnya ahli teknik mesin atau perbengkelan otomotif yang relevan dengan mata pelajaran mekanik otomotif. Pembelajaran dengan memanfaatkan guru tamu dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni orang tersebut (narasumber) diminta untuk memberikan penjelasan tentang sesuatu secara teori dan praktek di depan kelas dan di bengkel-bengkel atau workshop sekolah; dan/atau siswa-siswa melakukan kunjungan ke tempat narasumber bekerja di bawah pengawasan dan bimbingan para guru.

Pola pemenuhan guru produktif SMK melalui Program Guru Tamu merupakan salah satu cara merealisasikan Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, yang telah dilakukan sejak tahun 2016 sampai sekarang. Artinya bahwa pola ini merupakan pola baru, yaitu baru dilakukan di era revolusi industri 4.0, di atas tahun 2011. Pola ini merupakan salah satu bentuk dan cara bertransformasi dalam rangka pemenuhan kuantitas guru produktif SMK di era revolusi industri 4.0.

*Ketujuh*, Program Magang Mahasiswa PPG (Pendidikan Profesi Guru). Program ini merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan Nonkependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional. PPG terdiri dari PPG dalam Jabatan dan PPG Prajabatan. PPG dalam jabatan merupakan program dimana peserta yang mengikuti program tersebut telah menjadi guru pada satuan pendidikan. Sedangkan PPG Prajabatan merupakan program dimana peserta yang mengikuti program tersebut belum menjadi guru atau sudah menjadi guru namun tidak memenuhi syarat menjadi peserta PPG dalam jabatan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Program Mahasiswa Magang PPG dilakukan hanya 1 gelombang oleh Kemendikbud, dan terdapat sekitar 500an peserta di seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi. Penempatan para mahasiswa magang PPG guru yang sudah lulus sampai saat ini tidak jelas. SMKN 13 Kota Medan memiliki 4 guru produktif yang berasal dari Program Mahasiswa Magang PPG. Menurut pihak SMKN 13 bahwa para guru yang ikut Program Mahasiswa Magang PPG dijanjikan akan diangkat menjadi guru PNS oleh pihak panitia magang PPG, akan tetapi sampai saat ini status para guru tersebut tidak jelas.

Pola pemenuhan guru produktif SMK melalui Program Magang Mahasiswa PPG merupakan salah satu cara untuk merealisasikan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pola ini menerapkan sistem pendidikan guru yang mengintegrasikan proses perkuliahan dan pengenalan lapangan sedini mungkin melalui magang (internship). Mahasiswa PPG memiliki pengalaman nyata dan kontekstual dalam menerapkan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat menunjang tercapainya penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi penguasaan materi bidang studi secara utuh. Pola ini merupakan salah satu bentuk dan cara bertransformasi dalam rangka pemenuhan kuantitas guru produktif SMK di era revolusi industri 4.0.

**Pemenuhan Kualitas Guru Produktif SMK di Era Revolusi Industri 4.0** Berdasarkan hasil wawancara, dokumen, kuesioner diperoleh data dan informasi terkait pemenuhan kualitas guru produktif SMK, disajikan pada Tabel 4.

*Pertama*, Program Belajar Mandiri melalui Sistem Informasi Manajemen Terpadu Guru Pembelajar Online (SIM GPO) atau Sistem Informasi manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIM PKB). Sejak tahun 2017 lalu, Ditjen GTK sudah mengembangkan program SIM PKB yang menjadi kelanjutan dari SIM GPO, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru yang sudah terintegrasi dalam SIM PKB.

SIM GPO/PKB adalah suatu sistem informasi manajemen terpadu/berkelanjutan yang dibuat oleh Pemerintah khusus untuk guru untuk meningkatkan kualitasnya. Pemerintah membuat satu sistem online, dimana guru dapat mengaksesnya secara online dengan menggunakan Guru Pembelajar Id melalui <https://gurupembelajar.id>.

Belajar mandiri dilakukan melalui 3 (tiga) moda, yaitu: 1) tatap muka, merupakan pembelajaran dengan interaksi langsung antarfasilitator dengan peserta. Moda ini diperuntukkan bagi guru yang tidak bisa mengikuti pembelajaran moda lain karena alasan geografis, tidak/kurang tersedianya aliran listrik dan jaringan internet, ketersediaan anggaran, literasi teknologi informasi dan komunikasi, serta alasan lain yang rasional, dengan mempelajari 8-10 modul; 2) moda Daring, yaitu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi jaringan komputer dan internet, dengan mempelajari 3-5 modul; dan 3) moda Daring kombinasi, yaitu moda yang mengkombinasikan antara tatap muka dengan Daring, dengan mempelajari 6-7 modul.

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud membuat terobosan 2 program baru sebagai menu pada sistem SIM GPO (SIM PKB sebutan saat ini), yaitu Program *upskilling* dan *reskilling* guru SMK. Program *upskilling* adalah peningkatan kemampuan guru dan *reskilling* adalah pelatihan kemampuan baru bagi para guru. Kemendikbud membuka kesempatan bagi 2.160 orang guru untuk mengikuti program *upskilling* dan *reskilling* guru kejuruan SMK. SMK harus mampu beradaptasi dengan pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual dengan industri melalui pemanfaatan perkembangan teknologi di industri yang cepat dengan skema pembelajaran *project by learning* atau *bring industry to school*.

Pelaksanaan program *upskilling* dan *reskilling* guru kejuruan SMK didasarkan pada pemetaan 4 bidang *cluster center of excellence* (CoE) SMK, meliputi bidang: manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, *hospitality*, dan *care service*. Pemilihan CoE tersebut telah mempertimbangkan tren perkembangan industri dan kapasitas penyerapan tenaga kerja. Secara total, terdapat 21 kompetensi keahlian di SMK yang masuk dalam kriteria. Program *upskilling* dan *reskilling* guru kejuruan SMK dilakukan secara pembelajaran daring dan pembelajaran campuran sesuai dengan kompetensi dan keterampilan kejuruan yang akan dicapai guru. Pelatihan dilakukan selama 2 sampai 4 bulan bagi guru SMK yang memiliki

usia di bawah 50 tahun dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Hal baru yang mengalami transformasi pada pola belajar mandiri di era revolusi industri 4.0 ini adalah pemanfaatan moda (sarana belajar) untuk belajar mandiri bagi guru. Sebelum era revolusi industri 4.0, guru belajar mandiri dengan menggunakan moda tatap muka, yaitu interaksi secara langsung antara fasilitator dengan peserta pembelajaran, sedangkan di era revolusi industri 4.0 ini, selain moda tatap muka, guru juga menggunakan moda Daring dan Daring kombinasi.

Kedua moda ini merupakan cara belajar mandiri bagi guru dengan memanfaatkan fasilitas internet dan teknologi digital melalui komputer, laptop, HP, atau sejenisnya. Pemanfaatan media internet pada pola belajar mandiri melalui moda Daring dan Daring kombinasi merupakan tuntutan kompetensi guru di era revolusi industri 4.0.

Menurut Nurkholis dan Badawi (2019), salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru di era revolusi industri 4.0 adalah kompetensi mendidik atau pembelajaran berbasis *internet of thing* sebagai *basic skill*. Guru tentunya harus dapat mengoperasikan komputer di era saat ini. Guru juga harus menguasai internet karena di era saat ini internet sudah menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan. Guru akan tertinggal oleh waktu bila tidak bisa internet dan komputer.

**Tabel 4.** Pola Pemenuhan Kualitas Guru Produktif SMK

No.	Pola Pemenuhan Guru Produktif	Jumlah Guru Produktif (orang)															
		Kota Medan				*Kota P.siantar				Kota T.Tinggi				Kab. Deli Serdang			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Peningkatan kompetensi guru melalui pemanfaatan SIM GPO/PKB (sebuah program Kementerian Kemdikbud)	1	-	-	3	1	1	-	2	-	2	-	-	8	3	1	2
2.	Peningkatan kompetensi guru dengan aktif di Forum MGMP/KKG	1	3	1	4	7	1	3	3	-	5	2	1	1	1	1	6
3.	Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan	30	13	20	7	7	4	2	5	36	13	15	7	6	4	23	6
4.	Peningkatan kompetensi guru melalui magang di industry	9	1	3	-	-	1	4	3	4	5	3	-	1	1	6	2
5.	Peningkatan kompetensi guru dengan berkolaborasi dengan Industri	8	2	3	4	7	4	6	4	-	-	-	7	1	2	6	3

Sumber: Data Penelitian (2020)

Keterangan:

- = Tidak ada;

√ = Ada

\* = Sumber data hanya dari hasil wawancara

Kota Medan

Kota Pematangsiantar

Kota Tebing Tinggi

Kabupaten Deli Serdang

1. SMKN 8

1. SMKN 1

1. SMKN 2

1. SMKN 1 Patumbak

2. SMKN 9

2. SMKN 2

2. SMKN 3

2. SMKN 1 Pancurbatu

3. SMKN 13

3. SMKN 3

3. SMKN 4

3. SMKN 1 Kotalimbaru

4. SMKS Ar Rahman

4. SMKS Persiapan

4. SMKS Taman Siswa

4. SMKS Istiqlal Deli Tua

*Kedua*, Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG). Forum MGMP/KKG adalah suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar, kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru. Adapun beberapa materi diskusi di Forum MGMP/KKG yang pernah diikuti oleh beberapa guru produktif adalah: penggunaan teknologi untuk peningkatan kompetensi guru, pemanfaatan google classroom dalam pembelajaran Daring, materi-materi keteknikan, misalnya: teknik komputer dan jaringan Casco, perhotelan dan tata kecantikan, dan lain sebagainya.

Hal baru yang mengalami transformasi pada kegiatan MGMP/KKG di era revolusi industri 4.0 ini adalah materi diskusi yaitu pemanfaatan teknologi digital dan e-literasi, serta materi-materi keteknikan/kejuruan. Transformasi kegiatan MGMP/KKG di era revolusi industri 4.0 ini merupakan kegiatan guru dengan memanfaatkan fasilitas internet, e-literasi, serta teknologi digital melalui komputer, laptop, HP, atau sejenisnya. Pemanfaatan media internet, teknologi digital serta e-literasi merupakan tuntutan kompetensi guru di era revolusi industri 4.0.

*Ketiga*, Program Pelatihan, yaitu sebuah sarana untuk meningkatkan keterampilan kerja guru produktif SMK agar sesuai dengan standar yang diharapkan oleh DUDI. Pelatihan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) umumnya hanya untuk guru normatif dan adaptif, sedangkan pelatihan untuk guru produktif SMK umumnya dilakukan oleh P4TK.

Salah satu pelatihan yang pernah diikuti oleh guru produktif adalah pelatihan keahlian tata boga di P4TK bidang Bisnis dan Pariwisata, Sawangan-Bogor yaitu Pengolahan Aneka Makanan Indonesia, Asia, dan Kontinental; Pelayanan Makan dan Minum di Restoran; Pengolahan Aneka Kue Indonesia dan alain sebagainya. Beberapa guru produktif SMKN 9 Medan telah mengikuti berbagai jenis pelatihan, yaitu sistem jaringan, programming website, mikrotek, dan fiber optik. Beberapa guru produktif SMKN 13 Medan telah mengikuti pelatihan SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) pada Program Mahasiswa Magang PPG untuk jurusan Teknik Otomasi Industri. SCADA merupakan sistem kendali industri berbasis komputer yang dipakai untuk pengontrolan suatu proses industri. Beberapa guru produktif SMKS Ar-Rahman Medan telah

mengikuti pelatihan ACCURATE untuk jurusan Akuntansi.

Hal baru yang mengalami transformasi kegiatan pelatihan di era revolusi industri 4.0 ini adalah bahwa pelatihan tidak hanya pada pengetahuan pedagogis saja akan tetapi juga keterampilan kerja sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan di industri di era globalisasi saat ini. Menurut Irwanto (2019) bahwa salah satu kompetensi yang dibutuhkan guru vocational di era revolusi industri 4.0 adalah memiliki kompetensi yang sesuai dengan di DUDI, yang dapat mengorganisasikan dan memadukan pembelajaran baik teori maupun praktik.

*Keempat*, Program Magang di Industri, yaitu dilakukan dengan beberapa metode: modeling, approximating, scaffolding, self directed learning dan generalisasi. Magang guru dapat meningkatkan relevansi kompetensi keahlian guru produktif dengan perkembangan Iptek di DUDI. Guru dapat melihat secara nyata tamatan seperti apa yang dicari dan dibutuhkan oleh DUDI. Guru dapat mengetahui kompetensi mana yang harus dipertajam dalam pembelajaran agar dapat melahirkan peserta didik yang kompeten sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Magang guru dapat menambah pengetahuan dan keterampilan yang mendukung guru produktif SMK untuk lebih aktual pada saat mengajar dan memperoleh gambaran bagaimana prosedur kerja di DUDI.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak sekolah tidak memiliki anggaran biaya bagi guru yang melakukan magang. Biaya tersebut untuk kebutuhan akomodasi guru, biaya makan selama magang, uang saku guru, operasional magang, dll. Dalam berbagai kebijakan, Program Magang Guru merupakan langkah strategis Direktorat Pembinaan SMK- Kemendikbud, yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 26 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

*... biaya untuk magang guru di industri sebanyak 5 kali dalam setahun, yang meliputi biaya akomodasi, transportasi dan/atau uang saku.*

Pada Permendikbud di atas dijelaskan bahwa magang guru dilaksanakan dalam bentuk: mengikuti pelatihan kerja di industri; magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk/jasa dalam merealisasi kesepakatan teaching factory; magang di industri untuk menghasilkan bahan baku teaching factory; mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi; mengikuti pelatihan mendapatkan

sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi; dan/atau mengikuti magang kerja untuk menjalin kerjasama dengan industri.

*Kelima*, kolaborasi guru SMK-praktisi industri, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran kejuruan di SMK melalui pemberdayaan karyawan dari DUDI yang berpengalaman untuk mengajar siswa SMK. Terdapat 2 mekanisme pemberdayaan praktisi industri dalam pembelajaran SMK, yaitu melalui perekrutan praktisi industri yang sudah berusia menjelang 50 tahun untuk beralih menjadi guru SMK khusus mapel produktif, dan melalui program kelas industri dimana sekolah menggandeng para praktisi industri untuk melatih para siswa pada mata pelajaran praktek tertentu berkolaborasi dengan guru.

Para praktisi yang sudah lama terjun di industri tentu sudah cukup kaya dengan pengalaman kerja. Pengalaman dan keterampilan kerja di DUDI tersebut menjadi bekal yang sangat baik untuk mengajar di SMK. Didukung kondisi psikologis di usia yang telah matang menjadikan mereka lebih siap dalam membimbing siswa. Perekrutan guru dari praktisi industri atau disebut guru produktif menjadi solusi untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK sehingga memiliki daya saing tinggi. Pembelajaran produktif yang melibatkan instruktur dari industri dilaksanakan melalui team teaching. Guru dan praktisi industri bersama-sama melaksanakan pembelajaran. Praktisi industri fokus pada transfer keterampilan produktif, sedangkan guru mensupervisi dari sisi pedagogisnya. Selain itu, ketika guru berkolaborasi dalam pembelajaran bersama praktisi industri, guru sekaligus dapat terus mengupgrade pengetahuan dan keterampilannya dengan belajar dari praktisi industri.

## KESIMPULAN

Persentase jumlah guru produktif SMK dari jumlah seluruh guru di masing-masing SMKN/S tidak merata, yaitu kisaran antara 35% - lebih 50an%. Hampir semua SMK mengalami kekurangan guru produktif kecuali, SMKN 1 Pematangsiantar, SMKS Ar Rahman Medan, dan SMKN 3 Tebing Tinggi. Jumlah kekurangan guru produktif SMK tidak merata, yaitu kisaran antara 2 sampai 26 orang per SMK.

Pemenuhan kuantitas guru produktif SMK di Sumatera Utara memiliki 10 pola, yaitu: Pengangkatan guru dari Program CPNS; Pengangkatan guru melalui Ikatan Dinas D3 Jakarta; Guru yang pernah mengikuti Program Keahlian Ganda/Alih Keahlian; Pengangkatan guru melalui Program Alih Fungsi pegawai umum; Pengangkatan guru melalui Guru Tidak

Tetap (GTT) Provinsi; Pengangkatan guru melalui GTT yang dibiayai SPP; Pengangkatan guru melalui GTT yang dibiayai Dana BOS; Pengangkatan guru sebagai Guru Tetap Yayasan; Pengangkatan guru melalui Program magang mahasiswa PPG; dan Program Guru Tamu.

Pemenuhan kualitas guru produktif SMK di Sumatera Utara memiliki 5 pola, yaitu peningkatan kompetensi guru melalui: pemanfaatan SIM GPO/PKB; aktif di Forum MGMP/KKG; pelatihan; magang di industri; dan kolaborasi dengan Industri.

## REKOMENDASI

1. Gubernur Sumatera Utara agar Mengeluarkan Peraturan Gubernur atau Surat Edaran Gubernur atau Surat Keputusan Bersama antara Gubernur dengan DUDI dalam rangka kerjasama dan fasilitasi guru magang di industri, guru berkolaborasi dengan DUDI, pelatihan di DUDI, guru tamu, dan Prakerin Siswa SMK di DUDI, yang dalam regulasi tersebut melibatkan beberapa OPD teknis, misalnya: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, sesuai Tugas dan Fungsi masing-masing OPD.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara agar: berkoordinasi dengan BKD untuk melakukan Program Induksi bagi guru pemula yang baru lulus CPNS sebelum penempatan mengajar di SMK; Melakukan Program Keahlian Ganda berdasarkan kebutuhan jenis paket keahlian guru produktif dari guru-guru adaptif SMA yang berlebih untuk dialih tugaskan ke unit SMK yang kekurangan guru produktif; Memetakan kebutuhan pelatihan guru produktif SMK berdasarkan Jenis Paket Keahlian SMK; Menyusun Petunjuk Teknis Operasional (PTO) pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi guru-guru produktif SMK dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas; Menggandeng Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan dalam rangka pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikerjasamakan, misalnya: kolaborasi SMK dengan DUDI yang harus melibatkan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan sebagai OPD yang bersentuhan langsung dengan perusahaan sesuai Tusinya.
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag. Provinsi Sumatera Utara agar: memberikan rekomendasi atau surat pengantar untuk diajukan ke industri tempat magang guru atau Prakerin siswa yang mau dituju agar dapat meminimalisir penolakan; Melibatkan/mengundang guru-guru produktif dalam rangka Pelatihan Marketing

- dan Transaksi secara online dan pengembangan UMKM Digital.
4. Kepala Sekolah SMK agar Memanfaatkan alumni SMK yang telah bekerja di DUDI untuk dijadikan sebagai guru tamu ke sekolah dengan memperhatikan ketentuan dan syarat yang berlaku untuk meminimalisir pengeluaran biaya honor guru tamu;
  5. Pengawas Sekolah SMK agar Menyusun, memperbaharui, dan memetakan materi diskusi MGMP/KKG yang fokus dan menyentuh tentang kejuruan/keteknikan sesuai kebutuhan SMK pada program pembimbingan dan pelatihan profesional guru produktif SMK.
  6. Guru Produktif SMK agar: Menerapkan pengalaman bekerja di DUDI ke proses belajar mengajar di kelas melalui penyampaian materi pelajaran sesuai kebutuhan nyata di lapangan dan berorientasi pada kinerja individu di dunia kerja, serta peka terhadap perkembangan dunia kerja; Memanfaatkan *teaching factory* atau *factory to classroom* di Ruang Praktik Sekolah sebagai pengganti magang di industri untuk meningkatkan keterampilan kerja berbasis industri; serta, menjalin hubungan kerjasama antara guru dengan DUDI melalui pendekatan hubungan emosional.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara yang telah membiayai kegiatan penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, E., Rahayu, D., Harja, I. T., Muhammad, R., Zunivar, A. Y., Ramdlaningrum, H., & Lauranti, M. 2018. *Vokasi di Era Revolusi Industri: Kajian Ketenagakerjaan di Daerah*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
- Bukit, M. 2014. *Strategi dan Inovasi Pendidikan Kejuruan dari Kompetensi ke Kompetisi*. Bandung: Alfabeta.
- Firdaus. 2018. Manfaat Guru Tamu untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kelas XI Teknik Sepeda Motor SMK YPTN Bangkinang Kota. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 2(1).
- Firdausi, A. & Barnawi. 2012. *Profil Guru SMK Profesional*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hermann, M., Pentek, T., & Otto, B. 2016. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios. *The 49th Hawaiian International Conference on Systems Science*.
- Impres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka

Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

Irwanto. 2019. Kompetensi Guru Vokasional SMK di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, Vol. 2, No.1, 2019, hal. 182-204. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Ismara, K. I., Fitrihana, N., Amaripuja, P., Danupranata, G., Nadzir, M., Raharjo, A. B., & Widadi, S. 2018. *Buku Referensi Cyberzone: Membangun Bisnis di Era Industri 4.0*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

Liffler, M., & Tschiesner, A. 2013. *The Internet of Things and the Future of Manufacturing*. McKinsey & Company.

Merkel, A. 2017. *Speech by Feeral Chancellor Angela Merkel to the OECD Conference*. [Online] Dari: [http://www.bundesregierung.de/Content/EN/Raden/2014/2014-02-19-oecdmerkel\\_paris\\_en.html](http://www.bundesregierung.de/Content/EN/Raden/2014/2014-02-19-oecdmerkel_paris_en.html), [Diakses 20 Februari 2020].

Mulyadi. 2010. *Diagnosis Kesulitan Belajar & Bimbingan Terhadap Kesulitan Belajar Khusus*. Yogyakarta: Nuha Litera.

Nurkholis, Anwar, & Badawi. 2019. Profesionalisme Guru di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 12 Januari 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Prasetyo, H., & Sutopo, W. 2018. Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset. *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 13, No. 1, Hal. 17-26.

Schlechtendahl, J., Kretschmer F. M., Lechler, A., & Verl, A. 2015. Making Existing Production Systems Industry 4.0-Ready. *Production Engineering*, 9(1) hal: 143-148.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Waidl, A., Wardana, K., & Ni'mah, S. K. 2018. *Kertas Kebijakan, Enam Rekomendasi Kebijakan Pelatihan Vokasi: Urgensi Pelatihan Vokasi Inklusif dengan Melibatkan Serikat Pekerja, Masyarakat Sipil, serta Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. International NGO Forum of Indonesian Development.

Wurianto, A. B. 2018. Pengembangan Pendidikan Vokasi Bidang Sosio-Humaniora Menghadapi Revolusi Industri Era 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Vokasi Indonesia*, Volume 1, e-ISSN 2654-6493.

Zamtinah., Kurniawan, U., Sarosa, D., & Tyasar., R. 2011. Model Pendidikan Karakter untuk Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Pendidikan Karakter*. 1(1) hal: 98-109.

## Hasil Penelitian

# PENGEMBANGAN TIPOLOGI INOVASI PELAYANAN PUBLIK: STUDI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

## *(THE DEVELOPMENT OF A TYPOLOGY OF PUBLIC SERVICE INNOVATION: A STUDY OF POPULATION ADMINISTRATIVE SERVICES IN INDONESIA)*

*Wisber Wiryanto*

Lembaga Administrasi Negara  
Jl. Veteran 10, Jakarta 10110  
DKI Jakarta - Indonesia  
Email: wisberwiryanto@yahoo.com

*Diterima: 27 Agustus 2020; Direvisi: 07 Oktober 2020; Disetujui: 2 Maret 2021*

### ABSTRAK

Terdapat berbagai pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Namun, kualitas pelayanannya bervariasi, sebab kondisi geografis, permasalahan lokal dan global, serta kemampuan pelaksanaan kebijakan yang dihadapinya bervariasi. Maka, diperlukan adanya sebuah inovasi yang memiliki tipologi yang sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang pengembangan tipologi inovasi pelayanan publik. Makalah ini berusaha untuk menjawab pertanyaan kunci, bagaimana pengembangan tipologi inovasi pelayanan publik? Tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan pengembangan tipologi inovasi pelayanan publik. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan melakukan telaahan terhadap beberapa referensi, dokumen, informasi dan data yang relevan. Sampel diambil dengan teknik *accidental sampling*, sebagai sumber data. Sampel yang diambil sebanyak 23 instansi yang telah melakukan inovasi pelayanan publik yaitu inovasi pelayanan adminduk. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi tipologi inovasi pelayanan adminduk. Penelitian dilakukan pada semester pertama tahun 2020. Hasil studi menunjukkan, tipologi inovasi pelayanan adminduk, terdiri dari 8 tipe inovasi, yaitu: inovasi input, inovasi proses, inovasi output, inovasi sistem, inovasi konsep, inovasi administrasi, inovasi teknologi, dan inovasi tatakelola. Instansi dinas kependudukan dan catatan sipil yang bersangkutan perlu mengidentifikasi baik tipologi maupun jenis inovasi pelayanan adminduk yang dibutuhkan daerah sehingga proses inisiasi inovasi ataupun replikasi model inovasi dari daerah lain dapat diterapkan secara efisien dan efektif.

**Kata kunci:** administrasi kependudukan, inovasi, pelayanan publik, tipologi

### ABSTRACT

*There are various population administration (adminduk) services, in various provinces, districts and cities in Indonesia. However, the quality of service varies, because geographical conditions, local and global problems, as well as the ability to implement policies it faces varies. Then, it is necessary to have an innovation that has a typology as needed to improve the quality of public services. Therefore, the research was conducted about the development of public service innovation typology. This paper attempt to address a key research question, how about the development of public service innovation typology? The aim of this research, namely to description the development of public service innovation typology. The research method uses a library research by doing a review of some relevant references, documents, information and data. The sample was taken using accidental sampling technique, as the data source. The sample of this research in total 23 agencies that carry out public service innovation namely adminduk service innovation. A Qualitative descriptive data analysis was used to identify a typology of adminduk service innovation. The research was conducted in the first semester of the year 2020. The results of this study shown, a typology of adminduk public service innovation, consisting of 8 types of innovation, namely: innovation inputs, innovation process, innovation outputs, innovation system, innovation concepts, innovation administration, innovation technologies, as well as innovation governance.*

*The relevant population and civil registration agency need to identify both typologies and variant of innovation as needed before the process of initiation or replication of innovation is carried out in order to reach efficient and effective results.*

**Keywords:** *innovation, population administration, public service, typology*

## PENDAHULUAN

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) merupakan sebuah instansi daerah yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di Indonesia. Instansi ini tersebar merata di 34 (tiga puluh empat) provinsi; dan 416 (empat ratus enam belas) kabupaten; serta 98 (sembilan puluh delapan) kota. Kualitas pelayanan di masing-masing daerah tersebut bervariasi karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, permasalahan lokal, dan kemampuan yang berbeda dalam mengimplementasikan kebijakan.

Permasalahan dan kebijakan merupakan faktor pendorong dilakukannya sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pertama, permasalahan pelayanan adminduk berkaitan dengan faktor sistem dan manusia. Lebih-lebih, permasalahan global turut mempengaruhi pelayanan adminduk yaitu terjadinya wabah *Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Wabah tersebut telah menelan korban sebanyak setengah juta jiwa (Koran.tempo.co, 2020) sampai dengan pertengahan tahun 2020.

Kedua, Kebijakan pelayanan adminduk dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya, Undang-Undang (UU) No. 24/2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). UU adminduk tersebut mengamanahkan kepada setiap pemerintah daerah kabupaten/kota agar menyelenggarakan urusan adminduk dengan baik. Pemerintah mendorong pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal. Dengan adanya permasalahan dan kebijakan tersebut maka instansi yang bersangkutan mencari solusi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melakukan inovasi dengan cara menginisiasi inovasi ataupun mereplikasi dari inovasi yang sudah ada.

Guna menginisiasi inovasi ataupun mereplikasi sebuah model inovasi pelayanan dengan baik, maka dibutuhkan pengetahuan tentang tipologi inovasi pelayanan publik. Berdasarkan tipologi inovasi tersebut dapat dilakukan identifikasi tipe, karakteristik, ciri atau jenis inovasi pelayanan publik dengan lebih baik. Dengan diketahuinya tipe, karakteristik atau jenis inovasi pelayanan publik tersebut, maka

diperoleh kejelasan dalam menginisiasi inovasi dan mewujudkannya; ataupun kejelasan dalam mereplikasi inovasi pelayanan publik dari daerah lainnya sesuai kebutuhan, sehingga sebuah inovasi pelayanan dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Tipologi inovasi pelayanan publik dapat diuraikan berdasarkan konsepsi teorinya. Konsep tipologi inovasi sektor publik menurut Halvorsen *et.al* (2005) terdiri dari inovasi produk, inovasi proses, inovasi administrasi, inovasi sistem, dan inovasi konsep. Senada dengan konsep tersebut, menurut Acker (2017), tipologi inovasi sektor publik terdiri dari inovasi produk, inovasi proses, inovasi administrasi, inovasi teknologi, dan inovasi tata kelola. Kedua konsep tipologi tersebut perlu disintesis untuk mendapatkan sebuah tipologi inovasi pelayanan publik yang baru dan lebih lengkap.

Sehubungan latar belakang masalah tersebut, maka dipandang perlu melakukan studi pengembangan tipologi inovasi pelayanan publik melalui studi pelayanan adminduk di Indonesia. Dengan rumusan permasalahan, bagaimana pengembangan tipologi inovasi pelayanan publik di Indonesia? Tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan pengembangan tipologi inovasi pelayanan publik di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat dikembangkan sebuah model tipologi inovasi pelayanan publik berupa pelayanan adminduk yang dapat dimanfaatkan oleh instansi dukcapil dalam melakukan proses inisiasi inovasi ataupun replikasi inovasi pelayanan adminduk secara efisien dan efektif.

Tinjauan pustaka terhadap pelayanan adminduk menunjukkan kompleksitas pelayanan adminduk sebagai sebuah pelayanan yang dinamis yang tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika penduduk; melainkan juga dipengaruhi oleh situasi, kondisi, permasalahan, dan kebijakan yang mendasarinya. Tinjauan pustaka dilakukan untuk memperoleh kejelasan: 1) Konsep inovasi sektor publik; 2) Permasalahan inovasi dan pelayanan adminduk; 3) Kebijakan inovasi dan pelayanan adminduk; dan, 4) Tipologi inovasi sektor publik.

Konsep inovasi sektor publik, dapat ditelusuri dari istilah inovasi. Inovasi adalah pengenalan cara baru dalam mengubah input menjadi output sehingga dihasilkan perubahan meningkatnya nilai manfaat (Fontana, 2011). Kegiatan inovasi merupakan penciptaan nilai. Dalam penciptaan nilai tersebut, inovasi harus

mampu memberikan nilai tambah kesejahteraan (Nasution & Kartajaya, 2018). Selanjutnya Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) menyatakan, *innovation is a source of growth and a tool for addressing global challenges like climate change and social issues such as inequality. Regions are seeking to promote their economic development increasingly through support to innovation. They define and implement strategies and policy instruments to build on their strengths and to shift course* (OECD, 2019). Jadi, pemerintah mempunyai kegiatan melakukan inovasi dengan memperkenalkan cara baru dalam mengubah input menjadi output untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi dapat dilihat sebagai sebuah proses sosial yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antar pihak (Saparita, 2015). Sedangkan menurut Dyer et. al (2013), pemikir inovatif menghubungkan bidang ilmu, masalah, atau ide dimana orang lain memandangnya tidak berhubungan. Oleh karena itu, pejabat pemerintahan perlu mengambil inisiatif inovasi berdasarkan ide-ide, kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, perubahan kebijakan, dan permasalahan yang dihadapi untuk dicarikan pemecahannya melalui inovasi.

Jadi, keberhasilan inisiasi dan implementasi inovasi ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat, terutama dalam hubungannya pengembangan inovasi untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, inovasi merupakan proses transformasi yang mengubah *input* (masyarakat miskin) menjadi *output* (masyarakat sejahtera) melalui pemanfaatan inovasi. Hal ini berarti, keberhasilan inovasi ditentukan oleh keberhasilan melakukan proses perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, hubungan diantara inovasi *input*, proses dan *output* tersebut menunjukkan adanya sebuah tipologi inovasi sistem.

Ruang lingkup inovasi sektor publik di Indonesia meliputi inovasi administrasi Negara dan inovasi daerah. Pertama, inovasi administrasi Negara, mencakup inovasi tata pemerintahan, inovasi kelembagaan dan sumber daya aparatur, serta inovasi pelayanan publik (Utomo, 2017). Kedua, inovasi daerah, adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi tersebut dilakukan untuk mencapai target peningkatan pelayanan publik, tujuan peningkatan kinerja pemerintah daerah, dan kesejahteraan rakyat di daerah.

Inovasi daerah meliputi 3 (tiga) bentuk, yaitu: Inovasi tata kelola pemerintahan daerah, merupakan bentuk inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi

manajemen dan pengelolaan unsur manajemen; inovasi pelayanan publik, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik; dan inovasi daerah lainnya, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah/PP No. 38/2017 tentang Inovasi Daerah).

Permasalahan inovasi dan pelayanan adminduk, menjadi tugas pemerintah untuk mengatasinya. Mulgan & Albury (2003) menguraikan kendala inovasi sektor publik, meliputi: 1) Keengganan untuk menutup program atau organisasi yang gagal (*Reluctance to close down failing programmes or organization*); 2) ketergantungan yang berlebihan pada karyawan berkinerja tinggi sebagai sumber inovasi (*over-reliance on high performers as sources of innovation*); 3) teknologi tersedia tetapi ada hambatan aturan budaya organisasi (*technologies available but constraining cultural or organizational arrangements*); 4) Tidak ada penghargaan atau insentif untuk berinovasi atau mengadopsinya (*no rewards or incentives to innovate or adopt innovations*); 5) Rendahnya keterampilan dalam manajemen perubahan dan resiko (*Poor skills in active risk or change management*); 6) anggaran dan perencanaan jangka pendek (*short-term budgets and planning horizons*); 7) tingginya tekanan dan beban administrasi (*very pressures and administrative burdens*); dan, 8) budaya menghindari resiko (*culture of risk aversion*).

Penyebab permasalahan pelayanan adminduk tersebut meliputi berbagai faktor. Menurut Utomo (2017) permasalahan pelayanan adminduk, disebabkan oleh faktor sistem dan manusia, sebagai berikut: *Pertama*, Keterbatasan sistem: a) *Information and Techology (IT)* yang kurang mendukung: jaringan lemah *bandwidth* kecil, data tidak sinkron; b) Sumberdaya Manusia (SDM) kurang kapabel: tidak memiliki sertifikasi kompetensi, sering mutasi; c) Sarana prasarana: perangkat komputer lambat, blanko terbatas, tidak ada ruang tunggu; dan, d) Prosedur panjang: Rukun Tetangga (RT) - Rukun Warga (RW) - Kelurahan - Kecamatan - Dinas.

*Kedua*, Faktor moral *hazard*: a) *Corruptive/opportunistic behavior*: pungli, suap, calo, dan diskriminasi; b) Partisipasi/kesadaran publik yang lemah; c) Perilaku petugas: Cemberut, dan tidak berorientasi pelayanan. Oleh karena itu, maka diperlukan solusi pembaruan layanan adminduk secara berkesinambungan, berupa inovasi sektor

kependudukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, permasalahan global sangat mempengaruhi berfungsi tidaknya pelayanan adminduk, yaitu terjadinya *pandemi Covid-19*. Pada mulanya, wabah penyakit tersebut terjadi di Wuhan China akhir tahun 2019. Selanjutnya, wabah tersebut menyebar ke berbagai Negara, banyak penduduk yang tertular virus tersebut akibat kontak langsung. Sampai dengan pertengahan tahun 2020 wabah tersebut telah menelan korban sebanyak setengah juta jiwa (Koran.tempo.co, 2020). Permasalahan global tersebut menimbulkan dampak terjadinya perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, termasuk cara kerja di Indonesia. Instansi pelayanan adminduk perlu mengantisipasi permasalahan tersebut agar pelayanan berfungsi baik. Dalam hal ini, pelayanan adminduk secara *online* dan *physical distancing* selama wabah *Covid-19* dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kebijakan inovasi dan pelayanan adminduk, disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. UU Pelayanan publik tersebut mengatur tentang pokok-pokok pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa/pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Pelayanan publik diselenggarakan dalam berbagai sektor/bidang diantaranya kesehatan, pendidikan, dan pelayanan administrasi kependudukan.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) No. 30/2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik memberikan acuan tentang pengertian, tujuan, kriteria inovasi pelayanan publik, dan strategi percepatan pengembangan inovasi. Inovasi pelayanan publik adalah sebuah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat

bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tujuan pembangunan inovasi pelayanan publik untuk menjangkit dan menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan. Kementerian/Lembaga/Daerah dihimbau mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dengan membangun minimal satu inovasi setiap tahunnya, melalui kerjasama jaringan kerja pengembangan inovasi pelayanan publik dilakukan kompetisi dan pemberian penghargaan inovasi pelayanan publik.

Khusus pelayanan publik di bidang adminduk telah pula dilengkapi dengan instrumen kebijakan berupa UU No. 24/2013 tentang Perubahan UU No. 23/2006 tentang Adminduk. Berdasarkan UU adminduk tersebut, pemerintah mendorong pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal. Peraturan Presiden (Perpres) No. 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Dukcapil, isinya mendorong revolusi layanan publik dari berkarakter *bureaucratic base* berubah menjadi *customer base*. Sehingga semua layanan Dukcapil orientasinya memberikan kemudahan kepada seluruh pemohon layanan. Selanjutnya, Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Oleh karena itu, maka perlu didukung dengan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakai, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Selain itu, telah diterbitkan petunjuk pelaksanaan dan teknis adminduk untuk mengatur pengelolaan 23 (duapuluh tiga) jenis dokumen kependudukan yang terdiri dari 14 (empat belas) surat keterangan; 6 (enam) jenis akta, hingga biodata penduduk; dan 3 (tiga) jenis kartu yaitu Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik; dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Pengelolaan dokumen kependudukan tersebut, mengacu kepada 7 (tujuh) instrumen kebijakan, sebagai berikut: *Pertama*, Pelayanan kartu kependudukan yang meliputi KK, KTP dan KIA, diatur berdasarkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 9/2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional; dan Permendagri No. 2/2016 tentang Kartu Identitas Anak; serta Permendagri No. 11/2017 tentang

Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

*Kedua*, Peningkatan kualitas layanan adminduk, diatur berdasarkan Permendagri No. 19/2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk, yang memuat pengaturan antara lain mengenai layanan terintegrasi (terpadu), jemput bola dan perubahan (penyesuaian) jadwal/waktu pelayanan. Layanan terintegrasi tersebut merupakan jenis layanan adminduk yang output-nya bisa diberikan sebagai satu paket dan tidak perlu diminta tetapi diberikan. Misalnya, saat penduduk mengurus akta kelahiran, otomatis diterbitkan KK dan KIA; apabila mengurus akta kematian maka otomatis diterbitkan KTP-el bagi suami atau istrinya dengan status cerai mati dan kartu kerluarganya. Begitu pula, penduduk yang baru menikah, dengan mengurus akta nikah, maka mendapat KK dan KTP-el yang baru dengan status kawin. Kemendagri mengembangkan layanan adminduk yang terintegrasi, disebut dengan program *3 in 1* atau *4 in 1* (Suaranusantara.com, 2017). Kebijakan ini mendorong lahirnya inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan adminduk.

*Ketiga*, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa), merupakan gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya adminduk. Penerapan Gisa, dalam 1 kecamatan minimal harus terbentuk 1 kelurahan/desa sadar adminduk; 1 kabupaten/kota minimal terbentuk 1 kecamatan sadar adminduk; dan 1 provinsi minimal terbentuk 1 kabupaten/kota sadar adminduk. Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Adminduk.

Kesadaran akan adminduk tersebut ditunjukkan dengan 4 (empat) hal yaitu kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan; pemanfaatan data kependudukan; pematkhiran data kependudukan; dan pelayanan adminduk yang membahagiakan rakyat. Pelayanan publik harus dimaknai sebagai sebuah proses kreatif yang bisa membahagiakan masyarakat. Oleh karena itu, saat melakukan pelayanan harus diingat tujuan pemerintahan yang paling tinggi adalah membahagiakan rakyatnya (Menpan.go.id, 2020). Jadi, membahagiakan rakyat menjadi tujuan pelayanan adminduk yang harus diwujudkan.

*Keempat*, Pelayanan Dukcapil *Go Digital*. Dukcapil *Go Digital* merupakan transformasi awal di bidang adminduk yaitu dengan diterbitkannya KK dan akta kelahiran yang semula ditandatangani dan distempel basah oleh

Kepala Dinas, sekarang telah ditandatangani secara elektronik (TTE), sehingga dapat dilakukan kapan dan dimana pun. Dalam layanan Dukcapil *Go Digital*, maka setiap layanan dokumen kependudukan diharapkan bisa dilakukan *online*. Dalam hal ini, telah diterapkan layanan *online* berbasis *digital signature* atau TTE dalam layanan KK, akta kelahiran, dan sejumlah dokumen lainnya.

Selain itu, digunakan kertas *HVS* menggantikan kertas *security printing* untuk mencetak dokumen kependudukan seperti KK dan akta kelahiran. Perubahan ini dilakukan karena semua layanan Dukcapil akan beralih ke digital dan masyarakat mencetak sendiri dokumen kependudukannya (Menpan.go.id, 2020). Untuk mencetaknya, pemohon tak perlu keluar rumah karena dokumennya bisa dicetak di rumah. Dicitak di kertas *HVS* tersebut dengan otentikasi melalui *QR Code* (Dukcapil.kemendagri.go.id, 2019). Jadi, Dukcapil *Go Digital* transformasinya efisiensi, efektivitas dan memudahkan kerja Dukcapil (Kemendagri.go.id, 2019).

*Kelima*, Pelayanan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Ide pelayanan ADM adalah memindahkan kantor dukcapil ke tempat yang mudah dijangkau masyarakat. Diharapkan ADM bisa didirikan di sejumlah tempat, yaitu di semua *Mall* Pelayanan Publik (Menpan.go.id, 2020). ADM merupakan inovasi pelayanan dukcapil oleh Kemendagri. Mulai tahun 2020 dilakukan ujicoba pelayanan dukcapil melalui ADM atau Kios Dukcapil. Kemendagri menyediakan sistem ADM, sehingga apabila Pemda ingin menggunakan ADM, maka bisa dilakukan melalui pengajuan e-katalog (Dutawarta.com, 2020).

Prinsip kerja ADM seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Warga bisa memperoleh dokumen kependudukan yang dibutuhkan semudah mengambil uang di ATM. Pemohon mengetik sendiri dokumen kependudukan yang diinginkan di ADM. Otentifikasinya melalui *iris* mata, dan *face recognition*, kemudian langsung bisa di-*print out* di mesin (Dukcapil.kemendagri.go.id, 2019). ADM digunakan untuk mencetak KTP el, dan kependudukan lainnya seperti akta kelahiran, akta kematian, dan KK. Persediaan kertas ADM satu slot, semua dokumen kependudukan dicetak dengan kertas putih, ditentukan standarnya, ukuran, dan berat gramnya. Tidak ada istilah blangko habis, karena dicetak pakai kertas biasa (Kemendagri.go.id, 2019). Jadi, instansi Dukcapil bisa melakukan upaya transformasi atau inovasinya pada penggunaan kertas tersebut..

*Keenam*, Pelayanan Adminduk *Online-Daring*. Proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas

persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. Permendagri No. 7/2019 tentang Pelayanan Adminduk secara Daring, mengatur: ruang lingkup pelayanan pendaftaran dukcapil; penggunaan formulir elektronik; cara pelayanan adminduk daring, termasuk pelayanan dalam hal penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas adminduk daring; kios pelayanan adminduk daring; proses penandatanganan elektronik (TTE) dokumen kependudukan; dan mekanisme kerja; sarana dan prasarana. Dalam tahun yang sama, melengkapi pelayanan tersebut maka telah diterbitkan Permendagri No. 96/2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Adminduk.

*Ketujuh*, Pelayanan Adminduk *Online-Daring* selama *Pandemi Covid-19*. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghimbau agar mengoptimalkan pelayanan adminduk secara *online* selama *pandemi Covid-19*. Kemendagri berdasarkan Surat No. 443.1/2978/Dukcapil per 16 Maret 2020 (yang telah diperpanjang masa berlakunya hingga *pandemi Covid-19* berakhir) menghimbau kepada Dinas Dukcapil kabupaten/kota di Daerah PSBB memberikan layanan adminduk secara *online-daring*.

Pelayanan tersebut makin dioptimalkan selama *pandemi Covid-19* dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah berkembangnya *pandemi* tersebut. Untuk daerah yang masih ada layanan manual seperti perekaman KTP-el, wajib menggunakan protokol pencegahan penularan *Covid-19*; dan meminta seluruh Dinas Dukcapil yang belum memiliki aplikasi layanan *online-daring* agar segera mengembangkannya secara bertahap beralih menuju *online-daring* (Gatra.com, 2020).

Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang belum memiliki aplikasi layanan adminduk online dihimbau segera mengembangkannya, untuk meningkatkan kualitas layanan adminduk. Dinas Dukcapil mengumumkan dokumen kependudukan yang sudah selesai cetak di kantor Dinas, kecamatan, UPT, kelurahan/desa, atau di *mall* pelayanan publik, melalui pengumuman yang dipasang di kantor, atau media *website*, aplikasi *playstore/appstore*, WA dan SMS, serta memberitahukan tempat pengambilan dokumen tersebut (Solopos.com, 2020).

Jumlah Dinas Dukcapil yang melaksanakan layanan adminduk secara *online-daring* selama *pandemi Covid-19* dengan berbagai cara yang bisa diunduh *via playstore, website, WA* dan *SMS*, tercatat sebanyak 487 Dinas (Menpan.go.id,

2020). Jumlah ini belum mencakup keseluruhan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan adminduk antara lain perubahan situasi dan kondisi, perkembangan iptek, permasalahan dan kebijakan. Oleh karena itu, instansi pemerintah (kementerian/lembaga/daerah) penyelenggara fungsi pelayanan adminduk melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan adminduk maka dilakukan inovasi dalam berbagai jenis.

Berdasarkan kebijakan inovasi tersebut, maka dapat dijumpai ada 6 (enam) jenis inovasi pelayanan adminduk di Indonesia, terdiri dari: 1) inovasi layanan terintegrasi; 2) inovasi layanan jemput bola; 3) inovasi jadwal/waktu pelayanan; 4) inovasi layanan dukcapil *go digital*; 5) Inovasi anjungan dukcapil mandiri; dan, 6) inovasi layanan *online-daring*, termasuk inovasi layanan selama *pandemi Covid-19* dengan penerapan protokol kesehatan. Jadi, inovasi pelayanan adminduk dapat diidentifikasi menurut jenis inovasinya, sebagaimana telah disebutkan. Jenis-jenis inovasi tersebut dapat dikelompokkan sebagai bagian dari tipologi inovasi sektor publik.

Tipologi inovasi sektor publik, dapat dijelaskan dengan menelusuri terlebih dahulu istilah tipologi. Tipologi dapat diartikan sebagai penggolongan menurut corak (tipe) masing-masing (Depdikbud, 2008) sedangkan tipe adalah corak, model, contoh (Depdikbud, 2008). Padanan lainnya adalah prototipe yang berarti model yang mula-mula (model asli) yang menjadi contoh: contoh baku; contoh khas (Depdikbud, 2008). Dengan memperhatikan pengertian tersebut, maka tipologi inovasi dapat diartikan sebagai pengelompokan inovasi atas dasar tipe, corak atau karakteristiknya. Tipologi ini digunakan untuk menjelaskan gambaran tipe inovasi secara lebih spesifik.

Tipologi inovasi sektor publik menurut Halvorsen *et.al* (2005) terdiri dari: 1) Inovasi produk, yaitu perbaikan pelayanan atau pelayanan baru, contohnya pelayanan kesehatan di rumah; dan, inovasi proses, contohnya perubahan dalam proses penyediaan pelayanan atau produk; 2) Inovasi administrasi, contohnya penggunaan instrumen kebijakan baru atau hasil perubahan kebijakan; 3) Inovasi sistem, contohnya sistem baru atau perubahan mendasar dari sistem yang ada, berupa organisasi baru atau kerjasama dan interaksi pola baru; dan, 4) inovasi konsep, contohnya yang disertai penggunaan konsep baru, misalnya pengelolaan manajemen terpadu.

Sedangkan, menurut Acker (2017) tipologi inovasi sektor publik, terdiri dari: 1) Inovasi

produk atau pelayanan: pembuatan layanan publik atau produk baru; 2) Inovasi proses, terkait dengan kualitas dan efisiensi proses internal dan eksternal, terdiri dari: a) Inovasi administrasi: Pembentukan organisasi, pengenalan metode kerja, dan teknik manajemen baru; dan, b) Inovasi teknologi: organisasi melayani warga masyarakat dengan memberikan pengenalan, penggunaan atau pembuatan teknologi baru; dan, 3) Inovasi tata kelola: pengembangan proses dan bentuk layanan baru untuk mengatasi masalah sosial tertentu.

Apabila kedua tipologi tersebut disintesis maka dihasilkan sebuah tipologi inovasi sektor publik baru yang lebih lengkap, terdiri dari: 1) inovasi produk perbaikan pelayanan atau pelayanan baru; 2) inovasi proses: perubahan dalam proses penyediaan pelayanan; (3) inovasi sistem: perubahan mendasar dari sistem yang ada atau sistem baru; 4) inovasi konsep: penggunaan konsep baru; 5) inovasi administrasi: perubahan kebijakan atau penggunaan kebijakan baru; 6) inovasi teknologi: pengenalan, penggunaan atau pembuatan teknologi baru; dan, 7) inovasi tata kelola: pengembangan proses atau bentuk layanan baru untuk mengatasi masalah sosial tertentu.

Selanjutnya, tipologi inovasi sektor publik tersebut dilengkapi lagi oleh peneliti, dengan menambahkan tipe inovasi *input*, yaitu perbaikan pelayanan pada *input* pelayanan, sehingga tipologi inovasi yang dikembangkan terdiri dari 8 (delapan) tipe, sebagai berikut: 1) inovasi *input*; 2) inovasi proses; 3) inovasi produk (*output*); 4) inovasi sistem (akar inovasi ini adalah inovasi *input*, proses dan *output*); 5) inovasi tata kelola; 6) inovasi administrasi; 7) inovasi konsep; dan, 8) inovasi teknik. Perlu dijelaskan, karena unsur-unsur dari sebuah sistem memiliki keterkaitan satu-sama lain, maka inovasi *input*, proses, dan *output* (produk) digambarkan sebagai akar dari inovasi sistem.

Tersedianya tipologi inovasi pelayanan publik memungkinkan dilakukannya identifikasi pelayanan yang dibutuhkan oleh daerah, termasuk inovasi pelayanan *adminduk*. Berdasarkan tipologi inovasi pelayanan tersebut, seperti halnya jenis inovasi, maka sebuah inovasi pelayanan *adminduk* dapat diidentifikasi tipe dan jenis yang menjadi karakteristiknya, sebagaimana telah diuraikan.

Penelusuran hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan kedudukan penelitian ini sebagai kelanjutan dari hasil penelitian sebelumnya, diantaranya: 1) Tipologi inovasi layanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, oleh Putri (2017); 2) Tipologi inovasi sektor Publik (Program Si-Cakep) di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan,

oleh Basuki, Kasmad, dan Nasrulhaq (2018); 3) Tipologi Inovasi Sektor Publik pada Tiga Program Inovatif (Tinjauan reflektif terhadap tiga inovasi pelayanan publik pemerintah kota Surabaya), oleh Wicaksono, dan Widya (2018); dan, 4) Analisis Tipologi Inovasi Pelayanan *Adminduk* di Kota Padang Panjang oleh Annisa (2019).

Penelitian ini mempunyai hubungan relevansi dengan keempat hasil penelitian sebelumnya yang telah disebutkan, karena adanya kesamaan fokus kajian tipologi inovasi pelayanan. Salah satu diantaranya juga memiliki kesamaan bidang kajian inovasi layanan *adminduk*. Selain itu, penelitian ini dapat dibedakan dengan keempat penelitian tersebut berdasarkan lokusnya. Dimana keempat penelitian sebelumnya menggunakan sampel lokus instansi pelayanan di satu daerah; sedangkan penelitian ini menggunakan lokus instansi pelayanan *adminduk* di banyak daerah. Jadi, penelitian ini mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan baru dilakukan, sehingga diharapkan hasilnya berguna untuk melengkapi penelitian sebelumnya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan bersumber dari peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, laporan/hasil penelitian sebelumnya dengan memanfaatkan media tertulis, cetak dan elektronik termasuk *website*.

Penentuan sampel menggunakan teknik *Accidental Sampling* (Sugiyono, 2009) yaitu cara mengambil sampel yang ditemukan secara kebetulan karena cocok digunakan untuk sumber data. Sampel yang diambil merupakan instansi yang mempunyai tugas di bidang pelayanan publik yaitu pelayanan *adminduk*, sebanyak 23 (duapuluh tiga) instansi.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi inovasi pelayanan *adminduk* sampel tersebut; dan mengolahnya dengan cara dikelompokkan sesuai fokus penelitian, kemudian hasilnya disajikan ke dalam bentuk tabel. Selanjutnya, analisis data deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengembangkan tipologi inovasi pelayanan yang bisa diterapkan dalam rangka inovasi pelayanan *adminduk* di daerah. Penelitian dilakukan di Jakarta pada semester pertama tahun 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh menunjukkan adanya berbagai inovasi pelayanan *adminduk* yang dilakukan sebagai bentuk implementasi

kebijakan dan solusi permasalahan pelayanan adminduk. Perolehan data disajikan berdasarkan jenis kebijakan yang mendorong lahirnya inovasi pelayanan adminduk, sebagai berikut: 1) inovasi pelayanan adminduk terintegrasi (tabel 1); 2) inovasi pelayanan adminduk jemput bola (tabel 2); 3) inovasi pelayanan adminduk berdasarkan jadwal/waktu (tabel 3); 4) inovasi pelayanan dukcapil *go digital* (tabel 4); 5) inovasi pelayanan anjungan dukcapil mandiri (tabel 5); dan, (6)

inovasi pelayanan adminduk online-daring (tabel 6).

Inovasi pelayanan adminduk terintegrasi, sebagai bentuk pelaksanaan Permendagri No. 19/2018 tentang peningkatan kualitas layanan adminduk, telah mendorong dilakukannya inovasi pelayanan adminduk secara terintegrasi. Perolehan data menunjukkan ada 5 (lima) inovasi pelayanan adminduk terintegrasi (terpadu) dan tipologinya seperti pada tabel 1.

**Tabel 1.** Inovasi pelayanan adminduk terintegrasi dan tipologinya

No.	Instansi	Inovasi	Tipologi
1.	Kementerian Dalam Negeri	Si Juwita (Pemanfaatan data kependudukan terintegrasi & <i>online</i> mewujudkan <i>Single Identity Number</i> ), Ditjen Dukcapil	Inovasi tata- Kelola, teknologi
2.	Pemprov DKI Jakarta	Si dukun <i>3 in 1</i> (Sistem terintegrasi dokumen kependudukan: Disdukcapil, RS & BPJS Kesehatan) Dokter perkasia (Dokumen terintegrasi penuh rasa kasih sayang)	Inovasi sistem, teknologi Inovasi proses
3.	Pemko Yogyakarta	Program <i>5 in 1</i> (Layanan adminduk keluar bersama) sinergitas kependudukan dan kesehatan	Inovasi teknologi
4.	Pemkab Aceh Barat	Aklamasi dansa (Akta kelahiran, kematian terintegrasi dana desa)	Inovasi input, administrasi
5.	Pemkab Blitar	Urus akte cerai di PA Blitar langsung dapat layanan perubahan status e-KTP & KK	Inovasi output, produk

Sumber: Data diolah (2020)

**Tabel 2.** Inovasi pelayanan adminduk jemput bola dan tipologinya

No.	Instansi	Inovasi	Tipologi
1.	Pemko Kudus	Jempol Dukcapil (Jemput bola keliling dukcapil)	Inovasi proses
2.	Pemkab Pekalongan	<i>Jek-duk</i> (Pelayanan ojek adminduk) masyarakat rentan	Inovasi proses
3.	Pemkab Gunungkidul	Si panjang (Sistem pelayanan jemputbola sampai ke ranjang)	Inovasi proses
4.	Pemkab Trenggalek	Inovasi pelayanan adminduk gandeng ojek <i>online</i> Trenggalek	Inovasi proses
5.	Pemkab Badung	<i>Go laying</i> Adminduk (pergi pelayanan keliling adminduk)	Inovasi proses

Sumber: Data diolah (2020)

**Tabel 3.** Inovasi pelayanan adminduk berdasarkan jadwal/waktu dan tipologinya

No.	Instansi	Inovasi	Tipologi
1.	Pemko Kudus	Wassalam (Layanan akta kematian bisa sehari)	Inovasi proses
2.	Pemkab Padang Pariaman	Dukcapil <i>week-end service</i> (Layanan hari sabtu) Kadoku Ktp-el (Siswa SMA/SMK hut ke-17 kado Ktp di sekolah)	Inovasi proses Inovasi proses
3.	Pemkab Sleman	Lukadesi (Keluarga duka desa siaga-menginput data kematian)	Inovasi proses / input
4.	Pemkab Gunungkidul	Semedi (Sehari mesti jadi) 1 permohonan 3,4 dokumen sehari	Inovasi proses
5.	Pemkab Badung	Lakamari (Pelayanan Kependudukan Malam Hari)	Inovasi proses

Sumber: Data diolah (2020)

Inovasi pelayanan adminduk jemput bola, dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas layanan adminduk. Perolehan data menunjukkan ada 5 (lima) inovasi pelayanan jemput bola dan tipologinya seperti pada Tabel 2. Inovasi pelayanan adminduk berdasarkan jadwal/waktu, kebijakan peningkatan kualitas pelayanan adminduk tersebut juga telah mendorong dilakukannya inovasi pelayanan adminduk berdasarkan perubahan jadwal/waktu pelayanan. Perolehan data menunjukkan ada 5 (lima) inovasi pelayanan adminduk berdasarkan jadwal/waktu dan tipologinya seperti pada Tabel 3.

Inovasi pelayanan dukcapil *go digital*, kebijakan pelayanan dukcapil *go digital* diawali dengan penerapan tandatangan elektronik (TTE) menggantikan tandatangan basah pada dokumen adminduk; dan program cetak dokumen adminduk dari rumah, telah mendorong dilakukannya inovasi. Perolehan data menunjukkan ada 5 (lima) inovasi pelayanan adminduk *go digital* dan tipologinya seperti pada Tabel 4.

Inovasi pelayanan anjungan dukcapil mandiri (ADM), kebijakan peningkatan kualitas

layanan adminduk telah mendorong dilakukannya inovasi pelayanan ADM. Perolehan data menunjukkan ada 5 (lima) inovasi pelayanan ADM dan tipologinya seperti pada Tabel 5. Inovasi pelayanan *adminduk online-daring*. Merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan pelayanan adminduk secara *online-daring*. Perolehan data menunjukkan ada 5 (lima) inovasi pelayanan adminduk secara *online-daring* dan tipologinya seperti pada Tabel 6.

Selain kebijakan tersebut, diketahui bahwa adanya permasalahan juga menjadi faktor pendorong dilakukannya inovasi pelayanan publik. Sehubungan adanya permasalahan global yaitu wabah *pandemi Covid-19*, maka dinas dukcapil memberikan pelayanan adminduk secara *online-daring* seperti tersebut di atas, tetapi dengan cara harus menerapkan protokol kesehatan, berupa *social & physical distancing* yaitu menjaga jarak antara petugas dan pelanggan, untuk pencegahan penularan wabah tersebut, hingga pertengahan tahun 2020, dan diperkirakan masih terus berkelanjutan hingga masa *new-normal*. Misalnya, Pemprov DKI Jakarta melayani adminduk *online-daring* melalui aplikasi Alpukat Betawi dengan menerapkan protokol kesehatan.

**Tabel 4.** Inovasi Pelayanan Dukcapil *go digital* dan tipologinya

No.	Instansi	Inovasi	Tipologi
1.	Pemko Solok	Tanda tangan elektronik (TTE) untuk KK & akta kelahiran	Inovasi teknologi, proses
2.	Pemkab Padang Pariaman	Dukcapil ceria <i>digital</i> ( <i>download</i> 1 aplikasi semua info diakses) <i>Nagari go digital</i> (konektivitas layanan adminduk bisa diselesaikan di kantor <i>Nagari</i> ).	Inovasi teknologi tatakelola
3.	Pemkab Karawang	Karawang <i>go digital</i> : Tanda tangan elektronik dan akta kelahiran <i>online</i>	Inovasi teknologi, proses
4.	Pemkab Blitar	Program cetak dokumen adminduk dari rumah	Inovasi produk
5.	Pemkab Kulon Progo	Si dutaku (Sistem informasi data kependudukan berbasis peta kabupaten Kulon Progo)	Inovasi sistem

Sumber: Data diolah (2020)

**Tabel 5.** Inovasi Pelayanan Anjungan Dukcapil Mandiri dan tipologinya

No.	Instansi	Inovasi	Tipologi
1.	Pemprov Jawa Timur	Layanan anjungan dukcapil mandiri	Inovasi teknologi
2.	Pemko Tangerang Selatan	Layanan anjungan dukcapil mandiri	Inovasi teknologi
3.	Pemkab Magetan	Layanan anjungan dukcapil mandiri	Inovasi teknologi
4.	Pemkab Jombang	Layanan anjungan dukcapil mandiri	Inovasi teknologi
5.	Pemkab Sidoarjo	Layanan anjungan dukcapil mandiri	Inovasi teknologi

Sumber: Data diolah (2020)

**Tabel 6.** Inovasi pelayanan adminduk daring dan tipologinya

No.	Instansi	Inovasi	Tipologi
1.	Kementerian Dalam Negeri	Si Juwita (Pemanfaatan data kependudukan terintegrasi secara <i>on-line</i> mewujudkan <i>Single Identity Number</i> ) Ditjen Dukcapil	Inovasi teknologi, tatakelola
2.	Pemprov DKI Jakarta	Si mas gesit (Sistem Adminduk Berbasis Informasi Elektronik) Alpukat Betawi (Akses langsung layanan dokumen kependudukan cepat, akurat untuk menginput data bayi)	Inovasi teknologi, sistem Inovasi teknologi
3.	Pemko Surabaya	Program <i>6 in 1</i> (Pengurusan akta lahir, kematian, perkawin-an, perceraian, surat pindah datang/ keluar secara daring)	Inovasi teknologi
4.	Pemkab Penukai Abab Lematang Ilir	<i>Sagarurung Keli Salai</i> (Siaga urusan kependudukan melalui aplikasi sampai selesai)	Inovasi teknologi
5.	Pemkab Pati	<i>Tarjilu Okke</i> (Daftar <i>siji entuk telu online</i> akte kelahiran, kematian dan KTP-el.)	Inovasi teknologi

Sumber: Data diolah (2020)

**Tabel 7.** Tipologi inovasi pelayanan adminduk

No.	Tipologi	Deskripsi tipologi	Inovasi
1.	Inovasi <i>input</i>	Perbaikan layanan pada input pelayanan.	Lukadesi (Keluarga Duka Desa Siaga-meng- <i>input</i> data kematian).
2.	Inovasi proses	Perubahan atau perbaikan pada proses penyediaan layanan untuk membahagiakan masyarakat pengguna layanan.	Jam kunci (Jemput bola rekam KTP-el langsung cetak ditempat).
3.	Inovasi <i>output</i> (produk)	Perubahan atau perbaikan ada output/ produk pelayanan atau menghasilkan produk baru pelayanan.	Urus akte cerai di PA Blitar otomatis layanan ubah status e-KTP & KK.
4.	Inovasi sistem	Perubahan mendasar pada sistem yang ada atau menghasilkan sistem baru.	Si Pelandukilat (Sistem layanan adminduk di pedalaman/perbatasan).
5.	Inovasi konsep	Penggunaan konsep atau pengetahuan baru	<i>I-Pop: Indonesia Population &amp; Civil Registration Map</i> (Peta Dukcapil Ind.)
6.	Inovasi administrasi	Perubahan kebijakan atau penerapan kebijakan baru.	Aklamasi dansa (Akta kelahiran dan kematian terintegrasi dana desa).
7.	Inovasi teknologi	Pengenalan, penggunaan teknologi atau pembuatan teknologi baru.	<i>6 in 1</i> (Pengurusan akta lahir, kematian, perkawinan, perceraian, surat pindah datang/keluar daring).
8.	Inovasi tata kelola	Pengembangan bentuk layanan baru, sinergi untuk mengatasi masalah sosial.	Si Juwita (Pemanfaatan data kependudukan terintegrasi secara <i>online</i> untuk mewujudkan <i>Single identity Number</i> ).

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan hasil yang telah disajikan, maka dilakukan pembahasan untuk mengidentifikasi tipologi inovasi pelayanan adminduk. Guna mengidentifikasi tipologi inovasi tersebut maka disusun terlebih dahulu sebuah tabel tipologi inovasi pelayanan adminduk yang berisi tipologi inovasi berikut deskripsi dan nama inovasinya, yang merupakan hasil integrasi data yang telah diperoleh sebelumnya. Tipologi inovasi pelayanan adminduk tersebut disajikan pada tabel 7.

Tipologi inovasi pelayanan adminduk tersebut merupakan cerminan dari tipologi

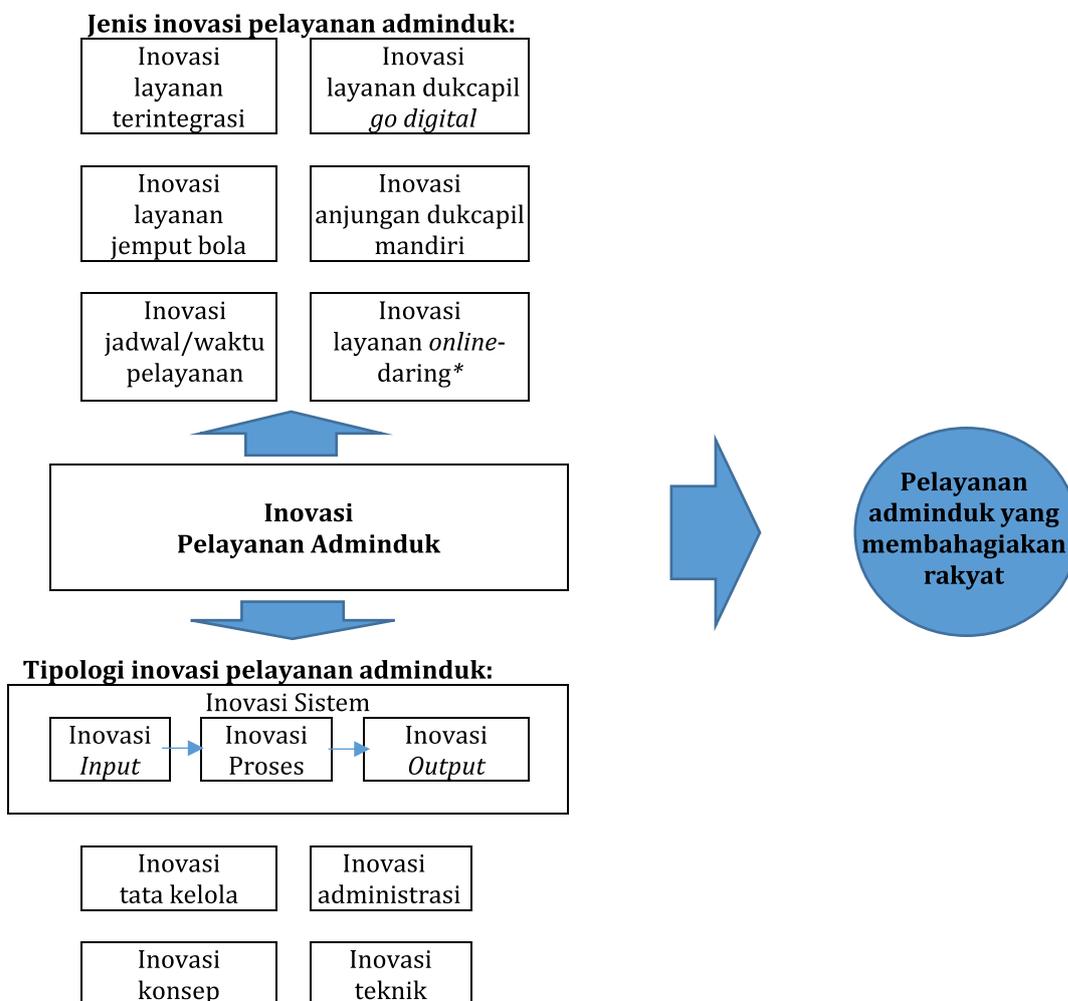
inovasi pelayanan adminduk yang ada di Indonesia. Tipologi inovasi pelayanan adminduk yang ditemukan terdiri dari 8 tipe yang deskripsi dan nama inovasinya, sebagai berikut: *Pertama*, Inovasi *input*: Perbaikan layanan pada input pelayanan. Contoh inovasi, Lukadesi (Keluarga Duka Desa Siaga-menginput data kematian). *Kedua*, Inovasi proses: Perubahan atau perbaikan pada proses penyediaan pelayanan untuk membahagiakan masyarakat pengguna layanan. Contoh, *Sad to happy* (Suku anak dalam terobos hutan demi adminduk Dharmasraya).

*Ketiga*, Inovasi *output* atau produk: Perubahan atau perbaikan pada produk pelayanan atau menghasilkan produk baru pelayanan. Contoh, Super tajam (Surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagai solusi penerbitan akta kelahiran). *Keempat*, Inovasi sistem: Perubahan mendasar pada sistem yang ada atau menghasilkan sistem baru. Contoh, Si Pelandukilat (Sistem pelayanan adminduk di wilayah Perbatasan dan Pedalaman). *Kelima*, Inovasi konsep: Penggunaan konsep atau pengetahuan baru. Contoh, Aplikasi *i-Pop: Indonesia's Population & Civil Registration Map* (Peta Dukcapil Indonesia).

*Keenam*, Inovasi administrasi: Perubahan kebijakan atau penerapan kebijakan baru. Contoh, Aklamasi dansa (Akta kelahiran dan kematian terintegrasi dana desa). *Ketujuh*, Inovasi teknologi: Pengenalan, penggunaan teknologi atau pembuatan teknologi baru.

Contoh, *6 in 1* (Pengurusan akta lahir, kematian, perkawinan, perceraian, surat pindah datang/keluar *online-daring*). *Kedelapan*, Inovasi tatakelola: Pengembangan bentuk layanan baru, sinergi untuk mengatasi masalah sosial. Contoh: Si Juwita (Pemanfaatan data kependudukan terintegrasi secara *online-daring* untuk mewujudkan *Single identity Number*).

Model dapat diartikulasikan dalam bentuk gambar, bagan, atau skema (Lembaga Administrasi Negara/LAN, 2017). Oleh karena itu, tipologi inovasi pelayanan adminduk dalam bentuk tabel dan penjelasannya yang telah disajikan, dapat disusun ke dalam bentuk sebuah gambar yang menjelaskan model tipologi inovasi pelayanan adminduk di Indonesia. Dalam hal ini, diusulkan model tipologi inovasi pelayanan adminduk di Indonesia, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Model tipologi inovasi pelayanan adminduk

Sumber: Data diolah dari Menpan.go.id (2018, 2019, 2020).

Keterangan: \*) termasuk melakukan layanan adminduk *online-daring* selama *pandemi Covid-19* yang diterapkan dengan protokol kesehatan.

Model tipologi inovasi pelayanan adminduk yang disusun ke dalam bentuk gambar tersebut menjelaskan bahwa sebuah inovasi dapat diidentifikasi berdasarkan jenis dan tipologi inovasi pelayanan adminduk. Inovasi pelayanan adminduk tersebut bertujuan untuk mewujudkan kebijakan pelayanan adminduk yang membahagiakan rakyat.

*Pertama*, jenis inovasi pelayanan adminduk, mencakup 6 (enam) jenis inovasi, terdiri dari: 1) inovasi layanan terintegrasi; 2) inovasi layanan jemput bola; 3) inovasi jadwal/waktu pelayanan; 4) inovasi layanan dukcapil *go digital*; 5) inovasi anjungan dukcapil mandiri; dan, 6) inovasi layanan adminduk secara daring (*online*) merupakan sebuah layanan yang dioptimalkan selama *pandemi covid-19* dengan protokol kesehatan. Jenis inovasi tersebut merupakan representasi inovasi pelayanan adminduk (lihat deskripsi tabel 7 kolom 2) oleh penyelenggara fungsi pelayanan adminduk (Kemendagri, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dinas Dukcapil Provinsi, dan Kabupaten/ Kota).

*Kedua*, tipologi inovasi pelayanan adminduk mencakup 8 (delapan) tipe inovasi, terdiri dari: 1) inovasi *input*; 2) inovasi proses; 3) inovasi *output*; 4) inovasi sistem (akar inovasi ini adalah inovasi *input*, proses dan *output*); 5) inovasi tata Kelola; 6) inovasi administrasi; 7) inovasi konsep; dan, 8) inovasi teknik. Tipologi inovasi pelayanan adminduk tersebut merupakan representasi dari berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dinas Dukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota. Khusus inovasi *input*, proses, dan *output* digambarkan sebagai akar dari inovasi sistem karena masing-masing memiliki hubungan keterkaitan.

Model ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi inovasi pelayanan adminduk berdasarkan tipologi inovasi pelayanan adminduk yang menjadi karakteristiknya, dan jenis inovasi pelayanan adminduk yang mempunyai hubungan relevansi dan merupakan implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan seperti pada Gambar 1. Dengan melakukan identifikasi inovasi pelayanan adminduk berdasarkan tipologi dan jenisnya, maka proses inisiasi dan replikasi inovasi pelayanan adminduk dari daerah lain yang dibutuhkan oleh instansi dukcapil daerah yang bersangkutan dapat dilakukan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pelayanan adminduk yang membahagiakan rakyat.

## KESIMPULAN

Tipologi inovasi pelayanan publik yaitu inovasi pelayanan adminduk di Indonesia yang ditemukan terdiri dari 8 (delapan) tipe inovasi,

yaitu: 1) Inovasi *input*: Perbaikan pada *input* pelayanan; 2) Inovasi proses: Perubahan atau perbaikan pada proses penyediaan pelayanan untuk membahagiakan masyarakat pengguna layanan; 3) Inovasi *output* atau produk: Perubahan atau perbaikan pada produk pelayanan atau menghasilkan *output* yaitu produk baru pelayanan; 4) Inovasi sistem: Perubahan mendasar pada sistem yang ada atau menghasilkan sistem baru; 5) Inovasi konsep: Penggunaan konsep atau pengetahuan baru; 6) Inovasi administrasi: Perubahan kebijakan atau penerapan kebijakan baru; 7) Inovasi teknologi: Pengenalan, penggunaan teknologi atau pembuatan teknologi baru; dan, 8) Inovasi tatakelola: Pengembangan bentuk layanan baru dengan sinergisme untuk mengatasi masalah sosial tertentu.

## REKOMENDASI

Strategi yang direkomendasikan agar inisiasi dan replikasi inovasi pelayanan adminduk efisien dan efektif, sebagai berikut:

1. Instansi dinas dukcapil perlu melakukan identifikasi tipe pelayanan adminduk sesuai kebutuhan daerah, dapat dilakukan dengan menggunakan tipologi inovasi pelayanan adminduk yang ditawarkan dengan memilih sebuah tipe pelayanan adminduk sesuai kebutuhan daerah, diantara pilihan inovasi-inovasi input, proses, output, sistem, konsep, administrasi, teknologi, dan tatakelola.
2. Instansi dinas dukcapil perlu pula menetapkan salah satu jenis inovasi pelayanan adminduk sesuai kebutuhan daerah, diantara pilihan inovasi-inovasi jadwal/waktu pelayanan, layanan terintegrasi, layanan jemput bola, layanan dukcapil *go digital*, layanan *online*-daring, dan anjungan dukcapil mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acker, W.V. 2017. An Introduction into Public Sector Innovation. Leuven: Public Governance Institute.
- Annisa, R. 2019. Analisis Tipologi Inovasi Pelayanan Adminduk di Kota Padang Panjang, Skripsi. Universitas Andalas.
- Ayoyogya.com. 2018. [Online] Dari: [ayoyogya.com/read/2018/09/12/36877/pemkab-sleman-terbitkan-3-inovasi-layanan-kependudukan](https://ayoyogya.com/read/2018/09/12/36877/pemkab-sleman-terbitkan-3-inovasi-layanan-kependudukan) [Diakses: 19 Mei 2020].
- Badungkab.go.id. 2020. *Go Laying* Adminduk Optimalkan Layanan. [Online] Dari: <https://www.badungkab.go.id/berita/read/3733> [Diakses: 19 Mei 2020].
- Baliexpress.jawapos.com. 2020. [Online] Dari: <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/01/28/>

- 176923/lakamari-inovasi-disdukcapil-badung-layani-masyarakat-sibuk [Diakses: 21 Mei 2020].
- Basuki, Y. Kasmad, R. dan Nasrulhaq. 2018. Tipologi inovasi sektor Publik (Program Si-Cakep) di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 2 (3) hal 207-216.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Disdukcapil.tangerangselatankota.go.id. 2020. [Online] Dari: <https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/web/berita/detail/186/superadmin/anjungan-dukcapil-mandiri> [Diakses: 15 Juni 2020].
- Dukcapil.gunungkidulkab.go.id. 2018. [Online] Dari: <http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/upaya-peningkatan-kualitas-layanan-administrasi-kependudukan/> [Diakses: 19 Mei 2020].
- Dukcapil.kemendagri.go.id. 2019. [Online] Dari <http://dukcapil.kemendagri.go.id/2018154-ini-langkah-konkret-bahagiakan-masyarakat-lewat-layanan-dukcapil-mandiri> [Diakses: 12 Mei 2020].
- Dukcapil.padangpariamankab.go.id. 2020. [Online] Dari <https://dukcapil.padangpariamankab.go.id> [Diakses: 21 Mei 2020].
- Dutawarta.com. 2020. [Online] Dari: [Dutawarta.com/mendagri-apresiasi-pemprov-jatim-atas-inisiatif-penggunaan-anjungan-dukcapil-mandiri](http://Dutawarta.com/mendagri-apresiasi-pemprov-jatim-atas-inisiatif-penggunaan-anjungan-dukcapil-mandiri) [Diakses: 2 Juli 2020].
- Dyer, Jeff *et.al.* 2013. *The Inovator's DNA-Mastering the Five Skill of Disruptive Innovators*. Penerjemah: Cornelius Trihendardi. Penerbit Andi.
- Fontana, A. 2011. *Innovate We Can!* Bekasi: Cipta Inovasi Sejahtera.
- Gatra.com. 2019. [Online] Dari: <https://www.gatra.com/detail/news/439460/politic/mendagri-jelaskan-pemanfaatan-nik-untuk-perbaikan-basis-data> [Diakses; 10 Mei 2020].
- Gatra.com. 2020. [Online] Dari: <https://www.gatra.com/detail/news/475960/teknologi/layanan-online-di-467-disdukcapil-saat-wabah-covid-19> [Diakses: 15 Juni 2020].
- Halvorsen, T. *et.al.* 2005. *Innovation in the Public Sector*. Oslo.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 470/837/SJ, 7 Feb. 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Pedoman Replikasi Inovasi*. Jakarta, hal 16-18.
- Jakarta.go.id. 2018. [Online] Dari: <https://jakarta.go.id/artikel/konten/3022/dinas-dukcapil-dki-jakarta-gagas-program-dokter-perkasa> [Diakses: 15 Juni 2020]
- Jateng.antaranews.com. 2019. [Online] Dari: <https://jateng.antaranews.com/berita/229089/kudu-s-miliki-10-inovasi-pelayanan-administrasi-kependudukan> [Diakses: 17 Mei 2020].
- Jatimtimes.com. 2020. [Online] Dari: [jatimtimes.com/baca/216910/20200618/162000/pe-rcepat-layanan-adminduk-dispendukcapil-dan-pa-blitar-sinergikan-inovasi-pelayanan-publik](http://jatimtimes.com/baca/216910/20200618/162000/pe-rcepat-layanan-adminduk-dispendukcapil-dan-pa-blitar-sinergikan-inovasi-pelayanan-publik) [Diakses: 10 Juli 2020].
- Jogja.tribunnews.com, 2020. [Online] Dari: <https://jogja.tribunnews.com/2020/03/27/maksima-lkan-layanan-daring-ini-rincian-layanan-yang-disediakan-disdukcapil-kulon-progo> [Diakses: 23 Juni 2020].
- Kemendagri.go.id, 2019. [Online] Dari: <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/24823/s-ensus-penduduk-2020-bantu-dukcapil>
- Kependudukancapil.jakarta.go.id. 2019. 116 Faskes di DKI Jakarta sudah terintegrasi dengan sistem Si Dukun 3 in 1. 2019. [Online] Dari: <http://kependudukancapil.jakarta.go.id/pages/?page=index&a=3&b=13&id=778> [Diakses: 15 Juni 2020].
- Kompak.or.id. 2019. [Online] Dari: <https://kompak.or.id/id/article/ojek-kependudukan-inovasi-layanan-administrasi-kependudukan-di-kecamatan-petungkriyono-kabupaten-pekalongan-jawa-tengah> [Diakses: 18 Mei 2020].
- Koran.tempo.co. 2020. [Online] Dari: <https://koran.tempo.co/read/internasional/454713/kematian-global-akibat-covid-19-tembus-setengah-juta-j jiwa> [Diakses: 10 Juli 2020].
- Menpan.go.id. 2018. [Online] Dari: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-tetapkan-top-40-inovasi-pelayanan-publik-2018> [Diakses: 15 Juni 2020].
- Menpan.go.id. 2018. [Online] Dari: <https://www.menpan.go.id/site/download/file/5713-pengumuman-tentang-top-99-inovasi-pelayanan-publik-tahun-2018> [Diakses: 30 Juni 2020].
- Menpan.go.id. 2019. [Online] Dari: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-tetapkan-top-45-inovasi> [Diakses: 15 Juni 2020].
- Menpan.go.id. 2019. [Online] Dari: <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/supertajam-permudah-penerbitan-akta-kelahiran>, [Diakses: 20 Juli 2020].
- Menpan.go.id. 2019. [Online] Dari: <https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/surat/file/6045-daftar-top-99-sinovik-tahun-2019> [Diakses: 15 Mei 2020].

- Menpan.go.id. 2020. [Online] Dari: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dukcapil-go-digital-semakin-optimal-selama-pandemi> [Diakses: 13 Juni 2020].
- Menpan.go.id. 2020. [Online] Dari: <https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/surat/file/6260-pengumuman-tentang-top-99-inovasi-pelayanan-publik-tahun-2020> [Diakses: 10 Juli 2020].
- Mulgan, G. and Albury, D. 2003. *Innovation in the Publik Sector*.
- Nasution, A.H. dan Kartajaya, H. 2008. *Inovasi*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9/2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Secara Nasional.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/2016 tentang Kartu Identitas Anak.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19/2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7/2019 tentang Pelayanan Adminduk secara Daring.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96/2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah No. 38/2017 tentang Inovasi Daerah.
- Peraturan Presiden No. 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Dukcapil.
- Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Putri, A.A. 2017. Tipologi inovasi layanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(1).
- Saparita, R. *et.al*. 2015. *Membangun Inovasi untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: LPI Press.
- Solokkota.go.id. 2019. [Online] Dari: <https://infopublik.solokkota.go.id/disdukcapil-resmikan-pemakaian-tanda-tangan-elektronik-untuk-kk-dan-kartu-keluarga/> [Diakses: 11 Juli 2020].
- Solopos.com, 2020. [Online] Dari: <https://www.solopos.com/pandemic-corona-467-daerah-terapkan-layanan-administrasi-kependudukan-online-1057056> [Diakses: 16 Juni 2020].
- Soraya, T. dan Astuti, P. 2019. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online di Kabupaten Pati. *Journal of Politic and Government Studies*, 8 (4), hal 61-70.
- Suaranusantara.com. 2017. [Online] Dari: <https://suaranusantara.com/2017/07/17/apa-sih-layanan-adminduk-terintegrasi-simak-penjelasan-dirjen-dukcapil/> [Diakses: 11 Mei 2020].
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Surat Kementerian Dalam Negeri No. 443.1/2978/Dukcapil per 16 Maret 2020 (yang telah diperpanjang masa berlakunya hingga *pandemi Covid-19* berakhir).
- Trenggalekkab.go.id. 2020. Pemkab Trenggalek berinovasi gandeng Blojek untuk layanan pengiriman dokumen adminduk. [Online] Dari: <https://www.trenggalekkab.go.id/berita.php?page=620> [Diakses: 17 Juni 2020].
- Undang-Undang No. 24/2013 tentang Perubahan UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang No. 25/ 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Utomo, T.W.W. 2017. [Online] Dari: <https://www.slideshare.net/triwidodowutomo/inovasi-pelayanan-administrasi-kependudukan> [Diakses: 10 Juni 2020].
- Utomo, T.W.W. 2017. *Inovasi Harga Mati: Sebuah Pengantar Inovasi Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Warta.jogjakota.go.id. 2019. Pemko Yogyakarta, 5 in 1 Diterapkan di Seluruh Kecamatan. [Online] Dari: <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/6987> [Diakses: 15 Mei 2020].
- Wicaksono, K.W. 2018. Tipologi Inovasi Sektor Publik pada Tiga Program Inovatif: Tinjauan reflektif terhadap tiga inovasi pelayanan publik pemerintah kota Surabaya. *Jurnal Manajemen Publik*, 1(2).

## Hasil Penelitian

# STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI (*STRATEGY FOR INCREASING COMMUNITY PARTICIPATION FOR BANGGAI REGIONAL INNOVATION*)

*Irwan Moridu*

Universitas Muhammadiyah Luwuk  
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.79 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai 94711  
Sulawesi Tengah – Indonesia  
E-mail: irwanmoridu@gmail.com

*Diterima: 22 Juli 2020; Direvisi: 08 Oktober 2020; Disetujui: 22 Oktober 2020*

### ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi masyarakat serta strategi dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada berbagai program – program inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode analisis SWOT. Sampel yang dipergunakan berjumlah 100 orang yang tersebar di 5 Kecamatan terdekat dan paling terdampak pada Inovasi Daerah Kabupaten Banggai dimana masing – masing kecamatan diwakili oleh 20 Orang serta dari berbagai Inovasi Daerah yang ada penulis memilih 8 Sampel Inovasi Daerah yang paling banyak berhubungan langsung dengan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis SWOT Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai memiliki kekuatan yang dapat dipakai pada stretegi tertentu serta memanfaatkan peluang yang tepat dan secara bersamaan meminimalkan atau menghindari kelemahan dan ancaman yang ada. Posisi ini sangat menguntungkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dengan memperbaiki kondisi diatas rata-rata kemampuan sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dapat meminimalkan kelemahan serta memanfaatkan peran masyarakat dalam pemanfaatan inovasi daerah. Pemerintah Kabupaten Banggai memanfaatkan kekuatan dan peluang dengan menjalankan inovasi sesuai dengan visi dan misi, memanfaatkan seluruh sumber daya alam dan kearifan local serta memperkuat peran serta masyarakat. Hal ini sejalan dengan Visi Kabupaten Banggai yaitu mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pertanian Dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya, hal ini dapat tercapai dengan adanya peran serta masyarakat yang sehingga Visi Kabupaten Banggai bisa terwujud kedepannya.

**Kata Kunci:** partisipasi, masyarakat, inovasi, SWOT

### ABSTRACT

*The main objective of this research is to identify the supporting and inhibiting factors in community participation as well as strategies in increasing community participation in various innovative programs of the Regional Government of Banggai Regency. The research method uses descriptive method with the SWOT analysis method. The sample used amounted to 100 people spread in the 5 closest districts and most affected in the Regional Innovation of Banggai Regency where each district was represented by 20 people and from various Regional Innovations there the authors chose 8 Regional Innovation Samples that most directly related to the community. Based on the results of the SWOT analysis the Regional Government of Banggai Regency has strengths that can be used in certain strategies and take advantage of the right opportunities while simultaneously minimizing or avoiding existing weaknesses and threats. This position is very beneficial for the Regional Government of Banggai Regency by improving conditions above the average capability so that the Regional Government of Banggai Regency can minimize weaknesses and take advantage of the role of the community in utilizing regional innovations. Where the Banggai Regency Government utilizes its strengths and opportunities by carrying out innovations in accordance with its vision and mission, utilizing all natural resources and local wisdom and strengthening community participation. This is in line with the Vision of the Banggai Regency which is to realize the Banggai Regency as the Center for Agricultural and Maritime Economic Growth Based on Local Wisdom and*

*Culture, this can be achieved with the participation of the community so that the Banggai Regency Vision can be realized in the future.*

**Keywords:** participation, society, innovation, SWOT

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis tersebut dilaksanakan pada tingkatan pusat hingga tingkat daerah. Sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance*, salah satu prinsip yang harus dijalankan adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk pemerintahan yang demokratis di mana orang memiliki banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam rencana pembangunan, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Seperti halnya diungkapkan oleh (Anggraeni, 2019) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk ikut serta mendukung terselenggaranya pemerintahan yang diinginkan.

Proses implementasi sebuah kebijakan atau program merupakan hal penting dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan secara maksimal, semakin baik dalam implementasi sebuah program, maka tingkat keberhasilan sebuah program akan semakin tinggi dan sebaliknya jika pengimplementasian suatu program tidak maksimal, maka tingkat keberhasilan sulit untuk tercapai. Menurut Simon Sumanjyo Hutagalung (2017), tidak hanya pada aspek perencanaan, keterlibatan masyarakat juga menghendaki dukungan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum, ikut menikmati hasil-hasil pembangunan dan pelayanan, sekaligus memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintahan di daerah Kabupaten Banggai.

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (Shadily, 2005). Partisipasi berarti partisipasi seseorang atau sekelompok orang dalam proses pembangunan dalam bentuk deklarasi atau dalam bentuk kegiatan untuk menginformasikan semangat, energi, waktu, keahlian, modal dan bahan, serta mengambil keuntungan dari partisipasi tersebut dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2005). Selain partisipasi, prinsip-prinsip *good governance* lainnya seperti transparansi dan akuntabilitas harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Partisipasi menurut Fasli Jalal (2001) mungkin juga berarti bahwa pembuat keputusan atau kelompok masyarakat yang menyarankan berpartisipasi memberikan saran dan pendapat, artikel, keterampilan, peralatan dan layanan. Sihombing dalam Husnul & Wahyunadi (2017) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah hak dasar manusia untuk ikut berpartisipasi merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang menyajikan harapan kemerdekaannya sendiri.

Partisipasi terungkap sebagai manifestasi dari keinginan untuk mempromosikan melalui proses demokrasi desentralisasi yang diupayakan, antara lain, kebutuhan untuk rencana dari bawah (*bottom-up*) untuk menyertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan masyarakat (Tilaar, 2009).

Gaventa dan Valderma dalam Dwiningrum (2009) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi untuk menjadi perhatian bagi berbagai bentuk partisipasi warga dalam kebijakan dan pengambilan keputusan di beberapa bagian utama yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Rahim (2004) partisipasi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan *good governance*. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menarik partisipasi masyarakat adalah melalui pembenahan dibidang perencanaan pembangunan, dalam perencanaan pembangunan ini sebisa mungkin pemerintah melibatkan masyarakat dalam hal memberikan masukan dan pendapat terkait dengan perencanaan pembangunan.

Pemerintah daerah melakukan survei atau tinjauan ke daerah-daerah guna mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat guna menunjang perekonomian, pendidikan dan lain-lain hal ini dimaksudkan agar perencanaan atau pembangunan yang terjadi di daerah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal lain yang menyebabkan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran sudah dijelaskan dalam (Indonesia, n.d.-a).

Pasal 23 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan berpartisipasi dalam penyusunan dan pengambilan keputusan dalam anggaran. Adanya kemungkinan untuk terlibat masyarakat tidak hanya dalam komunitas perencanaan, tetapi juga

pada anggaran adalah hal yang positif dalam proses transparansi yang coba dibangun oleh pemerintah. Proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan telah dicoba direspon oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai.

Kabupaten Banggai adalah kabupaten yang telah mencoba menerapkan proses partisipasi publik di bidang perencanaan dan pengembangan. Penerapan dan pelibatan masyarakat dalam tahapan perencanaan merupakan inovasi pemerintah daerah Kabupaten Banggai dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat daerah Kabupaten Banggai. Partisipasi masyarakat di harapkan mampu menjadi inovasi dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan untuk membawa kemajuan daerah yang terbelakang secara ekonomi menjadi daerah yang mampu mensejahterakan masyarakatnya.

Pelaksanaan partisipasi yang sesuai dengan keadaan masing-masing daerah ada, Kabupaten Banggai memiliki karakteristik masing-masing. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran, Kabupaten Banggai menjadi salah satu daerah praktek terbaik. Hal ini tidak lepas dari peran Bappeda Litbang Kabupaten Banggai yang menerapkan perencanaan dan penganggaran, yang mengatur sinergisme perencanaan dan penganggaran. Peran Bappeda Litbang bertambah ketika Kabupaten Banggai menerapkan aturan tersendiri tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat, terutama dalam perencanaan. Hal ini merupakan inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Banggai.

Menurut Suryani (2008), inovasi dalam konsep umum tidak terbatas pada inovasi produk dapat juga berupa ide atau metode objek dirasakan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk kepada perubahan dianggap sebagai baru oleh orang-orang yang mengalaminya, sedangkan menurut Sutarno (2012), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa yang baru, dengan menggunakan tindakan baru. Inovasi tersebut terkait dengan metode-metode yang digunakan.

Inovasi daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 (Indonesia) adalah inovasi daerah terutama dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam kesejahteraan masyarakat. Target Inovasi Daerah menyebabkan percepatan pelaksanaan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah sedangkan di Kabupaten

Banggai sendiri masih banyak inovasi dari Pemerintah Daerah yang cenderung tidak di ikuti oleh masyarakat dikarenakan ketidaktahuan akan informasi yang berhubungan dengan inovasi tersebut.

Maka, inovasi daerah yang diusulkan tidak harus dibatasi oleh pemerintah daerah, tetapi telah dibuka seluas-luasnya, memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan inovasi daerah. Beberapa inovasi yang ada dalam pelaksanaan pembangunan dan cenderung masyarakat ikut berpartisipasi, seperti: pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan yaitu posyandu prakonsepsi, pelayanan rujukan. "Membuat Si Miskin Bisa Tersenyum" dari Badan Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk, pada Dinas Pertanian ada Inovasi Kartu Petani Sejahtera dan Dinas Perikanan ada Kartu Nelayan Sejahtera. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki inovasi "Jemput Bola Pelayanan Dokumen Kependudukan", dan dibidang lingkungan ada inovasi Gerakan Moral Pinasa. Pada Dinas Pendidikan ada peluncuran kamus bahasa Saluan dan bahasa Balantak berbasis android.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi masyarakat serta strategi dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada berbagai program-program inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Inovasi yang dilakukan tersebut tidak lepas juga dari pengaruh organisasi non pemerintah (*non-government stakeholder*) yang turut mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap perubahan yang terjadi. Seperti beberapa penelitian terkait partisipasi masyarakat oleh (Kali, 2011) dimana partisipasi masyarakat masih rendah terhadap pelaksanaan pembangunan karena sosialisasi yang kurang. sejalan dengan Budi Guntoro (2014) dimana partisipasi masyarakat masih belum berjalan secara optimal.

Sedangkan Meilinawati (2018) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat cukup tinggi terhadap program padat karya di Kecamatan Magelang Utara. Iswahyudi (2012) menyatakan bahwa kesadaran kritis dan komunikasi partisipatif memberikan pengaruh terhadap efektifitas partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan public. Hasil penelitian Ardiansyah (2014) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berada pada kategori Cukup Baik.

## METODE

Metode pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengamatan langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan gambaran

empiris dari hasil penelitian. Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap beberapa informan yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kondisi aspek-aspek penelitian. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh tanggapan dari informan tersebut.

Kuesioner yang disebar menggambarkan partisipasi masyarakat terhadap beberapa inovasi yang ada di Kabupaten Banggai yang dijadikan sampel, yaitu: 1) Adanya Kamus Bahasa Saluan dan Balantak Berbasis Android; 2) Kartu Petani Sejahtera; 3) Kartu Nelayan Sejahtera; 4) Jemput Bola Pelayanan Dokumen Kependudukan; 5) Gerakan Moral Pinasa; 6) Sistem Informasi Manajemen, Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan (SIMRAL); 7) Posyandu Pra-konsepsi; dan, 8) Membuat Si Miskin Bisa Tersenyum.

Lima Kecamatan yang terpusat sebagai lokasi penelitian yang mudah di jangkau, sehingga sampel di tentukan sebanyak 100 responden yang akan dikumpulkan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.** Jumlah sampel masing-masing Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	Luwuk	20
2	Luwuk Selatan	20
3	Luwuk Utara	20
4	Nambo	20
5	Luwuk Timur	20
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>

Perhitungan terhadap data yang sudah diberikan skor berdasarkan jenis data yang dikumpulkan yaitu data kualitatif yang kemudian diubah menjadi kuantitatif, maka teknik yang digunakan adalah analisis statistik,

dalam penelitian ini menyangkut persepsi/penelitian analisis partisipasi masyarakat dalam Inovasi di Kabupaten Banggai. Adapun skala likert dimaksud menggunakan prosedur penerapan sebagai berikut: a) Mentabulasi jawaban responden; b) Menghitung batas nilai awal dan nilai akhir dengan mencari indeks minimal, indeks maksimal serta interval dengan rumus sebagai berikut:

a. Indeks Minimal =  $Bt \times P \times n$

b. Indeks Maksimal =  $Bb \times P \times n$

c. Interval =  $\frac{Imax - Imin}{jumlah\ indeks}$

Keterangan:

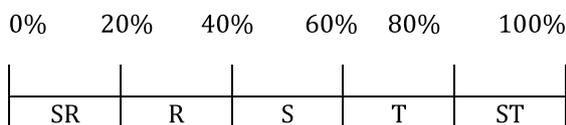
Bb = Skor tertinggi

Bt = Skor terendah

P = Variabel yang diteliti

n = Jumlah responden

a. Membuat skala likert sebagai berikut:



Sumber : Riduwan (2002)

Keterangan :

81- 100% (ST) = Partisipasi masyarakat tergolong dalam kategori sangat tinggi

61- 80% (T) = Partisipasi masyarakat tergolong dalam kategori tinggi

41- 60% (S) = Partisipasi masyarakat tergolong kategori sedang

21- 40% (R) = Partisipasi masyarakat tergolong kategori rendah

0-20% (SR) = Partisipasi masyarakat tergolong kategori sangat rendah.

b. Analisis SWOT

**Tabel 2.** Strategi Pembobotan dan Rating Analisis Swot

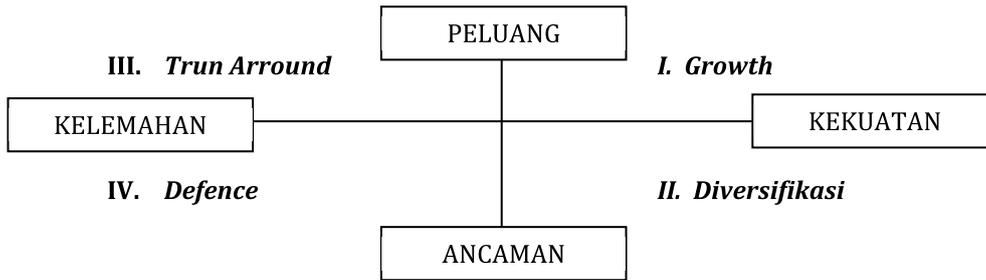
Faktor Strategi	Bobot	Rating	Nilai
<b>Internal :</b>			
<i>Strenght (S)</i>	S1 (0,0-1,0)	S2 (1-4)	<b>S1 x S2 = S3</b>
<i>Weakness (W)</i>	W1 (0,0-1,0)	W2 (1-4)	<b>W1 x W2 = W3</b>
<b>Eksternal :</b>			
<i>Opportunity</i>	O1 (0,0-1,0)	O2 (1-4) T2	<b>O1 x O2 = O3</b>
<i>Threats</i>	T1 (0,0-1,0)	(1-4)	<b>T1 x T2 = T3</b>
<b>Sub Total</b>	<b>1,0</b>		

Keterangan :

a. Bobot dari internal dan eksternal antara 0,0 sampai dengan 1,0

b. Rating dari internal dan eksternal antara 1 sampai 4

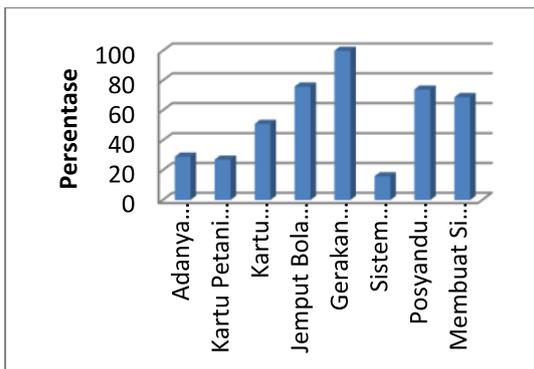
c. Nilai dari internal dan eksternal adalah hasil perkalian antara bobot dengan rating.



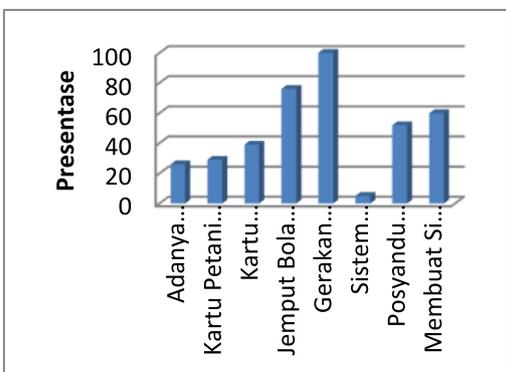
Gambar 1. Diagram Analisis Swot

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang telah ditemukan bahwa sebagian besar partisipasi masyarakat masih cenderung kurang terhadap beberapa inovasi yang ada di Kabupaten Banggai, seperti system informasi manajemen (SIMRAL) yang hanya dipergunakan oleh beberapa OPD yang ada di Kabupaten Banggai, sedangkan untuk Gerakan Moral Pinasa (Piana Sampah Ala) atau Lihat Sampah diambil itu lebih cenderung diketahui dan masyarakat ikut berpartisipasi, hampir 100 responden semua mengetahui dan melaksanakannya.

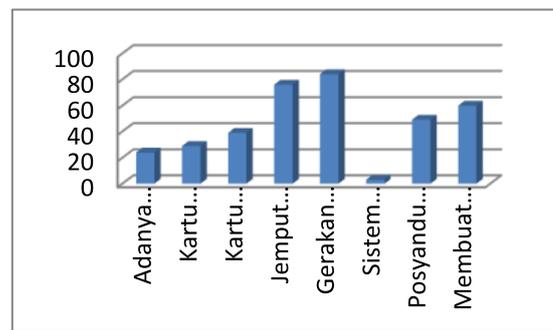


Gambar 2. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Inovasi Daerah Kabupaten Banggai

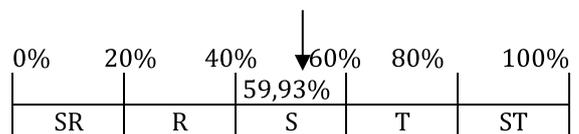


Gambar 3. Keikutsertaan Masyarakat Terhadap Beberapa Inovasi Daerah Kabupaten Banggai

Gambar 2 dan gambar 3 menunjukkan grafik persentase atas pengetahuan dan keikutsertaan masyarakat terhadap beberapa Inovasi yang ada di Kabupaten Banggai.

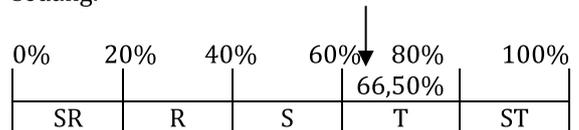


Gambar 4. Manfaat Yang Di Rasakan Oleh Masyarakat Terhadap Beberapa Inovasi Daerah Kabupaten Banggai



Gambar 5. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan inovasi Daerah Kabupaten Banggai

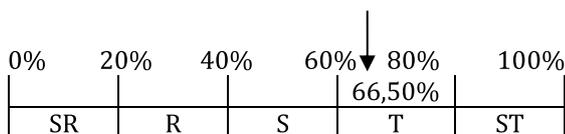
Berdasarkan skala likert pada Gambar 5 dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan inovasi Daerah Kabupaten Banggai termasuk dalam kategori sedang.



Gambar 6. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan inovasi Daerah Kabupaten Banggai

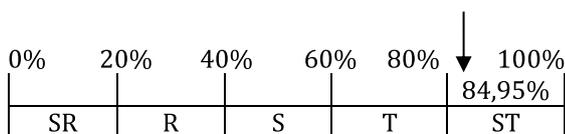
Berdasarkan skala likert pada Gambar 6 dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan inovasi Daerah

Kabupaten Banggai termasuk dalam kategori tinggi.



**Gambar 7.** Partisipasi masyarakat dalam evaluasi inovasi Daerah Kabupaten Banggai.

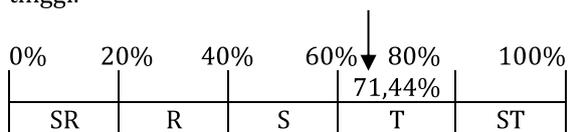
Berdasarkan skala likert pada Gambar 7 dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam evaluasi inovasi Daerah.



**Gambar 8.** Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil inovasi Daerah Kabupaten Banggai

Berdasarkan skala likert pada Gambar 8 dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil inovasi Daerah Kabupaten Banggai termasuk dalam kategori sangat tinggi. Selanjutnya, skala likert pada Gambar 9 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam inovasi Daerah

Kabupaten Banggai termasuk dalam kategori tinggi.



**Gambar 9.** Partisipasi masyarakat dalam inovasi Daerah Kabupaten Banggai

Sebagaimana diketahui bahwa inovasi daerah tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan dari kegiatan inovasi Daerah Kabupaten Banggai merupakan cermin dari keberhasilan pembangunan daerah.

Apabila inovasi daerah dilaksanakan di wilayah perkotaan yang dalam konsep perkembangan daerah, maka sudah jelas bahwa partisipasi masyarakatlah yang menjadi kunci keberhasilannya. Namun demikian peran serta masyarakat dalam proses inovasi Daerah tentunya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam inovasi daerah tersebut, faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam inovasi Daerah Kabupaten Banggai adalah faktor interen dan faktor.

**Tabel 3.** Matriks SWOT Partisipasi Masyarakat Dalam Inovasi Daerah Kabupaten Banggai

Faktor Internal	Faktor Eksternal
<p><b>Kekuatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banggai</li> <li>Potensi wilayah Kabupaten Banggai pada Sektor Perikanan.</li> <li>Potensi wilayah Kabupaten Banggai pada Sektor Pertanian.</li> <li>Masyarakat Kabupaten Banggai yang masih memiliki kearifan lokal</li> <li>Masih kuatnya budaya lokal di Kabupaten Banggai</li> </ol>	<p><b>Peluang :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat dapat menggunakan inovasi untuk membantu kegiatan sehari – hari.</li> <li>Masyarakat dapat meningkatkan penghasilan.</li> <li>Mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan.</li> <li>Memberikan pengetahuan tentang pentingnya inovasi untuk masyarakat.</li> <li>Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Banggai</li> </ol>
<p><b>Kelemahan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya SDM yang mampu dan terampil.</li> <li>Sistem Pendataan Yang Belum Maksimal.</li> <li>Keterbatasan Anggaran.</li> <li>Fasilitas pendukung masih kurang.</li> <li>Prosedur pelayanan yang cukup panjang.</li> </ol>	<p><b>Ancaman :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan inovasi.</li> <li>Adanya kejenuhan dari masyarakat akan prosedur yang panjang.</li> <li>Masih banyak tingkat penghasilan masyarakat yang rendah.</li> <li>Masih banyak masyarakat yang berpendidikan rendah.</li> <li>Masih ada masyarakat yang kurang mengetahui akan adanya inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</li> </ol>

**Tabel 4.** Ringkasan Matriks IFAS

<b>Faktor Internal</b>	<b>Bobot</b>	<b>Rating</b>	<b>Bobot dan Rating</b>	<b>Komentar</b>
<b>Kekuatan :</b>				
1. Adanya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banggai	0,16	4	0,64	Pelaksanaan Inovasi Sesuai dengan Visi dan Misi.
2. Potensi wilayah Kabupaten Banggai pada Sektor Perikanan.	0,12	3	0,36	Adanya Perikanan Tangkap, Budidaya, Dan Tambak.
3. Potensi wilayah Kabupaten Banggai pada Sektor Pertanian.	0,12	3	0,36	Banyak Lahan Pertanian.
4. Masyarakat Kabupaten Banggai yang masih memiliki kearifan lokal	0,11	3	0,33	Masyarakat masih memiliki nilai dan norma yang berlaku.
5. Masih kuatnya budaya lokal di Kabupaten Banggai	0,11	3	0,33	Masih melekat budaya lokal Kabupaten Banggai di Masyarakat
<b>Total Kekuatan</b>	<b>0,62</b>		<b>2,02</b>	
<b>Kelemahan :</b>				
1. Kurangnya SDM yang mampu dan terampil.	0,07	2	0,14	Perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan.
2. Sistem Pendataan Yang Belum Maksimal.	0,06	2	0,12	Masih banyak masyarakat yang belum terdata dengan baik.
3. Keterbatasan Anggaran.	0,08	2	0,16	Inovasi yang diberikan masih kurang karena anggaran yang tidak cukup.
4. Fasilitas pendukung masih kurang.	0,10	3	0,30	Inovasi yang ada belum semua dibarengi dengan fasilitas pendukung.
5. Prosedur pelayanan yang cukup panjang.	0,07	2	0,14	Masih perlu adanya perubahan prosedur
<b>Total Kelemahan</b>	<b>0,38</b>		<b>0,86</b>	
<b>Total</b>	<b>1,00</b>		<b>2,66</b>	

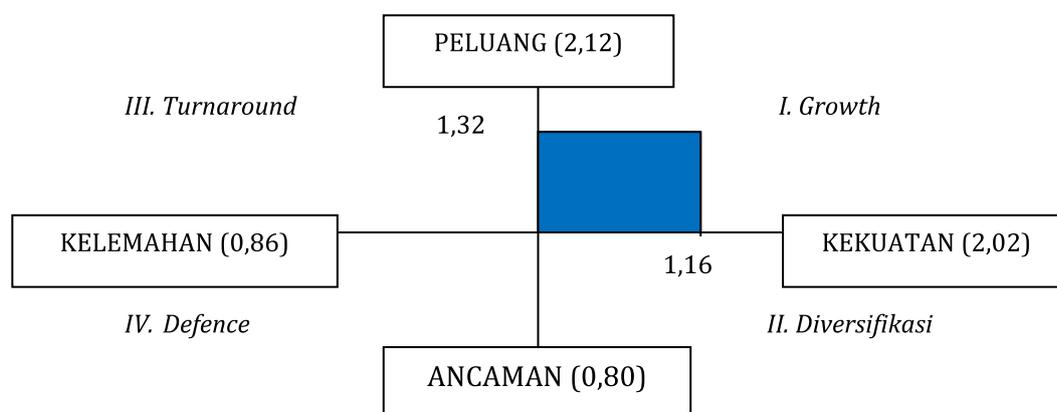
Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi partisipasi masyarakat Kabupaten Banggai dalam inovasi Daerah. Analisis ini mengacu pada beberapa logika yang mampu menghasilkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersama-sama juga mampu meminimalkan kelemahan (*Weakness*) serta ancaman (*Threat*). Tabel 3 menyajikan rincian mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari aspek partisipasi masyarakat. Sedangkan perhitungan terhadap analisis SWOT faktor internal dan eksternal disajikan pada Tabel 4.

Tabel 5 yang menyajikan matriks EFAS menunjukkan faktor *Strength* (Kekuatan)

mempunyai total nilai skor 2,02 sedang *Weakness* (Kelemahan) mempunyai total nilai skor 0,86. Seperti pada IFAS, maka pada faktor strategis eksternal yaitu EFAS juga dilakukan penjelasan yang hasilnya ada pada Tabel 6 menunjukkan bahwa untuk faktor-faktor *Opportunity* (Peluang) nilai skornya 2,12 dan faktor *Threat* (Ancaman) 0,80. Selanjutnya nilai total skor dari masing-masing faktor dapat dirinci, *Strength*: 2,02, *Weakness*: 0,86, *Opportunity*: 2,12 dan *Threat*: 0,80. Maka diketahui nilai *Strength* diatas nilai *Weakness* selisih (+) 1,16 dan nilai *Opportunity* diatas nilai *Threat* selisih (+) 1,32.

**Tabel 5.** Ringkasan Matriks EFAS

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Bobot dan Rating	Komentar
<b>Peluang :</b>				
1. Masyarakat dapat menggunakan inovasi untuk membantu kegiatan sehari – hari.	0,13	3	0,39	Beberapa inovasi dapat membantu pekerjaan masyarakat.
2. Masyarakat dapat meningkatkan penghasilan.	0,13	3	0,39	Dengan adanya motivasi dapat meningkatkan penghasilan.
3. Mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan.	0,13	4	0,52	Masyarakat mudah dalam berurusan dengan pelayanan pemerintah.
4. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya inovasi untuk masyarakat.	0,10	3	0,30	Masyarakat mengetahui manfaat inovasi yang diberikan oleh pemerintah.
5. Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Banggai	0,13	4	0,52	Sumber daya alam Kabupaten Banggai yang cukup melimpah.
<b>Total Peluang</b>	<b>0,62</b>		<b>2,12</b>	
<b>Ancaman :</b>				
1. Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan inovasi.	0,07	2	0,14	Masyarakat belum terlalu memahami Inovasi.
2. Adanya kejenuhan dari masyarakat akan prosedur yang panjang.	0,04	1	0,04	Prosedur yang panjang dan lama membuat masyarakat tidak berminat.
3. Masih banyak tingkat penghasilan masyarakat yang rendah.	0,08	2	0,16	Kurangnya keahlian masyarakat dan lapangan kerja.
4. Masih banyak masyarakat yang berpendidikan rendah.	0,10	3	0,30	Kepedulian masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
5. Masih ada masyarakat yang kurang mengetahui akan adanya inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	0,08	2	0,16	Sosialisasi adanya inovasi perlu ditingkatkan
<b>Total Ancaman</b>	<b>0,38</b>		<b>0,80</b>	
<b>Total Faktor Eksternal</b>	<b>1,00</b>		<b>2,92</b>	



**Gambar 10.** Diagram Analisis Swot

Diagram SWOT dari hasil identifikasi factor internal dan eksternal disajikan pada Gambar 10. Diagram cartesius menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai telah berada pada jalur yang tepat dengan terus melakukan strategi pengembangan (growth) inovasi yang

dapat meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam melihat manfaat dari Inovasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. Strategi inovasi daerah disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6.** Matriks Strategi Inovasi Daerah Kabupaten Banggai

<i>Internal Factor Analysis Strategy (IFAS)</i>	<b>Strength (S) Kekuatan Internal</b>	<b>Weakness (W) Kelemahan Internal</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banggai</li> <li>2. Potensi wilayah Kabupaten Banggai pada Sektor Perikanan.</li> <li>3. Potensi wilayah Kabupaten Banggai pada Sektor Pertanian.</li> <li>4. Masyarakat Kabupaten Banggai yang masih memiliki kearifan lokal</li> <li>5. Masih kuatnya budaya lokal di Kabupaten Banggai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya SDM yang mampu dan terampil.</li> <li>2. Sistem Pendataan Yang Belum Maksimal.</li> <li>3. Keterbatasan Anggaran.</li> <li>4. Fasilitas pendukung masih kurang.</li> <li>5. Prosedur pelayanan yang cukup panjang.</li> </ol>
<i>Eksternal Factor Analysis Strategy (EFAS)</i>	<b>Opportunities (O) Peluang Eksternal</b>	<b>Strategi (WO)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat dapat menggunakan inovasi untuk membantu kegiatan sehari – hari.</li> <li>2. Masyarakat dapat meningkatkan penghasilan.</li> <li>3. Mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan.</li> <li>4. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya inovasi untuk masyarakat.</li> <li>5. Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Banggai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kemampuan SDM Melalui Pelatihan.</li> <li>2. Mendata Jumlah Masyarakat Kabupaten Banggai dengan lebih menyeluruh dan terperinci.</li> <li>3. Menyesuaikan anggaran untuk pelaksanaan Inovasi.</li> <li>4. Menambah sarana dan prasarana penunjang Inovasi.</li> <li>5. Mempermudah prosedur pelayanan kepada masyarakat.</li> </ol>
<b>Treath (T) Ancaman Eksternal</b>	<b>Strategi (ST)</b>	<b>Strategi (WT)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan inovasi.</li> <li>2. Adanya kejenuhan dari masyarakat akan prosedur yang panjang.</li> <li>3. Masih banyak tingkat penghasilan masyarakat yang rendah.</li> <li>4. Masih banyak masyarakat yang berpendidikan rendah.</li> <li>5. Masih ada masyarakat yang kurang mengetahui akan adanya inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat inovasi yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat guna peningkatan penghasilan dan tingkat pendidikan.</li> <li>2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan adanya inovasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah</li> </ol>	<p>Meminimalkan kelemahan yang ada sesuai dengan ancaman yang segera atau akan terjadi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan prosedur yang cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat.</li> <li>2. Meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat dalam berinovasi.</li> </ol>

Hasil analisis menunjukkan bahwa Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Analisis SWOT menawarkan 4 strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam inovasi daerah.

Strategi SO (Mendukung Strategi *Growth*). Strategi ini dibuat berdasarkan pemikiran pentingnya Inovasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi SO yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Banggai yaitu: a) Menjalankan Inovasi sesuai dengan Visi Dan Misi Pemerintah Kabupaten Banggai; b) Strategi Memanfaatkan seluruh Potensi Sumber Daya Alam dengan Diimbangi Kearifan dan Budaya Lokal; dan, c) Memperkuat Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Kabupaten Banggai Dengan Memanfaatkan Inovasi yang ada.

Strategi ST (Mendukung Strategi *Diversifikasi*). Adalah Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Strategi ST ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yaitu: a) Membuat inovasi yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat guna peningkatan penghasilan dan tingkat Pendidikan, dan b) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan adanya inovasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Strategi WO (Mendukung Strategi *Turn-Around*). Strategi ini dapat di aplikasikan dari adanya peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WO yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai antara lain: a) Meningkatkan Kemampuan SDM Melalui Pelatihan; b) Mendata Jumlah Masyarakat Kabupaten Banggai dengan lebih menyeluruh dan terperinci; c) Menyesuaikan anggaran untuk pelaksanaan Inovasi; d) Menambah sarana dan prasarana penunjang Inovasi; dan, e) Mempermudah prosedur pelayanan kepada masyarakat.

Strategi WT (Mendukung Strategi *Defensif*). Strategi ini merupakan kegiatan yang bersifat defensif serta berusaha dalam meminimalkan adanya kelemahan yang ada dan menghindari adanya ancaman. Strategi WT ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai antara lain: a) Menciptakan prosedur yang cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat; dan, b) Meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat dalam berinovasi.

Strategi yang paling tepat digunakan adalah tetap menjalankan inovasi yang telah ada secara efektif adalah strategi SO. Sebagian besar

masyarakat lebih mengetahui Inovasi Gerakan Moral Pinasa dibandingkan dengan Inovasi lain yang ada di Kabupaten Banggai. Tingkat partisipasi masyarakat di golongan dalam kategori tinggi dengan tingkat presentase sebesar 71,44%. Berdasarkan analisis internal dan eksternal Inovasi Daerah beserta diagram cartesius dapat diperoleh bahwa yang menjadi strategi utama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai adalah strategi *Growth* (perkembangan) dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dapat mengembangkan inovasi yang ada dengan cara mengembangkan kemampuan inovasi tersebut sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Banggai serta memanfaatkan peran serta masyarakat yang lebih baik. Berdasarkan matriks SWOT.

Strategi yang didapatkan diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam inovasi daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hikmawati (2013) yang menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat yang luas dapat bermanfaat bagi pemerintahan lokal agar menjadi lebih transparan dan akuntabel, sebaliknya aturan-aturan yang top-down dari para elite dapat mematikan semangat masyarakat sipil. Penelitian Melis et al., (2016) juga menekankan bahwa faktor pendapatan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat khususnya dalam bentuk sumbangan dana kegiatan.

## KESIMPULAN

Faktor pendukung untuk mendukung partisipasi masyarakat, yaitu: visi dan misi Pemerintah; potensi sector perikanan dan pertanian; kearifan lokal; dan, budaya. Sedangkan yang menjadi factor penghambat, yaitu: minimnya minat masyarakat menggunakan hasil inovasi; prosedur tidak efisien; rendahnya pendapatan masyarakat; tingkat Pendidikan masih rendah; inovasi pemerintah daerah belum diketahui masyarakat. Strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam inovasi daerah di Kabupaten Banggai adalah adalah strategi SO.

## REKOMENDASI

1. Pemerintah Kabupaten Banggai harus lebih aktif dalam menjalankan inovasi, terutama untuk peningkatan pengetahuan dan penerapan atas inovasi yang telah di sampaikan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di pelosok daerah yang masih sulit untuk terjangkau yang sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banggai.

2. Perlu adanya strategi dari Pemerintah Kabupaten Banggai dalam memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam dengan diimbangi kearifan dan budaya local, karena masih banyak budaya dan potensi alam yang belum dimanfaatkan untuk berbagai inovasi baru khususnya bagi masyarakat daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Banggai perlu memperkuat peran serta masyarakat dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Banggai dengan memanfaatkan inovasi yang ada dengan cara melakukan penyuluhan maupun sosialisasi terkait berbagai macam inovasi dari Daerah untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. F. 2019. Partisipasi masyarakat dalam program sidekem (sistem informasi desa kawasan pemalang) di kabupaten pemalang (relawan tik dan sistem informasi desa kawasan pemalang). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), hal 1689–1699.
- Ardieansyah, W. 2014. *Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis*. hal 259–273.
- Budi Guntoro, T. W. A. N. P. 2014. Performance E-Government Untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kawistara*, 4(3).
- Dwiningrum, S. I. A. 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Pustaka Pelajar* [Online] Dari: <https://pustakapelajar.co.id/buku/desentralisasi-dan-partisipasi-masyarakat-dalam-pendidikan/>
- Fasli Jalal, D. S. 2001. *Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah* [Online] Dari: <http://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=73248>
- Hikmawati. 2013. Partisipasi Publik Dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), hal 1–12.
- Husnul, Imtihan. Wahyunadi, D. 2017. PERAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Musrenbang Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 2016). *Jurnal Trunojoyo.Ac.Id*, 11(1).
- Iswahyudi, F. 2012. Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Perbaikan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat pada Dinas. *Jurnal Borneo Administrator*, 8(3), hal 310–340.
- Kali, A. 2011. Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Dan Pembangunan PLTMH Di Paneki Desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. *Mektek*, XIII(3), hal 161–168.
- Meilinawati, D. T. 2018. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Program Padat Karya di Kecamatan Magelang Utara. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 02(02), hal 84–96.
- Melis, Muthalib, A. A., & Apoda. 2016. Analisis partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa di kecamatan tongauna kabupaten konawe. *Jurnal Ekonomi (JE)*, 1(1), hal 67–79.
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
- Rahim, E. I. 2004. *Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik* [Online] Dari: <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Shadily, J. M. E. & H. 2005. *Kamus Inggris Indonesia, Cetakan XXVI*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Simon Sumanjoyo Hutagalung, I. R. 2017. Analisis inovasi pelayanan publik (study implementasi program rumah sakit keliling provinsi lampung pada daerah operasional kabupaten pesisir barat). *Prosiding Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, hal 215–226.
- Sumaryadi, I. N. 2005. *Perencanaan pembangunan daerah otonom & pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Suryani, T. 2008. *PERILAKU KONSUMEN; Implikasi pada Strategi Pemasaran* [Online] Dari: <https://adoc.tips/perilaku-konsumen-implikasi-pada-strategi-pemasaran.html>
- Sutarno. 2012. *Sera-serbi manajemen bisnis* (Ed. 1). Jakarta: Graha Ilmu.
- Tilaar, H. 2009. *Kekuasaan dan pendidikan: manajemen pendidikan nasional dalam pusran kekuasaan* (Cet. 1.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## Tinjauan Kepustakaan

### MODEL EKOSISTEM BISNIS PARIWISATA TERPADU BERBASIS STRATEGI 5 JALUR

#### *(INTEGRATED TOURISM BUSINESS ECOSYSTEM MODEL BASED ON 5-TRACK STRATEGY)*

*Edhie Baskoro Yudhoyono\**, *Hermanto Siregar\**, *Noer Azam Achsani\**, *Tony Irawan\*\**

\*Sekolah Bisnis IPB University  
Jl. Raya Pajajaran, Bogor  
Jawa Barat - Indonesia  
Email: ebydmb12ipb@gmail.com

\*\*Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University  
Jl. Kamper Gedung FEM, Kampus IPB Darmaga, Bogor

*Diterima: 16 September 2020; Direvisi: 10 Oktober 2020; Disetujui: 25 Oktober 2020*

### ABSTRAK

Kegiatan pariwisata merupakan sektor strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Negara. Tujuan dari studi ini adalah menggambarkan pembangunan ekosistem bisnis pariwisata terpadu dengan melakukan inovasi pengembangan strategi berbasis strategi 5 jalur. Penulisan ini merupakan hasil pemikiran yang didasarkan pada studi literatur dari berbagai sumber, termasuk didalamnya hasil kajian empirik dari beberapa penelitian sebelumnya. Strategi 5 (lima) jalur merupakan pengembangan dari strategi 4 (empat) jalur yang terdiri dari *pro growth*, *pro job*, *pro poor*, dan *pro-environment* yang merupakan pemikiran dan kebijakan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam periode kepemimpinannya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat, maka strategi ini ditambahkan strategi jalur yang ke-5 yaitu *pro technology*. Strategi ini diterapkan dalam model ekosistem pariwisata terpadu agar meningkatkan permintaan barang dan jasa pada sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja serta mengurangi kemiskinan daerah lokasi pariwisata dengan pemanfaatan TIK dalam peningkatan kinerja pariwisata serta mendorong pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Ekosistem bisnis pariwisata harus dapat dipahami dengan baik agar dapat mengalokasikan sumber daya tepat sasaran dengan memilih prioritas yang dikembangkan terlebih dahulu didalam pariwisata. Pariwisata akan berkontribusi maksimal pada perekonomian negara, bila dikembangkan secara berencana dan terpadu, serta diperlukan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan. Pariwisata terpadu harus mengoptimalkan sumber daya lokal, kegiatan, produk, industri produksi dan jasa, dan masyarakat lokal yang partisipatif sebagai upaya untuk memadukan pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan fasilitas ekonomi lainnya di dalam satu kawasan sebagai sebuah destinasi pariwisata.

**Kata kunci:** ekosistem, binis, pariwisata, strategi 5 jalur

### ABSTRACT

*Tourism activity is a strategic sector which is expected to contribute significantly to the country's economy. The purpose of this study is to describe the development of an integrated tourism business ecosystem by innovating a strategy development based on a 5 track strategy. This writing is the result of thinking based on literature studies from various sources, including the results of empirical studies from several previous studies. The 5 (five) track strategy is the development of a 4 (four) track strategy consisting of pro growth, pro job, pro poor, and pro-environment which are the thoughts and policies of President Susilo Bambang Yudhoyono during his leadership period. Along with the rapid development of information technology, this strategy is added to the 5th track strategy, namely pro technology. This strategy is applied in the model of an integrated tourism ecosystem in order to increase demand for goods and services in the tourism sector and other sectors that have an impact on increasing economic growth, absorption of labor and reducing*

*poverty in tourism locations by utilizing ICT in improving tourism performance and encouraging more development. environmentally friendly. The tourism business ecosystem must be well understood in order to allocate resources right on target by selecting priorities to be developed first in tourism. Tourism will contribute maximally to the country's economy, if it is developed in a planned and integrated manner, and collaboration between all stakeholders is required. Integrated tourism must optimize local resources, activities, products, production and service industries, and participatory local communities as an effort to integrate the development and management of tourist attractions, tourism facilities and other economic facilities in one area as a tourism destination.*

**Keywords:** ecosystem, business, tourism, 5 track strategy

**PENDAHULUAN**

Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Sektor pariwisata mendorong sektor lain berkontribusi sebagai penyokong kegiatan pariwisata yang ada seperti transportasi, jasa travel, kuliner, perhotelan, dan industri rumah kerajinan tangan daerah yang akan melibatkan banyak masyarakat.

Pariwisata berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jalur termasuk pendapatan mata uang asing, menarik investasi internasional, meningkatkan pendapatan pajak dan menciptakan lapangan kerja tambahan (Gökovali & Bahar, 2006; Jayathilake, 2013; Kadir & Karim, 2012). Data rangking devisa pariwisata terhadap 11 komoditas ekspor terbesar menunjukkan peningkatan menjadi ranking 4 setelah minyak dan gas bumi, batubara serta kepala sawit pada tahun 2011 s.d 2015 (Kementerian Pariwisata, 2016). Hal ini menunjukkan pentingnya sektor pariwisata sebagai salah satu sumber

penerimaan devisa. Adapun data tersebut disajikan pada Tabel 1.

Pada tahun 2017 berdasarkan laporan Survei Angkatan Kerja Nasional Indonesia 2018, jumlah tenaga kerja pada industri pariwisata mencapai 12,74 juta orang atau 10,53 persen terhadap total tenaga kerja nasional yang berjumlah 121,02 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2018). Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan otoritas terkait lainnya sepakat untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata.

Ada tiga alasan utama yang yang membuat BI memandang pariwisata perlu didorong. *Pertama*, pariwisata adalah penyumbang devisa ketiga terbesar setelah CPO dan batubara sehingga potensinya ke depan sangat besar untuk devisa. Karena itu, secara langsung bisa mengurangi defisit transaksi berjalan.

*Kedua*, sektor pariwisata bisa pula untuk menopang ekonomi Indonesia ke depan. Ini mengingat pariwisata memiliki karakteristik *quick yielding* yang dapat menghasilkan devisa lebih cepat dibandingkan dengan kegiatan ekspor yang dilakukan secara konvensional. Alasan *ketiga* adalah sektor pariwisata juga bisa mendorong kesempatan kerja dan mengatasi kemiskinan.

**Tabel 1.** Rangking Devisa Pariwisata terhadap 11 Ekspor Barang Terbesar Tahun 2011-2105

Jenis Komoditas	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
	Rank	Nilai (juta USD)								
Minyak & Gas Bumi	1	41277.10	1	36977.00	1	32633.20	1	30318.80	1	18552.10
Batu bara	2	27221.80	2	26166.30	2	24501.40	2	20819.30	2	15943.00
Minyak kelapa sawit	3	17261.30	3	18845.00	3	15839.10	3	17464.90	3	15385.20
Karet olahan	4	14258.20	4	10394.50	5	9316.60	6	7021.70	7	5842.00
Pariwisata	5	8554.39	5	9120.85	4	10054.15	4	11166.13	4	12225.89
Pakaian jadi	6	7801.50	6	7304.70	6	7501.00	5	74500.90	5	7371.90
Alat listrik	7	7364.30	7	6481.90	7	6418.60	8	6259.10	8	5644.80
Tekstil	8	5.563,30	8	5278.10	9	5293.60	9	5379.70	9	4996.00
MaknanOlahan	9	4802.10	9	5135.60	8	5434.80	7	6486.80	6	6456.30
Bahan Kimia	10	4630.00	11	3636.30	12	3501.60	11	3853.70	12	2807.60
Kertas dan barang dr kertas	11	4214.40	10	3972.00	10	3802.20	12	3780.00	11	3605.50
Kayu Olahan	12	3288.90	12	3337.70	11	3514.50	10	3914.10	10	3815.80

Sumber: Kemenparekraf (2016)

PRO-GROWTH WITH EQUITY	PRO-JOBS	PRO-POOR	PRO-ENVIRONMENT
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan Ekonomi ~5,6%</li> <li>- Income/Kapita Rp. 41,9 Juta (Naik 4X)</li> <li>- APBN ~Rp. 1800 Triliun (Naik 4X)</li> <li>- Rasio Hutang Terjaga (24% PDB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengangguran Turun (5,7% / 7,2 Juta Jiwa)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemiskinan Turun (10,96% / 27,7 Juta Jiwa)</li> <li>- Program Pro-Rakyat : PKH, Raskin, KUR, PNPM, BLT, Beasiswa, Jamkesmas, DII</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanaman 1 Milyar Pohon/Tahun</li> <li>- Rumah Pangan Lestari</li> </ul>



**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
 "SUSTAINABLE GROWTH WITH EQUITY"  
 MEMBUTUHKAN ADOPTI TEKNOLOGI DALAM  
 MENGHADAPI TANTANGAN  
 "INDUSTRY 4.0" DAN "SUPER-SMART SOCIETY 5.0"**

**Gambar 1.** Rangkuman Keberhasilan Strategi 4 Jalur Pada Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Sebagai Presiden RI pada Periode Tahun 2004-2014

Sumber: Ahmad & Zainal (2011)

Pariwisata memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berapa jalur (Brida et al., 2010). Pertama, sektor pariwisata sebagai penghasil devisa untuk memperoleh barang modal yang digunakan dalam proses produksi (McKinnon, 1964). Kedua, pengembangan pariwisata menstimulus investasi dibidang infrakstruktur (Sakai, 2006). Ketiga, pengembangan sektor pariwisata mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lainnya melalui *direct*, *indirect*, dan *induced effect* (Dwyer et al., 2016). Keempat, pariwisata ikut berkontribusi dalam peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan (Lee & Chang, 2008). Kelima, pariwisata menyebabkan *positive economies of scale* (Weng & Wang, 2006).

Pariwisata juga merupakan faktor penting dalam penyebaran *technical knowledge*, mendorong *research and development*, dan akumulasi modal manusia (Blake et al., 2006) Strategi 5 jalur yang digunakan didalam penelitian ini direfleksikan pengalaman Indonesia di masa yang lalu. Salah satunya adalah strategi besar pembangunan yang diterapkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan selanjutnya dikenal sebagai strategi 4 jalur atau *Four Track Strategy*. Strategi 4 Jalur terdiri dari: *Pro Growth*, *Pro Job*, *Pro Poor*, dan *Pro Environment*, telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik dari sisi permintaan (demand) maupun penawaran (supply).

Rangkuman keberhasilan 4 jalur strategi ini dalam Era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat dilihat pada gambar 1. Gambar 1 menunjukkan keberhasilan 4 strategi jalur, yang bisa dipelajari serta diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam studi ini digunakan di sektor pariwisata. Studi ini dilakukan untuk melihat kajian dari *Four-Track Strategy* pada sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomian maupun kesejahteraan rakyat di Indonesia.

Studi ini menambahkan 1 jalur baru bersamaan dengan hadirnya tantangan baru seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, yaitu Revolusi Industri 4.0 dan *Super Smart Society 5.0*. Selain itu, penerapan *Four-Track Strategy* ke depan membutuhkan keterpaduan dalam ekosistem bisnis, terutama diantara stakeholders (Kolaborasi Pentahelix-Pemerintah, Masyarakat, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Media). Sehingga dalam studi ini 4 strategi jalur diatas ditambahkan 1 strategi jalur yaitu pro technology. Sehingga strategi 5 jalur akan diterapkan dalam pengembangan ekosistem bisnis pariwisata terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ekosistem bisnis merupakan komunitas ekonomi yang didasari oleh interaksi antara organisasi dan individu (organisme dalam dunia bisnis). Ekosistem tidak hanya mencakup bisnis utama (*core business*) dan pengembangan perusahaan, namun juga mencakup pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti asosiasi

industri, pemerintah, dan investor (Tang & Lyons, 2016). Dalam perspektif ekosistem bisnis, pariwisata merupakan suatu komunitas ekonomi yang didasari oleh interaksi antara organisasi dan individu (organisme dalam dunia bisnis). Ekosistem bisnis pariwisata ini tidak hanya mencakup bisnis utama (core business) dan pengembangan perusahaan atau unit usaha pariwisata lainnya, namun juga mencakup pemangku kepentingan (stakeholders) seperti asosiasi industri, pemerintah, dan investor. Dalam konteks inilah, keterpaduan menjadi hal yang sangat penting untuk dapat memandu pergerakan elemen-elemen dalam ekosistem pariwisata menuju pertumbuhan yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Dalam struktur Indeks Daya Saing Pariwisata (IDSP) secara umum keterpaduan ekosistem bisnis pariwisata ini dapat dilihat dari faktor-faktor lingkungan yang mendukung (enabling environment), kebijakan dan kondisi yang mendukung pariwisata, infrastruktur, serta sumber daya alam dan budaya.

Saat ini kita sedang berada pada kondisi pandemi covid 2019, di Indonesia Pembatasan sosial berskala besar Indonesia mulai diterapkan sejak 4 Mei 2020. Hal ini berdampak penurunan semua sektor ekonomi baik perdagangan, perindustrian termasuk pariwisata. Ada konsensus umum di kalangan ekonom bahwa pandemi virus corona akan menjerumuskan dunia ke dalam resesi global (Financial Times, 2020). Dana Moneter Internasional (IMF) pada bulan Maret menyatakan bahwa mereka memperkirakan resesi global yang akan sama buruknya dengan krisis keuangan global 2007-2008 diikuti oleh pemulihan pada tahun 2021 (Georgieva, 2020).

Berdasarkan data Bank Indonesia yang menyatakan sektor pariwisata memiliki karakteristik quick yielding dibandingkan kegiatan lainnya, maka penting dikembangkan ekosistem bisnis pariwisata terpadu berbasis strategi yang dapat membantu pemulihan ekonomi pasca dampak pandemi. Ekosistem Bisnis pariwisata terpadu membahas faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi, sistem adaptif yang kompleks, kemandirian organisasi, serta perkembangan terkini dari destinasi pariwisata berdasarkan infrastruktur teknologi yang mutakhir, Ekosistem bisnis tidak hanya mencakup perantara (intermediaries) dan partner, tetapi juga para pemangku kepentingan seperti pemerintah, pengunjung, dan lingkungan (Baggio & Chiappa, 2013; Lisi & Esposito, 2015; Nugroho et al., 2019; Selen & Ogulin, 2015).

Penelitian terdahulu hanya membahas ekosistem bisnis pariwisata secara parsial, sedangkan dalam studi ini akan membahas

secara menyeluruh. Penelitian terkait dengan pengembangan pariwisata juga diteliti oleh (Fairuza, 2017; Hermawan, 2017; Prasetya & Rani, 2014; Rusyidi & Ferdiansah, 2018), tetapi mereka hanya melihat pengaruh dari beberapa aktor atau *stakeholder* saja. Mereka hanya melihat peran dari pemerintah, masyarakat dan juga swasta. Penelitian yang mereka lakukan lebih kepada *collaborative governance* karena berkenaan dengan tiga aktor besar tersebut. Hasil penelitian mereka juga rata-rata menemukan *stakeholder* yang mempunyai peran besar dan sangat berpengaruh dalam pengembangan pariwisata di wilayah penelitian mereka.

Berdasarkan data rencana strategis tahun 2015-2019 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, disebutkan dalam pengembangan destinasi wisata, terdapat beberapa masalah utama yang harus dihadapi, yaitu: perubahan iklim dan bencana alam; ketidaksiapan masyarakat pada daerah yang menjadi destinasi wisata/Pemberdayaan masyarakat di daerah destinasi Indonesia belum optimal; ketidaksiapan sarana, prasarana, dan infrastruktur destinasi/Ketersediaan dan konektivitas infrastruktur destinasi Indonesia; dan, rendahnya nilai, jumlah dan pertumbuhan investasi, serta iklim usaha yang tidak kondusif.

Masalah tersebut merupakan suatu fakta yang menunjukkan bahwa ekosistem pariwisata di Indonesia belum terpadu dan masih parsial. Oleh karena itu, Studi ini bertujuan untuk memahami keberadaan sektor pariwisata sebagai sektor yang strategis dan pilar pembangunan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menggunakan strategi 5 jalur dapat memandu pengembangan ekosistem bisnis pariwisata untuk mendorong peningkatan output pariwisata secara berimbang dengan aspek-aspek kebutuhan penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, dan pemeliharaan lingkungan hidup, melalui cara-cara yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi secara terpadu. Pariwisata perlu merespon secara tepat dua hal utama, yaitu: ekosistem bisnis pariwisata yang belum terpadu; dan, penggunaan teknologi di pariwisata yang belum optimal. Guna memastikan keterpaduan dalam ekosistem bisnis pariwisata, dilakukan melalui upaya sinergi antara para pemangku kepentingan serta dengan memadukan juga antara keragaman jenis wisata, dan kebijakan, sehingga menghasilkan ekosistem bisnis pariwisata yang terpadu. Hal di atas dijalankan dalam kerangka strategi besar *five-track strategy*/ strategi 5 jalur yang memadukan konsep *four-track strategy* (pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment) dengan

tambahan track ke-5, yaitu *pro-technology*. Pada akhirnya, strategi besar 5 jalur yang dijalankan dalam suatu ekosistem bisnis pariwisata yang terpadu dapat membawa pariwisata untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara lebih optimal.

## METODE

Tulisan ini merupakan hasil pemikiran yang didasarkan pada studi literatur dari berbagai sumber, termasuk didalamnya hasil kajian empirik dari beberapa penelitian sebelumnya dan berdasarkan pengalaman penulis dalam pekerjaannya di Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dimana kondisi pariwisata di Indonesia belumlah optimal padahal memiliki potensi pariwisata yang besar, hal sesuai dengan data dari kementerian terkait dan penelitian terdahulu (Kementerian Pariwisata, 2016; Rahayu et al., 2015).

Sehingga diperlukan suatu pemahaman yang jelas mengenai model ekosistem pariwisata di Indonesia secara terpadu, dengan memahami ekosistem maka semua pemangku kepentingan dapat membangun suatu strategi yang tepat khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. Pemikiran strategi dalam studi ini mengambil strategi 4 jalur yang pernah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kepemimpinannya dengan menambahkan satu jalur yaitu pro teknologi.

Metode penelusuran literatur (*literature study*) dilakukan secara tradisional yaitu dokumentasi yang digunakan berupa hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, dokumen laporan, dan berbagai referensi yang memiliki relevansi dengan pokok bahasan yang dipilih sendiri oleh para peneliti pada satu topik penelitian, dan dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang peneliti (Dijkers, 2009). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa informasi, data, dan dokumentasi yang diperoleh dari institusi (kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian) yang berwenang dalam penerbitan informasi, data, dan dokumentasi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ekosistem Bisnis Pariwisata Terpadu.

Ekosistem bisnis diadopsi dari konsep biologis oleh Ahli strategi bisnis James Moore dalam artikelnya di *Harvard Business Review* 1993 "Predators and Prey: A New Ecology of Competition," di mana perusahaan yang beroperasi di dunia perdagangan semakin saling berhubungan dengan komunitas organisme yang beradaptasi dan berkembang untuk bertahan

hidup. Moore menyarankan agar perusahaan dilihat bukan sebagai perusahaan tunggal dalam suatu industri, tetapi sebagai anggota ekosistem bisnis dengan peserta yang tersebar di berbagai industri. Kemajuan teknologi dan meningkatnya globalisasi telah mengubah gagasan tentang cara terbaik untuk berbisnis, dan gagasan tentang ekosistem bisnis dianggap membantu perusahaan memahami cara berkembang dalam lingkungan yang berubah dengan cepat ini.

Moore mendefinisikan ekosistem bisnis sebagai berikut: Komunitas ekonomi yang didukung oleh fondasi organisasi dan individu yang saling berinteraksi (organisme dalam dunia bisnis). Komunitas ekonomi menghasilkan barang dan jasa yang bernilai bagi pelanggan, yang merupakan anggota ekosistem itu sendiri. Organisme anggota juga termasuk pemasok, produsen utama, pesaing, dan pemangku kepentingan lainnya. Seiring waktu, mereka mengembangkan kemampuan dan peran mereka bersama-sama dan cenderung menyesuaikan diri dengan arahan yang ditetapkan oleh satu atau lebih perusahaan pusat.

Perusahaan yang memegang peran kepemimpinan dapat berubah seiring waktu, tetapi fungsi pemimpin ekosistem dihargai oleh komunitas karena memungkinkan anggota untuk bergerak menuju visi bersama untuk menyelaraskan investasi mereka dan menemukan peran yang saling mendukung. Akibatnya, ekosistem bisnis terdiri dari jaringan perusahaan yang saling terkait yang secara dinamis berinteraksi satu sama lain melalui persaingan dan kerja sama untuk menumbuhkan penjualan dan bertahan. Ekosistem mencakup pemasok, distributor, konsumen, pemerintah, proses, produk, dan pesaing. Ketika ekosistem tumbuh subur, berarti peserta telah mengembangkan pola perilaku yang merampingkan aliran ide, bakat, dan modal di seluruh sistem.

Berdasarkan literatur terbaru (Jarvi & Kortelainen, 2017) muncul gagasan mengenai ekosistem dibandingkan berbagai sumber literatur mengenai ekosistem (Adner, 2006; Basole, 2009; Moore, 1993). Gagasan mengenai ekosistem yang mempersatu gagasan ekosistem lainnya mencakup Ekosistem Bisnis digital (Selander et al., 2013; Tsatsou et al., 2010), Ekosistem Teknologi (Wareham et al., 2013) dan Ekosistem Inovasi (Adner, Ron & Rahul, 2010; Adner, 2006; Still et al., 2014).

Menurut Moore (1993), Ekosistem Bisnis melintasi berbagai industri dan perusahaan, dan ikut berkembang kapabilitas seputar inovasi baru. Ciri-ciri ekosistem adalah logika nilai, simbiosis partisipan dan stabilitas kelembagaan. Lebih jauh, nilai dapat ditemukan dalam manfaat

inovasi. Simbiosis peserta menjadi eksplisit dalam spesialisasi bersama, saling melengkapi, dan evolusi bersama dalam ekosistem. Bersama-sama ini menyediakan mekanisme yang mendorong penciptaan nilai (Thomas & Autio, 2012). Dalam suatu destinasi pariwisata, hidup dan beroperasi banyak entitas otonom yang menyelenggarakan berbagai pariwisata terkait kegiatan. Meskipun entitas ini bisa heterogen dalam hal lingkungan operasi, budaya, dan tujuan, semuanya bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dari pengembangan pariwisata lokal dan untuk meningkatkan daya saing umum di dengan wilayah geografis lain dan persaingan global (Akoumianakis, 2014).

Sementara itu, konsep ekosistem pariwisata diinspirasi pertama kali dikemukakan oleh The Global Sustainable Tourism Council (GTSC) (2017) yang mengemukakan konsep ekosistem dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman umum tentang pariwisata berkelanjutan, dan merupakan standar minimum yang harus dicapai oleh setiap usaha pariwisata. GTSC diciptakan dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman umum tentang pariwisata berkelanjutan, dan merupakan standar minimum yang harus dicapai oleh setiap usaha pariwisata. Kriteria ini disusun dalam 4 (empat) tema utama, yaitu: 1) perencanaan keberlanjutan yang efektif; 2) memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat; 3) meningkatkan warisan budaya; dan 4) mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pariwisata terpadu mengacu pada kawasan tertentu yang menjadikan pariwisata sebagai industri dominan melalui promosi sumber daya ekonomi dan sosial yang komprehensif dan sistematis, terutama sumber daya pariwisata. Secara praktis, pariwisata terpadu memiliki hubungan yang jelas dengan sumber daya lokal, kegiatan, produk, industri produksi dan jasa, dan masyarakat lokal yang partisipatif (Lisi & Esposito, 2015). Kebijakan pengembangan pariwisata terpadu dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memadukan pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan fasilitas ekonomi lainnya di dalam satu kawasan sebagai sebuah destinasi pariwisata.

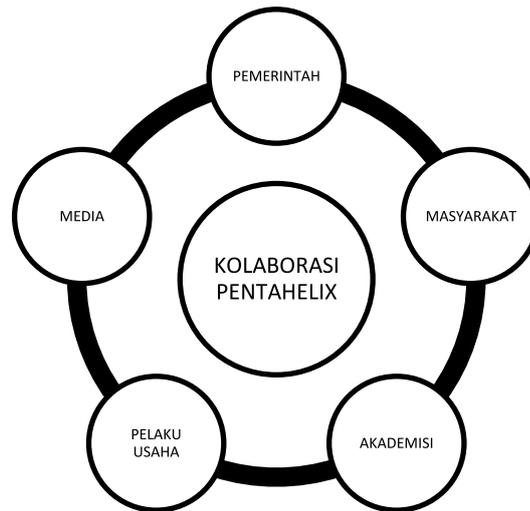
Pariwisata secara internal merupakan suatu sistem yang kompleks. Dengan kompleksitas yang dimilikinya, maka integrasi (keterpaduan) menjadi sangat penting. Pariwisata terpadu merupakan konsep yang dikembangkan dengan memperhatikan integrasi antara para pemangku kepentingan dan antara berbagai sub sektor

(Cornelis et al., 2018). Menurut Suharso (2009) serta Rajak dan Suprihardjo (2013), salah satu prinsip penting dalam pengembangan pariwisata terpadu adalah adanya *the value of time*, artinya waktu wisatawan dapat digunakan secara optimal untuk menikmati objek pariwisata yang ada. Oleh karena itu, dalam suatu Kawasan pariwisata dikembangkan konsep 'jalur wisata'.

Pelupessy et al. (2011) menyebutkan bahwa pengembangan kawasan wisata terpadu artinya harus ada peran-peran jenis kegiatan wisata yang saling mendukung satu dengan lainnya dengan memperhitungkan pusat-pusat kegiatan wisata, serta pendukungnya dan didukung dengan adanya sebuah jalur wisata untuk mengaitkan objek dan daya tarik wisata yang ada. Dalam hal ini konsep terpadu yang dikemukakan memiliki kata kunci yaitu adanya kaitan atau integrasi antar objek dan daya tarik wisata yang ada.

Pariwisata dikembangkan bukan untuk menggantikan sektor manapun, namun untuk menjadi salah satu sektor yang tumbuh bersama sektor lainnya. Pariwisata juga perlu memperhatikan kepentingan berbagai tingkat, baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Keterpaduan dalam pariwisata tersebut perlu mencakup aspek-aspek: 1) Pelaku (usaha besar, UMKM, pelaku di "darat", pelaku di "udara"); 2) Keragaman jenis wisata (massal, spesifik); 3) Pemangku kepentingan (Dalam bentuk Kolaborasi Pentahelix (gambar 2): Pemerintah, Masyarakat, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Media); dan, 4) Kebijakan (kebijakan antara pusat dan daerah).

Menurut Soemaryani (2016), Model pentahelix merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait di dalam mendukung seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan. Kolaborasi pentahelix mempunyai peran penting untuk bermain di dalam mendukung tujuan inovasi bersama dan pentahelix berkontribusi terhadap kemajuan sosial ekonomi daerah. Model Pentahelix berupaya mendorong sektor pariwisata dan sistem kepariwisataan dengan meningkatkan peran pelaku usaha, pemerintah, masyarakat, akademisi, dan media untuk menciptakan nilai manfaat kepariwisataan serta keuntungan dan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Pertama kali Model Pentahelix ini, dicanangkan oleh Menteri Pariwisata Arif Yahya, dan selanjutnya dirumuskan menjadi Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.



**Gambar 2.** Kolaborasi pentahelix para pemangku kepentingan  
Sumber: Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia  
Nomor 14 Tahun 2016

**Strategi Empat Jalur.** Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan konsep strategi 4 jalur (*Four-Track Strategy*) dalam kebijakan pembangunan melalui pidato di *Regional Meeting and Stakeholder Consultation on the Post-2015 Development Agenda* di Nusa Dua Bali pada tanggal 16 Agustus 2013. Tujuan kebijakan *Four Track Strategy* (FTS) adalah strategi kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi guna mengurangi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang secara keseluruhan dinyatakan dengan *'sustainable growth with equity'*.

Secara umum, konsep ini dapat dirumuskan sebagai berikut: *Pertama, Pro Growth* (Pertumbuhan Berkelanjutan Berkeadilan). *Pro-growth* merupakan paradigma yang mendukung dan memihak kepada pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, baik kebijakan mikro ekonomi maupun makro ekonomi mampu mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Adam Smith (2010) pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan.

*Kedua, Pro Job* (Penyerapan Tenaga Kerja). *Pro-job* adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan semakin meningkatnya peluang kerja, maka akan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. *Ketiga, Pro Poor* (Pengurangan Kemiskinan dan Program Pro Rakyat). *Pro-poor* merupakan paradigma yang berpihak kepada masyarakat kecil atau orang

misin. Batasan kemiskinan disini bukan hanya pada ketidakmampuan ekonomi, namun juga mencakup kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar serta perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. *Keempat, Pro Environment* (Pelestarian Lingkungan), yaitu sikap atau tindakan mendukung menjaga dan melestarikan lingkungan.

Perkembangan teknologi berbasis dunia (*platform*) digital telah mendorong perluasan dan intensitas interaksi antar pelaku (*institusi*). Perluasan dan intensitas tersebut terjadi dengan modus-modus yang semakin "terbebas" dari batasan-batasan ruang dan waktu. Hal ini dimungkinkan karena adanya perkembangan pada komponen-komponen atau sistem-sistem pendukung, baik dari aspek perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*). Perkembangan jaringan internet dan komputasi awan telah membuka khazanah baru dalam melihat data dan informasi. Sumbangan teknologi berbasis digital tersebut tampak nyata pada peningkatan tingkat konektivitas seiring dengan perkembangan pada dunia informasi dan komunikasi (Rouse 2019). Sehingga didalam studi ini dirasakan perlu untuk menambahkan 1 strategi jalur yaitu *pro technology*.

**Penerapan Strategi 5 Jalur dalam Pengembangan Ekosistem Bisnis Pariwisata Terpadu. Pertama, Pro Growth (Pertumbuhan Berkelanjutan Berkeadilan).** Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan Nasional. Pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang

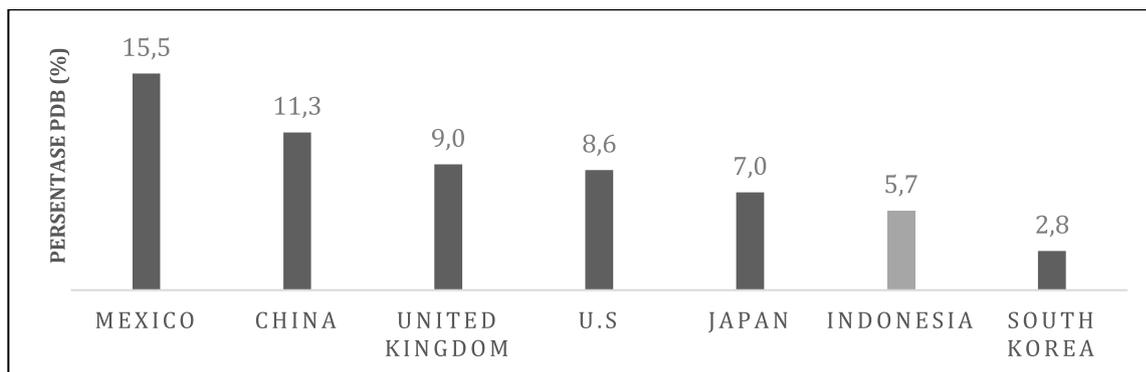
pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pariwisata berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jalur termasuk pendapatan mata uang asing, menarik investasi internasional, meningkatkan pendapatan pajak dan menciptakan lapangan kerja tambahan (Aktaş Şenkardeşler, 2020; Jayathilake, 2013; Kadir & Karim, 2012; Peña-Sánchez et al., 2020; Yazdi, 2019).

Pariwisata Indonesia masih memiliki ruang yang relatif besar untuk tumbuh baik dari sisi output, jumlah kunjungan wisatawan, penerimaan negara (devisa), dan lain-lain. Dalam hal output, tingkat kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB sebesar 4,8% pada tahun 2019. Angka ini masih relatif jauh dibawah negara-negara G20 lain yang lebih maju sektor pariwisatanya, seperti Meksiko (15,5%), dan Tiongkok (11,3%) (Gambar 3).

Selain itu, Indonesia menduduki peringkat ke 18 (di antara negara-negara G20 lainnya) dalam daftar ketergantungan PDB terhadap sektor pariwisata. Pada tahun 2019, Meksiko merupakan negara dengan ketergantungan terhadap pariwisata terbesar dengan kontribusi

pariwisata sebesar 15,5%, disusul Spanyol (14,3%), dan Italia (13,0%) (WTTC dan WEF 2019). Dari sisi kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) dunia dan penerimaan devisa sektor pariwisata, kinerja sektor pariwisata Indonesia dapat terlihat dari data yang tercantum pada tabel 2 yang menunjukkan daftar peringkat negara dengan kedatangan wisman yang dibandingkan dengan penerimaan dari sektor pariwisata pada tahun 2019.

Jumlah wisman yang datang ke Indonesia pada tahun 2019 cukup besar, yaitu 15,9 juta orang, menduduki peringkat 24 dunia, namun jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kemampuan sektor pariwisata Indonesia dalam menyumbang devisa negara dapat dikatakan masih belum optimal. Hal ini terindikasi dari jumlah kedatangan wisman ke Indonesia pada tahun 2019 yang menduduki posisi 24 dunia, namun penerimaan dari sektor pariwisata Indonesia hanya menduduki peringkat 27 dunia. Fakta ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Indonesia masih memiliki peluang tumbuh mengingat Indonesia memiliki potensi wisata alam dan budaya yang masih sangat besar.



**Gambar 3.** Kontribusi langsung pariwisata terhadap PDB Indonesia dan beberapa negara Lainnya  
Sumber: World Travel & Tourism Council (2019) diolah

**Tabel 2.** Perbandingan data pariwisata Indonesia dibandingkan dengan negara top 10 dunia

Kedatangan Wisman 2019 (juta orang)			Penerimaan Pariwisata 2019 (Miliar USD)		
Peringkat	Negara	Penerimaan	Peringkat	Negara	Penerimaan
1	Perancis	89.4	1	Amerika Serikat	264.6
2	Spanyol	84.9	2	Spainol	81.4
3	Amerika Serikat	81.2	3	Perancis	72.9
4	China	63.6	4	Thailand	66.2
5	Italia	61.9	5	Jerman	60.3
6	Turki	44.7	6	Italia	50.9
7	Meksiko	42.2	7	Inggris Raya	49.6
8	Jerman	39.7	8	Australia	48.1
9	Thailand	39.3	9	Jepang	45.6
10	Inggris Raya	37.5	10	China	40.7
14	Malaysia	26.6	19	Malaysia	21.8
24	Indonesia	15.9	21	Singapura	21
27	Singapura	14.9	27	Indonesia	15.9

Sumber: Nation Master (2020)

Kekayaan potensi pariwisata di Indonesia saat ini belum menunjukkan kinerja yang optimal dalam mendatangkan devisa negara. Dari segi penerimaan, Indonesia mendapatkan devisa negara dari sektor pariwisata sebesar USD 15,9 miliar pada tahun 2019, dan menduduki posisi ke 27 dunia. Sebagai pembanding di kawasan Asia Tenggara, pada tahun 2019 Thailand menduduki posisi ke 9 dalam jumlah kunjungan wisatawan (39,3 juta orang). Meskipun demikian, dari segi penerimaan devisa Thailand menduduki posisi ke 4 dengan mendapatkan devisa dari sektor pariwisata sebesar USD 66,2 miliar.

Jika dianalisis lebih dalam, pengeluaran (spending) wisman yang datang ke Indonesia lebih kecil dari pengeluaran wisman yang datang ke Thailand. Hal serupa juga dapat diamati dalam beberapa negara lainnya, seperti Singapura yang menduduki posisi 27 (14,9 juta orang) dalam hal kunjungan, namun menduduki posisi ke 21 (USD 21 miliar) dunia dalam hal penerimaan devisa pariwisata. Termasuk Amerika Serikat (USA) yang menduduki peringkat ke 3 (81,2 juta orang) dalam kunjungan, namun menduduki peringkat pertama (USD 264,6 miliar) dalam pendapatan devisa pariwisata (Nation Master 2020). Hal ini berarti, pengeluaran wisman yang datang ke Indonesia masih belum optimal.

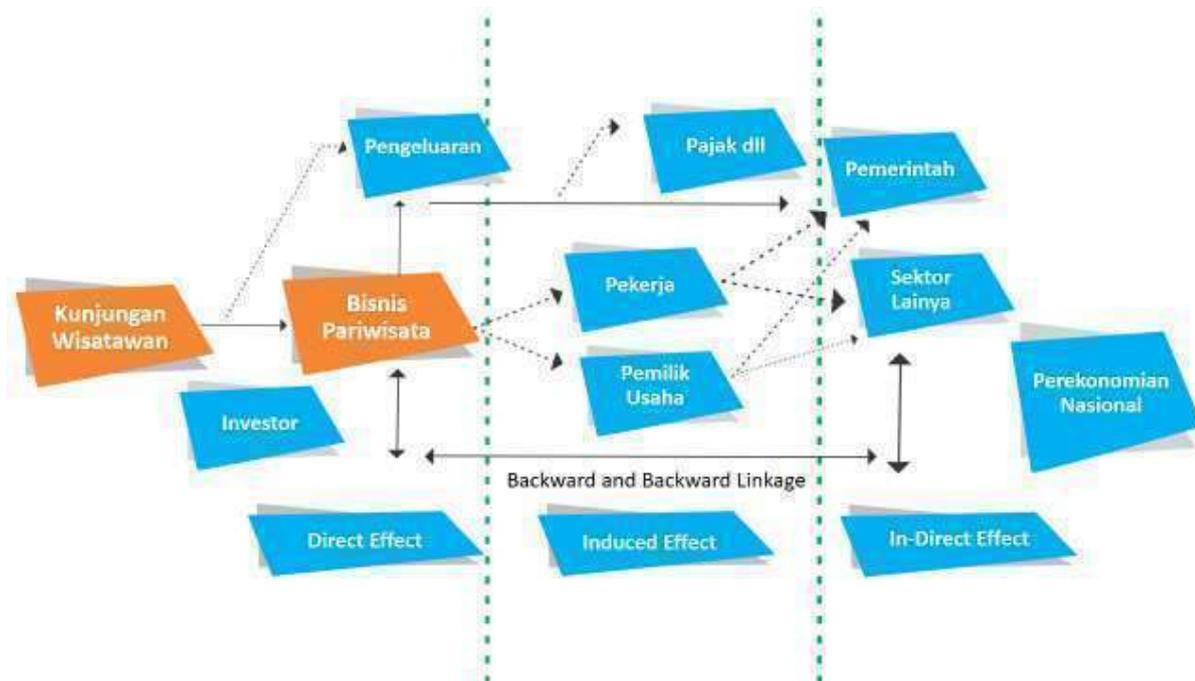
Strategi jalur *Pro growth* akan mengembangkan ekosistem pariwisata terpadu yang memiliki efek multiplier terhadap ekonomi. Aktifitas wisatawan yang datang menghabiskan sejumlah besar uang mulai dari pengeluaran transportasi hingga untuk membeli produk/jasa di daerah tujuan wisata, seperti akomodasi, makanan dan minuman, cenderamata, kegiatan rekreasi dan sebagainya. Hal ini menghasilkan efek langsung pada bisnis dan ekonomi yang dapat diukur dari pendapatan upah tenaga kerja sektor pariwisata dan pajak yang dibayar oleh perusahaan pariwisata ke negara.

Pada waktu bersamaan, bisnis pariwisata harus membeli barang dan jasa dari sektor lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Pengeluaran bisnis pariwisata itu merupakan efek tidak langsung pariwisata melalui pembelian input dari sektor lain yang kemudian berdampak juga pada penciptaan lapangan pekerjaan dan upah. Strategi jalur ini diimplementasikan agar kasus yang terjadi Praktik Turis Murah dari Tiongkok di Bali yang merupakan penipuan-penipuan dan usaha-usaha ilegal yang terjadi terkait pariwisata.

Modusnya ialah warga Tiongkok yang hendak ke Bali ditawarkan paket wisata dengan harga murah (seakan disubsidi) oleh biro perjalanan Tiongkok. Untuk menutupi murahnya harga itu, biro perjalanan Tiongkok bekerja sama dengan toko-toko souvenir di Bali yang juga dimiliki oleh warga Tiongkok. Setiba para turis Tiongkok itu di Bali, selain berwisata, mereka dikondisikan untuk juga mengunjungi toko-toko souvenir, yang dimiliki oleh warga Tiongkok itu. Tentu saja, belanja para turis Tiongkok itu akhirnya lebih banyak mengalir ke toko-toko tersebut ketimbang ke toko-toko souvenir milik warga lokal Bali. Toko-toko souvenir itu kemudian memberi imbalan kepada para biro perjalanan Tiongkok yang bekerjasama dengannya, sehingga biro perjalanan Tiongkok itu tidak rugi meski menjual murah paket wisatanya ke Bali. Yang terkena dampaknya adalah biro perjalanan lokal Bali dan toko-toko souvenir lokal (Dinata, 2028).

Permintaan pada produk dan jasa pariwisata yang meningkat akibat meningkatnya wisatawan yang datang akan menarik investor untuk menanam modal di sektor pariwisata seperti investasi pembangunan hotel/penginapan, restoran, pembelian peralatan dan lain sebagainya. Investasi tersebut akan berpengaruh juga pada sektor lainya seperti sektor bangunan, listrik dan lain sebagainya. Dari sisi pemerintah, berbagai kegiatan pemerintah dalam sektor pariwisata juga dapat memberikan kontribusi pada perekonomian. Kegiatan promosi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, serta kegiatan investasi pemerintah yang mendukung sektor pariwisata dapat dimasukkan dalam faktor yang mampu mendorong penciptaan nilai barang dan jasa di sektor pariwisata.

Aktivitas lintas sektor dan lintas pelaku ekonomi yang menghasilkan dampak langsung dan tidak langsung, pada tahap selanjutnya akan menyebabkan tingkat pendapatan rumah tangga di seluruh perekonomian akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya lapangan pekerjaan. Sebagian dari peningkatan pendapatan rumah tangga ini akan meningkatkan kembali permintaan barang dan jasa pada sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya (efek induksi). Alur Dampak sektor pariwisata terhadap ekonomi dalam kajian laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2018) dapat dilihat pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Dampak sektor pariwisata terhadap perekonomian  
 Sumber: LPEM-FEB UI (2018)

**Kedua, Pro Job (Penyerapan Tenaga Kerja).** Pariwisata suatu negara dapat menciptakan lapangan kerja baru, membantu menarik surplus tenaga kerja dari sektor lain sambil membantu mengurangi pengangguran. Surplus dari angkatan kerja tidak hanya menentukan pertumbuhan dan peremajaan penawaran di pasar tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan konsumsi yang menghasilkan pertumbuhan PDB dan tentu saja meningkatkan taraf hidup, kualitas hidup dan kesejahteraan sosial (Morozova et al., 2015; Oneti & Predonu, 2013).

Jika dibandingkan dengan sektor lainnya, sektor pariwisata menyumbang tenaga kerja dua kali lebih banyak dibandingkan dengan sektor finansial. World Travel Tourism Council (WTTC) dalam laporan Benchmarking Report 2017 menyatakan bahwa 1 dari 10 tenaga kerja adalah tenaga kerja bidang pariwisata. Jumlah tenaga kerja langsung (direct), tidak langsung (indirect), dan ikutan (induced) di sektor pariwisata dihitung dari total tenaga kerja yang terserap di sektor-sektor perekonomian akibat adanya aktivitas pariwisata, baik langsung (direct), tidak langsung (indirect), maupun ikutan (induced).

Tenaga kerja langsung sektor pariwisata mencakup antara lain tenaga kerja di bidang akomodasi, biro perjalanan, maskapai penerbangan dan pelayanan penumpang lainnya. Termasuk juga tenaga kerja di sektor usaha restoran dan tempat-tempat rekreasi yang langsung melayani wisatawan. Tenaga kerja tidak langsung mencakup antara lain tenaga

kerja di sektor promosi pariwisata, *furnishing/equipment*, persewaan kendaraan, manufaktur transportasi. Tenaga kerja ikutan mencakup antara lain tenaga kerja di sektor pemasok makanan dan minuman, grosir, utilitas computer, dan jasa personal. Berdasarkan Neraca Satelit Pariwisata Tahun 2017, industri pariwisata yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah usaha penyedia makan minum dan perdagangan yang masing-masing mempunyai share mencapai 45,87 persen dan 40,79 persen.

Usaha lain yang cukup besar kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja adalah usaha penyediaan akomodasi dan kegiatan olah raga dan rekreasi lainnya yang masing-masing menyumbang 5,03 persen dan 1,69 persen. Sementara kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas menyumbang 0,88 persen. Usaha angkutan dan jasa agen perjalanan wisata mempunyai kontribusi masing-masing sebesar 0,40 persen dan 0,63 persen. Pengembangan ekosistem pariwisata terpadu dengan strategi jalur pro Job adalah dengan mendorong peningkatan jumlah kedatangan serta pengeluaran wisatawan pada usaha industri pariwisata yang menyerap tenaga kerja paling besar.

**Ketiga, Pro Poor (Pengurangan Kemiskinan dan Program Pro Rakyat).** Penelitian Njoya & Seetaram (2018) yang mengidentifikasi dampak pariwisata terhadap pengurangan kemiskinan di Kenya, menunjukkan hasil empiris bahwa pariwisata berdampak positif terhadap pengurangan

kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. Garza-Rodriguez (2019) menyatakan bahwa ada hubungan jangka panjang antara pariwisata dan pengurangan kemiskinan di Meksiko. Dimana, pariwisata membantu meningkatkan PDB per kapita dan dengan demikian mengurangi kemiskinan dalam perekonomian ini.

Hasil empiris penelitian Tung & Cuong (2020) dengan kuat menunjukkan bahwa pariwisata memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di semua model yang diperkirakan. Artinya, semakin tinggi pendapatan pariwisata dapat menurunkan angka kemiskinan di 61 provinsi di Vietnam selama periode 2010-2018. Pengembangan ekosistem pariwisata terpadu dengan strategi jalur pro poor dengan menghadirkan program yang dapat dinikmati sebagai pendapatan bagi penduduk lokal sehingga angka kemiskinan semakin berkurang dengan sektor pariwisata.

**Keempat, Pro Environment (Pelestarian Lingkungan).** Pariwisata dinilai merupakan industri yang tak berasap dan tidak memiliki produk, namun tak dapat dihindari fakta dimana pembangunan hotel, marina, mall dan pengoperasian fasilitas wisata secara mendasar merubah lingkungan dan komunitasnya. Semenjak awal tahun 1970-an pembangunan berkelanjutan telah menjadi kesatuan konsep untuk perencanaan lingkungan. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya masih kurang dipahami. Konsep tersebut menjembatani hubungan antara konservasi lingkungan dan kualitas hidup sosial-ekonomi tetapi tetap meninggalkan isu perdebatan mengenai bagaimana keseimbangan pemanfaatan yang berkelanjutan atau bagaimana nilai suatu lingkungan.

Berbagai organisasi dunia menyangkut pariwisata dan lingkungan menyepakati bahwa pariwisata hendaknya merangkul prinsip-prinsip berkelanjutan dengan menghargai daya dukung lingkungan (carrying capacity), tanggungjawab sosial dan kesatuan aktifitas pariwisata dengan keinginan penduduk lokal. Tourism Concern (TC) dan Worlwide Fund for Nature (WWF) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan adalah sebagai pariwisata dan infrastrukturnya yang: a) Beroperasi dengan kapasitas alami untuk regenerasi dan masa depan produktifitas alam, sosial dan budaya; b) Mengakui kontribusi dimana masyarakat dan komunitas, kebiasaan dan gaya hidup sekarang dan yang akan datang menjadi pengalaman bagi pariwisata; c) Menerima bahwa masyarakat memiliki pembagian yang adil dan wajar dari keuntungan pariwisata; dan, d) Diarahkan dari yang 'berkepentingan' kepada masyarakat dan komunitas di sekitar wilayah wisata khususnya.

Prakarsa bersama antara Program Lingkungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) (United Nations Environment Programme /UNEP), Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO), Organisasi Pemberi Kerja Internasional (International Organization of Employers/IOE) dan Konfederasi Serikat Dagang Internasional (International Trade Union Confederation /ITUC) telah diluncurkan pada tahun 2001, untuk menilai, menganalisis, dan mendorong terciptanya pekerjaan yang layak sebagai konsekuensi dari kebijakan lingkungan yang diperlukan. Maka, untuk memastikan dampak positif dan menanggapi perubahan iklim, transisi ekonomi dan pertumbuhan pekerjaan ramah lingkungan, Prakarsa Pekerjaan Ramah Lingkungan telah diperkenalkan sebagai suatu proyek nasional Indonesia oleh ILO bersama dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 2009 di bawah naungan the Green Jobs in Asia Initiative.

Pada tahun 2011 disiapkan rencana strategis diprakarsai oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan ditempatkan dibawah payung Proyek Pekerjaan Ramah Lingkungan ILO (ILO's Green Jobs) untuk Asia khususnya Indonesia untuk menetapkan suatu kerangka kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan Pekerjaan Ramah Lingkungan dalam sektor pariwisata di Indonesia.

Destinasi pariwisata Indonesia yang dikenal secara internasional yaitu Bali, sudah mempunyai pengalaman yang panjang dalam melaksanakan praktek-praktek pariwisata berkelanjutan yang didasarkan pada kearifan budaya setempat, yaitu Tri Hita Karana – keharmonisan hubungan antara Alam, Manusia, dan Sang Pencipta. Konsep ini bahkan sudah dibawa ke tingkat internasional dan pada tahun 2002 serta telah mendapat pengakuan UNWTO dan organisasi industri regional terkemuka seperti Pacific Asia Travel Association (PATA).

Saat ini banyak komponen industri pariwisata (hotel, rumah makan, resor) yang telah mendapat penghargaan Tri Hita Karana, sebagai wujud kepeduliannya terhadap lingkungan, budaya dan kesejahteraan masyarakat. Tri Hita Karana merupakan model yang yang dapat dimodifikasi dan diadaptasi dalam industri pariwisata di daerah lain di Indonesia. Hal itu juga merupakan suatu contoh kerangka praktek pariwisata berkelanjutan dan pengembangan kebijakan untuk dipelajari oleh pemerintah lokal dan provinsi yang mengeluarkan ijin-ijin.

Usaha yang berkelanjutan diharapkan menjadikan aktifitas pariwisata sebagai alat informasi pengetahuan, mendukung kesatuan ekosistem, memberi keuntungan bagi penduduk, memelihara lingkungan dan menghormati budaya serta tradisi lokal. Prinsip dari pengembangan pariwisata berkelanjutan dinyatakan dengan penggunaan secara optimal sumberdaya alam dan budaya dalam kerangka keseimbangan dan menyokong pengembangan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Menyediakan kesan khusus bagi turis di satu sisi, dan disisi lain meningkatkan kualitas kehidupan penduduk lokal. Ini bisa dicapai hanya dengan kerjasama permanen antara pemerintah, sektor swasta dan penduduk lokal. Pariwisata berkelanjutan adalah industri yang diusahakan menekan dampak negatif pada lingkungan dan budaya lokal, dengan membantu meningkatkan pendapatan, pekerjaan, dan konservasi ekosistem setempat. Hal ini merupakan pariwisata bertanggungjawab yang sensitif terhadap nilai-nilai ekologi dan budaya seperti ekowisata (ecotourism). Ekowisata sebagai sarana untuk mempromosikan pelestarian lingkungan dan peningkatan pendapatan (Nag, 2018; Teeroovengadum, 2019). Pengembangan ekosistem pariwisata terpadu pada strategi jalur pro environment harus mengoptimalkan lingkungan sebagai sumber daya pariwisata dengan tetap menjaga kelestariannya.

**Kelima, Pro Technology (Penggunaan Teknologi).** Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan pariwisata (Ilić & Nikolić, 2018; TFAILY, 2018; Tsaurai & Chimbo, 2019). Perkembangan TIK telah terbukti mendukung peningkatan kualitas sektor pariwisata di Indonesia, di antaranya melalui *platform E-Commerce* yang turut membantu pelaku usaha dan pemerintah untuk meningkatkan kinerja sektor pariwisata di Indonesia baik dari sisi teknologi maupun melalui edukasi bagi para pemangku kepentingan.

Perkembangan ini direspon dari sisi permintaan (konsumen), dimana mayoritas wisatawan (70%) melakukan 'Search & Share' secara online (Kemenpar RI 2019), dan mayoritas wisatawan (50-70%) menggunakan 'Online Travel Agent (OTA)' (Dailysocial.id 2018). Hal lain sebagai salah satu akibat dari penggunaan TIK pada sektor pariwisata adalah munculnya fenomena *viral destinations* atau destinasi wisata berbasis viral sebagai akibat dari penggunaan media sosial melalui platform seperti Facebook, Youtube, Instagram & Twitter.

Fenomena ini mampu menghadirkan destinasi wisata baru yang sebelumnya belum

tersentuh oleh kebijakan pemerintah maupun usaha swasta. Fenomena *viral destinations* ini menjadi semakin populer sebagai bagian dari strategi pemasaran beberapa obyek wisata baru tersebut. Perkembangan pariwisata berkorelasi dengan sarana komunikasi baru, dan informasi yang mencapai tujuan manapun di seluruh dunia secara instan, Oleh karena itu, aplikasi smartphone harus dikembangkan agar lebih menarik dan bermanfaat bagi calon wisatawan yang harus mengetahui destinasi secara *real time* (Sava & Mateia, 2016).

Berbagai metode baru penggunaan sosial media dan mesin pencari (search engine) yang telah disebut di atas merupakan contoh kecil dari penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mempromosikan dan mengembangkan sektor pariwisata dalam negeri. Seiring dengan peningkatan penetrasi internet dalam masyarakat dan munculnya metode penggunaan media sosial ini, urgensi penerapan teknologi dalam meningkatkan kinerja sektor pariwisata Indonesia merupakan hal yang tidak dapat disangkal lagi. Perkembangan teknologi juga memiliki keterkaitan dengan masalah lingkungan hidup.

Pada satu tahapan pertumbuhan ekonomi perkembangan teknologi yang disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat dapat ikut mendorong terciptanya pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Pada fase-fase awal, pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan tingkat adopsi teknologi dan kesadaran masyarakat yang masih relatif rendah, memberikan tekanan yang tinggi pada lingkungan (polusi).

Pada fase selanjutnya, tekanan pertumbuhan ekonomi pada kualitas lingkungan lebih rendah dibandingkan dengan fase sebelumnya. Pada tahapan ini proses adopsi teknologi dan pengetahuan, serta environment consiousness juga semakin meningkat. Kondisi ini akan mengantarkan pada fase berikutnya yaitu periode *recovery* atas kondisi lingkungan seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian. Pengembangan ekosistem pariwisata terpadu pada strategi jalur pro technology harus mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam peningkatan kinerja pariwisata serta mendorong pembangunan yang lebih ramah lingkungan.

Strategi pro teknologi juga akan mendorong terjadinya inovasi pada sektor pariwisata. Dokumen administrasi Pemerintahan dan regulasi baru secara resmi menyebutkan terminology Inovasi pada UU No. 23 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Konteks inovasi pun sudah mulai didengarkan sejak ditetapkannya

Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No. 03 Tahun 2012 dan No. 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan saat ini lebih diperkuat dengan hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Kemenparekraf pun turut mengedepankan INOVASI sebagai terobosan dalam meningkatkan kepariwisataan di masa Pandemi Covid-19.

## KESIMPULAN

Pembangunan bidang pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi. Kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor non-migas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Negara. Pariwisata akan berkontribusi maksimal pada perekonomian negara, bila dikembangkan secara berencana dan terpadu, serta diperlukan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan. Dengan begitu sektor pariwisata akan berfungsi sebagai penggerak kinerja perekonomian, sehingga diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Ukuran suksesnya pariwisata bukan hanya jumlah pengunjung belaka (kuantitas) tetapi oleh lamanya tinggal, uang yang dipakai selama kunjungan dan kualitas pengalaman. Pada akhirnya dicapai kepuasan, memberi gairah kepada turis dengan membawa pengetahuan baru di tempat asalnya dan membagi cerita kepada teman-temannya apa yang diperolehnya. Hal ini tentunya akan menarik pengunjung baru dan akan tetap memberi peluang bagi kelanjutan bisnis pariwisata terus menerus. Pengembangan ekosistem pariwisata terpadu dilakukan untuk memadukan pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan fasilitas ekonomi lainnya di dalam satu kawasan sebagai sebuah destinasi pariwisata dengan memperhatikan integrasi antara para pemangku kepentingan dan antara berbagai sub sektor berdasarkan strategi 5 jalur. Strategi 5 jalur yang digunakan dalam pengembangan ekosistem pariwisata terpadu adalah *pro growth*, *pro job*, *pro poor*, *pro environment* dan *pro technology*. Strategi 4 jalur diadopsi dari pemikiran dan kebijakan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pembangunan ekonomi di masa kepemimpinannya. Sedangkan strategi jalur *Pro technology* berdasarkan kebutuhan pariwisata di era sekarang yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi.

## REKOMENDASI

Studi ini memberikan rekomendasi atas model ekosistem bisnis pariwisata terpadu berdasarkan strategi 5 jalur, adapun rekomendasi penelitian yang ditujukan kepada pemerintah serta pelaku bisnis pariwisata adalah:

1. Ekosistem bisnis merupakan komunitas ekonomi yang didukung oleh fondasi organisasi dan individu yang saling berinteraksi (organisme dalam dunia bisnis) menghasilkan barang dan jasa yang bernilai bagi pelanggan, yang merupakan anggota ekosistem itu sendiri. Sehingga perlu pemahaman mengenai ekosistem bisnis khususnya di sektor pariwisata agar kita bisa lebih bijak dan dapat mengalokasikan sumber daya tepat sasaran dengan memilih prioritas yang akan dikembangkan terlebih dahulu didalam pariwisata.
2. Pariwisata dikembangkan bukan untuk menggantikan sektor manapun, namun untuk menjadi salah satu sektor yang tumbuh bersama sektor lainnya. Pariwisata juga perlu memperhatikan kepentingan berbagai tingkat, baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Sehingga diperlukan kolaborasi diantara pemangku kepentingan yaitu pelaku usaha, pemerintah, masyarakat, akademisi, dan media untuk menciptakan nilai manfaat kepariwisataan serta keuntungan dan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
3. Pariwisata terpadu mengacu pada kawasan tertentu yang menjadikan pariwisata sebagai industri dominan melalui promosi sumber daya ekonomi dan sosial yang komprehensif dan sistematis, terutama sumber daya pariwisata. Pariwisata terpadu harus mengotimalkan sumber daya lokal, kegiatan, produk, industri produksi dan jasa, dan masyarakat lokal yang partisipatif sebagai upaya untuk memadukan pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan fasilitas ekonomi lainnya di dalam satu kawasan sebagai sebuah destinasi pariwisata.
4. Strategi jalur pertumbuhan berkelanjutan berkeadilan (Pro Growth), Penyerapan Tenaga Kerja (Pro Job), Pengurangan Kemiskinan dan Program Pro Rakyat (Pro Poor), pelestarian lingkungan (pro Environment), Penggunaan Teknologi (Pro Technology) dilakukan dalam pengembangan ekosistem pariwisata terpadu agar meningkatkan permintaan barang dan jasa pada sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya yang berdampak pada

peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja serta mengurangi kemiskinan daerah lokasi pariwisata dengan pemanfaatan TIK dalam peningkatan kinerja pariwisata serta mendorong pembangunan yang lebih ramah lingkungan.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penulisan karya tulis ini. Terkhusus kepada Mitra Bestari Jurnal Inovasi yang telah banyak memberikan masukan, tanggapan dan kritik dalam penyempurnaan karya tulis ini. Semoga karya tulis ini memberi manfaat bagi kita semua, baik dalam kepentingan akademis maupun kepentingan praktis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani Basuki, Zaenal A. Budiono. 2011. Four Track Strategy dan Pembangunan Ekonomi H. Susilo Bambang Yudhoyono. Jakarta: Fajar Ilmu.
- Adner, Ron, K., & Rahul. 2010. Value Creation In Innovation Ecosystems: How The Structure of Technological Interdependence Affects Firm Performance In New Technology Generations. *Strategic Management Journal*, 31. hal 306-333.
- Adner, R. 2006. Match Your Innovation Strategy to Your Innovation Ecosystem. *Harvard Business Review* hal 2-11.
- Akoumianakis, D. 2014. Ambient affiliates in virtual cross-organizational tourism alliances: A case study of collaborative new product development. *Computers in Human Behavior*, 30 (January 2014), hal 773-786.
- Aktaş Şenkardeşler, R. 2020. Long-Run Nexus Between Tourism Receipts And Economic Growth: Empirical Evidence from Turkey. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 6(3), hal 135-147.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Survei Angkatan Kerja Nasional Indonesia 2018.
- Baggio, R., & Chiappa, G. Del. 2013. Information and Communication Technologies in Tourism 2013. Information and Communication Technologies in Tourism 2013, October.
- Basole, R. C. 2009. Visualization of interfirm relations in a converging mobile ecosystem. *Journal of Information Technology*, 24(2), hal 144-159.
- Blake, A., Sinclair, M. T., & Soria, J. A. C. 2006. Tourism productivity. Evidence from the United Kingdom. *Annals of Tourism Research*, 33(4), hal 1099-1120.
- Brida, J. G., Barquet, A., & Risso, W. A. 2010. Causality between economic growth and tourism expansion: Empirical evidence from Trentino-Alto adige. *Tourismos*. 5(2), hal 87-98.
- Cornelis, S., Faisal, B., Gunawan, M. P., Herman, Monballyu, M., Ermaula, F. A., Roosmalen, P., Agreholm, J., Sugeng, P., Setiawati, P., & Rostiana, E. 2018. Rencana induk pariwisata terpadu. [Online] Dari: [http://bpiw.pu.go.id/uploads/itmp/Laporan\\_Pendahuluan\\_ITMP\\_Danau\\_Toba.pdf](http://bpiw.pu.go.id/uploads/itmp/Laporan_Pendahuluan_ITMP_Danau_Toba.pdf)
- Dinata Wema Satya. 2018. "Terbongkar! Praktik Turis Murah dari Tiongkok di Bali Bakal Diberantas Pemerintah hingga ke Akar" *Tribun Mando*, 20 Oktober 2018 [Online] Dari: <https://manado.tribunnews.com/2018/10/20/terbongkar-praktik-turis-murah-dari-tiongkok-di-bali-bakal-diberantas-pemerintah-hingga-ke-akar?page=2> [Diakses: 11 September 2020]
- Dwyer, L., Forsyth, P., & Spurr, R. 2016. Tourism economics and policy analysis: Contributions and legacy of the Sustainable Tourism Cooperative Research Centre. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 26 (February), hal 91-99.
- Fairuza, M. 2017. Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata ( Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-13.
- Garza-Rodriguez, J. 2019. Tourism and poverty reduction in Mexico: An ARDL cointegration approach. *Sustainability (Switzerland)*, 11(3).
- Gökovali, U., & Bahar, O. 2006. Contribution of tourism to economic growth: A panel data approach. *Anatolia*, 17(2), hal 155-167.
- Hermawan, H. 2016. Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglangeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Pariwisata*. III(2) hal 105-127.
- Ilić, I., & Nikolić, A. 2018. Implications of modern technology development for the tourism sector of the Republic of Serbia. *Ekonomika*, 64(1), hal 37-52.
- Jarvi, K., & Kortelainen, S. 2017. Taking stock of empirical research on business ecosystems: A literature review. *International Journal of Business and Systems Research (IJBSR)*. 11(3) hal 215-228.
- Jayathilake, P. M. B. 2013. Tourism and economic growth in Sri Lanka: evidence from cointegration and causality analysis. *International Journal of Business, Economics and Law*. 2(2), hal 22-27.
- Kadir, N., & Karim, M. Z. A. 2012. Turizam i ekonomski rast u maleziji: Dokazi iz turističkih dolazaka iz ASEAN-5 zemalja. *Ekonomika Istrazivanja*, 25(4), hal 1089-1100.
- Kementerian Pariwisata. 2016. Ranking Devisa Pariwisata Terhadap 11 Ekspor barang Terbesar, Tahun 2011 - 2015. Ranking Devisa Pariwisata Terhadap 11 Ekspor Barang Terbesar, Tahun 2011 - 2015 [Online] Dari: <http://www.kemenpar.go.id/userfiles/devisa2011-2015.pdf>

- Lee, C. C., & Chang, C. P. 2008. Tourism development and economic growth: A closer look at panels. *Tourism Management*. 29(1), hal 180–192.
- Lisi, F. A., & Esposito, F. 2015. An AI application to integrated tourism planning. Congress of The Italian Association for Artificial Intelligence 2015. Hal 246–259.
- Moore, J. F. 1993. A New Ecology of Competition Harvard Business Review. *Harvard Business Review*. 71(3) hal 75–86.
- Morozova, L. S., Ananjev, A. N., Morozov, V. Y., Havanova, N. V., & Litvinova, E. V. 2015. Influence of tourism industry development on the regional labour market (On the example of the Yaroslavl region). *Review of European Studies*. 7(3) hal 51–65.
- Nag, A. 2018. A Study of Tourism Industry of Himachal Pradesh with Special Reference to Ecotourism. *Sumedha Journal of Management*. 7(1) hal 85–106.
- Njoya, E. T., & Seetaram, N. 2018. Tourism Contribution to Poverty Alleviation in Kenya: A Dynamic Computable General Equilibrium Analysis. *Journal of Travel Research*. 57(4) hal 513–524.
- Nugroho, L., Utami, W., & Doktoralina, C. M. 2019. Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqasid Syariah (Halal Tourism Business Ecosystem in the Maqasid Syariah Perspective). *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*. 3(2) hal 84–92.
- Onețiu, A. N., & Predonu, A.-M. 2013. Effects of Tourism on Labour Market. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 92(Lumen) hal 652–655.
- Peña-Sánchez, A. R., Ruiz-Chico, J., Jiménez-García, M., & López-Sánchez, J. A. 2020. Tourism and the SDGs: An analysis of economic growth, decent employment, and gender equality in the European Union (2009–2018). *Sustainability*. 12(13): 5480.
- Prasetya, D., & Rani, M. 2014. PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang). *Jurnal Politik Muda*. 3(3) hal: 412–421.
- Rusyidi, B., & Ferdiansah, M. 2018. Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(1), 144. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2017.v05.i01.p26>
- Sava, C., & Mateia, A. N. (2016). An Analysis of the Impact of the Internet. *QUAESTUS MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 347–352.
- Selander, L., Henfridsson, O., & Svahn, F. (2013). Capability search and redeem across digital ecosystems. *Journal of Information Technology*, 28, 183–197. [https://doi.org/10.1007/978-3-662-59807-8\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-662-59807-8_4)
- Selen, W., & Ogulin, R. 2015. Strategic Alignment across a Tourism Business Ecosystem. *Athens Journal of Tourism*. 2(3) hal 167–178.
- Still, K., Huhtamäki, J., Russell, M. G., & Rubens, N. 2014. Insights for orchestrating innovation ecosystems : the case of EIT ICT Labs and data-driven network visualisations Kaisa Still \* Jukka Huhtamäki Neil Rubens. *International Journal Technology Management*. 66(2/3) hal 243–265.
- Tang, D., & Lyons, R. 2016. An ecosystem lens: Putting China's digital music industry into focus. *Global Media and China*, 1(4) hal 350–371.
- Teeroovengadam, V. 2019. Environmental identity and ecotourism behaviours: examination of the direct and indirect effects. *Tourism Review*. 74(2) hal 257–269.
- TFAILY, R. 2018. E-Tourism and the Competitiveness of Tourism Products in the Context of the Global Tourism and Travel Industry Market. *Review of International Comparative Management*. 19(2) hal 187–195.
- Thomas, L. D. W., & Autio, E. 2012. Modeling the ecosystem: A meta-synthesis of ecosystem and related literatures. The DRUID Society Conference on Innovation and Competitiveness - Dynamics of Organizations, Industries, Systems and Regions, June, 0–27.
- Tsatsou, P., Elaluf-Calderwood, S., & Liebenau, J. 2010. Towards a taxonomy for regulatory issues in a digital business ecosystem in the EU. *Journal of Information Technology*. 25(3) hal 288–307.
- Tsaurai, K., & Chimbo, B. 2019. Information and communication technology (ICT) led tourism growth nexus in transitional markets. *Acta Universitatis Danubius. Œconomica*. 15(5) hal 38–56.
- Tung, L. T., & Cuong, L. K. 2020. Impact of tourism on poverty reduction: Evidence from an emerging tourism market. *Montenegrin Journal of Economics*. 16(3), hal 45–55.
- Wareham, J. D., Fox, P. B., & Cano Giner, J. L. 2013. Technology Ecosystem Governance. *ESADE Business School Research Paper*. 225-2 .
- Weng, C. C., & Wang, K. L. 2006. Scale and scope economies of international tourist hotels in Taiwan. *Tourism Management*. 27(1), hal 25–33.
- Yazdi, S. K. 2019. Structural breaks, international tourism development and economic growth. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*. 32(1) hal 1765–1776.

## Hasil Penelitian

# KINERJA USAHA DALAM PERIKANAN TANGKAP JARING PUKAT CINCIN

## *(BUSINESS PERFORMANCE IN CAPTURE FISHERIES OF PURSE SEINE NETS)*

*Herna Octivia Damayanti*

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati  
Jl. Raya Pati-Kudus Km. 3,5 Pati 59163  
Jawa Tengah - Indonesia  
Email: octivia\_oc@yahoo.co.id

*Diterima: 26 November 2019; Direvisi: 20 Oktober 2020; Disetujui: 03 Mei 2021*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis rasio R/C, faktor-faktor produksi yang berpengaruh, skala hasil (*return to scale*) dan tingkat efisiensi dari usaha perikanan tangkap jaring pukat cincin. Metode pengambilan sampel yaitu *simple random sampling* dengan 56 sampel nelayan jaring pukat cincin. Analisis data dengan *Revenue-Cost Ratio* (rasio R/C) dan fungsi produksi *Stochastic Frontier*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio  $r/C > 1$  sehingga layak untuk dijalankan. Faktor produksi yang signifikan 99% yaitu GT kapal, solar, oli, konsumsi dan jumlah ABK. Faktor produksi yang signifikan 95% yaitu luas jaring dan jumlah lampu dengan skala hasil (*Return to Scale*) adalah 1,276 yang berarti skala hasil yang meningkat. Tingkat efisiensi menunjukkan belum efisien. Rekomendasi penelitian yaitu perlu dibuat peraturan (dapat berupa Perda) untuk mengendalikan dan membatasi upaya penangkapan, dan perlu adanya pelatihan tentang manajemen usaha agar pelaku usaha perikanan khususnya jaring pukat cincin agar dapat menjalankan usahanya secara profesional dan efisien.

**Kata kunci:** efisiensi, pukat cincin, rasio R/C, skala hasil, *Stochastic Frontier Production*

### ABSTRACT

*The research objective was to analyze the R/C ratio, the influencing production factors return to scale and the efficiency level of capture fisheries business of Purse Seine nets. Sampling was simple random sampling with 56 Purse Seine fishermen samples. Data analysis with Revenue-Cost Ratio (R/C Ratio) and Stochastic Frontier Production Function. Research result showed that R/C ratio > 1, feasible to run. The 99% significant production factors, namely GT boats, diesel fuel, oil, consumption and the number of crew members. 95% significant production factors, namely large of the net and the number of lights with Return to Scale 1.276 means increasing return to scale. The level of efficiency shows inefficient. Research recommendations are regulations (in the form of local regulations) need to be made to control and limit fishing efforts and there is a need for training on business management so that fisheries businesses, especially Purse Seine nets, can conduct their business professionally and efficiently.*

**Keywords:** efficiency, Purse Seine, R/C ratio, return to scale, *Stochastic Frontier Production*

### PENDAHULUAN

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati No 19 Tahun 2009 mendefinisikan perikanan sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam

suatu sistem bisnis perikanan (Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, 2009).

Produksi perikanan nasional terdiri dari perikanan laut dan perairan umum. Produksi perikanan laut nasional sepanjang tahun 2012-2013 mengalami peningkatan. Tahun 2012 produksi perikanan laut nasional sebesar 5.435,633 ribu ton. Tahun 2013 produksi

perikanan laut nasional meningkat 4,99% menjadi 5.707,013 ribu ton. Tahun 2014 meningkat 5,79% menjadi 6.037,654 ribu ton. Pada tahun 2015 meningkat 2,77% menjadi 6.204,668 ribu ton, produksi kembali meningkat 2,37% menjadi 6.351,480 ribu ton pada tahun 2016. Rata-rata peningkatan produksi dari tahun 2012-2016 sebesar 3,98% (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2018).

Kabupaten Pati merupakan salah satu penghasil perikanan laut di Jawa Tengah. Tahun 2014, Kabupaten Pati menduduki peringkat keempat dengan kontribusi sebesar 9,54% setelah Kabupaten Rembang, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang. Untuk tahun 2015, Kabupaten Pati menduduki peringkat kedua dengan kontribusi sebesar 16,21%. Kontribusi perikanan laut terbesar di Jawa Tengah pada tahun 2015 disumbang oleh Kabupaten Rembang sebesar 20,48% (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2015-2016).

Pertumbuhan produksi perikanan laut Kabupaten Pati pada tahun 2013 mengalami penurunan jumlah produksi hingga 32,38% dibandingkan tahun 2012 dengan pertumbuhan nilai turun sebesar 14,24%. Tahun 2014, jumlah produksi perikanan laut Kabupaten Pati meningkat sebesar 0,36% dibandingkan tahun 2013 dengan pertumbuhan nilai turun 3,53%. Lonjakan produksi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 63,52% dengan pertumbuhan nilai meningkat sebesar 141,32%, sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan produksi secara tajam dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 48,60% dengan pertumbuhan nilai turun sebesar 67,56% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2013-2017).

Komoditas perikanan laut tangkap diperoleh nilai LQ 1,152. Nilai LQ perikanan laut tangkap Kabupaten Pati ini ternyata >1 sehingga mengindikasikan bahwa komoditas perikanan laut di kabupaten Pati lebih besar dari perusahaan rata-rata di Jawa Tengah, dan komoditas perikanan laut merupakan komoditas unggulan (Damayanti, 2013). Walden and McGuire (2011) menyebutkan bahwa perairan laut merupakan sumberdaya alam milik bersama sehingga nelayan mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan sumberdaya atau melakukan usaha penangkapan. Selain itu, sifat sumber daya perikanan yang *common property resources* dan bernilai ekonomi mendorong penduduk pesisir untuk ikut andil dalam kegiatan usaha perikanan tangkap, namun disisi lain dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya perikanan akibat eksploitasi sumber daya secara berlebihan (Putra, 2013).

Setiap usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tertentu akan selalu menginginkan keuntungan yang dapat berlangsung terus menerus. Suatu alat penangkapan yang baik merupakan satu kesatuan dari beberapa bagian yang dibentuk sedemikian rupa dengan menggunakan perhitungan dan teknik perancangan atau pembuatan yang telah diperhitungkan terlebih dahulu. Dalam usaha penangkapan, alat tangkap yang dipakai nelayan sangat mempengaruhi hasil tangkapan, karena semakin efektif suatu alat penangkapan maka semakin baik pula hasil tangkapan yang diperoleh (Silitonga dkk., 2016).

Untuk memperoleh produksi maksimal, harus mengadakan pemilihan penggunaan faktor produksi secara tepat, mengkombinasikan secara optimal dan efisien. Namun kenyataannya, masih banyak yang belum memahami bagaimana faktor produksi untuk digunakan secara efisien agar produksi semakin tinggi dan pendapatan meningkat (Panjaitan dkk., 2014).

Picaulima (2012) melakukan penelitian terhadap faktor produksi pada perikanan pukat cincin (*Purse Seine*) di Kabupaten Maluku Tenggara. Variabel penelitian adalah lama operasi, biaya eksploitasi, luas jaring, jumlah ABK dan ukuran kapal. Hasil penelitian yaitu faktor lama operasi, biaya eksploitasi, luas jaring, jumlah ABK, ukuran kapal memberikan berpengaruh terhadap produktivitas sebesar 89,70%, sedangkan variabel lama operasi dan luas jaring signifikan terhadap produktivitas pukat cincin pada tingkat kepercayaan 95%.

Suryana dan Rahardjo (2013) melakukan penelitian terhadap pengaruh panjang jaring, ukuran kapal, PK mesin dan jumlah ABK terhadap produksi ikan pada alat tangkap pukat cincin di Perairan Prigi Kabupaten Trenggalek-Jawa Timur. Variabel penelitian yaitu ukuran alat tangkap, ukuran kapal, PK mesin, jumlah ABK, produksi. Hasil penelitian yaitu panjang pukat cincin mempunyai pengaruh yang paling signifikan. GT kapal, PK mesin juga mempunyai pengaruh. Jumlah ABK mempunyai pengaruh paling rendah. Dari keempat variabel yang di analisa ternyata yang mempunyai pengaruh paling signifikan adalah panjang jaring dengan nilai R kuadrat 0,920483186 dan nilai F signifikan 4,04012E-53.

Alhuda dkk. (2016) melakukan penelitian terhadap produktivitas dan kinerja usaha nelayan pukat cincin di Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing, Bandar Lampung. Variabel penelitian yaitu hasil tangkapan, GT kapal, PK mesin, luas palka, jumlah ABK, jumlah trip, harga ikan, biaya operasional. Hasil penelitian yaitu produktivitas pukat cincin di PPP. Lempasing

cenderung menurun setiap tahunnya. Produktivitas tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 0,45 ton/trip, sedangkan produktivitas terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 0,10 ton/trip. Faktor kapasitas armada (X1), kekuatan mesin (X2), luas palka (X3), jumlah ABK (X4), dan jumlah trip (X5) berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan pada tingkat kepercayaan 95%. Secara parsial, hanya kapasitas armada (X1) dan kekuatan mesin (X2) yang berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan pukat cincin di PPP. Lempasing pada tingkat kepercayaan 95%. Rata-rata total pendapatan nelayan pukat cincin perkapal dalam setahun adalah Rp 497.892.000. Sedangkan rata-rata pendapatan bersih nelayan pukat cincin perkapal dalam setahun adalah Rp 301.372.000. Pendapatan bersih rata-rata nelayan pemilik pukat cincin setahun sebesar Rp 120.549.000. Pendapatan bersih rata-rata nelayan buruh (nakhoda dan ABK) dalam setahun adalah Rp 12.063.00. Usaha perikanan pukat cincin di daerah Lempasing layak untuk dikembangkan dengan nilai B/C rasio sebesar 2.53.

Penelitian ini dilakukan pada alat tangkap jaring pukat cincin yang merupakan penghasil tangkapan terbesar di Kabupaten Pati. Selain itu, jaring pukat cincin merupakan alat tangkap yang dijadikan alternatif oleh nelayan yang beralih dari alat tangkap jaring cantrang. Faktor produksi yang digunakan dalam penelitian berasal dari faktor produksi fisik (kapal, alat tangkap, mesin) dan faktor produksi biaya operasional (solar, lama trip, ABK dan konsumsi). Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian terhadap faktor produksi yang berpengaruh dan efisiensi usaha perikanan tangkap dengan jaring pukat cincin.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian adalah: 1) menganalisis R/C rasio usaha perikanan jaring pukat cincin; 2) menganalisis faktor produksi yang mempengaruhi usaha perikanan jaring pukat cincin; 3) menganalisis skala perolehan (*return to scale*) usaha perikanan jaring pukat cincin; dan, 4) menganalisis tingkat efisiensi usaha perikanan jaring pukat cincin.

## METODE

Jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Waktu penelitian dilakukan selama 5 (lima) yaitu bulan April-Agustus 2018 dengan lokasi penelitian di Desa Bajomulyo dan Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Populasi dalam penelitian ini adalah nelayan pemilik usaha perikanan yang menggunakan alat tangkap jaring pukat cincin. Teknik pengambilan sampel penelitian

dilakukan secara *simple random sampling* dengan tahapan sebagai berikut :

### a. Penentuan Populasi Penelitian

Berdasarkan data Pelabuhan Pendaratan Perikanan Bajomulyo (2017) populasi penelitian yaitu 56 (lima puluh enam) pukat cincin. Populasi ini diperoleh berdasarkan kriteria-kriteria tertentu:

**Tabel 1.** Kriteria Populasi Penelitian

No.	Kriteria
1.	Ukuran kapal 70-90 GT
2.	Lokasi di Desa terdekat dengan TPI Bajomulyo (Desa Bendar dan Bajomulyo)

Sumber: Data Penelitian (2018)

### b. Penentuan Populasi Penelitian

Menentukan sampel penelitian yaitu semua nelayan pemilik kapal jaring pukat cincin di Desa Bajomulyo dan Desa Bendar diambil dan dijadikan sampel penelitian. Jumlah nelayan pemilik kapal jaring pukat cincin disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Sampel Penelitian

No.	Lokasi	Sampel
1	Desa Bajomulyo	27
2	Desa Bendar	29
Jumlah		56

Sumber: Data Penelitian (2018)

Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap nelayan pemilik kapal, observasi, dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan terhadap responden dengan menggunakan media kuesioner untuk mengetahui: produksi ikan per trip; biaya operasional penangkapan per trip; biaya investasi; biaya administrasi pelayaran, biaya pemeliharaan, harga ikan per musim; jumlah trip selama 1 tahun; tenaga kerja yang digunakan; konsumsi; jumlah BBM yang digunakan; ukuran kapal; dan, kekuatan mesin kapal. Teknik observasi dilakukan untuk pengumpulan data pendukung tentang hasil tangkapan yang diperoleh. Teknik dokumentasi dilakukan untuk mendokumentasikan keadaan lokasi penelitian, deskripsi sarana tangkap, dan hasil tangkapan.

Analisis data dengan *Revenue-Cost* (R/C Rasio) adalah perbandingan antara total pendapatan dan total biaya dari suatu usaha. Analisis ini dilakukan untuk menganalisis performa usaha yang dikaji melalui pendapatan usahanya. Hasil perhitungan rasio R/C akan diketahui *probability* keuntungan/kerugian dan

kelayakan usaha perikanan yang dijalankan secara sistematis dituliskan :

$$\text{Profit}(\pi) = \text{TR} - \text{TC} = (p \cdot C) - (\text{FC} + \text{VC}) \dots \dots \dots (1)$$

$$\text{Rasio } R/C = \text{TR} / \text{TC} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

$\pi$  = Profit (Rp)

TR = total revenue / pendapatan total (Rp)

TC = total cost / biaya total (Rp)

FC = fixed cost / biaya tetap total (Rp)

VC = variable cost / biaya variabel total (Rp)

p = harga ikan (Rp/Kg)

C = total tangkapan (Kg)

Adapun kriteria hasil perhitungan ratio R/C adalah: a) Jika R/C ratio > 1, maka usaha yang dijalankan mengalami keuntungan atau layak

untuk dikembangkan; b) Jika R/C ratio < 1, maka usaha tersebut mengalami kerugian atau tidak layak untuk dikembangkan; dan, c) Jika R/C ratio = 1, maka usaha berada pada titik impas (*Break Event Point*). Biaya tetap (*fixed cost*) terdiri dari biaya investasi dan biaya administrasi. Sedangkan yang termasuk biaya tidak tetap (*variabel cost*) adalah biaya operasional.

Analisis faktor produksi perikanan jaring pukat cincin. Model yang digunakan yaitu fungsi produksi Frontier (*Stochastic Frontier Production Function*). Produksi jaring pukat cincin di Kabupaten Pati merupakan fungsi dari: GT kapal; ukuran kapal; kekuatan mesin; luas jaring pukat cincin; kapasitas freezer; kekuatan lampu; jumlah solar; jumlah oli; kebutuhan konsumsi; dan, jumlah ABK.

**Tabel 3.** Komponen Biaya Tetap dan Biaya Tidak Tetap Usaha Perikanan Jaring pukat cincin

Biaya Tetap ( <i>fixed cost</i> )			Biaya Operasional ( <i>variabel cost</i> )
Biaya Investasi	Biaya pemeliharaan	Biaya Administrasi	Biaya Operasional
a. Kapal	a. Perawatan Mesin	a. Ijin Usaha/SIUP	a. BBM (Solar)
b. Mesin	b. Perawatan Kapal	b. Pergantian kesehatan buku	b. Oli
c. Alat Tangkap	c. Perawatan Alat Tangkap	c. Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)	c. Perbekalan (Air Bersih, konsumsi)
d. Lampu		d. Surat Laik Operasi (SLO)	d. Buku SIJIL
e. Freezer		e. Pas Besar	e. Ijin Radio
			f. Surat Persetujuan Berlayar
			g. Surat Ijin Pengawasan Pengisian BBM (BUNKER)
			h. Retribusi TPI

**Tabel 4.** Variabel Terikat dan Tidak Terikat Usaha Perikanan pukat cincin

No.	Variabel		Skala Pengukuran
1.	Produksi	LnY	kg
2.	GT kapal	LnKapal	GT
3.	Mesin	LnMesin	PK
4.	Luas Jaring	LnJaring	Meter Persegi
5.	Freezer	LnFreezer	kg
6.	Lampu	LnLampu	Watt
7.	Solar	LnSolar	Liter
8.	Oli	LnOli	Liter
9.	Konsumsi	LnKonsumsi	Rp
10.	ABK	LnABK	orang

Secara matematis persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y=f(\text{kapal, mesin, jaring, freezer, lampu, solar, oli, konsumsi, ABK})\dots\dots(2)$$

Bentuk Estimasi fungsi produksi frontier adalah sebagai berikut:

$$\text{Ln } Y = b + b_1 \text{ LnKapal} + b_2 \text{ LnMesin} + b_3 \text{ LnJaring} + b_4 \text{ LnFreezer} + b_5 \text{ LnLampu} + b_6 \text{ LnSolar} + b_7 \text{ LnOli} + b_8 \text{ LnKonsumsi} + b_9 \text{ LnABK} + e \dots\dots (3)$$

Analisis *Return to scale* usaha perikanan jaring pukat cincin, dihitung dari penjumlahan koefisien elastisitas input fisik yaitu LnKapal, LnMesin, LnJaring, LnFreezer, LnLampu, LnSolar, LnOli, dan LnABK. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:

$$\sum b_i \text{ fisik} = b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 + b_6 + b_7 + b_8 \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan:

- b<sub>1</sub> = koefisien elastisitas LnKapal
- b<sub>2</sub> = koefisien elastisitas LnMesin
- b<sub>3</sub> = koefisien elastisitas LnJaring
- b<sub>4</sub> = koefisien elastisitas LnFreezer
- b<sub>5</sub> = koefisien elastisitas LnLampu
- b<sub>6</sub> = koefisien elastisitas LnSolar
- b<sub>7</sub> = koefisien elastisitas LnOli
- b<sub>8</sub> = koefisien elastisitas LnABK

Analisis efisiensi usaha perikanan jaring pukat cincin. Fungsi produksi frontier stokastik (*stochastic frontier production function*) untuk menganalisis efisiensi (Nurjati dkk., 2018). Penelitian ini dilakukan analisis untuk efisiensi teknis, efisiensi harga (alokatif) dan efisiensi ekonomi.

Efisiensi teknis adalah proses produksi dengan menggunakan kombinasi beberapa *input* saja untuk menghasilkan *output* yang maksimal (Hanafi, 2017).

$$\gamma = (\sigma_u^2)/(\sigma^2) \dots\dots\dots(5)$$

$$\sigma_u^2 + \sigma_v^2, \text{ dan } 0 \leq \gamma \leq 1 \dots\dots\dots (6)$$

Apabila  $\gamma$  mendekati 1, dan  $\sigma_v^2$  mendekati nol dan  $v_i$  adalah tingkat kesalahan maka dikatakan in-efisiensi. Perbedaan antara output aktual dengan output potensial menunjukkan in-efisiensi dalam produksi. Jondrow et al dalam Zen et al. (2002) memperlihatkan kondisi rata-rata dari  $u_i/\varepsilon_i$  dalam persamaan sebagai berikut:

$$E(u_i/\varepsilon_i) = (\sigma_u \sigma_v / \sigma) \left\{ \left[ \frac{f(\varepsilon \lambda \sigma^{-1})}{1 - F(\varepsilon \lambda \sigma^{-1})} \right] - (\varepsilon^{-1} \lambda \sigma^{-1}) \right\} \dots\dots\dots (7)$$

Dimana:

- $\varepsilon_i$  : adalah penjumlahan dari  $v_i$  dan  $u_i$
- $\sigma$  adalah persamaan untuk  $(\sigma_u^2 + \sigma_v^2)^{1/2}$
- $\lambda$  adalah ratio dari  $\sigma_u$  atas  $\sigma_v$
- $f$  dan  $F$  adalah standart normal density dan fungsi distribusi evaluasi atas  $\varepsilon_i \sigma \lambda \sigma^{-1}$

Untuk mendapatkan efisiensi teknis (ET) dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$ET_i = \exp(E(u_i/\varepsilon_i)) \dots\dots\dots(8)$$

$$0 \leq ET_i \leq 1$$

Efisiensi Harga/Alokatif. Efisiensi harga menerangkan hubungan antara biaya dan *output*. Efisiensi harga tercapai jika suatu perusahaan mampu memaksimalkan keuntungan dengan menyamakan Nilai Produksi Marjinal (NPM) setiap faktor produksi dengan harganya (Hanafi, 2017).

$$\frac{b_i Y P_i}{X} = P_x \dots\dots\dots(9)$$

atau

$$\frac{b_i Y P_i}{X P_x} = 1 \dots\dots\dots(10)$$

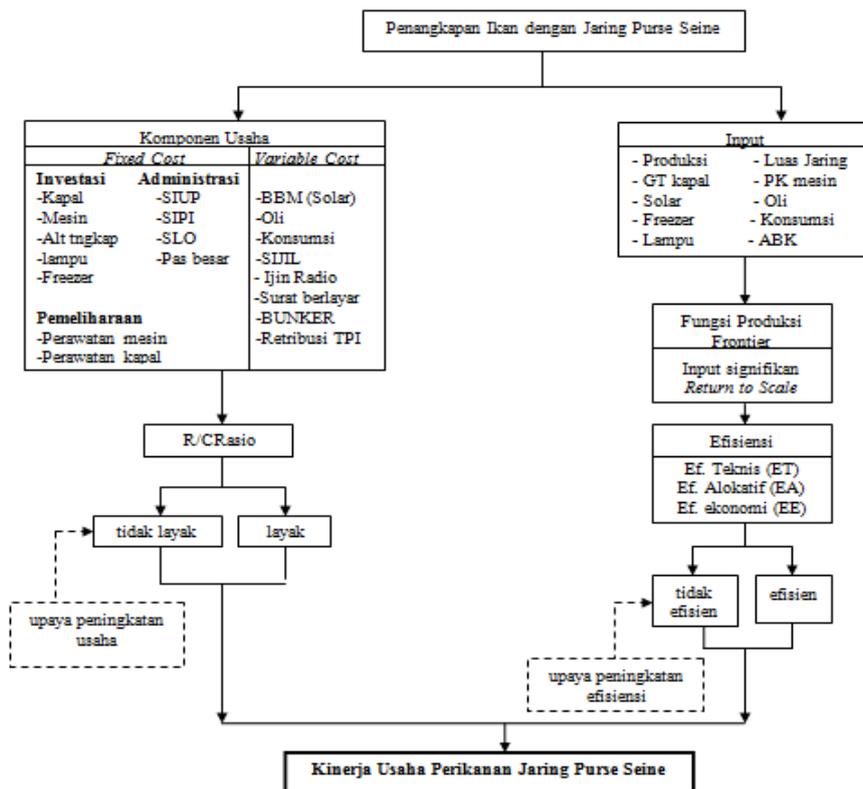
Dimana:

- $P_x$  = Harga faktor produksi X
- $Y$  = Produksi
- $X$  = Jumlah faktor produksi X
- $b$  = elastisitas produksi

Dalam banyak kenyataan NPM<sub>x</sub> tidak selalu sama dengan  $P_x$ , yang sering terjadi adalah sebagai berikut: a)  $(NPM_x / P_x) > 1$  ; artinya penggunaan input X belum efisien, untuk mencapai efisien input X perlu ditambah; b)  $(NPM_x / P_x) < 1$  ; artinya penggunaan input X tidak efisien, untuk menjadi efisien maka penggunaan input X perlu dikurangi.

Efisiensi Ekonomi. Efisiensi ekonomi merupakan hasil kali antara seluruh efisiensi teknis dengan efisiensi harga atau alokatif dari seluruh faktor input (Hanafi, 2017). Jadi efisiensi ekonomi dapat dicapai jika kedua efisiensi tersebut tercapai sehingga dapat dituliskan sebagai berikut:

$$EE = ET.EH \dots\dots\dots(11)$$



Gambar 1. Kerangka Penelitian  
Sumber: Pengolahan data (2018)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kelayakan Finansial Usaha Perikanan Jaring pukat cincin.** Analisis kelayakan finansial untuk usaha perikanan jaring pukat cincin dengan menggunakan rasio R/C. Perhitungan rasio R/C dilakukan untuk musim puncak, musim biasa dan musim paceklik. Terdapat dua skenario dalam perhitungan rasio R/C yaitu 1) skenario I adalah skenario ideal, dimana seluruh biaya penyusutan peralatan dimasukkan sebagai *fix cost* (biaya tetap) yaitu ABK ikut menanggung seluruh biaya penyusutan; 2) Skenario II adalah skenario negosiasi, dimana terdapat hasil negosiasi antara nelayan pemilik dengan ABK untuk menanggung biaya penyusutan peralatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan pemilik, besar biaya penyusutan peralatan yang ikut ditanggung oleh ABK adalah 16% dari pendapatan setelah dikurangi biaya operasional.

**Revenue-Cost Ratio (Rasio R/C) Musim Puncak.** Skenario I. Analisis finansial dengan Rasio R/C untuk skenario I musim puncak disajikan pada Tabel 5. Rasio R/C usaha perikanan jaring pukat cincin sebesar 2,767. Sari (2011) menyebutkan bahwa Rasio R/C > 1 juga menunjukkan usaha yang dijalankan sudah

efisien. Nilai rasio R/C 2,767 menunjukkan setiap pengeluaran Rp1.000,00 akan memperoleh pendapatan sebesar Rp2.767,00. Keuntungan usaha yang diperoleh untuk musim puncak berdasarkan skenario I adalah Rp582.657.474,00. Keuntungan ini akan dibagi dengan *sharing system* (bagi hasil) antara pemilik kapal dan ABK. Rincian *sharing system* yaitu 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri mempunyai rincian nahkoda mendapat 2 bagian dari 50%, tenaga mekanik/mesin mendapat 1,5 bagian dari 50% dan ABK lain mendapat 1 bagian dari 50%.

Hasil perhitungan *sharing system* adalah pemilik kapal memperoleh bagian Rp291.328.737,00 dan ABK memperoleh bagian hasil sebesar Rp291.328.737,00. Bagian ABK ini kemudian dibagi untuk masing-masing ABK. Jika rata-rata jumlah ABK kapal jaring cumi adalah 34 orang dengan rincian 1 orang nahkoda, 2 orang teknisi mesin dan 31 orang ABK biasa. Upah per orang pada musim puncak adalah nahkoda Rp17.136.985,00; upah teknisi mesin Rp12.852.738,00 dan upah ABK biasa Rp8.568.492,00.

Tabel 5. Perhitungan Rasio R/C Musim Puncak Skenario I

Deskripsi	Rp	%
Pendapatan Total	912.375.000	
Biaya Total	329,717,526	100,00
<b>Biaya Tetap</b>	<b>118,699,308</b>	<b>36,00</b>
Biaya Penyusutan	50,581,506	42,61
• Kapal	17,532,761	14,77
• Mesin	4,065,374	3,42
• Alat tangkap	10,154,319	8,55
• Freezer	9,370,108	7,89
• Lampu	9,458,944	7,97
Biaya Pemeliharaan	44,145,833	37,19
Biaya administrasi	14,513,024	12,23
<b>Biaya operasional</b>	<b>211,018,218</b>	<b>64,00</b>
Solar	126,407,857	38,34
Oli	2,324,464	0,70
Konsumsi	71,428,571	21,66
Buku SIJIL	302,500	0,09
Ijin radio	66,071	0,02
Ijin berlayar	62,500	0,02
Ijin BUNKER	25,179	0,01
Retribusi TPI	10,401,075	3,15
<b>Keuntungan (profit)</b>	<b>582,657,474</b>	
<b>Rasio R/C</b>	<b>2,767</b>	

Sumber: Pengolahan Data (2018)

Skenario II. Analisis finansial dengan Rasio R/C untuk skenario II, musim puncak disajikan pada Tabel 6. Rasio R/C sebesar 2,389. Nilai rasio R/C 2,389 menunjukkan setiap pengeluaran Rp1.000,00 akan memperoleh pendapatan sebesar Rp2.389,00. Rasio R/C >1 juga menunjukkan usaha yang dijalankan sudah efisien. Keuntungan usaha yang diperoleh untuk musim puncak berdasarkan skenario II adalah Rp530.480.839,00. Hasil perhitungan *sharing system* adalah pemilik kapal memperoleh bagian Rp265.240.420,00 dan ABK memperoleh bagian hasil sebesar Rp265.240.420,00. Dengan demikian upah per orang pada musim puncak adalah nahkoda Rp15.602.378,00; upah teknisi mesin Rp11.701.783,00 dan upah ABK biasa Rp7.801.189,00.

**Revenue-Cost Ratio (Rasio R/C) Musim Biasa.** Skenario I. Analisis finansial dengan Rasio R/C untuk skenario I musim biasa disajikan pada Tabel 7. Rasio R/C sebesar 1,712. Nilai rasio R/C 1,712 menunjukkan setiap pengeluaran Rp1.000,- akan memperoleh pendapatan sebesar Rp1.712,00. Keuntungan usaha yang diperoleh untuk musim biasa berdasarkan skenario I adalah Rp339.911.501,00. Hasil perhitungan *sharing*

*system* adalah pemilik kapal memperoleh bagian Rp169.955.751,00 dan ABK memperoleh bagian hasil sebesar Rp169.955.751,00. Dengan demikian upah per orang pada musim biasa adalah nahkoda Rp9.997.397,00; upah teknisi mesin Rp7.498.048,00 dan upah ABK biasa Rp4.998.699,00.

Skenario II. Analisis finansial dengan Rasio R/C untuk skenario II musim biasa disajikan pada Tabel 8. Rasio R/C sebesar 1,636. Nilai rasio R/C 1,636 menunjukkan setiap pengeluaran Rp1.000,00 akan memperoleh pendapatan sebesar Rp1.636,00. Rasio R/C >1 juga menunjukkan usaha yang dijalankan sudah efisien. Keuntungan usaha yang diperoleh untuk musim biasa berdasarkan skenario II adalah Rp317.722.615,00. Hasil perhitungan *sharing system* adalah pemilik kapal memperoleh bagian Rp158.861.307,00 dan ABK memperoleh bagian hasil sebesar Rp158.861.307,00. Dengan demikian upah per orang pada musim biasa adalah nahkoda Rp9.344.783,00; upah teknisi mesin Rp7.008.587,00 dan upah ABK biasa Rp4.672.391,00.

**Tabel 6.** Perhitungan Rasio R/C Musim Puncak Skenario II

Deskripsi	Rp	%
Pendapatan Total	912.375.000	
Biaya Total	381.894.161	100,00
<b>Biaya Tetap</b>	<b>170.875.943</b>	<b>44,74</b>
Biaya Penyusutan	112.217.085	65,67
Biaya Pemeliharaan	44,145,833	25,84
Biaya administrasi	14,513,024	8,49
<b>Biaya operasional</b>	<b>211.018.218</b>	<b>55,26</b>
Solar	126,407,857	33,10
Oli	2,324,464	0,61
Konsumsi	71,428,571	18,70
Buku SIJIL	302,500	0,08
Ijin radio	66,071	0,02
Ijin berlayar	62,500	0,02
Ijin BUNKER	25,179	0,01
Retribusi TPI	10,401,075	2,72
<b>Keuntungan (profit)</b>	<b>530.480.839</b>	
<b>Rasio R/C</b>	<b>2,389</b>	

Sumber: Pengolahan Data (2018)

**Tabel 7.** Perhitungan Rasio R/C Musim Biasa Skenario I

Deskripsi	Rp	%
Pendapatan Total	817.366.071	
Biaya Total	477.454.570	100,00
<b>Biaya Tetap</b>	<b>163.927.299</b>	<b>34,33</b>
Biaya Penyusutan	75.098.615	45,81
• Kapal	26,108,130	15,93
• Mesin	5,979,330	3,65
• Alat tangkap	14,814,999	9,04
• Freezer	14,086,350	8,59
• Lampu	14,109,807	8,61
Biaya Pemeliharaan	52,732,887	32,17
Biaya administrasi	21,985,991	13,41
<b>Biaya operasional</b>	<b>313.527.271</b>	<b>65,67</b>
Solar	190,606,310	39,92
Oli	3,347,083	0,70
Konsumsi	109,797,619	23,00
Buku SIJIL	302,500	0,06
Ijin radio	66,071	0,01
Ijin berlayar	62,500	0,01
Ijin BUNKER	25,179	0,01
Retribusi TPI	9,320,009	1,95
<b>Keuntungan (profit)</b>	<b>339.911.501</b>	
<b>Rasio R/C</b>	<b>1,712</b>	

Sumber: Pengolahan Data (2018)

**Tabel 8.** Perhitungan Rasio R/C Musim Biasa Skenario II

<b>Deskripsi</b>	<b>Rp</b>	<b>%</b>
Pendapatan Total	817.366.071	
Biaya Total	499.643.457	100,00
<b>Biaya Tetap</b>	<b>149.469.638</b>	<b>29,92</b>
Biaya Penyusutan	74.750.760	50,01
Biaya Pemeliharaan	52,732,887	35,28
Biaya administrasi	21,985,991	14,71
<b>Biaya operasional</b>	<b>350.173.818</b>	<b>70,08</b>
Solar	227,252,857	45,48
Oli	3,347,083	0,67
Konsumsi	109,797,619	21,98
Buku SIJIL	302,500	0,06
Ijin radio	66,071	0,01
Ijin berlayar	62,500	0,01
Ijin BUNKER	25,179	0,01
Retribusi TPI	9,320,009	1,87
<b>Keuntungan (profit)</b>	<b>317.722.615</b>	
<b>Rasio R/C</b>	<b>1,636</b>	

Sumber: Pengolahan Data (2018)

**Tabel 9.** Perhitungan Rasio R/C Musim Paceklik Skenario I

<b>Deskripsi</b>	<b>Rp</b>	<b>%</b>
Pendapatan Total	736.750.000	
Biaya Total	578.469.524	100,00
<b>Biaya Tetap</b>	<b>197.820.753</b>	<b>34,20</b>
Biaya Penyusutan	90.046.060	45,52
• Kapal	31,444,917	15,90
• Mesin	7,269,325	3,67
• Alat tangkap	18,298,574	9,25
• Freezer	17,454,746	8,82
• Lampu	15,578,498	7,88
Biaya Pemeliharaan	65,985,119	33,36
Biaya administrasi	26,211,076	13,25
<b>Biaya operasional</b>	<b>380.648.771</b>	<b>65,80</b>
Solar	240,631,429	41,60
Oli	3,947,857	0,68
Konsumsi	127,214,286	21,99
Buku SIJIL	302,500	0,05
Ijin radio	66,071	0,01
Ijin berlayar	62,500	0,01
Ijin BUNKER	25,179	0,00
Retribusi TPI	8,398,950	1,45
<b>Keuntungan (profit)</b>	<b>158.280.476</b>	
<b>Rasio R/C</b>	<b>1,274</b>	

Sumber : Pengolahan Data (2018)

**Tabel 10.** Perhitungan Rasio R/C Musim Paceklik Skenario II

Deskripsi	Rp	%
Pendapatan Total	736.750.000	
Biaya Total	518.583.163	100,00
<b>Biaya Tetap</b>	<b>151.312.963</b>	<b>29,18</b>
Biaya Penyusutan	59.116.768	39,07
Biaya Pemeliharaan	65.985.119	43,61
Biaya administrasi	26.211.076	17,32
<b>Biaya operasional</b>	<b>367.270.200</b>	<b>70,82</b>
Solar	227.252.857	43,82
Oli	3.947.857	0,76
Konsumsi	127.214.286	24,53
Buku SIJIL	302.500	0,06
Ijin radio	66.071	0,01
Ijin berlayar	62.500	0,01
Ijin BUNKER	25.179	0,00
Retribusi TPI	8.398.950	1,62
<b>Keuntungan (profit)</b>	<b>218.166.837</b>	
<b>Rasio R/C</b>	<b>1,421</b>	

Sumber : Pengolahan Data (2018)

**Revenue-Cost Ratio (Rasio R/C) Musim Paceklik.** Skenario I. Analisis finansial dengan Rasio R/C untuk skenario I musim paceklik disajikan pada Tabel 9. Rasio R/C sebesar 1,274. Nilai rasio R/C 1,274 menunjukkan setiap pengeluaran Rp1.000,00 akan memperoleh pendapatan sebesar Rp1.274,00. Rasio R/C >1 juga menunjukkan usaha yang dijalankan sudah efisien. Keuntungan usaha yang diperoleh untuk musim paceklik berdasarkan skenario I adalah Rp158.280.476,00. Hasil perhitungan *sharing system* adalah pemilik kapal memperoleh bagian Rp79.140.238,00 dan ABK memperoleh bagian hasil sebesar Rp79.140.238,00. Dengan demikian upah per orang pada musim paceklik adalah nahkoda Rp4.655.308,00; upah teknisi mesin Rp3.491.481,00 dan upah ABK biasa Rp2.327.654,00.

Skenario II. Analisis finansial dengan Rasio R/C untuk skenario II musim paceklik disajikan pada Tabel 10. Rasio R/C sebesar 1,421. Nilai rasio R/C 1,421 menunjukkan setiap pengeluaran Rp1.000,00 akan memperoleh pendapatan sebesar Rp1.421,00. Rasio R/C >1 juga menunjukkan usaha yang dijalankan sudah efisien. Keuntungan usaha yang diperoleh untuk musim paceklik berdasarkan skenario II adalah Rp218.166.837,00. Hasil perhitungan *sharing system* adalah pemilik kapal memperoleh bagian Rp109.083.418,00 dan ABK memperoleh bagian

hasil sebesar Rp109.083.418,00. Dengan demikian upah per orang pada musim paceklik adalah nahkoda Rp6.416.672,00; upah teknisi mesin Rp4.812.504,00 dan upah ABK biasa Rp3.208.336,00.

Tangke (2011) menyebutkan bahwa berdasarkan penilaian aspek ekonomi dan kelayakan finansial, diperoleh hasil bahwa pengembangan usaha unit penangkapan pukat cincin dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan alat tangkap lainnya. Hal ini dilihat dari produktifitas pukat cincin yang tinggi, sehingga menghasilkan pendapatan kotor per tahun, pendapatan kotor per trip maupun pendapatan kotor per jam kerja operasi yang tinggi. Hasil penelitian Neliyana dkk. (2014) PPP Lampulo Banda Aceh menyebutkan bahwa usaha perikanan pukat cincin masih layak untuk dilanjutkan. Demikian pula dengan hasil penelitian Sartika (2017) yang menyebutkan bahwa kelayakan usaha alat tangkap pukat cincin dikatakan layak karena memperoleh keuntungan sekitar Rp581.801.800,00 sampai Rp1.229.061.240,00 per tahun dengan R/C >1 yaitu 1,055 sampai 2,021.

**Faktor Produksi Usaha Perikanan Jaring pukat cincin.** Hasil estimasi fungsi produksi frontier usaha perikanan jaring pukat cincin secara lengkap disajikan pada Tabel 11.

**Tabel 11.** Estimasi Fungsi Produksi Frontier Usaha Perikanan Jaring pukat cincin

No	Variabel	Koefisien	Std. error	t- ratio
1	Konstanta	-3,03184	3,31170	-0,91550***
2	LX1 (Kapal)	0,40417	0,54698	0,73891***
3	LX2 (Mesin)	0,73507	0,19964	3,68190
4	LX3 (Jaring)	0,28790	0,12823	2,24522**
5	LX4 (Freezer)	0,26022	0,09515	2,73498
6	LX5 (Lampu)	-0,13739	0,06204	-2,21452**
7	LX6 (Solar)	-0,00456	0,05086	-0,08960***
8	LX7 (Oli)	-0,21681	0,25436	-0,85241***
9	LX8 (Konsumsi)	0,01083	0,07287	0,14867***
10	LX9 (ABK)	-0,05261	0,23862	-0,22047***
11	$\gamma$	0,00001	0,01551	0,00078***
12	$\sigma^2$	0,04069	0,00750	5,42177
13	Log Likelihood 1	10,19262		
14	Log Likelihood 2	10,19262		
15	Mean TE	0,99944		
16	Mean Inefisiensi	0,00006		
17	N	56		

Sumber : Pengolahan Data (2018)

Keterangan :

LY = *dependent variable* (produksi)

\*\*\* Nyata pada taraf kepercayaan 99%

\*\* Nyata pada taraf kepercayaan 95%

TE = Efisiensi Teknis

Estimasi fungsi produksi frontier usaha perikanan jaring pukat cincin adalah:

$$\begin{aligned} \text{Ln Produksi} = & -3,03184 + 0,40417 \text{Ln kapal} + 0,73507 \text{Ln mesin} + 0,28790 \text{Ln jaring} \\ & + 0,26022 \text{Ln freezer} - 0,13739 \text{Ln lampu} - 0,00456 \text{Ln solar} \\ & - 0,21681 \text{Ln oli} + 0,01083 \text{Ln konsumsi} - 0,05261 \text{Ln ABK} + e \dots\dots\dots(12) \end{aligned}$$

Koefisien variabel input pada fungsi produksi frontier bernilai positif dan negatif menunjukkan bahwa model tidak dalam kondisi normal yaitu terjadi kecenderungan fungsi produksi sudah jenuh. Interpretasi model usaha perikanan jaring pukat cincin dijelaskan sebagai berikut:

**Kapal.** Koefisien regresi untuk input kapal adalah sebesar 0,40417. Hal ini berarti bahwa apabila ukuran/GT kapal dinaikkan 1% (kondisi *ceteris paribus*) maka akan mengakibatkan peningkatan output produksi sebesar 0,40417%. Penambahan ukuran kapal (GT kapal) berpeluang menambah jumlah produksi karena tersedia ruang penyimpanan yang lebih besar. Input GT kapal berpengaruh secara signifikan pada taraf kepercayaan 99% terhadap produksi usaha perikanan jaring pukat cincin. Alhuda dkk. (2016) menyebutkan bahwa kapal yang berukuran besar umumnya mampu menampung hasil tangkapan yang lebih banyak. Kapal

dengan kapasitas yang besar mampu beroperasi lebih jauh akan mempengaruhi hasil tangkapan.

**Mesin.** Koefisien regresi untuk input Mesin sebesar 0,73507. Hal ini berarti jika penggunaan kapasitas mesin dinaikkan 1% (kondisi *ceteris paribus*) maka akan mengakibatkan peningkatan output produksi sebesar 0,73507%. Penambahan PK mesin berpeluang akan meningkatkan jumlah produksi. Hal ini karena kemampuan mesin bertambah sehingga proses kerja akan lebih efisien dan lebih cepat. Namun, perlu diingat bahwa proses penangkapan juga berhubungan dengan ketersediaan stok ikan sehingga peningkatan input produksi harus diimbangi dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kondisi dan status daerah penangkapannya untuk meminimalisir potensi kerugian. Input mesin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi usaha perikanan jaring pukat cincin. Alhuda dkk. (2016) menyebutkan bahwa kekuatan mesin akan menentukan kecepatan kapal saat mengejar gerombolan ikan. Kapal dengan mesin penggerak yang besar umumnya mampu melakukan proses pelingakran jaring dengan waktu yang lebih singkat sehingga peluang ikan untuk meloloskan diri lebih kecil.

**Jaring.** Koefisien regresi untuk input jaring sebesar 0,28790. Hal ini berarti jika penggunaan input luas jaring dinaikkan 1% (kondisi *ceteris*

*paribus*) maka akan mengakibatkan peningkatan output produksi sebesar 0,28790%. Penambahan luas jaring cumi akan menambah jumlah produksi, namun hal ini juga dipengaruhi oleh ketersediaan stok ikan. Jika telah terjadi over eksploitasi maka produksi akan tetap turun walaupun luas jaring ditambah. Input jaring berpengaruh secara signifikan pada taraf kepercayaan 95% terhadap produksi usaha perikanan jaring pukat cincin.

*Freezer.* Koefisien regresi untuk input freezer sebesar 0,26022. Hal ini berarti jika penggunaan kapasitas freezer dinaikkan 1% (kondisi *ceteris paribus*) maka akan mengakibatkan peningkatan output produksi sebesar 0,26022%. Penambahan kapasitas freezer akan meningkatkan produksi. Namun, sama halnya dengan penambahan luas jaring, dalam penambahan kapasitas freezer juga harus mempertimbangkan status daerah penangkapan (ketersediaan stok ikan). Input freezer tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi usaha perikanan jaring pukat cincin. Alhuda dkk. (2016) menyebutkan bahwa keuntungan penambahan kapasitas penyimpanan selain memperbanyak hasil tangkapan, juga memaksimalkan usaha mempertahankan tingkat kesegaran ikan sampai dijual, sehingga mempengaruhi harga jual ikan.

*Lampu.* Koefisien regresi untuk input lampu sebesar -0,13739. Hal ini berarti jika penggunaan jumlah lampu dinaikkan 1% (kondisi *ceteris paribus*) maka akan mengakibatkan penurunan output produksi sebesar 0,13739%. Penambahan jumlah lampu berpeluang menurunkan jumlah produksi. Nelwan dkk. (2015) menyebutkan bahwa respon ikan terhadap cahaya memiliki keterbatasan sehingga daya pikat lampu untuk mengkonsentrasikan ikan juga menurun atau efektivitas kekuatan lampu semakin berkurang seiring bertambahnya durasi pengoperasian. Dengan demikian, penggunaan lampu yang terlalu banyak dapat menurunkan daya pikat terhadap ikan karena batasan respon ikan terhadap cahaya. Selain itu, jumlah lampu yang terlalu banyak akan menambah pengeluaran untuk biaya operasional. Input lampu berpengaruh secara signifikan pada taraf kepercayaan 95% terhadap produksi usaha perikanan jaring pukat cincin.

*Solar.* Koefisien regresi untuk input Solar sebesar -0,00456. Hal ini berarti jika penggunaan input Solar dinaikkan 1% (kondisi *ceteris paribus*) maka akan mengakibatkan penurunan output produksi sebesar 0,00456%. Penambahan jumlah BBM berpeluang untuk menurunkan jumlah produksi, karena berhubungan dengan ketersediaan stok ikan.

Penambahan jumlah solar berarti memperpanjang durasi trip, hal ini cenderung akan menurunkan produksi karena wilayah penangkapan akan dieksploitasi lebih lama sehingga dalam jangka panjang jumlah stok akan berkurang sehingga produksi akan menurun. Input solar berpengaruh secara signifikan pada taraf kepercayaan 99% terhadap produksi usaha perikanan jaring pukat cincin.

*Oli.* Koefisien regresi untuk input oli sebesar -0,21681. Hal ini berarti jika penggunaan input oli dinaikkan 1% (kondisi *ceteris paribus*) maka akan mengakibatkan penurunan output produksi sebesar 0,21681%. Sama halnya dengan penambahan jumlah solar, penambahan jumlah oli juga berpeluang untuk menurunkan jumlah produksi. Alasannya sama seperti pada penambahan solar, penambahan jumlah oli berarti memperpanjang durasi trip dan mengakibatkan wilayah penangkapan akan dieksploitasi lebih lama. Input oli berpengaruh secara signifikan pada taraf kepercayaan 99% terhadap produksi usaha perikanan jaring pukat cincin.

*Konsumsi.* Koefisien regresi untuk input konsumsi sebesar 0,01083. Hal ini berarti jika penggunaan konsumsi dinaikkan 1% (kondisi *ceteris paribus*) maka akan mengakibatkan peningkatan output produksi sebesar 0,01083%. Penambahan jumlah konsumsi akan berpeluang menambah jumlah produksi karena memperpanjang lama trip. Namun, hal ini hanya terjadi dalam jangka waktu pendek karena lama trip yang panjang justru akan menurunkan produksi. Input konsumsi berpengaruh secara signifikan pada taraf kepercayaan 99% terhadap produksi usaha perikanan jaring pukat cincin.

*ABK.* Koefisien regresi untuk input ABK sebesar -0,05261. Hal ini berarti jika jumlah ABK dinaikkan 1% (kondisi *ceteris paribus*) maka akan mengakibatkan penurunan output produksi usaha perikanan jaring cumi sebesar 0,05261%. Jumlah ABK yang terlalu banyak akan membuat kegiatan penangkapan menjadi tidak efisien dan dapat memperlambat proses kerja karena kesulitan dalam melakukan koordinasi. Selain itu, pada wilayah yang telah terjadi overeksploitasi walaupun jumlah tenaga kerja ditambah produksi akan tetap mengalami penurunan. Input ABK berpengaruh secara signifikan pada taraf kepercayaan 99% terhadap produksi usaha perikanan jaring pukat cincin.

**Skala Perolehan (*Return to Scale*) Usaha Perikanan Jaring Pukat Cincin.** Nilai *return to scale* pada usaha perikanan jaring pukat cincin di Kabupaten Pati adalah:

$$\begin{aligned} \sum \text{bi fisik} &= 0,40417 + 0,73507 + 0,28790 + 0,26022 - \\ & 0,13739 - 0,00456 - 0,21681 - 0,05261 \\ &= 1,27599 \dots\dots\dots(13) \end{aligned}$$

Hasil penjumlahan tersebut menjelaskan bahwa usaha perikanan jaring pukat cincin di Kabupaten Pati berada dalam kondisi skala hasil yang meningkat (*increasing return to scale*), karena nilai *return to scale* lebih dari 1 yaitu 1,27599. Hal ini berarti apabila terjadi penambahan faktor produksi sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan *output* sebesar 1,27599%. Namun demikian, status usaha perikanan jaring pukat cincin di Kabupaten Pati berada pada transisi tahap II ke tahap III atau mulai terjadi penurunan produksi.

**Tingkat Efisiensi Usaha Perikanan Jaring Pukat Cincin. Efisiensi Teknis.** Nilai efisiensi teknis rata-rata adalah sebesar 0,99944 yang berarti usaha perikanan jaring pukat cincin di Kabupaten Pati belum seluruhnya melakukan kegiatannya secara efisien sehingga masih dimungkinkan untuk ditingkatkan. Nilai inefisiensi teknis rata-rata usaha perikanan jaring pukat cincin di Kabupaten Pati sebesar 0,00006 (Lihat Tabel 11).

Budiarti dkk. (2015) menyebutkan bahwa penyebab belum efisiennya usaha perikanan jaring pukat cincin di Pemangkat Kalimantan Barat dapat disebabkan dari faktor input produksi berupa trip, bahan bakar dan konsumsi. Wiyono (2012) dari hasil penelitiannya terhadap penggunaan alat tangkap pukat cincin di Muncar Jawa Timur diperoleh temuan bahwa efisiensi teknis usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap pukat cincin menunjukkan gejala *overcapacity*.

Optimalisasi dapat dilakukan dengan cara pengurangan variable input yang digunakan yaitu BBM, tenaga kerja dan perbekalan. Penelitian Hufiadi dan Wisudo (2010) terhadap kapal pukat cincin dengan berbagai ukuran GT menyimpulkan bahwa efisiensi dapat dicapai dengan melakukan pengurangan input

penangkapan terutama input lampu dan bahan bakar minyak. Koeshendrajana dkk. (2012) memberikan rekomendasi penggunaan peta perkiraan *fishing ground* untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan penangkapan, dengan dibekali peta perkiraan *fishing ground* diharapkan dapat lebih cepat mencapai daerah penangkapan ikan sehingga lebih efisien dalam pemanfaatan BBM.

**Efisiensi Alokatif.** Untuk melihat faktor produksi secara rinci yang tidak efisien dilakukan perhitungan terhadap efisiensi alokatif (efisiensi harga) (Sudantoko, 2010). Faktor produksi yang tidak efisien (nilai efisiensi alokatif kurang dari 1) adalah lampu, solar, oli dan ABK. Temuan penelitian memberikan gambaran bahwa usaha perikanan jaring pukat cincin harus lebih efisien untuk mengoptimalkan produktivitasnya.

Secara keseluruhan, nilai efisiensi alokatif usaha perikanan jaring pukat cincin adalah -169,88 yang berarti penggunaan input tidak efisien. Jika nilai efisiensi alokatif lebih kecil daripada satu maka situasi ini menunjukkan penggunaan input yang tidak efisien sehingga untuk menjadi efisien penggunaan input perlu dikurangi. Sukiyono dan Romdhon (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peningkatan efisiensi sebaiknya lebih ditekankan pada peningkatan jumlah tangkapan dan menjaga stabilitas harga ikan hasil tangkapan. Dengan kata lain, upaya peningkatan efisiensi alokatif tidak selalu harus dilakukan dengan jumlah input yang digunakan, tetapi juga dapat dilakukan melalui komponen pembentuk efisiensi itu sendiri. Khusus pada usaha perikanan tangkap melalui peningkatan jumlah tangkapan dengan tetap menjaga keberlanjutan perikanan laut.

**Tabel 12.** Efisiensi Alokatif Usaha Perikanan Jaring pukat cincin

No	Faktor produksi	Px X	PQ Q	b	MPx	EA
1	Kapal	2.109.821.429	2.466.491.071	0,404	6.105.175.919	2,89
2	Mesin	299.553.571	2.466.491.071	0,735	3.355.770.165	11,20
3	Jaring	455.178.571	2.466.491.071	0,288	8.564.205.109	18,82
4	Freezer	549.107.143	2.466.491.071	0,260	9.486.504.121	17,28
5	Lampu	44.089.286	2.466.491.071	-0,137	-18.003.584.463	-408,34
6	Solar	560.925.357	2.466.491.071	-0,456	-5.408.971.648	-9,64
7	Oli	9.619.405	2.466.491.071	-0,217	-11.366.318.302	-1,181,60
8	Konsumsi	385.833.333	2.466.491.071	0,108	22.837.880.291	59,19
9	ABK	121.219.748	2.466.491.071	-0,526	-4.689.146.524	-38,68
						-169,88

Sumber: Pengolahan data (2018)

**Efisiensi Ekonomis.** Hasil perhitungan efisiensi ekonomis dapat dilihat pada Tabel 13. Hasil analisis efisiensi ekonomis usaha perikanan jaring pukat cincin sebesar -169,78. Oleh karena nilai efisiensi ekonomis kurang dari 1 maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan input yang tidak efisien sehingga untuk menjadi efisien penggunaan input perlu dikurangi. Guna mencapai efisiensi maka usaha perikanan jaring pukat cincin harus melakukan pengurangan penggunaan sejumlah input.

Pada perhitungan efisiensi alokatif diperoleh bahwa penggunaan input lampu, solar, oli dan ABK tidak efisien. Maka, penggunaan input-input tersebut dapat dikurangi. Penggunaan input lampu dapat dikurangi karena fungsi lampu hanya sebagai alat untuk menarik perhatian ikan dan mengkonsentrasikan ikan, sehingga penggunaannya dapat dibatasi baik jumlah maupun durasi menyalanya disesuaikan dengan kebutuhan saat proses penangkapan ikan.

Penggunaan solar dan oli juga dapat disesuaikan dengan jumlah trip, lama trip dan luas daerah penangkapan yang dijelajahi, sehingga sebelum melakukan pelayaran perlu direncanakan lama trip dan daerah jelajah terlebih dahulu. Jumlah ABK juga disesuaikan dengan kapasitas kapal dan kebutuhan untuk proses penangkapan ikan, karena selain berhubungan dengan proses penangkapan, jumlah ABK akan mempengaruhi persediaan/persediaan/konsumsi yang harus disediakan.

**Tabel 13.** Efisiensi Ekonomis Usaha Perikanan Jaring pukat cincin

ET	EH	EE
0.9994	-	-
3996	169.88	169.78

Sumber : Pengolahan Data (2018)

**KESIMPULAN**

Rasio R/C usaha perikanan jaring pukat cincin musim puncak, musim biasa, musim paceklik baik skenario I dan skenario II adalah >1. Pengaruh faktor produksi terhadap usaha perikanan jaring pukat cincin: input signifikan pada taraf kepercayaan 99% yaitu GT kapal, solar, oli, konsumsi dan jumlah ABK. Input signifikan pada taraf kepercayaan 95% yaitu luas jaring dan jumlah lampu. *Return to Scale* usaha perikanan jaring pukat cincin >1 berarti *increasing return to scale*. Tingkat efisiensi usaha perikanan jaring pukat cincin: efisiensi teknis, efisiensi alokatif dan efisiensi ekonomis belum efisien.

**REKOMENDASI**

1. Perlu dibuat peraturan (dapat berupa Perda) untuk mengendalikan dan membatasi upaya penangkapan. Peraturan atau Perda ini didalamnya mencakup pembatasan jumlah kapal dan lama trip, serta pembatasan kuota atau jumlah tangkapan juga dilakukan agar jumlah tangkapan tidak melampaui TAC.
2. Perlu adanya pelatihan tentang manajemen usaha agar pelaku usaha perikanan khususnya jaring pukat cincin agar dapat menjalankan usahanya secara profesional dan efisien. Termasuk didalamnya bimbingan teknis tentang perhitungan penggunaan faktor-faktor produksi untuk mencapai efisiensi usaha, terutama untuk faktor-faktor produksi yang signifikan mempengaruhi yaitu ukuran GT kapal, solar, oli, konsumsi, jumlah ABK, luas jaring dan jumlah lampu.

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini, khususnya responden penelitian (nelayan jaring pukat cincin) di Kabupaten Pati yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alhuda, A., Anna, Z. dan Rustikawati, I. 2016. Analisis Produktivitas dan kinerja Usaha Nelayan *Purse Seine* di Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing, Bandar Lampung. *Jurnal Perikanan Kelautan VII*(1), hal. 30-40.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. 2013. *Pati dalam Angka Tahun 2012*. Pati: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. 2014. *Pati dalam Angka Tahun 2013*. Pati: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. 2015. *Pati dalam Angka Tahun 2014*. Pati: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. 2016. *Pati dalam Angka Tahun 2015*. Pati: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. 2017. *Pati dalam Angka Tahun 2016*. Pati: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2015. *Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2014*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2016. *Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2015*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

- Budiarti, T. W., Wiyono, E. S. dan Zulbainarni, N. 2015. Poduksi Optimal Pukat Cincin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, Kalimantan Barat. *Jurnal Litbang Perikanan Indonesia* 21(1), hal. 37–44.
- Damayanti, H. O. 2013. Komoditas Perikanan di Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* IX(2), hal. 98–106.
- Hanafi, R. 2017. Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi Pada Industri Kecil dan menengah Furnitur di Kota Pekanbaru. *JOM Fekon* 4(1), hal. 883–897.
- Hufiadi dan Wisudo, S. H. 2010. Efisiensi Teknis Perikanan Pukat Cincin di Pekalongan. *Jurnal Litbang Perikanan Indonesia* 16(1), hal. 21–27.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2018. *Produksi Perikanan Nasional 2008-2017*. Jakarta: Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Koeshendrajana, S., Apriliani, T. and Firdaus, M. 2012. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Usaha Perikanan Tangkap Laut Skala Kecil Melalui Fasilitasi Peta Perkiraan Fishing Ground. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 2(1), hal. 77–88.
- Neliyana, Wiryawan, B., Wiyono, E. S., Nurani, T. W. 2014. Analisis Kelayakan Usaha Perikanan Pukat Cincin di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lampulo Banda Aceh Provinsi Aceh. *Marine Fisheries* 5(2), hal. 163–169.
- Nelwan, A. F. P., Sudirman, M. N. and Yunus, M. A. 2015. Produktivitas Penangkapan Ikan Pelagis di Perairan Kabupaten Sinjai Pada Musim Peralihan Barat-Timur. *Jurnal Perikanan XVII*(1), hal. 18–26.
- Nurjati, E., Fahmi, I. and Jahroh, S. 2018. Analisis Efisiensi Produksi Bawang Merah di Kabupaten Pati dengan Fungsi Produksi Frontier Stokastik Cobb-Douglas. *Jurnal Agro Ekonomi* 36(1), hal. 55–69.
- Panjaitan, F. E. D., Lubis, S. N. dan Hashim, H. 2014. Analisis Efisiensi Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Jagung (Studi Kasus: Desa Kuala, Kecamatan Tiga binanga, Kabupaten Karo). *Journal On Social Economic Of Agriculture And Agribusiness* (1). [Online] Dari: <https://media.neliti.com/media/publications/15214-ID-analisis-efisiensi-produksi-dan-pendapatan-usahatani-jagung-studi-kasus-desa-kua.pdf> [Diakses 26 Februari 2018].
- Pelabuhan Pendaratan Perikanan Bajomulyo. 2017. Data Kapal PPP Bajomulyo. Pati: Pelabuhan Pendaratan Perikanan Bajomulyo.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. 2009. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tempat Pelelangan Ikan. Pati: Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.
- Picaulima, S. M. 2012. Analisis Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Produktivitas Perikanan Pukat Cincin di Kabupaten Maluku Tenggara. *Journal of Tropical Fisheries* 7(1), hal. 611–616.
- Putra, S. E. 2013. *Analisis Usaha Penangkapan Ikan Yang Berkelanjutan Pada Kondisi Perubahan Iklim*. Tesis, Universitas Diponegoro.
- Sari, K. M. 2011. *Analisis Usaha Pengolahan Ikan Asin di Kabupaten Cilacap*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret.
- Sartika, I. 2017. *Analisa Kelayakan Usaha dan Selektivitas Alat Tangkap Purse Seine dan Gillnet Kapal 30 GT di Perairan Sibolga Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Silitonga, C., Isnaniah dan Syofyan, I. 2016. Studi Konstruksi Alat Tangkap Pukat Cincin (*Purse Seine*) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga Kelurahan Pondok Batu Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. [Online] Dari: <https://media.neliti.com/media/publications/18454-4-ID-study-on-construction-of-purse-seine-in.pdf> [Diakses 21 Februari 2018].
- Sudantoko, D. 2010. *Pemberdayaan Industri Batik Skala Kecil di Jawa Tengah (Studi Kasus di Kabupaten dan kota Pekalongan)*. Disertasi, Universitas Diponegoro.
- Sukiyono, K. dan Romdhon, M. M. 2016. Efisiensi Alokatif Faktor Produksi Pada Usaha Perikanan Tangkap di Kota Bengkulu : Kasus Pada Alat Tangkap Gillnet. *Jurnal Saintek Perikanan* 11(2), hal. 99–104.
- Suryana, S. A., Rahardjo, I. P. dan Sukandar. 2013. Pengaruh Panjang Jaring, Ukuran Kapal, PK mesin dan Jumlah ABK Terhadap Produksi Ikan Pada Alat Tangkap *Purse Seine* di Perairan Prigi Kabupaten Trenggalek-Jawa Timur. *PSPK Student Journal* I(1), hal. 36–43.
- Tangke, U. 2011. Analisis Kelayakan Usaha Perikanan Tangkap Menggunakan Alat Tangkap Gillnet dan *Purse Seine* di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan (Agrikan UMMU-Ternate)* 4(1), hal. 1–13.
- Walden, J. B. and McGuire, C. J. 2011. Who Owns The Fish? Moving From The Commons To The Federal Ownership Of Our National Fisheries. *Marine Resources Committee Newsletter* 14(2), hal. 3–7.
- Wiyono, E. S. 2012. Analisis Efisiensi Teknis Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap *Purse Seine* di Muncar, Jawa Timur. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian* 22(3), hal. 164–172.
- Zen, L. W., Abdullah, N. M. R. and Yew, T. S. 2002. Technical Efficiency of the Driftnet and Payang Seine (Lampara) Fisheries in West Sumatra, Indonesia. *Asian Fisheries Science* 15(2002), hal. 97–106.

## Hasil Penelitian

# KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN INSES DI KECAMATAN TANJUNG TIRAM

## *(PUBLIC POLICY COMMUNICATION FOR COUNTERMEASURES OF INSES IN TANJUNG TIRAM SUB-DISTRICT)*

*Hasan Sazali*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang 20371  
Sumatera Utara - Indonesia  
Email: hasansazali@uinsu.ac.id

*Diterima: 08 September 2020; Direvisi: 08 November 2020; Disetujui: 15 Februari 2021*

### ABSTRAK

Berbagai penyimpangan di masyarakat kerap kita temukan bertentangan dengan norma sosial. Salah satu yang marak terjadi adalah perilaku inses yang didapati di berbagai wilayah. Masyarakat beranggapan persoalan inses merupakan urusan keluarga dan tidak perlu diketahui oleh pihak lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komunikasi kebijakan publik dalam penanggulangan inses. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu melalui observasi, wawancara dan fokus grup diskusi. Analisis data hasil penelitian dilakukan berdasarkan sumber informasi transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah, dan menyusun data yang ada, selanjutnya data disusun berdasarkan sumber informasi, dan membaca keseluruhan data. Kemudian, menganalisis lebih detail dengan mengkodekan-data, mempertimbangkan petunjuk-petunjuk secara detail yang dapat membantu proses coding sewaktu menganalisa dari data yang ada. Terakhir mendeskripsikan temuan-temuan data dalam bentuk naratif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa permasalahan terjadinya inses adalah kurangnya peran pemerintah dalam komunikasi kebijakan publik dan dalam memberikan perlindungan secara hukum. Selain itu, dalam komunikasi kebijakan publik untuk menanggulangi terjadinya inses diperlukan pertukaran informasi dan menjalin hubungan komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Dalam implementasi kebijakan publik yang dilakukan pemerintah belum dapat menyentuh korban-korban inses untuk melaporkan kejadian yang dialaminya karena ketakutan tidak adanya perlindungan bagi korban.

**Kata kunci:** komunikasi, kebijakan publik, inses

### ABSTRACT

*We often find various deviations in society against social norms. One of the things that are rife is the incest behavior that is found in various regions. People think that incest is a family affair and does not need to be known by other parties. The purpose of this study is to analyze public policy communication in dealing with incest. This type of research is qualitative research. The data collection technique was carried out in three stages, namely through observation, interviews, and focus group discussions. The data analysis of the research results was carried out based on the source of the interview transcription information, scanning the material, typing in the field data, or sorting and compiling the existing data, then the data was compiled based on the information source, second, reading the entire data. Then, analyze in more detail by coding-data, considering detailed instructions that can help the coding process when analyzing the existing data. Finally, describe the data findings in a narrative form. The results of this study found that the problem with incest was the lack of the government's role in public policy communication and in providing legal protection. In addition, in public policy communication to combat incest, it is necessary to exchange information and establish a two-way communication relationship between the public and the government. In the implementation of public policies carried out, the government has not been able to touch incest victims to report the events they experienced because of fear of the lack of protection for victims.*

**Keywords:** communication, public policy, incest

## PENDAHULUAN

Kejahatan adalah tindakan melawan hukum yang dapat dihukum oleh negara atau otoritas lain. Berbicara masalah kejahatan saat ini tentu saja merupakan suatu hal yang sudah merajalela di dunia, khususnya di Indonesia. Kejahatan merupakan gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang. Semakin kompleksnya masyarakat dewasa ini, dapat mempengaruhi seseorang maupun kelompok tertentu dalam mempertinggi persaingan hidup terutama kebutuhan ekonomi yang ditandai dengan munculnya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin yang memunculkan berbagai jenis kejahatan (Amy, et.al, 2018).

Melalui informasi dari media massa, baik media cetak maupun media elektronik setiap harinya selalu saja ada pemberitaan yang marak mengenai tindak kejahatan. Dalam perkembangan sehari-hari banyak terjadi kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta kekayaan (pencurian, penggelapan, pemerasan, penipuan dan lain-lain), kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain serta berbagai jenis kejahatan dibidang kesusilaan, dan salah satunya yang saat ini yang memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak adalah tindak pidana perkosaan (Duouai and Perry, 2018).

Lebih tragis lagi apabila perkosaan itu dilakukan di kalangan keluarga sendiri atau yang disebut incest yang merupakan salah satu kejahatan seksual yang masih sangat tabu di dalam masyarakat dan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia. Inses telah menjadi salah satu realitas dan praktik paling brutal dari keluarga dan masyarakat selama berabad-abad. Meskipun banyak negara memiliki undang-undang larangan sendiri terkait masalah ini (Minnet, 2018).

Ditemukan berbagai macam penyimpangan yang bertentangan dengan norma sosial dan norma agama yang terjadi di masyarakat karena pada dasarnya individu memiliki daya ingat yang tinggi tentang informasi norma sosial (Gorman, et.al, 2008). Salah satu yang termasuk paling parah dan fatal adalah perilaku incest yang didapati di berbagai wilayah seperti yang banyak terjadi di Kecamatan Tanjung Tiram khususnya dan masyarakat nelayan yang tinggal di pinggiran laut umumnya. Kondisi ini terjadi diakibatkan banyak faktor, antara lain melemahnya peran keluarga, pemerintah dan masyarakat sebagai fondasi struktur dan

kehidupan sosial. Fenomena perilaku incest banyak yang tidak sampai ke aparat pemerintah, sehingga tidak diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Thornhill (1991) dalam Junior (2017) merumuskan bahwa perilaku yang disebut incest dalam sosial literatur sains dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, Endogami incest yang berkaitan dengan seksual hubungan antar individu dengan hubungan keluarga, yaitu, yang memiliki hubungan kekerabatan dengan keturunan langsung (misalnya, antara orang tua dan anak atau antara saudara kandung). Kedua, Endogami non-incest yang meliputi seksual persetubuhan antar individu dengan kekerabatan yang lebih jauh (antara sepupu, misalnya). Ketiga, aktivitas seksual berasal dari perzinahan antara orang-orang tanpa genetik kekerabatan dalam konteks akrab (anak tiri dan ibu tiri).

Sebagian masyarakat beranggapan persoalan incest merupakan urusan keluarga dan tidak perlu diketahui oleh pihak lain, karena persoalan ini dianggap aib bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Sejatinya, upaya sistem komunikasi kebijakan publik yang dibangun selama ini oleh pemerintah terhadap keluarga dan masyarakat belum mampu meminimalisir fenomena incest. Pada akhirnya setiap tahun terjadi kenaikan angka pelaku dan korban incest. Inses merupakan hubungan sumbang (tidak normal) yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki ikatan kekerabatan inti, biasanya ayah dengan anak perempuannya, baik kandung atau tiri; anak laki-laki dengan saudara perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya.

Menurut pendekatan sosiologis banyak kondisi yang memungkinkan perilaku incest ini terjadi (Millan, et.al, 2017). Salah satunya adalah faktor ekonomi. Fenomena incest di Kecamatan Tanjung Tiram adalah sebahagian besar terjadi pada perempuan yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, dengan pertimbangan ekonomi, lebih memilih untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW) keluar negeri ketimbang mencari sumber ekonomi dilingkungan tempat tinggalnya.

Secara kuantitas perempuan yang menjadi TKW terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan sulitnya sumber perekonomian di tempat lingkungannya. Suami yang ditinggal bertahun-tahun bersama dengan anak perempuannya yang setiap hari semakin tumbuh besar membuka peluang besar untuk terjadinya incest dengan ketiadaan ibu di samping mereka berdua. Peluang incest semakin lebar ketika kondisi rumah yang sederhana

tanpa kamar tidur pemisah bagi anak laki-laki dan perempuan dan bagi anak dan orang tuanya.

Fenomena pelecehan seksual bernuansa inses merupakan suatu fenomena gunung es dan telah berlangsung cukup lama tanpa ada penanganan dan malah, menariknya, tidak terekspos. Tanpa adanya sebuah upaya sistem komunikasi kebijakan publik permasalahan inses tidak akan pernah teratasi. Komunikasi adalah objek kebijakan, seperti yang terlihat dalam upaya pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk menginformasikan dan mendidik berbagai publik tentang masalah inses di masyarakat.

Komunikasi kebijakan publik yang efektif adalah sebuah alat penting untuk membantu mencapai tujuan kebijakan. Transparansi dan komunikasi kebijakan publik yang proaktif harus terus berlanjut agar akar permasalahan sosial masyarakat tidak semakin marak dan berkembang. Menyikapi permasalahan inses yang telah diuraikan diatas, perlu untuk menganalisis bagaimana sistem komunikasi kebijakan publik dalam penanggulangan inses di Kecamatan Tanjung Tiram.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap informan dengan teknik *snowball throwing* dan diskusi grup terfokus. Disamping itu juga, peneliti menggunakan data-data sekunder yang berhubungan dengan topik penelitian. Ditambah lagi data-data statistik yang berasal dari instansi terkait. Analisis data pada penelitian kualitatif biasanya dilakukan pengaturan data secara logis dan sistematis, analisa data kualitatif dilakukan sejak awal terjun ke lokasi penelitian, hingga akhir penelitian (Sugiyono, 2011).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pendekatan analisa data kualitatif dalam penelitian ini, pertama mengubah dan mempersiapkan data-data untuk di analisis. Langkah pertama melibatkan hasil dari transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah, dan menyusun data yang ada, selanjutnya data disusun berdasarkan sumber informasi, dilanjutkan dengan membaca keseluruhan data.

Kedua, menganalisis lebih detail dengan mengkodekan data. Ketiga, mempertimbangkan petunjuk-petunjuk secara detail yang dapat membantu proses coding sewaktu menganalisa data yang ada. Keempat mendeskripsikan temuan-temuan data dalam bentuk naratif dengan berbagai pendekatan yang memiliki keterkaitan dengan data yang akan dianalisa sebagai contoh; pembahasan kronologi suatu

pristiwa, tema-tema tertentu yang menurut peneliti memiliki hal yang menarik untuk dianalisa lebih dalam (Sugiyono, 2011).

Analisis deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian. Hasil reduksi data tersebut disusun sedemikian rupa agar masing-masing pola, kategori, fokus dengan tema yang akan dipahami tentang substansi persoalannya dapat disimpulkan dengan interpretasi pemahaman yang baik. Melalui proses krosek siklus inilah diharapkan konstruksi temuan penelitian dapat dibuat dengan baik, dengan memiliki landasan pengambilan kesimpulan yang kuat. Untuk lebih melengkapi data supaya lebih komprehensif pada beberapa karakteristik dilakukan kuantifikasi prespektif statistik (Sugiyono, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Komunikasi Kebijakan Publik Penanggulangan Inses di Kecamatan Tanjung Tiram.** Komunikasi memegang peranan penting dalam semua aspek pembangunan termasuk didalam mengatasi permasalahan sosial, ekonomi dan budaya (Zang, 2017). Disamping itu, dalam komunikasi kebijakan publik dapat menjembatani permasalahan sosial yang sudah mengakar seperti perilaku inses. Komunikasi kebijakan publik dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga mencerminkan transparansi informasi dalam penanggulangan inses. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan menempatkan kebijakan publik (Klijin, 2017).

Beberapa kebijakan publik yang diadopsi untuk menanggulangi inses masih belum berjalan dengan baik seperti penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Masih banyak diantara para saksi dan korban yang masih menutup-nutupi kejadian inses tersebut. Alasannya adalah dikarenakan ketakutan akan tidak adanya perlindungan. Guna memutus rantai inses di Kecamatan Tanjung tiram perlu dilakukan komunikasi kebijakan publik dua arah dengan melakukan pertukaran informasi.

Komunikasi dua arah dalam menanggulangi inses memerlukan pertukaran informasi yang saling menguntungkan di mana masyarakat dan pemerintah dapat berbagi masalah atau menyarankan pendapat dengan pemerintah saat mengadopsi kebijakan. Saat ini, beberapa organisasi sektor publik menggunakan beranda internet atau bahkan blog yang dipersonifikasikan untuk mempromosikan partisipasi masyarakat dalam komunikasi dengan mereka (Quy, 2018).

Komunikasi dua arah seperti itu memungkinkan adanya saling menguntungkan memahami kebutuhan dan keinginan satu sama lain dari kedua sisi. Intervensi pemerintah terhadap fenomena inses dapat meminimalisir konflik antara pemerintah dan individu dalam komunikasi (Phuong, 2017). Sikap ini bisa dijelaskan dengan menerapkan konsep *reaktansi psikologis* yang harus dikelompokkan ke dalam pola sikap seperti; kehati-hatian terhadap nasihat orang lain; dan menghindari konflik. Tidak dapat dipungkiri dampak kemiskinan merupakan salahsatu faktor yang menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan untuk menanggulangi fenomena inses di Tanjung Tiram.

Apabila dilihat dari kondisi sosial masyarakat Kecamatan Tanjung Tiram, banyak di antara para ibu rumah tangga dan wanita di daerah tersebut mengadu nasib ke negara tetangga khususnya Malaysia menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) sebagai pembantu rumah tangga. Banyaknya kaum perempuan menjadi TKW ke luar negeri, secara tidak langsung telah

memberikan dampak sosial tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Tanjung Tiram.

Kondisi tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membangun komunikasi kebijakan publik dengan mensosialisasikan pentingnya menjaga keluarga inti agar terhindari dari perilaku menyimpang. Agar peran ibu tidak digantikan oleh ayah, seperti sentuhan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan lainnya. Dari data yang dihimpun berdasarkan temuan dalam penelitian ini korban inses terjadi setiap tahun (Tabel 1).

Tabel 1 menjadi gambaran terhadap berbagai macam situasi dan kondisi Kecamatan Tanjung Tiram. Aspek ekonomi turut memunculkan persoalan sosial di masyarakat. Dampak sosial yang terjadi salah satunya adalah munculnya perilaku inses di daerah tersebut. Pada kurun waktu 2016, 2017 dan 2018, jumlah kasus inses yang terjadi di Kecamatan Tanjung Tiram berjumlah 12 orang (Tabel 20. Namun demikian, data ini sesungguhnya masih banyak yang belum terungkap. Pelaku tertinggi banyak dilakukan oleh kakak lelaki kandung sebanyak 6 orang, terendah oleh ayah tiri sebanyak 1 orang.

**Tabel 1.** Data Korban Inses di Kecamatan Tanjung Tiram

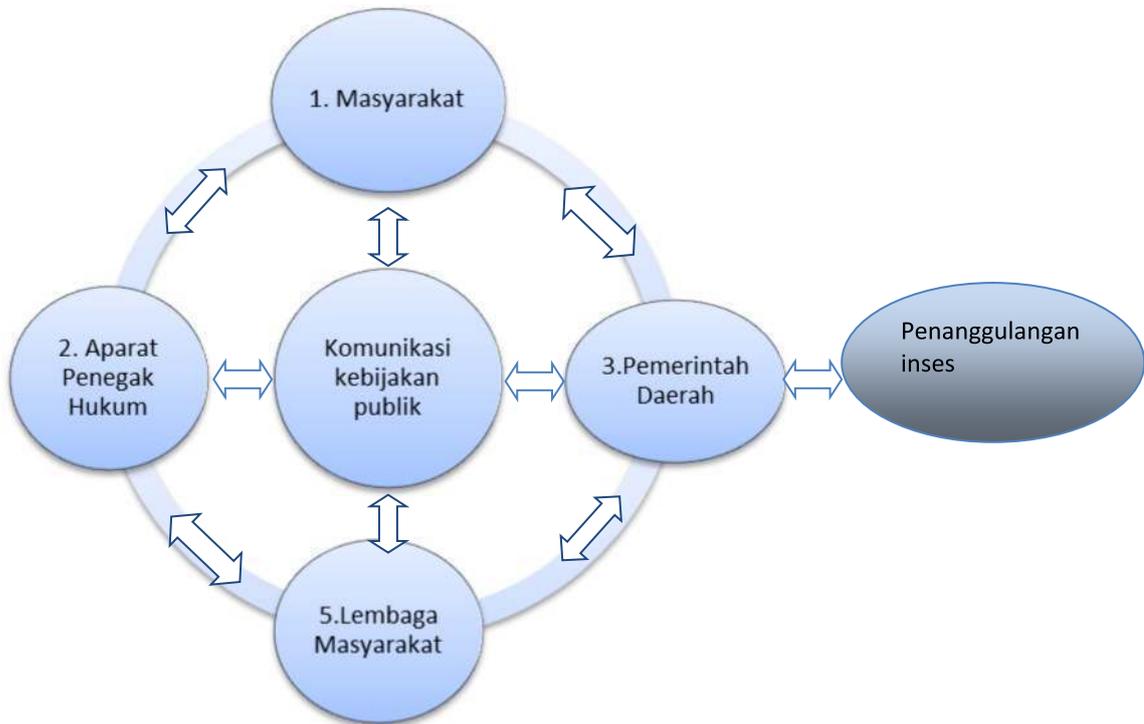
No.	Bentuk Kejahatan	Korban	Usia	Pelaku	Tahun Kejadian
1.	Pemerksaan	Adik Perempuan	13 Tahun	Abang	2017
2.	Pemerksaan	Adik Perempuan	15 Tahun	Abang	2017
3.	Pemerksaan	Cucu Perempuan	8 Tahun	Kakek	2018
4.	Pemerksaan	Anak Perempuan	14 Tahun	Ayah	2016
5.	Pemerksaan	Anak Perempuan	12 Tahun	Ayah tiri	2017
6.	Pemerksaan	Anak Perempuan	15 Tahun	Ayah kandung	2016
7.	Pemerksaan	Anak Perempuan	13 Tahun	Ayah kandung	2018
8.	Pemerksaan	Cucu Perempuan	11 Tahun	Kakek	2017
9.	Pemerksaan	Adik Perempuan	13 Tahun	Abang	2018
10.	Pemerksaan	Adik Perempuan	15 Tahun	Abang	2017
11.	Pemerksaan	Adik Perempuan	15 Tahun	Abang	2016
12.	Pemerksaan	Adik Perempuan	14 Tahun	Abang	2018

Sumber: Sazali and Misrah (2018)

**Tabel 2.** Persentase Kategori Pelaku Inses di Kecamatan Tanjung Tiram

No.	Kategori Pelaku	Jumlah	Persentase
1.	Abang	6	50
2.	Ayah Kandung	3	25
3.	Kakek	2	17
4.	Ayah tiri	1	8
<b>Total</b>		<b>12</b>	<b>100</b>

Sumber: Sazali and Misrah (2018)



**Gambar 1.** Hubungan Antar Lembaga Dalam Komunikasi Kebijakan Publik Penanggulangan Inses  
Sumber: Sazali (2020)

Berdasarkan persentase kategori pelaku inses pada Tabel 2, menjelaskan bahwa fenomena inses ini dapat terjadi bagi semua kalangan terutama dalam anggota keluarga inti. Namun yang lebih dominan dari pelaku inses ini adalah keluarga inti yang tinggal satu rumah dengan korban. Kategori pelaku paling banyak adalah abang dari korban. Tentu perilaku tersebut sangat tercela dan merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu pemerintah, lembaga masyarakat, aparat, tokoh-tokoh masyarakat harus mampu secara kontinuitas melakukan sinergitas guna membuka ruang komunikasi kebijakan publik untuk memberikan masukan terhadap pemerintah untuk menanggulangi inses di Tanjung Tiram.

Adapun siklus sinergitas dan ruang komunikasi yang dibangun disajikan pada Gambar 1. Mengingat betapa bahayanya perilaku inses yang dilakukan oleh keluarga inti dalam hubungannya dengan komunikasi kebijakan publik mendorong berbagai lembaga/*stakeholder*, elemen masyarakat dan harus bersama-sama memperhatikan kembali hak-hak terhadap korban inses dan pengaturan hukum terhadap pelaku inses. Karena kejahatan tersebut tidak hanya berasal dari luar namun dapat juga berasal dari dalam keluarga tersebut. Agar dapat memutus mata rantai perilaku menyimpang tersebut yang dapat meresahkan

masyarakat dan menghilangkan budaya kearifan lokal (Sazali, 2020).

**Kebijakan Hukum Penanggulangan Inses di Masyarakat Tanjung Tiram Batubara.** Adanya kasus inses di Kecamatan Tanjung Tiram mengindikasikan buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Sejauh ini pemerintah setempat tidak berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan bagaimana pula para orang tua menyadari peran mereka untuk mendidik dan melindungi anak yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai orang tua.

Menurut Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Hal ini tidak hanya terjadi pada lingkungan umum di Kecamatan Tanjung Tiram saja namun juga terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anggota keluarga untuk berlindung.

Umumnya kejahatan inses ini justru jarang sekali dilaporkan kepada pihak berwajib karena

mengingat bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh anggota keluarga sendiri yang tentu saja apabila diketahui oleh pihak lain akan menimbulkan rasa malu bagi anggota keluarga yang lain. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban inses ini berdampak pada psikologisnya, sehingga diantaranya ada yang putus sekolah, memakai narkoba, stress, dan bahkan sakit jiwa. Menurut salah satu informan mengatakan:

*“Di desa kami pernah terjadi apa namanya, yang Bapak katakan, melakukan hubungan seks dengan keluarga. Didaerah ini pernah terjadi seorang kakek memperkosanya. Kondisi ini dikarenakan Ayah dan Ibunya kerja merantau keluar negeri. Kakek tersebut hanya tinggal berdua dengan cucunya dirumah. Tidak berapa lama, ada masyarakat yang mengetahui bahwa kakeknya ini sering melakukan pencabulan terhadap cucunya, dikarenakan ketahuan sama tetangganya.*

Pernyataan diatas menggambarkan bahwa terjadinya inses di wilayah ini dikarenakan faktor adanya kesempatan dan kurangnya penjagaan dari orangtua yang sibuk dengan pekerjaan dan sering meninggalkan rumah, sehingga terjadi pencabulan oleh keluarga sendiri. Selain itu informan tersebut menyatakan bahwa kakek dan cucu ini sering ditinggal berdua, maka muncullah keinginan untuk melakukan kejahatan itu.

Jika dikaji dari sisi hukum tindak pidana inses belum ada pengaturannya sehingga perlu pengaturan lebih lanjut pada masa yang akan datang. Adapun yang melatarbelakanginya adalah keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi figure perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu, kesulitan seksual pada orang tua, kakek tidak mampu mengatasi dorongan seksualnya.

Penanggulangan fenomena inses keluarga inti di wilayah penelitian belum optimal. Khususnya pada keluarga yang orang tuanya awam akan pendidikan, tetapi justru mereka cenderung lebih mengutamakan pekerjaan dan kesibukannya sendiri sebagai nelayan daripada memperhatikan pendidikan anak-anak di keluarganya. Dalam keluarga semacam ini, pendidikan keluarga hampir “punah” sebab masing-masing sibuk mengurus pekerjaannya. Dalam lingkungan keluarga seperti ini, anak akan tercukupi kebutuhan fisik dan materialnya, tetapi sangat menderita secara rohani.

Akibatnya, anak mencari perhatian dengan melakukan berbagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan, salah satunya inses. Bahkan, tidak jarang anak dari keluarga yang secara ekonomis tercukupi kebutuhannya dan pendidikan orang tuanya tinggi, tetapi akhlak dan moralnya berantakan. Satu penyebab utamanya adalah tidak kuatnya peran atau fungsi keluarga dalam mendidik anak-anaknya. Keberhasilan dan kualitas pendidikan keluarga sangat ditentukan oleh keluarga dan kualitas kemampuan orang tua dalam melaksanakan proses pendidikan. Semakin tinggi kualitas kemampuan orang tua dalam melaksanakan pendidikan keluarga, semakin berhasil pendidikan keluarga tersebut.

Kendatipun faktor tersebut sangat mempengaruhi terjadinya inses di Kecamatan Tanjung Tiram, pendidikan keluarga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Kedua faktor tersebut harus berjalan secara simultan. Dalam keluarga yang iklimnya kondusif untuk belajar dan didukung oleh tingginya kualitas kemampuan orang tua dalam melaksanakan pendidikan keluarga, akan membawa akibat majunya pendidikan keluarga tersebut. Sebaliknya, minimnya pendidikan keluarga akan terjadi jika kualitas kemampuan orang tua dalam melaksanakan pendidikan keluarga sangat rendah untuk belajar. Seperti yang dikemukakan oleh informan seperti berikut:

*“Strategi untuk mengatasi inses ini, yang kami tau hanya melalui pendidikan. Contohnya anak-anak kami diajari memakai pakaian yang tertutup ketika dirumah maupun diluar rumah, kondisi ini dikarenakan kalau dari segi berpakaian sudah tidak benar menurut norma agama dan adat, seperti itulah yang mudah terpengaruh oleh godaan Syaitan. Selama ini kondisi itulah yang terjadi, yang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya hubungan seks dalam satu keluarga. Pada dasarnya seadainyapun kami mengajari atau menesehati, itupun hanya yang sesuai dengan kemampuan kami. Terkadang juga disini, dipengaruhi oleh cuaca yang sedikit panas. Seandainya diizinkan, untuk tidak memakai baju yang tertutup, agar suasana sedikit sejuk. Kondisi ini pada dasarnya menjadi masalah. Belum lagi kondisi rumah tempat tinggal sebahagian dari kami yang tinggal dirumah yang sempit. Begitulah keadaannya. Adapun yang bisa kami lakukan hanya mengawasi pergaulan anak-anak kami, serta memberikan pengetahuan agama, sebab,*

*pengetahuan agama merupakan dasar yang paling penting untuk diketahui.*

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka, penguatan peran keluarga dalam mengatasi masalah fenomena inses keluarga inti dimulai dari mendidik, saling mengingatkan dan menasehati dan yang terpenting harus terus dihidupkan kembali jika kita menghendaki generasi yang berkualitas di masa depan. Sebaliknya, jika orangtua terlalu egois dengan segala kesibukannya, jangan berharap dapat melahirkan generasi yang berkualitas di masa depan. Pengetahuan agama menjadi salahsatu penopang untuk mencegah terjadinya inses karena daerah ini juga mayoritas muslim dan anak-anak banyak mengaji di Surau.

**Pengaturan Tindak Pidana Inses.** Indonesia memiliki UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang merupakan suatu upaya jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ketentuan pasal 1 angka (1) ditentukan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kemudian mengenai siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam lingkup rumah tangga telah diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa “Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi: a) Suami, isteri, dan anak; b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau, c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Selanjutnya, dalam hal ketentuan pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual dalam Undang-undang ini ditentukan dalam pasal 46 yang menentukan “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Ketentuan pasal 46 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dirumuskan: a) Setiap orang; b)

Melakukan perbuatan kekerasan seksual; c) Yang dimaksud dalam pasal 8 huruf (a); d) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun; e) atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00.

Yang dimaksud dengan pasal 8 huruf (a) yang terdapat pada rumusan poin (c) tersebut diatas yaitu bahwa kekerasan seksual tersebut terjadi terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Kemudian dari rumusan ancaman pidana yang diberikan oleh pasal 46 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dapat diuraikan sebagai berikut.

Pada ketentuan pasal, yang menjadi subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah manusia secara individu atau orang perseorangan. Hal ini ditegaskan dengan penggunaan “setiap orang”. Dalam hal tindak pidana inses yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya, penggunaan kata “setiap orang” belum tepat mengenai sasaran terhadap ayah sebagai pelaku, karena “setiap orang” pada ketentuan ini bersifat umum.

Perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh hukum adalah melakukan perbuatan seksual di dalam lingkup rumah tangga. Bahwa apabila terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya (tindak pidana inses) maka sudah dapat dijerat dengan ketentuan pidana pada pasal ini. Lama pidana yang diberikan oleh pasal 46 UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00. Tidak ada rumusan pidana minimal khusus dalam ketentuan ini, yang berarti bahwa pidana penjara bisa saja dijatuhkan dalam rentang waktu 1 hari sampai 12 tahun. Kemudian di dalam ketentuan ancaman pidana ini juga tidak terdapat pemberatan pidana, mengingat bahwa pelaku adalah orang tua (Setiawan, 2019).

**Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.** Dalam hal korban tindak pidana adalah seorang anak, maka Indonesia telah memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai segala bentuk perlindungan terhadap anak. Pada ketentuan pasal 1 angka (1) ditentukan tentang batasan usia dari seorang anak, yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, secara khusus mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam

ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 81 ayat (1) memberikan ancaman terhadap orang yang melakukan kekerasan seksual, yang dapat dirumuskan sebagai berikut: a) Setiap orang; b) Dengan sengaja; c) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan; d) Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya; e) Atau dengan orang lain; f) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun; g) Denda paling banyak Rp.300.000.000,00 dan paling sedikit Rp.60.000.000. Kemudian dari rumusan ancaman pidana yang diberikan oleh pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat diuraikan sebagai berikut.

Setiap orang dalam ketentuan pasal ini yang menjadi subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah manusia secara individu atau orang perseorangan. hal ini ditegaskan dengan penggunaan “setiap orang”. Dalam hal tindak pidana inses yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya, penggunaan kata “setiap orang” belum tepat mengenai sasaran terhadap ayah sebagai pelaku, karena “setiap orang” pada ketentuan ini bersifat umum.

Perbuatan pidana dalam rumusan pada poin (b) , poin (c), poin (d), dan poin (e) dapat dijelaskan bahwa apabila pelaku dengan sengaja atau dengan maksud dan berkehendak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan hubungan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka pelaku tersebut bisa dijerat dengan ketentuan pidana pada pasal ini. Lama pidana yang diberikan oleh pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 dan paling sedikit Rp.60.000.000,00.

Pada ketentuan ancaman pidana ini juga tidak terdapat pemberatan pidana, mengingat bahwa pelaku adalah orang tua. Sistem perumusan pidana pada ketentuan pasal 81 ayat (1) adalah kumulatif (penjara dan denda). Oleh karena itu sangat diperlukan empati dari berbagai pihak dan pemerintah untuk

menyelesaikan kasus-kasus yang berkenaan dengan inses (Setiawan, 2019). Tanpa itu, sangat sulit bagi korban inses untuk memperoleh keadilan dan akan terus menjadi korban kekerasan tanpa tahu kapan akan berakhir.

## KESIMPULAN

Aspek-aspek permasalahan terjadinya inses adalah kurangnya peran pemerintah dalam komunikasi kebijakan publik. Bentuk komunikasi kebijakan publik yang tersistem dengan baik antar lembaga Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terlibat secara langsung. Begitu juga instansi penegak hukum, lembaga masyarakat, begitu juga dengan masyarakat secara umumnya. Pemerintah daerah harus mampu merumuskan indikator yang tepat, untuk mempermudah proses evaluasi terhadap sistem komunikasi kebijakan yang diterapkan. Begitu juga dengan memberikan perlindungan secara hukum baik bagi pelapor, begitu juga dengan korban. Selain itu, dalam komunikasi kebijakan publik untuk menanggulangi terjadinya inses diperlukan pertukaran informasi dan menjalin hubungan komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Implementasi kebijakan publik yang dilakukan pemerintah belum efektif dalam menjangkau informasi dari korban inses untuk melaporkan kejadian yang dialaminya karena belum terjaminnya perlindungan hukum bagi korban. Kebijakan hukum yang diterapkan untuk menanggulangi inses sampai saat ini hanya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## REKOMENDASI

1. Pemerintah agar membuka ruang komunikasi kebijakan publik dengan aparat hukum, masyarakat dan tokoh-tokoh dan saling bersinergi dan lebih intensif dalam melakukan tindakan terhadap kasus-kasus inses. Upaya Pemerintah untuk meminimalisir terjadinya kasus inses dalam lingkup keluarga.
2. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan upaya preventif atau upaya pencegahan dan upaya represif. Upaya preventif yakni dengan melakukan sosialisasi berkaitan dengan pendidikan, pembinaan, dan penyadaran kepada masyarakat umum tentang dampak perilaku inses.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para instansi terkait yang telah memberikan dukungan data dan informasi sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar, terkhusus kepada pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Akib, Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*. 1(1) hal 1-10.

Amy M. Alberton, Kevin M. Gorey. 2018. "Contact Is A Stronger Predictor Of Attitudes Toward Police Than Race: A State-Of-The-Art Review", *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, Vol. 41 Issue: 1, hal 2-23.

Duouai and Perry. 2018. A Different Lens? How Ethnic Minority Media Cover Crime. *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*. 8 (2), hal 96-121.

Gorman, et.al. 2008. An Evolved Cognitive Bias For Social Norms. *Evolution and Human Behavior* 29, hal 71-78.

Hoa, T. and Zamour, J.C.G. 2017. Citizen Participation in Vietnam's Local government: Impact on Transparency and Accountability. *International Journal of Public Administration and Governance*, 7 hal 38-57.

Junior. 2017. Incest Avoidance And Prohibition: Psychobiological And Cultural Factors Francisco. *Psicologia USP*, 28(2), hal 287-297.

Millan, et.al. 2017. Incest Victims: A Case Study. *International Journal of Advances Research*. Vol. 5(9) hal 572-573.

Minnet, Betül. 2018. Incest as a private/social conundrum: A brief Analysis of Atlikarınca movie and the mother's reaction to the incestuous husband within the context of Ethics of Care, *Journal of Human Sciences*, 15 (4), hal 2257-2265.

Phuong, T. 2017. Vaitrocuatruyen thong chinhsach de manglaisu dong thuanxa hoi. *The 201st International Conference on Communicating Public Policies: Experiences of Vietnam and Korea*, Ha Noi, 1 November 2017.

Quy, H. and Ha, T.T. 2018. An Empirical Assessment of Public Policy Communications in Central Region of Vietnam. *Modern Economy*, 9 hal 2052-2063.

Sazali, Hasan., dan Misrah. 2018. *Laporan Penelitian "Sistem Penguatan Peran Keluarga Berbasis Agama dan Kearifan Lokal Dalam Mengantisipasi Perilaku Inses Keluarga Inti (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Tanjung Tiram)".* LP2M Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Sazali. 2020. *Komunikasi Pembangunan*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya.

Setiawan, I Putu Agus; Purwanto, I Wayan Novy. 2019. Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi Di Polda Bali). *Kertha wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8 (4), hal 1-16

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Zhang, Y.L and Zhu, X.Y. 2017. Multiple Mechanisms of Policy Diffusion in China. *Public Management Review*. 21(4) hal 495-514.

## Hasil Penelitian

# STRATEGI PERCEPATAN PENGENTASAN BACKLOG KEPEMILIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DAERAH PERKOTAAN DI SUMATERA UTARA

## *(ACCELERATION STRATEGY FOR THE ALLEVIATION OF HOME OWNERSHIP BACKLOG FOR LOW-INCOME COMMUNITIES OF URBAN AREAS IN NORTH SUMATERA)*

*Dumora Jenny Margaretha Siagian, Porman Juanda Marpomari Mahulae,  
Sahat Christian Simanjuntak*

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara  
Jl. Sisingamangaraja No. 198 Medan 20126  
Sumatera Utara - Indonesia  
Email: jenny79.siagian@gmail.com

*Diterima: 04 Februari 2021 ; Direvisi: 06 Mei 2021 ; Disetujui: 18 Mei 2021*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai permasalahan dalam upaya pengentasan backlog perumahan, serta menyusun strategi untuk mengentaskan permasalahan backlog kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan utama adalah pendekatan kualitatif, yang dilengkapi dan diperkuat pula dengan data yang bersifat kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (pengamatan), wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD) dan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pengentasan backlog kepemilikan rumah bagi MBR diantaranya adalah belum jadi prioritas pembangunan daerah, lembaga kemitraan pembangunan bidang perumahan di daerah belum berjalan secara efektif, keterbatasan lahan dan anggaran di daerah, tidak tersedianya basis data MBR, serta kesulitan yang dialami perbankan untuk menyalurkan dana KPR FLPP kepada masyarakat pekerja informal dan berpenghasilan tidak tetap. Berdasarkan hasil analisis dengan strategi matriks SWOT, disimpulkan bahwa isu backlog perumahan bagi MBR harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, sehingga perlu adanya optimalisasi program pengembangan perumahan oleh Pemerintah Daerah dan Pusat untuk menambah hunian baru bagi MBR, membentuk Lembaga kemitraan PKP daerah yang efektif dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan penyaluran pembiayaan perumahan bagi MBR, penambahan alokasi ruang kawasan pemukiman perkotaan dalam RTRW, serta peningkatan keberdayaan MBR perkotaan.

**Kata kunci:** backlog kepemilikan rumah, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), perkotaan

### ABSTRACT

*This study aims to understand the various problems in efforts to alleviate the housing backlog, as well as to present a strategy to alleviate the problem of housing backlog for low-income households in North Sumatra. This research uses descriptive method with the main approach is a qualitative approach, which is complemented and strengthened by quantitative data. The data collection techniques used were observation (observation), in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD) and literature study. The results showed that the problems with alleviation the home ownership backlog for MBR include not being a priority for regional development, institution of development partnerships in the housing sector in the regions have not been running effectively, limited land and budget in the regions, the unavailability of MBR databases, and difficulties experienced by banks to channeling FLPP KPR funds to informal workers and irregular income people. Based on the results of the analysis with the SWOT matrix strategy, it was concluded that the issue of housing backlog for low-income families should be one of the regional development priorities, so it is necessary to optimize housing development programs by the*

*Regional and Central Governments to add new housing for low-income people, to form an effective regional PKP partnership institution in efforts to control the rate of population growth and distribution of housing finance for low-income households, increase the allocation of space for urban residential areas in the RTRW, and increase the empowerment of urban MBR.*

**Keywords:** home ownership backlog, low income community (MBR), urban

## PENDAHULUAN

Hak atas perumahan dalam disiplin hak asasi manusia sering kali disamakan dengan hak rakyat atas tempat untuk hidup (Supriyanto, 2009), sehingga perlu diciptakan kondisi yang dapat mendorong pembangunan perumahan untuk menjaga kelangsungan penyediaan perumahan dan permukiman. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (selanjutnya disebut dengan MBR) dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Namun pada kenyataannya, tidak semua keluarga telah memiliki rumah hingga saat ini.

Kondisi yang menggambarkan masalah ketidakterpenuhinya kebutuhan perumahan secara keseluruhan, atau adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah sering disebut sebagai Backlog Perumahan (Lucy, 2015). Pakpahan (2015) menyatakan bahwa backlog perumahan telah menjadi sebuah isu krusial di seluruh Negara di dunia, tak terkecuali Indonesia yang nota bene adalah Negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat.

Mengacu pada data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2015, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk ketimpangan antara tambahan permintaan (*demand*) rumah yang sekitar 1,46 juta unit pertahunnya, dengan penawaran (*supply*) yang hanya sebesar 400 ribu unit. Dengan demikian, masih ada gap sebanyak 1,06 juta unit per tahun. Gap ini akan terus melebar tiap tahunnya jika pembangunan perumahan tidak bisa mengejar jumlah permintaan.

Isu backlog perumahan juga merupakan salah satu masalah pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, seperti terlihat pada daftar permasalahan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017. Merujuk data Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Milik Sendiri tahun 2016-2018, dapat diketahui bahwa Provinsi Sumatera Utara adalah Provinsi dengan rata-rata persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri terbesar ketiga setelah DKI Jakarta dan

Kepulauan Riau. Bila rata-rata persentase tersebut dikalikan dengan rata-rata jumlah rumah tangga setiap provinsi pada periode tahun yang sama, dapat terlihat bahwa Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi dengan jumlah rumah tangga belum memiliki rumah sendiri terbesar keempat (1.03 juta rumah tangga), setelah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Menyadari bahwa cenderung meningkatnya angka backlog kepemilikan rumah di Sumatera Utara, meski dalam kurun waktu 4 tahun belakangan, Pemerintah Pusat dan Daerah gencar menyelenggarakan program pembangunan perumahan dengan skema-skema yang telah direncanakan sebelumnya. Penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyusun strategi baru dan lebih operasional yang dapat digunakan untuk mengurangi masalah tersebut.

Terkait pengentasan backlog perumahan, Dimiyati (2010) menyatakan beberapa strategi seperti penyusunan kebijakan yang mendorong konduktifitas pembangunan perumahan bagi seluruh pemangku kepentingan, meningkatkan koordinasi dan kerjasama kemitraan, memanfaatkan sumberdaya perumahan dan iptek serta kearifan lokal bidang perumahan, serta terus mengupayakan perbaikan dan dukungan sistem pembiayaan perumahan, dan juga pendataan dan penegakan hukum di bidang perumahan. Strategi saja belum cukup, tentu harus diikuti berbagai program aksi untuk mewujudkannya. Paramitha Kusuma Astuti dan Asnawi (2014) dalam penelitian yang berjudul Perencanaan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Banyumanik menyusun perencanaan pembangunan rumah sederhana dengan teknologi Risha yang cepat dan murah bagi MBR yang *non-bankable* sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan rumahnya.

Sedangkan penelitian ini lebih fokus untuk memahami berbagai masalah dalam upaya pengentasan backlog perumahan, serta menyusun dan menawarkan strategi berupa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait untuk mengentaskan permasalahan backlog kepemilikan rumah bagi MBR di Sumatera Utara.

## METODE

Penelitian dilakukan selama 5 (lima) bulan dimulai dari bulan Februari sampai Juni 2019 di

daerah perkotaan Provinsi Sumatera Utara. Merujuk data persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah menurut Kabupaten/Kota tahun 2016 s.d 2018, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah dengan persentase terbesar, yakni Kota Sibolga (53.5%), Kota Padang Sidempuan (47.6%), Pematang Siantar (45.8%), Medan (43.5%), Tanjung Balai (35.4%), Tebing Tinggi (35,5%) dan Binjai (30.6%).

Pembatasan subjek penelitian terhadap MBR dan wilayah kajian yang hanya pada wilayah perkotaan, lebih didasarkan pesan konstitusi yang mengamatkan agar kebijakan perumahan lebih diutamakan bagi kelompok masyarakat tersebut, dan data kepemilikan rumah yang menunjukkan bahwa permasalahan backlog kepemilikan rumah tersebut paling tinggi berada di wilayah perkotaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan penelitian utama adalah pendekatan kualitatif, sehingga data yang utama adalah bersifat kualitatif. Akan tetapi untuk melengkapi analisis data kualitatif, maka akan diperkuat pula dengan data-data yang bersifat kuantitatif, dengan pemahaman bahwa penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif yang dilengkapi dan diperkuat dengan data kuantitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam pendekatan kualitatif ini adalah observasi (pengamatan), wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD) dan studi Pustaka. Pengamatan (observasi) dilakukan terhadap aktifitas berbagai program penyediaan dan pembiayaan perumahan untuk mengatasi backlog perumahan bagi MBR yang sedang berlangsung. Sedangkan Wawancara dilakukan kepada para informan, yakni Pemerintah Pusat dan Daerah, pengembang perumahan, perbankan, serta informan kunci terdiri dari pejabat di lembaga-lembaga yang terkait program penyediaan dan pembiayaan perumahan untuk mengatasi backlog perumahan bagi MBR di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Pemilihan personal sebagai perwakilan dari kelompok peserta informan tersebut dilakukan dengan metode *search sampling* seperti yang diterapkan oleh Kuswanda (2015). Yaitu dengan mencari personal dari kelompok peserta informan yang mengetahui informasi yang dibutuhkan peneliti. FGD dilaksanakan satu kali dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, pengembang perumahan, lembaga keuangan, dan pemerhati perumahan.

Pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei untuk

mendeskripsikan pendapat MBR terhadap berbagai variabel terkait kendala kepemilikan rumah dan program-program pengentasan backlog kepemilikan rumah bagi kelompok masyarakat tersebut. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner terhadap 350 responden (50 orang setiap kota) yang dipilih secara purposif, dengan persyaratan bahwa responden adalah MBR sesuai dengan yang diatur pada UU Nomor 1 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2014.

Pengolahan dan analisis data dilakukan dalam 3 prosedur. *Pertama*, Pengolahan dan Analisis Kualitatif dilakukan dengan kategorisasi data, pengurutan dan perolehan intisari dari data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian (De Vaus et al., 2002). Secara umum, analisis data kualitatif dalam penelitian ini akan melibatkan beberapa tahap termasuk: 1) pengorganisasian data; 2) kategorisasi tema dan pola; 3) mencari penjelasan alternatif atas data yang ditemukan; dan, 4) terakhir menulis laporan.

*Kedua*, pengolahan dan analisis kuantitatif dilakukan dengan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan data atau hasil pengamatan dengan singkat dan jelas dalam bentuk tabel dan grafik atau diagram. Analisis dilakukan dengan bantuan *Microsoft Excel*. Selanjutnya prosedur *ketiga*, didasarkan pada hasil pendeskripsian hasil analisis kualitatif dan kuantitatif sebelumnya, data akan dibagi menjadi 2 bagian. Yaitu faktor internal dan faktor eksternal, untuk diidentifikasi dan dikategorikan sebagai kelompok *Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*. Faktor-faktor tersebut kemudian akan dianalisis dengan matriks SWOT, untuk menentukan strategi *agresif, diversifikatif, defensive dan turn-around*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan penduduk dan kebutuhan perumahan, merupakan bagian terintegral bersifat dinamis, yang harus dicermati proses perubahannya dari waktu ke waktu. Kadangkala dalam perubahan tersebut terjadi keseimbangan dan ketidakseimbangan. Sebagai langkah bijaksana, sedini mungkin mestinya diantisipasi, dengan adanya kebijakan dan perencanaan yang bersifat holistik dan komprehensif. Sebab, Pertumbuhan penduduk menaikkan kebutuhan rumah.

**Tabel 1.** Kebutuhan rumah 5 tahun terakhir dan proyeksi tahun berikutnya di Sumatera Utara

Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebutuhan Rumah Berdasarkan Jumlah Rumah Tangga											
	Data					Proyeksi Geometrik						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040
Nias	26945	26733	27034	28096	28241	28241	28241	28241	28241	28241	28241	28241
Mandailing Natal	99116	99972	100877	101910	102894	102894	102894	102894	102894	102894	102894	102894
Tapanuli Selatan	63558	63162	63672	64087	64479	64479	64479	64479	64479	64479	64479	64479
Tapanuli Tengah	71134	73626	75119	76601	78057	78057	78057	78057	78057	78057	78057	78057
Tapanuli Utara	67699	67316	67805	68316	68823	68823	68823	68823	68823	68823	68823	68823
Toba Samosir	43946	43845	44005	44248	44516	44516	44516	44516	44516	44516	44516	44516
Labuhanbatu	99272	102255	104137	106012	107833	107833	107833	107833	107833	107833	107833	107833
Asahan	162950	163567	164935	166430	167839	167839	167839	167839	167839	167839	167839	167839
Simalungun	217717	215694	216768	218065	219275	219275	219275	219275	219275	219275	219275	219275
Dairi	67821	66658	66825	67189	67492	67492	67492	67492	67492	67492	67492	67492
Karo	100606	103503	104955	106842	108622	108622	108622	108622	108622	108622	108622	108622
Deli Serdang	452793	465881	475365	485488	495351	495351	495351	495351	495351	495351	495351	495351
Langkat	246276	247586	249048	250971	252715	252715	252715	252715	252715	252715	252715	252715
Nias Selatan	62863	63356	64231	64864	65505	65505	65505	65505	65505	65505	65505	65505
Humbang Hasundutan	41000	41147	41493	41930	42333	42333	42333	42333	42333	42333	42333	42333
Pakpak Bharat	9565	9883	10171	10367	10544	10544	10544	10544	10544	10544	10544	10544
Samosir	30142	29759	29837	30007	30152	30152	30152	30152	30152	30152	30152	30152
Serdang Bedagai	151164	148033	148402	148942	149435	149435	149435	149435	149435	149435	149435	149435
Batu Bara	89895	91018	91899	92859	93800	93800	93800	93800	93800	93800	93800	93800
Padang Lawas Utara	55386	57563	58759	59973	61157	61157	61157	61157	61157	61157	61157	61157
Padang Lawas	56090	58254	59566	60900	62288	62288	62288	62288	62288	62288	62288	62288
Labuhanbatu Selatan	70244	72851	74316	75854	77380	77380	77380	77380	77380	77380	77380	77380
Labuhanbatu Utara	79948	80520	81295	82079	82822	82822	82822	82822	82822	82822	82822	82822
Nias Utara	27102	27262	27509	27738	27959	27959	27959	27959	27959	27959	27959	27959
Nias Barat	16715	16658	16756	15924	16017	16017	16017	16017	16017	16017	16017	16017
Sibolga	18858	18490	18566	18624	18688	18688	18688	18688	18688	18688	18688	18688
Tanjungbalai	34672	35209	35708	36151	36601	36601	36601	36601	36601	36601	36601	36601
Pematang Siantar	56753	57304	57844	58333	58803	58803	58803	58803	58803	58803	58803	58803
Tebing Tinggi	36423	36997	37478	37976	38403	38403	38403	38403	38403	38403	38403	38403
Medan	498046	502735	507205	511515	515649	515649	515649	515649	515649	515649	515649	515649
Binjai	59380	60204	60780	61518	62213	62213	62213	62213	62213	62213	62213	62213
Padangsidempuan	46911	46302	47014	47713	48407	48407	48407	48407	48407	48407	48407	48407
Gunungsitoli	27025	27413	27831	28179	28503	28503	28503	28503	28503	28503	28503	28503
<b>Kebutuhan Rumah Sumatera Utara</b>	<b>3188015</b>	<b>3220756</b>	<b>3257205</b>	<b>3295701</b>	<b>3332796</b>	<b>3332796</b>	<b>3332796</b>	<b>3332796</b>	<b>3332796</b>	<b>3332796</b>	<b>3332796</b>	<b>3332796</b>

**Kondisi Pasokan Rumah di Sumatera Utara.** Berdasarkan data kependudukan periode tahun 2012-2018, diketahui bahwa jumlah penduduk Sumatera Utara mengalami penambahan setiap tahunnya, dengan pertumbuhan rata-rata 1.53 % per tahun. Sebagai data penghubung antara kondisi kependudukan dengan kebutuhan rumah tinggal adalah data jumlah rumah tangga, yang menunjukkan bahwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2017, jumlah rumah tangga di Sumatera Utara terus bertambah dengan pertumbuhan rata-rata 1.25 % per tahun. Dengan mengasumsikan bahwa kebutuhan rumah adalah sama dengan jumlah rumah tangga yang ada, maka pertumbuhan jumlah kebutuhan rumah di Sumatera Utara adalah sama dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga yang ada. Dengan menggunakan rumus proyeksi geometrik, maka kebutuhan rumah untuk tahun-tahun berikutnya dapat dihitung seperti yang disajikan pada tabel 1.

Kondisi saat ini, pasokan rumah baik itu yang bersumber dari swadaya maupun non swadaya, belum dapat memenuhi kebutuhan rumah yang dibutuhkan rumah tangga di Sumatera Utara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, untuk mengetahui data pasokan rumah hanya dapat dilakukan dari sumber non swadaya melalui data realisasi pembangunan rumah per tahun dari para pengembang di Sumatera Utara, yakni Real Estate Indonesia (REI), Perum Perumnas cabang Sumatera Utara, dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) cabang Sumatera Utara. Sementara data rumah terbangun dari non swadaya tidak ada data pasti yang bisa didapat.

Namun dengan membandingkan kapasitas pasokan rumah antara sektor swadaya dan sektor non swadaya, Mungkasa (nd) menyatakan bahwa 70 persen investasi perumahan di negara-negara berkembang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya, UN Habitat (2005) menyatakan bahwa selama tahun 2000 sekitar 70-80% perumahan dibangun di Indonesia dibangun secara informal

(swadaya), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan (wawancara) menyatakan bahwa perbandingan pembangunan rumah antara sektor swadaya dan non swadaya berbanding 60% : 40%. Dimana 60% rumah dibangun sendiri oleh masyarakat secara swadaya.

Merujuk ketiga pernyataan tersebut, penelitian ini berasumsi bahwa perbandingan antara kontribusi perumahan swadaya dan non swadaya di Sumatera Utara adalah berkisar 60% swadaya dan 40% non swadaya, serta atas informasi yang diterima dari tiga pengembang perumahan (REI, Perum Perumnas dan Apersi) di Sumatera Utara, maka kapasitas pasokan rumah di Sumatera Utara dapat diestimasi dan diproyeksi seperti hasil perhitungan yang tersaji pada tabel 2.

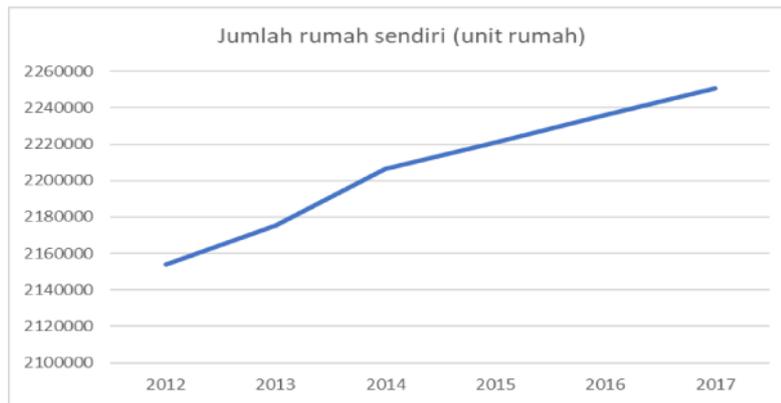
Sebagai pembanding, penelitian ini juga melakukan perhitungan pasokan rumah di Sumatera Utara berdasarkan data pertumbuhan persentase rumah tangga dan status kepemilikan rumah milik sendiri tahun 2012-2017, dengan mengasumsikan bahwa pertumbuhan rumah yang terjadi setiap tahunnya sama dengan selisih jumlah kepemilikan rumah sendiri tahun  $n$  dengan tahun sebelumnya (Gambar 1). Sehingga, dapat diberikan data proyeksi estimasi pasokan rumah di Sumatera Utara hingga tahun 2040 seperti pada tabel 3.

Berdasarkan data kebutuhan rumah di Sumatera Utara (tabel 1) dan estimasi pasokan rumah di Sumatera Utara (tabel 2 dan tabel 3), maka dapat divisualisasikan kapan produksi perumahan di Sumatera Utara akan dapat mengejar selisihnya terhadap kebutuhan perumahan (gambar 2). Dimana terlihat bahwa berdasarkan data produksi rumah yang dibangun secara swadaya dan non swadaya, penawaran rumah di Sumatera Utara akan dapat memenuhi permintaan pada sekitar tahun 2031. Sedangkan berdasarkan data rumah tangga dengan status kepemilikan rumah sendiri, penawaran akan dapat memenuhi permintaan pada sekitar tahun 2035.

**Tabel 2.** Estimasi pasokan rumah di Sumatera Utara tahun 2019-2040 berdasarkan data produksi rumah non swadaya dan swadaya

Sumber Kontribusi	Estimasi Pasokan Rumah							
	Data		Proyeksi Geometrik					
	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040
<b>Non swadaya</b>								
REI Sumatera Utara	17000	20878						
Perum Perumnas Sumatera Utara	424	1246						
Apersi Sumatera Utara	7000	7000						
<b>Swadaya</b>	36636	43686						
<b>Produksi Rumah di Sumatera Utara</b>	<b>61060</b>	<b>72810</b>	<b>86821</b>	<b>103528</b>	<b>249592</b>	<b>601730</b>	<b>1450684</b>	<b>3497390</b>

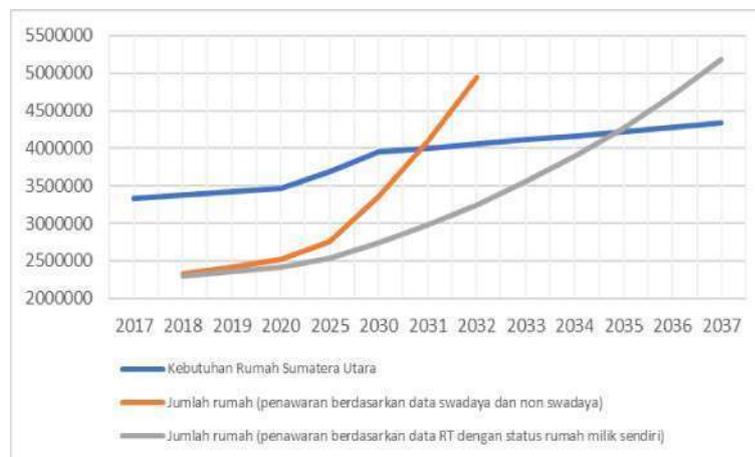
Sumber: Data penelitian (2019)



**Gambar 1.** Tren pertambahan jumlah rumah milik sendiri berdasarkan data persentase rumah tangga dengan status milik sendiri di Sumatera Utara, 2012-2017

**Tabel 3.** Estimasi pasokan rumah di Sumatera Utara tahun 2018-2040 berdasarkan data rumah tangga dengan status rumah milik sendiri

Parameter	2013	2014	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040
	Data			Proyeksi Geometrik						
Jumlah Rumah milik di Sumatera Utara	2175183	2206218	2250637							
Produksi Rumah milik di Sumatera Utara		31035	44419	50058	56413	63575	115562	210060	381831	694063



**Gambar 2.** Kondisi Produksi dan Kebutuhan Perumahan di Sumatera Utara

Namun perhitungan tersebut tentunya akan sangat dipengaruhi kondisi penawaran dan permintaan rumah yang terjadi setiap tahunnya. Sesuai teori permintaan dan penawaran, permintaan rumah akan tinggi bila harga dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun sebaliknya, penawaran rumah hanya akan tinggi bila harga juga tinggi. Artinya, para pengembang hanya akan membangun rumah bila akan menguntungkan baginya. Demikian juga, masyarakat hanya akan mau membeli atau

membangun rumah bila harga jual dapat dijangkaunya.

**Kebijakan Pembangunan Bidang Perumahan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.** Pemerintah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kebijakan pembangunan bidang perumahan Pemerintah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah masing-masing

unsur pemerintah, sebuah aturan yang menjadi “patron” Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Pada RPJMN 2015-2019, dinyatakan bahwa Pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memiliki dan mengakses rumah tinggal yang layak adalah tantangan dalam menghilangkan kesenjangan pembangunan yang mampu meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah dan memastikan bahwa penduduk miskin memperoleh perlindungan sosial.

Sasaran pembangunan bidang perumahan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: 1) Terfasilitasinya penyediaan hunian layak khususnya untuk MBR; 2) Mendorong keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak; serta 3) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, termasuk penanganan kawasan permukiman kumuh. Dalam mencapai sasaran tersebut, maka ada 2 (dua) program yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat, yakni: Program Pengembangan Perumahan yang dilaksanakan dan ditanggungjawab oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, serta Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan MBR untuk memiliki rumah melalui sejumlah program yang sudah berjalan seperti KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Pemerintah Daerah yang menjadi lokasi penelitian pun masing-masing memiliki kebijakan pembangunan bidang perumahan, terutama dalam mendukung Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil pengumpulan data dokumen, serta wawancara yang dilakukan terhadap beberapa OPD di daerah penelitian, ditemukan bahwa: *Pertama*, Permasalahan pembangunan di bidang perumahan lebih fokus kepada kualitas lingkungan perumahan yang masih memerlukan perhatian. Selain mengenai kualitas kawasan permukiman, permasalahan pembangunan bidang perumahan di setiap daerah juga menyoroti masalah kualitas hunian masyarakat, yang masih banyak bermukim di rumah dengan kualitas rendah, atau lebih dikenal dengan istilah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

*Kedua*, Dari delapan pemerintah daerah yang menjadi informan pada penelitian ini, hanya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menyampaikan permasalahan mengenai adanya kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat (Backlog Perumahan). Walaupun demikian, di

dalam perencanaan kegiatan pembangunannya, Pemerintah Provinsi tidak merencanakan akan membangun hunian baru. Dari delapan Pemerintah Daerah yang diamati, justru Pemerintah Kota Binjai yang merencanakan akan membangun rumah susun bagi MBR di daerah tersebut. Walaupun tidak menyampaikan adanya masalah backlog di daerahnya.

*Ketiga*, Strategi yang ditetapkan setiap pemerintah daerah dalam upaya pengentasan permasalahan pembangunan di bidang perumahan, pada umumnya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan rakyat. *Keempat*, Dua program umum yang menjadi andalan pemerintah daerah untuk melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang perumahan di Sumatera Utara, yaitu: 1) program pengembangan perumahan; dan, 2) program lingkungan sehat perumahan.

**Realisasi Program Pengembangan Perumahan di Sumatera Utara.** Program ini adalah upaya pemerintah menambah pasokan rumah untuk menurunkan akumulasi kekurangan tempat tinggal khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada pelaksanaan program ini, upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah adalah melakukan peningkatan kualitas perumahan, bantuan PSU perumahan, pembangunan rumah susun dan rumah khusus.

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen, realisasi penyediaan perumahan melalui program pengembangan perumahan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah di Sumatera Utara memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2015-2018, Pemerintah Pusat telah membangun rumah baru sejumlah 1,623 unit rumah. Sedangkan Pemerintah daerah (hanya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara) hanya membangun 103 unit rumah, yang merupakan upaya relokasi korban bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. Selain itu, Pemerintah Pusat juga telah melakukan peningkatan kualitas rumah melalui kegiatan Rehabilitasi Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 16,886 unit rumah dan bantuan PSU perumahan untuk sekitar 2,464 unit rumah yang tersebar di berbagai Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.

Hasil penelitian mendapatkan bahwa penambahan rumah baru dari program pengembangan perumahan oleh pemerintah di Sumatera Utara adalah sekitar 432 rumah/tahun. Bila dibandingkan dengan jumlah produksi rumah yang ada (Tabel 2 dan 3), maka dapat diketahui bahwa sebenarnya program pengembangan perumahan hanya berkontribusi

sekitar 0.6 persen dari produksi rumah yang ada. Artinya bahwa penambahan rumah dari program pengembangan perumahan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah di Sumatera Utara, belum dapat berbuat banyak untuk menambah percepatan produksi rumah dalam memenuhi kebutuhan permintaan rumah yang ada. Untuk itu, dibutuhkan upaya lebih agar program tersebut dapat membantu penambahan pasokan rumah di Sumatera Utara.

**Realisasi Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan.** Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan MBR untuk memiliki rumah. Skema utama pembiayaan perumahan yang menjadi suksesi program ini adalah penyaluran bantuan pembiayaan perumahan berupa Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Pada tahun 2019 pemerintah telah menambah skema pembiayaan perumahan berupa dua program baru berbasis tabungan. Yaitu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Berdasarkan data realisasi penyaluran dana KPR FLPP di Sumatera Utara periode tahun 2014-2018, yang diterima peneliti dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diketahui bahwa dalam periode lima tahun terakhir nilai dana FLPP yang telah di salurkan ke Provinsi Sumatera Utara telah mencapai Rp. 1.301.639.601.479, dengan jumlah unit rumah subsidi sebanyak 15.730 unit rumah (rata-rata 3.146 unit rumah/tahun). Berdasarkan informasi yang diterima dari pihak PPDPP, seluruh dana FLPP yang disalurkan di Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui mekanisme KPR perumahan subsidi oleh pengembang perumahan.

Artinya tidak ada MBR yang mendapat dana tersebut melalui mekanisme pembangunan rumah secara swadaya. Hal tersebut terjadi sebab biasanya MBR yang membangun rumah secara swadaya di atas lahan yang dimiliki sendiri, lebih memilih membangun secara menciil, yang bila diakumulasikan akan melebihi batas harga yang dapat dibiayai oleh dana FLPP.

Membandingkan jumlah unit rumah yang telah dibiayai oleh dana FLPP dengan jumlah unit rumah yang terbangun oleh para pengembang pada tahun 2017 dan 2018, ternyata jumlah rumah yang didanai oleh KPR FLPP dan terjual kepada para MBR hanya berkisar 11%-16% dari jumlah keseluruhan rumah yang dibangun oleh para pengembang.

Bila diasumsikan bahwa 50% jumlah rumah yang dibangun oleh para pengembang adalah rumah bersubsidi, maka terdapat sekitar 9,500 sampai 9,800 unit rumah subsidi tersebut tidak diserap oleh MBR setiap tahunnya.

Bila perbandingan jumlah realisasi penyaluran KPR FLPP dan produksi rumah subsidi oleh para pengembang tersebut dianalisis lebih mendalam. Masih sedikitnya realisasi pembelian rumah melalui mekanisme KPR FLPP oleh MBR, menandai masih rendahnya tingkat antusiasme para MBR terhadap penawaran rumah yang diberikan. Menurut teori permintaan, hal ini dapat dipengaruhi oleh: 1) masih tingginya harga rumah yang ditawarkan, sehingga para MBR lebih memilih alternatif lain (menyewa dan menumpang); dan, 2) produk perumahan yang ditawarkan belum sesuai dengan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh para MBR.

Namun, bila dilihat dari sisi penawaran. Produksi rumah subsidi oleh para pengembang yang terus meningkat, menandai masih layaknya harga pasar rumah subsidi tersebut (menguntungkan secara bisnis). Sehingga para pengembang terus meningkatkan produksinya setiap tahun. Dalam kondisi ini penawaran yang terus meningkat diakibatkan produk yang tetap laku dengan harga yang tinggi (harga tinggi penawaran tinggi).

Merujuk analisis tersebut, timpangnya perbandingan jumlah realisasi penyaluran KPR FLPP dan produksi rumah subsidi oleh para pengembang tersebut. Menimbulkan beberapa asumsi. *Pertama*, MBR masih belum mampu membeli rumah subsidi tersebut, walaupun dengan mekanisme KPR FLPP. Sehingga sisa rumah subsidi yang terbangun dibeli oleh masyarakat non MBR melalui sistem tunai atau melalui sistem KPR komersil. Dalam hal ini ada dugaan bahwa penyaluran dana KPR FLPP tidak tepat sasaran. Dimana rumah subsidi yang direncanakan akan disalurkan kepada para MBR, ternyata dibeli oleh masyarakat golongan non MBR.

*Kedua*, Data yang diinformasikan para pengembang tidak menjelaskan jumlah rumah subsidi terbangun yang sebenarnya. Sehingga terjadi ketimpangan data antara rumah terbangun dan realisasi KPR dengan dana FLPP yang terjadi. Asumsi ini menduga bahwa para pengembang memang hanya membangun rumah subsidi sekitar 11%-16%, dari keseluruhan rumah yang dibangun. Dan sisanya adalah rumah komersil yang dipasarkan kepada masyarakat non MBR.

**Permasalahan Pengentasan Backlog Perumahan di Sumatera Utara.** Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap para

kelompok aktor, yang terdiri dari: 1) pemerintah Pusat; 2) pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah kota yang menjadi lokasi penelitian; 3) pengembang perumahan (REI, APERSI dan Perumnas); dan 4) Perbankan (BTN), dapat diberikan hasil

identifikasi permasalahan implementasi kebijakan penyediaan dan pembiayaan perumahan dalam pengentasan backlog perumahan di Sumatera Utara yang dihadapi oleh para aktor seperti disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Identifikasi permasalahan implementasi kebijakan penyediaan dan pembiayaan perumahan dalam pengentasan backlog perumahan di Sumatera Utara

No.	Informan	Permasalahan
1	<p><b>Pemerintah Pusat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR</li> <li>2) Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR</li> <li>3) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR</li> </ol>	<p>Kendala dalam pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi MBR khususnya di Sumatera Utara. Yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target Pembangunan perumahan pada level Nasional belum diterjemahkan dengan baik dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah, sehingga kegiatan pembangunan perumahan nasional di daerah belum terintegrasi. Sebagian besar Daerah belum memiliki Basis Data Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang telah menjadi Perda</li> <li>2. Pembangunan bidang perumahan belum menjadi prioritas pembangunan di daerah, terbukti masih sangat terbatasnya sumberdaya (SDM dan anggaran biaya). Akibatnya permasalahan terkait regulasi perizinan, ketersediaan lahan dan sharing pembiayaan pembangunan belum terselesaikan.</li> <li>3. Belum terbentuk dan/atau tidak berjalannya secara efektif lembaga kemitraan (pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat) pembangunan bidang perumahan di daerah, sehingga adanya tumpang tindih program dan kegiatan antar perangkat daerah (khususnya yang membidangi perumahan, sosial dan kesehatan).</li> </ol>
2	<p><b>Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah kota yang menjadi lokasi penelitian)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prov. Sumatera Utara <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman</li> <li>• SNVT Wilayah Sumatera Utara</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>• Pokja PKP Prov. Sumatera Utara</li> </ul> </li> <li>2. Kota Medan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman</li> </ul> </li> <li>3. Kota Tebing Tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul> </li> <li>4. Kota P. Siantar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul> </li> <li>5. Kota Tanjung Balai <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul> </li> <li>6. Kota Sibolga <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perumahan dan Kawasan</li> </ul> </li> </ol>	<p>Ada empat masalah utama yang saling berkaitan satu sama lain. Yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keterbatasan kewenangan, akibat tidak sinkronnya aturan kewenangan antara UU No.1 Thn 2011 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perumahan dengan UU No. 23 Thn 2014 yang menyatakan sebaliknya bahwa urusan perumahan untuk MBR sepenuhnya tanggung jawab Pemerintah Pusat. Menurut para informan, satu-satunya upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat pengentasan backlog perumahan di daerahnya masing-masing adalah dengan memaksimalkan peran pemerintah daerah.</li> <li>2) Keterbatasan anggaran; Berdasarkan pengakuan para informan, dengan tidak adanya kewenangan daerah pada urusan perumahan bagi MBR maka penganggaran pada urusan perumahan terdampak, dan hanya difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dan kualitas hunian rakyat. Adapun upaya alternatif yang dapat dilakukan untuk mendukung pengembangan perumahan, pemerintah daerah hanya dapat menganggarkan biaya bantuan PSU.</li> <li>3) Keterbatasan lahan dan alokasi ruang; Berkaitan dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Peraturan Menteri PUPR No. 01/PRT/M/2018 dalam penyediaan lahan yang sesuai dengan persyaratan teknis. Selain keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah untuk membeli lahan, juga diakibatkan oleh terbatasnya lahan yang tersedia dan sesuai dengan persyaratan teknis. Seperti: 1) sesuai dengan RTRW; 2) tersedia jalan akses ke lokasi; 3) bebas dari bencana banjir dan longsor; 4) tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai, dan pantai; 5) tersedia pasokan daya listrik sesuai dengan kebutuhan; dan 6) tersedia pasokan sumber air bersih lainnya</li> </ol>

No.	Informan	Permasalahan
	<p>Pemukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>• Dinas Pekerjaan Umum</li> </ul> <p>7. Kota Padang Sidempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul> <p>8. Kota Binjai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>	<p>sesuai dengan kebutuhan</p> <p>4) Tidak tersedianya basis data MBR. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan, diketahui bahwa ternyata semua stakeholder di lokasi penelitian tidak memiliki data mengenai MBR yang belum memiliki rumah di daerahnya masing-masing. Seringkali program yang dilakukan, seperti program bedah rumah berdasarkan data kemiskinan. Selain itu juga, MBR yang tinggal di lokasi penelitian bisa dipastikan tidak semua merupakan masyarakat lokal. Sehingga data MBR yang tidak memiliki rumah sudah seharusnya ada di setiap daerah. Seperti yang dikatakan oleh PKP Medan:</p> <p><i>“iya, makanya saya bilang pak kalau sebetulnya kita harus punya database yang sama. Sebetulnya backlog di daerah kabupaten perbatasan dengan backlog di Kota Medan sama tidak, jangan-jangan orgnya itu juga. Dipindah sana pindah sini jangan-jangan orang yang sama, sementara backlog terhitung besar. Kalau dia sudah punya rumah tapi dia warga medan, itukan berarti ada link yang hilang terhadap data yang sama tadi. Harusnya dia tidak dapat rumah lagi. Kalau pun dia dapat rumah tentunya konsekuensinya ya secara swadaya dia sah aja mempunyai rumah ke-2 tapi kalau di insentif penuh ya tidak. Tapi ya tadi kita harus punya data link yang sama berapa yang bener backlog itu. By name by adres, NIK nya sama tidak. ....”</i></p> <p>Database MBR yang belum memiliki rumah sangat penting agar penyediaan rumah bisa tepat sasaran. Menurut Kadis PKP Kota Pematang Siantar, contohnya pada program rehabilitasi rumah tidak layak huni, kadangkala ada rumah yang tidak layak huni direhabilitasi, padahal sebenarnya pemilik rumah tidak tinggal disitu dan rumah tersebut pun bukan merupakan rumah satu-satunya yang dimilikinya. Namun karena yang tinggal disitu adalah MBR, rumah tersebut menjadi terdata perlu direhab. Sehingga data-data yang seperti kondisi tersebut perlu diklarifikasi.</p>
3	<p><b>Pengembang Perumahan REI, APERSI dan Perumnas</b></p>	<p>Peran pengembang di dalam penyediaan dan pembiayaan perumahan MBR adalah yang paling dominan. Tanpa suplai rumah dari pengembang mustahil program penghapusan backlog akan terealisasi (Balitbang PUPR, 2016). Karena selama ini suplai rumah dari pemerintah hanya kurang lebih 10% dari suplai rumah total dan sisanya dipenuhi oleh para pengembang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para pengembang, terungkap bahwa masih banyak persoalan yang dihadapi para pengembang untuk mendukung program pengentasan backlog perumahan, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahal dan terbatasnya lahan. Kondisi terbatasnya lahan ini di daerah perkotaan diakibatkan harga lahan yang sudah terlalu mahal, dan terbatasnya peruntukan lahan untuk kawasan budidaya perumahan yang diatur dalam RTRW Kota.</li> <li>2. Masih sulitnya perizinan. Dalam wawancara, diketahui bahwa meskipun rentang waktu proses perizinan telah diatur dalam PP Nomor 64 Tahun 2016, proses perizinan di setiap daerah Sumatera Utara masih memakan waktu yang lama.</li> <li>3. Sulitnya penyediaan jaringan PSU. Permasalahan ini berhubungan dengan posisi lahan perumahan terhadap fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur listrik, air bersih, telekomunikasi dan terutama transportasi.</li> <li>4. Dibatasinya kuota dana KPR FLPP. Berdasarkan konfirmasi yang dilakukan peneliti terhadap pihak PPDPP Kementerian PUPR, diakui bahwa memang pada tahun 2019 penyaluran dana KPR FLPP akan dibatasi.</li> <li>5. Kenaikan harga rumah subsidi FLPP yang masih rendah. Menurut para pengembang, kenaikan harga rumah subsidi FLPP yang ditetapkan Pemerintah masih terlalu rendah dan belum sesuai dengan terus meningkatnya tingkat kemahalan konstruksi dan tingkat inflasi di setiap tahunnya.</li> </ol>

No.	Informan	Permasalahan
4	<b>Perbankan</b> Bank Tabungan Negara (BTN)	<p>Beberapa permasalahan yang dihadapi lembaga pembiayaan Perbankan dalam mendukung penyaluran dana FLPP bagi MBR, sekaligus penyalur kredit konstruksi dan kredit pemilikan lahan bagi para pengembang. Yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulit menyalurkan KPR FLPP kepada masyarakat pekerja informal dan berpenghasilan tidak tetap. Hal ini dikarenakan, dalam penyaluran dana KPR FLPP bagi pekerja informal dan berpenghasilan tidak tetap memerlukan waktu dan sumber daya lebih banyak dalam proses appraisalnya. Lagipula, adanya resiko gagal kredit yang lebih besar pada kalangan tersebut.</li> <li>2. Pengajuan akad kredit sebelum rumah selesai dibangun. Permasalahan ini terkait strategi para pengembang yang lebih memilih akan membangun rumah, setelah akad kredit telah dilaksanakan. Hal ini tentunya memberikan resiko besar pihak Bank penyalur kredit, sebab bangunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit ternyata belum ada atau belum selesai dikerjakan. Sehingga beresiko terhadap terjadinya gagal kredit.</li> <li>3. Untuk menjaga keberlangsungan kasnya Bank BTN belum dapat mengaplikasikan uang muka dibawah 5%. Selain itu, Bank BTN juga harus membebankan biaya notaris, biaya SKMHT, biaya appraisal, biaya administrasi, biaya provisi bank, dan angsuran pertama kepada debitur. Dengan terbatasnya kemampuan sebagian para MBR untuk menyediakan dana besar di awal kredit, penyaluran KPR FLPP sering tidak dapat diaplikasikan kepada para MBR tersebut.</li> <li>4. Adanya permasalahan rumah yang tidak dihuni, dialihkan atau proses dialihkan kepada pihak lain. Permasalahan ini adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi Bank BTN atas resiko terhambatnya angsuran kredit dari para debitur, karena menjadi catatan buruk bagi kinerja Bank BTN sebagai penyalur dana FLPP tersebut.</li> </ol>

### **Strategi Percepatan Pengentasan Backlog Kepemilikan Rumah Bagi MBR di Daerah Perkotaan di Sumatera Utara. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal.**

Berdasarkan pendeskripsian kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi, dalam upaya pengentasan backlog kepemilikan rumah bagi MBR di daerah perkotaan Provinsi Sumatera Utara sebelumnya. Dapat diidentifikasi elemen faktor internal (Strength dan Weakness) serta elemen faktor eksternal (Opportunity dan Threat) upaya pengentasan backlog kepemilikan rumah bagi MBR di daerah perkotaan di Sumatera Utara, yang dapat dikombinasikan dalam matriks SWOT.

Matriks SWOT dibuat untuk merumuskan strategi percepatan pengentasan backlog kepemilikan rumah bagi MBR perkotaan di Sumatera Utara (Tabel 5). Di dalam identifikasi yang dilakukan, tidak banyak kemampuan efektif yang dimiliki Pemerintah daerah Provinsi dan Kota di Sumatera Utara, untuk memanfaatkan peluang dan menangani kelemahan dan ancaman yang ada.

Berdasarkan 7 (tujuh) elemen yang teridentifikasi dalam faktor internal, hanya 2 (dua) elemen yang tergolong sebagai kekuatan. Sedangkan yang lainnya adalah keterbatasan kemampuan Pemerintah daerah, ditambah

kinerja yang belum optimal untuk mempermudah produktifitas pembangunan perumahan. Dari sisi lingkungan eksternal, terdapat 3 (tiga) elemen peluang yang berasal dari pemerintah pusat dan pelaku pengembangan perumahan di Sumatera Utara. Ketiga elemen peluang ini adalah hal positif yang dapat dimanfaatkan untuk “menutupi” berbagai kelemahan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah di Sumatera Utara. Bahkan sangat dimungkinkan, bahwa strategi percepatan yang direncanakan dalam penelitian ini, akan sangat bergantung pada ketiga elemen tersebut.

Lingkungan eksternal juga memberikan berbagai tantangan yang berasal dari kondisi sosial ekonomi kelompok sasaran, kondisi perekonomian regional maupun global yang mempengaruhi harga-harga, dan dari sisi kinerja kelompok pengembang yang tentunya berorientasi pada keuntungan.

**Analisis Strategi.** Berdasarkan analisis strategi menggunakan matrik SWOT pada tabel 7, dapat dirumuskan 4 strategi utama yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota di Sumatera Utara, untuk mempercepat pengentasan backlog kepemilikan rumah bagi MBR di daerah perkotaan. Strategi yang disarankan adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.** Matriks SWOT strategi percepatan pengentasan backlog kepemilikan rumah bagi MBR perkotaan di Sumatera Utara.

	<p><b>Strength</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah terbentuknya perangkat daerah yang khusus menangani urusan perumahan dan kawasan pemukiman di daerah</li> <li>2. Adanya program pengembangan perumahan di dalam perencanaan pembangunan daerah</li> </ol>	<p><b>Weakness</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya biaya pembangunan bidang perumahan di daerah</li> <li>2. Terbatasnya kewenangan daerah terkait pembangunan rumah bagi MBR</li> <li>3. Belum adanya basis data MBR</li> <li>4. Mahalnya lahan dan terbatasnya alokasi ruang</li> <li>5. Masih sulitnya perizinan di daerah</li> </ol>
<p><b>Opportunity</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya program pengembangan perumahan dan program pengembangan pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah Pusat</li> <li>2. Produktifitas pengembang perumahan yang tinggi</li> <li>3. Tersedianya teknologi perumahan alternative</li> </ol>	<p><b>Strategi agresif (SO)</b></p> <p>Optimalisasi Program Pengembangan Perumahan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, untuk menambah hunian baru bagi MBR di daerah perkotaan Sumatera Utara. Dengan memanfaatkan teknologi RISHA dan RUSPIN</p>	<p><b>Strategi diversifikasi (ST)</b></p> <p>Mendukung penuh pembangunan perumahan bagi MBR yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan para pengembang (penyediaan lahan/pemanfaatan lahan tidak produktif, sharing target pembangunan perumahan dengan Pemerintah pusat, pendataan dan pemetaan MBR perkotaan, penambahan alokasi ruang Kawasan pemukiman perkotaan dalam RTRW, optimalisasi implementasi PP 64 Tahun 2016).</p>
<p><b>Threat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat</li> <li>2. Biaya produksi perumahan yang terus meningkat</li> <li>3. Tingkat pendapatan MBR yang rendah</li> <li>4. Mayoritas MBR tergolong <i>non-Bankable</i></li> <li>5. Urbanisasi yang terus berlangsung</li> <li>6. Kuota dana KPR FLPP yang dibatasi</li> <li>7. Program pembiayaan perumahan yang tidak tepat sasaran kepada MBR</li> </ol>	<p><b>Strategi defensive (WO)</b></p> <p>Membentuk Lembaga kemitraan PKP daerah yang efektif (pemerintah daerah, akademisi, swasta, lembaga pembiayaan dan masyarakat), dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan keberdayaan MBR perkotaan, pemberian insentif pengembangan perumahan, kontrol penyaluran pembiayaan perumahan bagi MBR, dan pengendalian arus urbanisasi.</p>	<p><b>Strategi turn around (WT)</b></p> <p>Menjadikan isu backlog kepemilikan rumah bagi MBR sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.</p>

*Pertama, Strategi agresif.* Optimalisasi Program Pengembangan Perumahan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, untuk menambah hunian baru bagi MBR di daerah perkotaan Sumatera Utara dengan memanfaatkan teknologi RISHA dan RUSPIN. Dalam strategi ini, upaya yang dapat dilakukan Pemerintah daerah Provinsi dan Kota adalah mengarahkan kegiatan-kegiatan pada program pengembangan perumahan, baik yang ada di dalam rencana pembangunan daerah maupun yang berasal dari Pemerintah pusat. Untuk menambah hunian baru berkonsep rumah susun (sewa/milik) atau rumah khusus di daerah perkotaan di Sumatera Utara. Pembangunan hunian baru tersebut dapat memanfaatkan teknologi RISHA dan RUSPIN yang telah

dikembangkan oleh Puslitbang Perkim Kementerian PUPR, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan yang dilakukan.

*Kedua, Strategi diversifikatif.* Mendukung penuh pembangunan perumahan bagi MBR yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Para pengembang. Strategi ini dapat dilakukan dengan: a) Optimalisasi anggaran pembangunan daerah untuk menyediakan lahan tapak pembangunan rumah susun dan khusus di perkotaan, dan/atau memanfaatkan lahan tidak produktif yang ada di dalam dan/atau di sekitar wilayah perkotaan; b) Menerapkan mekanisme sharing target penyediaan perumahan bagi MBR dengan Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, Pemerintah daerah Provinsi dan Kota di

Sumatera Utara menyusun rencana percepatan pemenuhan kebutuhan rumah, khususnya bagi para MBR perkotaan di Sumatera Utara. Yang diajukan kepada Pemerintah pusat, untuk dijadikan target pembangunan Bersama; c) Pendataan dan pemetaan MBR perkotaan dengan memanfaatkan perangkat kelurahan; d) Menambah alokasi ruang untuk kawasan permukiman di dalam dokumen RTRW daerah Kota; dan, e) Optimalisasi implementasi PP 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

*Ketiga*, Strategi *defensive*. Membentuk lembaga kemitraan perumahan dan pemukiman daerah yang efektif, dari unsur pemerintah daerah, akademisi, swasta, lembaga pembiayaan dan masyarakat. Untuk bekerjasama dalam upaya: a) pengendalian laju pertumbuhan penduduk; b) peningkatan keberdayaan MBR perkotaan; c) pemberian insentif pengembangan perumahan (keringanan-keringanan biaya pengurusan izin, PBB, dan bantuan biaya PSU bagi pengembang perumahan); d) kontrol penyaluran pembiayaan perumahan bagi MBR; dan, e) pengendalian arus urbanisasi. *Keempat*, Strategi *turn around*. Menjadikan isu backlog kepemilikan rumah bagi MBR sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kondisi pembangunan perumahan di Sumatera Utara dan identifikasi permasalahan yang dilakukan, maka dengan menggunakan analisis strategi matriks SWOT, disimpulkan bahwa strategi percepatan yang dapat dilakukan pemerintah daerah Provinsi dan Kota, untuk mengentaskan backlog perumahan bagi MBR perkotaan di Sumatera Utara adalah sebagai berikut: *Pertama*, Strategi agresif (SO). Optimalisasi Program Pengembangan Perumahan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, untuk menambah hunian baru bagi MBR di daerah perkotaan Sumatera Utara. Dengan memanfaatkan teknologi RISHA dan RUSPIN. *Kedua*, Strategi diversifikasi (ST). Mendukung penuh pembangunan perumahan bagi MBR yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pada para pengembang (penyediaan lahan/pemanfaatan lahan tidak produktif, sharing target pembangunan perumahan dengan Pemerintah pusat, pendataan dan pemetaan MBR perkotaan, penambahan alokasi ruang Kawasan permukiman perkotaan dalam RTRW, optimalisasi implementasi PP 64 Tahun 2016). *Ketiga*, Strategi *defensive* (WO). Membentuk Lembaga kemitraan PKP daerah yang efektif (pemerintah daerah, akademisi, swasta, lembaga pembiayaan dan masyarakat), dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk,

peningkatan keberdayaan MBR perkotaan, pemberian insentif pengembangan perumahan, kontrol penyaluran pembiayaan perumahan bagi MBR, dan pengendalian arus urbanisasi. *Keempat*, Strategi *turn around* (WT). Menjadikan isu backlog kepemilikan rumah bagi MBR sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

## REKOMENDASI

1. Menjadikan isu backlog kepemilikan rumah bagi MBR sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. (Instansi pelaksana: Bappeda Provinsi dan Kota).
2. Membentuk Lembaga kemitraan PKP daerah yang efektif (pemerintah daerah, akademisi, swasta, lembaga pembiayaan dan masyarakat). (Instansi pelaksana: Bappeda dan Dinas PKP Provinsi serta Kota).
3. Optimalisasi Program Pengembangan Perumahan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Untuk menambah hunian baru di perkotaan berbentuk rumah susun sewa/milik, rumah khusus, dan swadaya, dengan memanfaatkan teknologi RISHA dan RUSPIN. Hal ini dilakukan terlebih dahulu dengan menyusun rencana percepatan pemenuhan kebutuhan rumah, khususnya bagi para MBR perkotaan di Sumatera Utara. Yang diajukan kepada Pemerintah pusat, untuk dijadikan target pembangunan bersama (Instansi pelaksana: Dinas PKP Provinsi dan Kota).
4. Penambahan alokasi ruang Kawasan permukiman perkotaan dalam RTRW daerah. (Instansi pelaksana: Bappeda dan Tata ruang Provinsi dan Kota).
5. Menyediakan lahan untuk tapak rumah susun di perkotaan. (Instansi pelaksana: Bappeda, Dinas PKP, Biro Aset Provinsi dan Kota).
6. Mempermudah proses perizinan sesuai PP 64 Tahun 2016 (Instansi pelaksana: PTSP dan Lembaga perizinan lainnya di Provinsi dan Kota).
7. Melakukan Pendataan dan Pemetaan MBR perkotaan. (Instansi pelaksana: Bappeda dan Dukcapil Provinsi dan Kota).

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, yang telah memfasilitasi sehingga terlaksananya penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga terpublikasinya tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Paramitha Kusuma dan Asnawi. 2014. Perencanaan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Banyumanik. *Jurnal Teknik PWK*. 3(4).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2018. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2018. Medan: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2017. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Milik Sendiri, 1999-2017. Medan: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2017. Statistik Kesehatan dan Perumahan Provinsi Sumatera Utara 2017. Medan: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2017. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2017
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2016. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2016. Medan: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Bogdan, R.C. and Biklen S.K. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Toronto: Allyn and Bacon Inc.
- De Vaus, D. 2002. *Surveys In Social Research*. Sydney: Allen and Unwin.
- Dimiyati, Muhammad. 2010. Mengatasi Backlog Perumahan Bagi Masyarakat Perkotaan. Available at: [http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data\\_artikel/edisi5g.pdf](http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/edisi5g.pdf).
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019.
- Kuswanda, Wanda. 2015. Potensi Tumbuhan, Aktivitas Masyarakat dan Kebijakan Pengelolaan Habitat Siamang (*Hylobates syndactylus* Raffles) Pada Hutan Produksi di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Inovasi, Jurnal Politik dan Kebijakan*. 12(1) hal: 311-322.
- Mungkasa, Oswar. nd. Perumahan Swadaya: Konsep, Pembelajaran dan Praktek Unggulan. Retrieved from: [https://www.academia.edu/2641557/PERUMAHAN\\_SWADAYA\\_KONSEP\\_PEMBELAJARAN\\_DAN\\_PRAKTEK\\_UNGULAN](https://www.academia.edu/2641557/PERUMAHAN_SWADAYA_KONSEP_PEMBELAJARAN_DAN_PRAKTEK_UNGULAN)
- Pakpahan, Deddy H. 2015. 'The Three Musketeers', Solusi Atasi Backlog Perumahan di Indonesia. Dalam <http://jktproperty.com/three-musketeers-solusi-atasi-backlog-perumahan-di-indonesia/>.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- Rangkuti, Freddy. 2000. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Supriyanto, Dkk. 2009. *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonomi Daerah: Analisis Di Tiga Daerah*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
- Yosita, Lucy. 2015. *Strategi Perencanaan Dan Perancangan Perumahan Pada Era Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish Available at: [https://www.researchgate.net/publication/303726376\\_STRATEGI\\_PERENCANAAN\\_DAN\\_PERANCANGAN\\_PERUMAHAN\\_PADA\\_ERA\\_KONTEMPORER](https://www.researchgate.net/publication/303726376_STRATEGI_PERENCANAAN_DAN_PERANCANGAN_PERUMAHAN_PADA_ERA_KONTEMPORER)

## Hasil Penelitian

# KEBIJAKAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL WEBSITE, FACEBOOK, DAN YOUTUBE DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SURABAYA

## *(UTILIZATION POLICY OF SOCIAL MEDIA WEBSITE, FACEBOOK AND YOUTUBE OF SURABAYA'S LIBRARY AND ARCHIVES AGENCY)*

*Rio Febriannur Rachman, Kacung Marijan*

Universitas Airlangga  
Jl. Mulyorejo, Surabaya, 60115  
Jawa Timur - Indonesia  
Email: rio.febriannur.rachman-2018@fisip.unair.ac.id

*Diterima: 16 Juli 2020; Direvisi: 22 November 2020; Disetujui: 11 Januari 2021*

### ABSTRAK

Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu pelopor pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Semua perangkat daerah di kota ini berlomba-lomba untuk menciptakan aplikasi elektronik demi mewujudkan efisiensi dan efektifitas program kerja. Studi ini membahas bagaimana kebijakan berbasis teknologi, khususnya di bidang pemanfaatan media sosial website, facebook, dan youtube, yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya, dibuat dan diimplementasikan untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Teori determinasi teknologi dan kebijakan publik digunakan sebagai landasan berpikir dalam studi. Penelitian dalam studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap tiga orang informan, observasi pada media sosial, dan penelusuran melalui literatur maupun dokumen lainnya. Teknik analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan perumusan kesimpulan. Studi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial website, facebook, dan youtube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya telah berjalan secara baik dan memberi dampak positif. Implementasi kebijakan publik ini juga selaras dengan apa yang dirumuskan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang digariskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meski demikian, perlu ada pembenahan di sejumlah aspek, antara lain, penambahan frekuensi pembaruan konten di media sosial website, facebook, dan youtube. Penambahan konten bisa menjadi salah satu cara untuk membangun kedekatan antara instansi tersebut dengan masyarakat. Selain itu, penambahan jumlah mitra kolaborasi dalam program-program berbasis media sosial juga diperlukan demi mengoptimalkan pelayanan publik.

**Kata kunci:** determinasi teknologi, media sosial, kebijakan publik, tujuan pembangunan berkelanjutan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya

### ABSTRACT

*Surabaya City Government is one of the pioneers using information and communication technology for public services. Every governmental agency in this city is competing to create electronic app to achieve efficiency and effectiveness of their work programs. This study aims to discuss how technological based policy, especially the utilization of social media website, facebook and youtube is made and implemented to optimize their public services. Theories of technology determinism and public policy are used for the theoretical framework of the study. The study employs qualitative method with descriptive approach. Data collection is conducted through indepth interview to three informants, observation of the social media and investigation to literatures and other documents. The analysis is performed using data reduction, data presentation and formulation of conclusion. The study shows that the utilization of social media website, facebook and youtube by Surabaya's Library and Archives Agency has run well and brought positive impacts. The implementation of this policy is also in line with the Sustainable Development Goals formulated by the United Nations. However, there are still rooms for improvements in some aspects, such as the frequency of content updates in the social media website, facebook and youtube. Adding more contents can improve*

*engagements between the agency and the community. Furthermore, increasing number of partnerships for social media based programs is also needed to optimize the public services.*

**Keywords:** *technology determination, social media, public policy, sustainable development goals, Surabaya's Library And Archives Agency*

## PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu pelopor pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik di Indonesia. Sistem layanan publik berbasis elektronik di Surabaya sudah dibangun sejak 2003 ketika diluncurkannya e-Procurement (Yuwinanto, 2013). Seiring berjalannya waktu, ada banyak aplikasi layanan publik yang dirilis oleh Pemerintah Kota Surabaya, antara lain adalah, e-Health atau pelayanan publik di bidang kesehatan, e-Musrenbang atau usulan pembangunan kota secara langsung dari eksponen Rukun Warga, dan *Surabaya Single Window* atau pengurusan perizinan.

Terdapat pula program-program unggulan yang berbasis optimasi media digital (Rachman, 2019). Sebagai contoh, program pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengelolaan industri kreatif, dan lain-lain. Segenap Perangkat Daerah dipacu untuk menciptakan aplikasi atau merumuskan program berbasis teknologi. Semua itu dilakukan untuk melahirkan efisiensi dan efektifitas kerja, yang bertujuan memberikan layanan prima bagi warga Surabaya.

Salah satu perangkat daerah yang selalu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip Surabaya. Pada tahun 2019 lalu, kegiatan-kegiatan dalam jaringan atau *online*, maupun luar jaringan atau *offline*, yang dilaksanakan instansi ini diganjar penghargaan pemerintah provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat (Perpusnas RI, 2019). Fokus dari studi ini adalah membahas program-program dalam jaringan, dalam hal ini pengembangan dan pemanfaatan media sosial berbasis internet, yang dijalankan Dispusip Surabaya.

Elemen pemerintah memang harus tanggap terhadap perkembangan zaman serta kemajuan teknologi demi kehidupan masyarakat yang lebih baik (Cohen, 2014). Kebijakan publik yang berorientasi manfaat bagi masyarakat mesti dijalankan oleh pemerintah di setiap level, termasuk pemerintah di tingkat kota (Anderson, 1984). Kebijakan publik di suatu kawasan, harus mengacu pada kondisi masyarakat di kawasan tersebut, khususnya di era otonomi daerah. Salah satu misal adalah kebijakan percepatan

pencatatan tanah di kabupaten Ogan Ilir yang dianggap punya urgensi di daerah yang tengah gencar dikembangkan tersebut (Hardiansyah, 2019). Selain itu, ada kebijakan menggali energi terbarukan di desa-desa Sumatera Utara karena di sana belum teraliri listrik dengan baik (Mahulae & Husni, 2018).

Fakta di Kota Surabaya, respon cepat pemerintah terhadap pertumbuhan dunia digital dibutuhkan oleh masyarakat yang makin akrab dengan internet (Gere, 2008). Hal demikian ditopang dengan warga perkotaan yang memiliki karakteristik peka terhadap teknologi dan menjadikan dunia maya sebagai wadah berekspresi dan ruang interaksi sehari-hari (Rachman, 2017). Bertolak dari semua itu, Dispusip Surabaya mengimplementasikan kebijakan optimasi teknologi informasi dan komunikasi untuk mengukuhkan fungsi perpustakaan sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, dan sarana edukasi (Bagian Organisasi Pemkot Surabaya, 2019).

Fokus kebijakan Dispusip Surabaya ini adalah pengembangan media sosial dengan berbagai *platform*, mulai laman atau website resmi perpustakaan umum Surabaya, akun *facebook*, sampai *YouTube*. Kebijakan ini selaras dengan filosofi teori determinasi teknologi yang menyebutkan, teknologi mempengaruhi masyarakat. Di sisi lain, teknologi juga berkembang seiring kebutuhan publik. Yang pada gilirannya, teknologi bisa membuat perubahan cara interaksi dan komunikasi masyarakat (McLuhan, 1962).

Maka, korelasi antara perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta model komunikasi merupakan lingkaran yang berjaln kelindan (Marx & Smith, 1994). Oleh karena teknologi media sosial telah akrab dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat berbondong-bondong menggunakan teknologi ini. Sejalan dengan itu, pemerintah mesti membuat kebijakan yang dekat dengan kehidupan warganya (Dye, 1972). Teknologi komunikasi yang berbentuk media sosial memudahkan sosialisasi oleh pemerintah pada warga. Media sosial juga bisa menjadi sarana masyarakat menyampaikan aspirasi.

Studi ini menggunakan teori determinasi teknologi sebagai landasan utama dalam mengupas pemanfaatan media sosial oleh Dispusip Surabaya. Selain itu, teori kebijakan publik juga menjadi pelengkap untuk

menjelaskan sejauh mana inovasi ini menjawab kebutuhan masyarakat. Ada dua rumusan masalah yang dijawab melalui studi kualitatif ini. Pertama, bagaimana pemanfaatan media sosial oleh Dispusip Surabaya sebagai imbas determinasi teknologi komunikasi di masyarakat. Kedua, bagaimana implementasi kebijakan pemanfaatan media sosial oleh Dispusip Surabaya dalam perspektif tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada pun konsep tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui resolusi negara-negara anggotanya (United Nation, 2015).

PBB mengharapkan semua kebijakan publik di masyarakat, pada level pemerintah kota, provinsi, maupun pusat, diminta mengacu atau memiliki keselarasan dengan minimal satu dari tujuh belas poin penting SDGs (Rachman, 2020). Ada dua tujuan studi ini, pertama, mendeskripsikan praktek pemanfaatan media sosial oleh Dispusip Surabaya sebagai jawaban atas tantangan zaman di era determinasi teknologi komunikasi. Kedua, menganalisis implementasi kebijakan pemanfaatan media sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Surabaya berdasarkan poin-poin penting tujuan pembangunan berkelanjutan. Studi ini diharapkan memberikan manfaat praktis dan menjadi pertimbangan di tahap evaluasi kebijakan tersebut. Selain itu, studi ini juga bisa menambah kekayaan penelitian di bidang kebijakan publik dan pemanfaatan media sosial bagi kepentingan masyarakat.

## METODE

Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta lapangan yang ada di lingkungan populasi tertentu, dikaitkan dengan bidang tertentu (Hasan, 2002). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam pada tiga orang informan, observasi pada media sosial Dispusip Surabaya, dan penelusuran melalui literatur maupun dokumentasi yang berkenaan dengan topik riset.

Para informan yang diwawancarai secara mendalam adalah Kepala Dispusip Surabaya Musdiq Ali Suhudi selaku perumus, pengawas, sekaligus penanggungjawab utama kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Selain itu, dua orang warga yang selama ini menjadi pengguna layanan Dispusip Surabaya, yakni seorang yang berprofesi sebagai peneliti di sebuah lembaga swasta bernama Yeni Ermawaty, warga Kecamatan Gubeng Surabaya, dan seorang pelajar sekolah menengah atas negeri bernama

Muhammad Iqbal, warga Kecamatan Simokerto Surabaya. Dua warga Surabaya itu adalah pengakses rutin media sosial Dispusip Surabaya. Paling tidak, satu minggu sekali mereka berkunjung ke laman atau akun media sosial instansi tersebut. Yeni melakukannya untuk kebutuhan penelitian, sedangkan Iqbal melakukannya untuk keperluan sekolah.

Peneliti melakukan wawancara pada rentang Januari hingga Juni 2020 untuk memastikan kebaruan informasi. Observasi pada media sosial Dispusip Surabaya dilakukan pada website resmi perpustakaan umum Surabaya, akun *facebook*, dan *YouTube*, sebagai tiga platform media sosial yang paling aktif melakukan pembaruan konten dari instansi tersebut. Teknik analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

Hasil dari proses analisis data diuraikan secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran faktual sesuai variabel-variabel atau kategorisasi yang muncul saat itu (Bogdan & Taylor, 1990). Validitas dalam studi kualitatif didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipasi, atau pembaca secara umum (Creswell, 2012).

Peneliti memposisikan tiga narasumber utama sebagai representasi informasi bagi pembaca secara umum. Tiga narasumber itu berasal dari elemen pembuat kebijakan dan elemen masyarakat yang menggunakan layanan Dispusip Surabaya. Masyarakat yang dimaksud berasal dari kalangan pelajar dan non-pelajar. Di samping wawancara, peneliti juga menambah objektivitas data melalui penelusuran konten media sosial melalui analisis isi (Mayring, 2000). Khususnya, pada tiap elemen yang berhubungan dengan topik studi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Media Sosial Terintegrasi.** Keberadaan media sosial berbasis internet yang menghubungkan segenap anggota masyarakat merupakan bukti adanya determinasi teknologi. Dilihat dari aspek komunikasi, media sosial memegang peranan penting. Cara berkomunikasi mengalami pergeseran dan makin dinamis karena pesan-pesan dalam bentuk, audio, visual, teks, dan lain sebagainya, dapat dengan bebas disampaikan maupun direspon (Meyrowitz, 1999). Apalagi, di kota-kota besar seperti Surabaya, makin banyak titik-titik sinyal internet gratis. Dengan demikian, masyarakat bisa secara mudah mengakses media sosial. Interaksi tidak harus berupa relasi fisik, melainkan juga relasi yang dihubungkan oleh perangkat teknologi komunikasi (Holmes, 2005).

Ada empat ciri eksistensi media sosial. Pertama, pesan yang disampaikan bisa untuk lebih dari satu penerima. Banyak pihak bisa mengakses pesan tersebut. Kedua, pesan bisa disampaikan tanpa disunting. Berbeda dengan media massa konvensional yang mengalami proses editing di meja redaksi. Media sosial yang berbasis massa dapat menyebarkan informasi secepat-bebasnya. Ketiga, pesan bisa disampaikan secepat mungkin. Keempat, penerima pesan bisa menentukan waktu interaksi. Meskipun pesan sudah lama disampaikan, penerima masih bisa mengaksesnya, karena ada fitur perekaman atau data yang bisa diakses tanpa terikat waktu (Gamble & Teri, 2002).

Media sosial memiliki banyak kekuatan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah guna menyosialisasikan program, menjalankan kebijakan, dan berinteraksi dengan masyarakat. Oleh sebab itu, Dispusip Surabaya mengoptimalkan website resmi perpustakaan umum Surabaya, *Facebook*, maupun *YouTube*. Website resmi perpustakaan umum Surabaya yang bisa diakses pada tautan <https://dispusip.surabaya.go.id/dils/page.php?i d=perpustakaanumum> memiliki banyak menu, antara lain, Perpustakaan Umum, TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pustaka Sekolah, E-Book, Video, Arsip, dan Kemitraan. Dispusip Surabaya memberi website ini nama khusus agar gampang diingat masyarakat. Nama itu diadopsi dari salah satu makanan khas Surabaya, yakni, TEMPE TERASI (Sistem Perpustakaan Elektronik Terintegrasi).

Pada menu Perpustakaan Umum, terdapat informasi mengenai koleksi buku yang ada di dua perpustakaan pusat Surabaya, Perpustakaan Rungkut Jalan Rungkut Astri Tengah nomor 5-7 Surabaya dan Balai Pemuda Jalan Gubernur Suryo nomor 15 Surabaya. Pada menu TBM terdapat informasi mengenai koleksi buku di semua TBM di semua kelurahan Surabaya. Pada menu Pustaka Sekolah terdapat informasi mengenai semua koleksi buku di perpustakaan yang ada di seluruh sekolah Surabaya. Berdasarkan data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) hingga Desember 2019, terdapat 1.405 TBM maupun titik layanan perpustakaan dengan 488 petugas pengelola. Dari semua lokasi tersebut, ada 1,2 juta buku yang tersebar di seluruh penjuru Surabaya.

Selain menyediakan buku dan literatur, Dispusip Surabaya juga mengondisikan TBM dan perpustakaan sekolah sebagai pusat edukasi. Oleh sebab itu, para petugas di sana mesti bisa membuat kegiatan-kegiatan edukatif. Sebagai contoh, terdapat petugas TBM yang membuat kuiz-kuiz ringan bagi pengunjung yang masih

anak-anak, berupa permainan tebak-tebakkan nama negara dan ibukotanya, membacakan cerita atau dongeng inspiratif bagi pengunjung, dan memberi pendampingan belajar. Dengan cara ini, kegiatan di TBM menjadi lebih dinamis dan variatif.

Website TEMPE TERASI merupakan sistem yang mampu mengelola data perpustakaan serta memonitoring koleksi semua koleksi buku tersebut. Sekaligus, mengawasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan di TBM atau perpustakaan. Warga yang ingin mencari koleksi buku tertentu, tinggal masuk ke website ini, mengetik judul pada kolom pencarian, apabila Dispusip Surabaya memiliki koleksi tersebut, pasti akan muncul informasi tentang di perpustakaan mana buku tersebut berada. Website ini menggantikan fungsi katalog yang selama ini ada di perpustakaan-perpustakaan.

Pada menu e-Book, terdapat koleksi buku dalam jaringan yang bisa diakses siapa saja. Dispusip Surabaya bekerjasama dengan penerbit-penerbit untuk bisa mempublikasikan e-Book yang dipajang di sana. Pada menu Video, terdapat video-video pembelajaran bagi anak-anak maupun tutorial keterampilan atau kerajinan tangan yang dapat dipraktikkan di rumah. Terdapat video pendidikan dasar, misalnya pengenalan huruf dan angka. Ada juga yang membahas tentang pendidikan karakter, antara lain, animasi mengenai pentingnya tolong menolong, saling menghormati, toleransi, dan lain sebagainya.

Terdapat pula kumpulan video lagu-lagu anak. Ada pun video tutorial keterampilan yang ada di sana, antara lain berisi cara membuat masakan tertentu, membuat taman obat keluarga, membuat produk bermanfaat dari bahan baku barang bekas, dan lain sebagainya. Pada menu Arsip, terdapat banyak informasi tentang sejarah Surabaya. Ada pula foto lawas sudut-sudut kota Surabaya, penjelasan tentang pahlawan-pahlawan nasional yang lahir, tumbuh, dan berjuang di Surabaya, berikut manuskrip maupun literatur kuno yang valid.

Penyediaan buku dan informasi dalam bentuk digital memperoleh tanggapan positif dari para penggunanya. Seorang pengguna perpustakaan menuturkan, "Dalam masa belajar di rumah karena ada virus Covid-19 atau Corona, kami para pelajar merasa dimudahkan dengan keberadaan buku versi PDF yang tersedia di website perpustakaan umum online Surabaya," (Wawancara, warga Surabaya Muhammad Iqbal tanggal 3 Juni 2020).

Pada menu kemitraan, terdapat sub-sub menu yang berisi data mengenai koleksi buku maupun literatur karya ilmiah dari empat kampus besar Surabaya, yakni, Institut Teknologi

Sepuluh November, Universitas Airlangga, Universitas Kristen Petra, dan Universitas Negeri Surabaya. Sebagian dari buku maupun literatur karya ilmiah di sana bisa diakses secara online dalam bentuk e-Book maupun versi PDF.

*"Website TEMPE TERASI yang disediakan Dispusip Surabaya memudahkan para mahasiswa maupun peneliti untuk mencari sumber-sumber referensi riset. Khususnya, bagi mereka yang ingin membuat artikel tentang Surabaya. Karena dari satu kanal, bisa masuk ke tautan-tautan lain berkenaan dengan arsip Surabaya, lantas masuk ke tautan-tautan di repository kampus-kampus," (Wawancara, warga Surabaya Yeni Ermawaty tanggal 26 Mei 2020).*

Keberadaan menu ini menjadi bukti pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan perpustakaan terintegrasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Informasi yang ada pada website ini pun menjadi lebih variatif dan dapat memberikan wawasan komprehensif bagi para pengunjungnya.

*"Perpustakaan merupakan pusat edukasi seumur hidup bagi masyarakat. Integrasi dan kolaborasi online harus dilakukan demi mengoptimalkan pelayanan publik di zaman internet seperti sekarang ini. Ke depan, kami akan menambah jumlah kampus mitra (Wawancara, Kepala Dispusip Surabaya Musdiq Ali Suhudi tanggal 4 Februari 2020).*

Selain menguatkan website TEMPE TERASI, Dispusip Surabaya mengaktifkan akun *facebook* yang di dalamnya berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dijalankan instansi tersebut. Akun *facebook* itu pun merilis pengumuman lomba-lomba yang dihelat oleh Dispusip Surabaya, di antaranya, menulis cerita pendek, mendongeng, memainkan permainan tradisional, lomba cerdas cermat, dan lain sebagainya. Akun *facebook* Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya juga merilis informasi mengenai kolaborasi dengan pihak lain, seperti perguruan tinggi, lembaga independen, maupun perusahaan swasta. Melalui media sosial, aktifitas kerjasama yang bertujuan mengoptimalkan pelayanan publik dapat disiarkan secara lebih luas dan lebih cepat ke masyarakat (Flew, 2002).

Ada informasi kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dispusip Surabaya menyiapkan lokasi Kuliah Kerja Nyata di TBM maupun perpustakaan untuk

para mahasiswa kampus tersebut (unggahan *facebook* 23 Januari 2020). Ada pula kolaborasi dengan *Western Australia East Java Universities Consortium*, Dispusip Surabaya menyiapkan lokasi kegiatan bertajuk Membaca Cerita untuk Masyarakat, bagi komunitas yang terdiri dari 5 perguruan tinggi asal Australia dan 10 perguruan tinggi asal Jawa Timur tersebut (unggahan 27 Juni 2019).

Terdapat juga kabar mengenai kegiatan pelatihan Membaca Nyaring & Pemanfaatan Buku Digital, hasil kerjasama Dispusip Surabaya dan The Asia Foundation (unggahan 25 Juni 2019). Sementara itu, informasi mengenai sinergitas Dispusip Surabaya dan pabrik cat Nippon Paint pada lomba menghias TBM dan perpustakaan juga bisa disimak di akun *facebook* (unggahan 15 Juni 2019).

Pada tiap unggahan-unggahan di *facebook* itu, terdapat respon berupa klik suka, bagikan, dan komentar. Dengan kata lain, informasi yang disampaikan oleh Dispusip Surabaya langsung mendapat umpan balik dari masyarakat yang menyimaknya. Tanpa harus melalui sortir panjang, sebagaimana surat kritik, saran, dan masukan, yang di masa sebelum adanya internet biasa dipakai sebagai sarana pemerintah menyerap kesan dari program yang dijalankan. Perangkat dan fitur yang mendukung *facebook* menyediakan fasilitas interaksi antara pembuat dan penerima pesan (Bertot. dkk, 2010).

Pada akun *YouTube*, unggahan-unggahan audio visual tampak impresif. Tidak hanya berisi video yang dibuat oleh Dispusip Surabaya, yang berisi kegiatan yang digagas oleh instansi ini, melainkan pula diisi konten-konten kiriman warga. Khususnya, warga yang mengikuti lomba vlog bertema tempat bersejarah Surabaya. Selain itu, ada banyak tutorial pula yang dipublikasikan oleh akun *YouTube* tersebut, video tutorial yang dimaksud antara lain, cara mendongeng yang baik, cara meresensi buku atau film, cara melindungi diri dari virus covid 19 atau corona, serta kelas belajar bahasa korea.

*"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya memiliki cita-cita mewujudkan masyarakat yang sadar literasi. Bagi kami, literasi bukan hanya membaca dan menulis. Lebih dari itu, literasi adalah memproduksi maupun mengonsumsi produk-produk ilmu pengetahuan yang berkualitas. Membuat vlog, mendongeng, meresensi buku atau film, adalah upaya menyampaikan nilai-nilai moral. Konten yang punya pesan moral yang baik tentu bertolak dari referensi yang bagus. Referensi itu pasti berasal dari ilmu pengetahuan," (Wawancara, Kepala*

*Dispusip Surabaya Musdiq Ali Suhudi  
tanggal 4 Februari 2020).*

Media sosial memiliki banyak kelebihan mendasar yang dapat digunakan sebagai sarana kolaborasi, partisipasi, pemberdayaan, dan efisiensi waktu. Media sosial terus berkembang dengan cepat. Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan, harus memanfaatkannya seoptimal mungkin demi menyediakan akses pada layanan publik (Jaeger. dkk, 2012). Dispusip Surabaya telah melakukan langkah strategis di aspek pemanfaatan media sosial dalam bentuk website resmi perpustakaan umum, *facebook*, dan *YouTube*. Dengan kata lain, praktek pemanfaatan media sosial oleh Dispusip Surabaya sebagai jawaban atas tantangan zaman di era determinasi teknologi komunikasi sudah dilakukan sebagaimana mestinya.

**Kebijakan Publik Aplikatif.** Ada banyak definisi tentang kebijakan publik yang dikemukakan para pakar. Secara umum, kebijakan publik adalah tindakan dari pemerintah, di level manapun, yang mempunyai tujuan pengaruh pada kehidupan warga (Anderson, 1984). Kebijakan itu memiliki target atau cita-cita luhur mensejahterakan masyarakat. Kebijakan tersebut dilakukan oleh segenap struktur dalam pemerintahan itu. Terdapat tiga level hirarkis dalam sebuah kebijakan, antara lain, *policy level*, *organizational level*, *operational level* (Bromley 1989). Di negara demokratis, *policy level* diperankan yudikatif dan legislatif, *organizational level* diperankan eksekutif, sedangkan *operational level* dilaksanakan instansi pelaksana, pihak swasta, atau elemen masyarakat yang bersinggungan dengan kebijakan itu. Selalu ada *institutional arrangement* atau peraturan yang bersifat mengikat.

Pemanfaatan media sosial oleh Dispusip Surabaya merupakan kebijakan publik yang didorong semangat literasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya memegang peranan di *policy level*. Berkat pengesahan DPRD Surabaya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan yang terdapat dalam mata anggaran di Dispusip Surabaya ini bisa berjalan dengan baik. *Organization level* dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya, sedangkan *operational level* dijalankan oleh Dispusip Surabaya, pihak swasta, dan eksponen masyarakat yang turut menggerakkan kegiatan pemanfaatan media sosial tersebut. Selain Peraturan Daerah mengenai APBD, peraturan atau edaran yang dikeluarkan oleh kepala Dispusip Surabaya, menjadi *institutional arrangement* dari pelaksanaan kebijakan.

Ada tiga tahapan pokok kebijakan publik, yakni, perumusan, implementasi serta pengawasan dan penilaian atau evaluasi (Tachjan, 2006). Perumusan kebijakan berujung pada pembuatan aturan-aturan yang menjadi standar operasional dan prosedur. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan lanjutan setelah sebuah kebijakan diluncurkan melalui regulasi berkekuatan hukum (Grindle, 2004). Dari implementasi kebijakan bisa dilihat bagaimana dampaknya di masyarakat (Van Metter & Van Horn, 1975).

Oleh karena itu, tahapan implementasi merupakan penentu hasil akhir kebijakan yang kemudian bisa dievaluasi (Ripley & Franklin, 1987). Sebuah kebijakan publik bisa dievaluasi melalui analisis secara objektif dengan cara melihat kondisi masyarakat sebelum dan sesudah tahap implementasi. Variabel terpenting dan komprehensif adalah aspek kebermanfaatan bagi masyarakat. Kebijakan aplikatif pasti memiliki dampak positif di masyarakat (Dunn, 2000).

*“Keberadaan website perpustakaan memudahkan pengunjung mencari referensi atau buku-buku yang diperlukan. Apalagi, ada versi PDF juga di sana. Facebook membuat warga gampang berinteraksi dengan Pemkot (Pemerintah Kota Surabaya, pen). Kami bisa bertanya maupun menyalurkan saran bagi dinas perpustakaan meskipun di luar topik yang diposting di sana melalui kolom komentar. Admin juga responsif. Sedangkan YouTube mereka cukup informatif. Banyak video pelajaran juga,” (Wawancara, warga Surabaya Muhammad Iqbal tanggal 3 Juni 2020).*

Sebelum website perpustakaan umum TEMPE TERASI diluncurkan, belum ada media pencarian informasi atau katalog yang terintegrasi di Surabaya. Sehingga, untuk mendapatkan informasi tentang literatur referensi maupun buku, warga perlu datang langsung ke TBM atau perpustakaan yang lokasinya bisa jadi jauh dari tempat tinggal mereka. Sementara itu, kemitraan dengan kampus di Surabaya memudahkan mereka yang bukan civitas akademika untuk menelusuri *repository* perguruan tinggi tersebut.

TEMPE TERASI merupakan *one stop service* pencarian informasi literatur, referensi, dan buku perpustakaan Surabaya yang menjadikan pelayanan publik menjadi efektif serta efisien. Konsep pemanfaatan media sosial yang dilakukan oleh Dispusip Surabaya juga bisa direplikasi di daerah lain. Dengan demikian

Konsep yang dipakai tergolong sederhana karena hanya membuat website, akun facebook, dan YouTube.

Dampak positif yang bisa dirasakan masyarakat dari kebijakan pemanfaatan media sosial Dispusip Surabaya ini juga merambah di aspek ekonomi. Salah satu perkumpulan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Jambangan mengaku, para anggotanya mendapat keuntungan dari kebijakan ini. Referensi mengenai bisnis kuliner, kerajinan tangan, dan lain sebagainya, yang tersedia di website perpustakaan umum, facebook, maupun YouTube, membuat sejumlah UMKM berkembang signifikan.

*“Berdasarkan masukan warga di Jambanga, pada tahun 2019, kami melakukan penambahan buku tentang ekonomi rakyat. Lebih dari itu, melihat animo yang besar di sana, kami bekerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi UMKM. Terdapat perubahan omzet bulanan dari sejumlah UMKM di sana. Misalnya, UMKM B1WUH, dari Rp 2.000.000 menjadi Rp 4.000.000: Berkah Crispy, dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.500.000: Rapi Ayu, dari Rp 3.600.000 menjadi Rp 7.000.000: Flass, dari Rp 5.000.000 menjadi Rp 6.000.000: Perca Ayu, dari Rp 500.000 menjadi Rp 700.000,” (Wawancara, Kepala Dispusip Surabaya Musdiq Ali Suhudi, 4 Februari 2020).*

Dispusip Surabaya membuka diri bagi siapa saja yang ingin memberi saran maupun kritik. Instansi ini juga melakukan penilaian internal dan memperoleh beberapa poin penting untuk membenahan program dalam kebijakan pemanfaatan media sosial tersebut. Di antaranya, penambahan jumlah koleksi buku maupun e-book, baik terbitan lama yang kontennya masih relevan, maupun terbitan baru. Dispusip Surabaya melalui kanal-kanal media sosial yang ada juga membuka diri pada masukan dari masyarakat.

*“Secara umum media sosial Dispusip Surabaya sudah cukup informatif. Namun akan lebih mengesankan bila pembaruan konten di facebook dan YouTube makin diperbanyak. Kalau sekarang kan dalam setahun rata-rata sebulan dua kali update. Coba kalau seminggu sekali kan lumayan banyak sehingga lebih dikenal masyarakat. Kalau perlu nantinya, semua pustakawan diwajibkan melakukan share konten Dispusip Surabaya melalui akun*

*pribadi masing-masing. Toh, nantinya yang diuntungkan juga masyarakat banyak,” (Wawancara, Yeni Ermawaty tanggal 26 Mei 2020).*

Ada banyak pembelajaran yang bisa dipetik dari kebijakan pemanfaatan media sosial Dispusip Surabaya. Pembelajaran bagi pemerintah adalah pentingnya terus berinovasi terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Determinasi teknologi sudah tidak bisa dihindarkan di era digital seperti sekarang ini. Di sisi lain, kebijakan ini tidak bisa berjalan lancar tanpa sinergitas banyak pihak, baik di internal Pemerintah Kota Surabaya maupun kolaborasi dengan pihak eksternal.

Pada bagian lain, terdapat tujuh belas poin tujuan pembangunan berkelanjutan dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dicetuskan pada 2015 lalu. Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah di seluruh dunia, diharapkan selaras dengan satu atau lebih dari tujuan tersebut (United Nation, 2015).

Tujuh belas poin yang dimaksud antara lain, *No Poverty* (mengakhiri kemiskinan), *Zero Hunger* (mengakhiri kelaparan), *Good Health and Well-Being* (memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi masyarakat), *Quality Education* (menciptakan pendidikan berkualitas), *Gender Equality* (mencapai kesetaraan gender), *Clean Water and Sanitation* (ketersediaan air bersih dan sanitasi yang sehat), *Affordable and Clean Energy* (memastikan akses terhadap energi tanpa polusi), *Decent Work and Economic Growth* (membuka lapangan kerja dan menumbuhkan ekonomi), serta *Industry, Inovation and Infrastructure* (mengembangkan industri, inovasi dan infrastruktur yang inklusif).

Poin yang lain adalah *Reduced Inequalities* (mengurangi kesenjangan sosial), *Sustainable Cities and Communities* (membangun kota dan komunitas yang berkelanjutan). *Responsible Consumption and Production* (mewujudkan pola konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab), *Climate Action* (mengambil peran untuk menyikapi dampak buruk perubahan iklim), *Life Below Water* (mengelola dan melestarikan sumber daya air dan sektor kemaritiman), *Life on Land* (mengelola dan melestarikan sumber daya di daratan), *Peace, Justice, and Strong Institutions* (mewujudkan kedamaian, keadilan, yang diperkuat secara kelembagaan), *Partnership for The Goals* (menguatkan kemitraan dan sinergitas).

Pemanfaatan media sosial oleh Dispusip Surabaya selaras dengan tujuan mewujudkan pendidikan dan berkualitas (*Quality Education*). Kebijakan ini memberikan kemudahan masyarakat untuk mencari referensi yang baik

dan bisa dijadikan acuan dalam menimba ilmu pengetahuan. Di sisi lain, kebijakan ini terbukti menguatkan UMKM atau industri rumah tangga sehingga para pelaku usaha giat berinovasi berdasarkan literatur kredibel yang mereka dapatkan. Dengan kata lain, kebijakan ini juga selaras dengan tujuan pengembangan industri dan inovasi (*Industry, Inovation and Infrastructure*). Melalui teknologi berbasis internet, layanan publik bisa lebih merata menjangkau masyarakat. Terlebih, Pemerintah Kota Surabaya memberikan layanan *hotspot* gratis di kantor kelurahan dan balai RW. Semua masyarakat bisa mengakses layanan publik ini dengan mudah sebagai upaya Dispusip Surabaya untuk mengurangi kesenjangan sosial (*Reduce Inequality*).

Penggunaan internet menjadikan layanan tanpa kertas atau *paperless* selaras pula dengan semangat melestarikan sumber daya di daratan, dalam hal ini peka terhadap isu penebangan pohon (*life on Land*). Kebijakan ini juga selaras dengan cita-cita membangun kota dan komunitas yang berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*) melalui aktifitas literasi yang turut mencerdaskan bangsa. Apalagi, banyak kegiatan yang mengandalkan kemitraan dan sinergitas demi pelayanan optimal (*Partnership for The Goals*). Dengan kata lain, secara umum, implementasi kebijakan pemanfaatan media sosial oleh Dispusip Surabaya sudah selaras poin-poin penting tujuan pembangunan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Pemanfaatan media sosial oleh Dispusip Surabaya merupakan jawaban atas tantangan zaman di era determinasi teknologi komunikasi sudah berjalan dengan baik. Pemanfaatan media sosial oleh Dispusip Surabaya melalui optimalisasi website perpustakaan umum, *facebook*, dan *YouTube*, merupakan bentuk layanan publik sebagai ibas determinasi teknologi. Pelayanan publik perpustakaan tidak lagi hanya dilakukan di luar jaringan (*offline*), melainkan harus mengikuti perkembangan zaman yang serba dalam jaringan (*online*). Website perpustakaan umum berisi informasi mengenai buku-buku koleksi TBM dan perpustakaan di Surabaya, e-Book, video tutorial edukatif, arsip mengenai sejarah Surabaya, serta *repository* kampus-kampus di Surabaya (Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Kristen Petra). Akun *facebook* dan *YouTube* berisi informasi mengenai kegiatan yang dijalankan oleh Dispusip Surabaya, termasuk, informasi mengenai kegiatan kolaboratif dengan institusi, perusahaan swasta,

atau pihak eksternal lainnya. Publikasi di media sosial yang sudah dilaksanakan menjadi lebih cepat direspon oleh masyarakat, contohnya, melalui kolom komentar di media sosial. Kebijakan menyentuh langsung masyarakat dan kebermanfaatannya bisa dirasakan secara kongkret. Kedua, implementasi kebijakan pemanfaatan media sosial oleh Dispusip Surabaya sudah selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kebijakan pemanfaatan media sosial sebagai sarana media komunikasi yang informatif dan edukatif ini bisa direplikasi oleh instansi lain, dari dinas di dalam kota Surabaya, maupun instansi di luar Surabaya. Dengan kata lain, kebijakan ini memiliki nilai-nilai universal yang bisa diaplikasikan di mana saja.

## REKOMENDASI

Kebijakan pemanfaatan media sosial Dispusip Surabaya masih perlu dibenahi agar pelayanan publik bisa lebih optimal. Ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan untuk kemajuan program tersebut.

1. Penambahan koleksi e-book atau literatur versi PDF dan video tutorial edukatif, di website perpustakaan umum. Mengingat, kebutuhan masyarakat terhadap referensi berkualitas semakin berkembang dari waktu ke waktu.
2. Penambahan kampus mitra untuk melengkapi menu kemitraan di website perpustakaan umum. Saat ini baru ada empat kampus, padahal, Surabaya memiliki banyak kampus besar yang dapat diajak berkolaborasi.
3. Penambahan konten informatif dan edukatif di akun *facebook* maupun *YouTube*. Dispusip Surabaya dapat menempatkan petugas khusus yang menangani akun media sosial, agar pembaruan dan penyebaran konten bisa berjalan secara rutin dan terukur.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terimakasih pada Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Airlangga Surabaya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya, serta para informan yang telah mendukung penelitian ini. Kami juga berterimakasih pada dewan redaksi dan mitra bestari Jurnal Inovasi Balitbang Sumatera Utara yang telah memberi kesempatan bagi publikasi penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Anderson, James E. 1984. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Bagian Organisasi Pemkot Surabaya. 2019. *Inovasi Pelayanan Publik*. Surabaya: tidak diterbitkan.

- Bertot, John C, Paul T. Jaeger, Justin M. Grimes. 2010. Using ICT to Create a Culture of Transparency: E-government and Social Media as Openness and Anticorruption Tools for Societies. *Government Information Quarterly* 27(3), hal: 264-271.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. 1990. Looking at the bright side: A positive approach to qualitative policy and evaluation research. *Qualitative Sociology*, 13(2), hal: 183-192.
- Bromley, Daniel W. 1989. Economic Interest and Institutions: The Conceptual Foundations of Public Policy. New York: Basil Blackwell Ltd.
- Cohen, B, 2014. The Smartest Cities in The World 2015 [Online] Dari: <https://www.fastcompany.com/3038818/the-smartest-cities-in-the-world-2015-methodology> [Diakses: 6 Januari 2020].
- Creswell, John W. 2012. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1972. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall.
- Flew, Terry. 2000. New Media: An Introduction. New York: Oxford University Press.
- Gamble, M. & Teri K. G. 2002. Communication Works. Boston: McGraw Hill Education.
- Gere, Charlie. 2008. Digital Culture. London: Reaktion Books.
- Grindle, M. S. 2004. Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform In Developing Countries. *Governance* 17 (4), hal: 525-548.
- Hardiansyah, Intan L. N, & Lutfi A. 2019. Implementasi Kebijakan Publik Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir. *Inovasi* 16 (1), hal: 47-57.
- Holmes, David. 2005. Communication Theory: Media, Technology and Society. New York: Sage Publications Ltd.
- Jaeger, P. T., Bertot, J. C., & Shilton, K. 2012. Information Policy and Social Media: Framing Government—Citizen Web 2.0 Interactions. Dalam: C. G. Reddick & S. K. Aikins, editor. *Web 2.0 Technologies and Democratic Governance*. New York: Springer-Verlag.
- Jones, Charles O. 1984. An Introduction to The Study of Public Policy. California: Brook/Cole Publishing Company.
- Mahulaa, P., & Husni, N. 2018. Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Listrik Di Desa-Desa Terpencil Di Sumatera Utara. *Inovasi* 14 (1), hal: 61-76.
- Marx, Leo & Smith, M. R. 1994. Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism. Cambridge: Massachussets Institute of Technology Press.
- Mayring, P. 2000. Qualitative content analysis. *Forum: Qualitative Social Research*, 1 (2), Art. 20, tersedia di <http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0002204>.
- McLuhan, Marshall. 1962. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographical Man. Toronto: University of Toronto Press.
- Meyrowitz, J. 1999. Understandings of Media. *ETC: A Review of General Semantics* 56 (1), hal: 44-52.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. 1994. Qualitative Data Analysis. California: Sage Publishing Inc.
- Perpusnas RI. 2019. Nugra Jasadarma Pustaloka dan Gemilang Perpusnas 2019: Apresiasi Bagi Pejuang Literasi [Online]. Dari: <https://www.perpusnas.go.id/news-detail.php?lang=id&id=1909060236070ITWt0G8Sv> [Diakses: 3 Maret 2020].
- Rachman, R.F. 2017. Menelaah Riuh Budaya Masyarakat di Dunia Maya. *Jurnal Studi Komunikasi* 1(2), hal: 206-222.
- Rachman, R.F. 2019. Optimalisasi Media Digital Berbasis Kemaslahatan Umat dalam Program Pahlawan Ekonomi Surabaya. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2), hal: 273-292.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. 1987. Congress, The Bureaucracy, and Public Policy. Chicago: Dorsey Press.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII.
- United Nation. 2015. About the Sustainable Development Goals [Online]. Dari: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/> [Diakses: 11 Mei 2020]
- United Nation. 2015. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 [Online]. Dari: [https://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E](https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E) [Diakses: 16 Februari 2020]
- Van Metter, D. S., & Van Horn, C. E. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6 (4), hal: 445-488.
- Yuwinanto, H.P. 2013. Implementasi E-Procurement pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jejaring Administrasi Publik* 5(1). hal: 212-231.

## Hasil Penelitian

# PERSEPSI PENGUNJUNG TERHADAP FASILITAS, KONDISI LINGKUNGAN, DAN KESEDIAAN MEMBAYAR DI KAWASAN AEK NAULI ELEPHANT CONSERVATION CAMP

## *(VISITORS'S PERCEPTION TOWARDS INFRASTRUCTURE, ECOLOGICAL QUALITY, AND THE WILLINGNESS TO PAY IN THE AEK NAULI ELEPHANT CONSERVATION CAMP)*

*Freddy Jontara Hutapea\*, Johansen Silalahi\*\*, Wanda Kuswanda\**

\*Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli  
Jl. Raya Parapat Km.10,5, Desa Sibaganding Parapat, 21174  
Sumatera Utara - Indonesia  
Email: jontara\_h@yahoo.com; johansen\_silalahi@yahoo.com; wkuswan@yahoo.com

\*\*Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Asahan Barumun  
Jl. Viyata Yudha No. 108 Pematangsiantar 21139  
Sumatera Utara - Indonesia

*Diterima: 13 Juli 2020; Direvisi: 01 Maret 2021; Disetujui: 25 Maret 2021*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pengunjung terhadap fasilitas, kualitas ekologi dan kesiapan membayar di ANECC (Aek Nauli Elephant Conservation Camp), Kawasan dengan Tujuan Khusus Aek Nauli. Penelitian dilaksanakan pada Bulan September sampai dengan Nopember 2018. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden yaitu pengunjung ANECC. Pemilihan responden dilakukan secara purposive random sampling dan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Persepsi pengunjung terhadap fasilitas di ANECC sudah tergolong baik meskipun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Alasan utama pengunjung mendatangi ANECC adalah untuk melihat gajah (72%), menikmati suasana alam (27%), dan menikmati pemandangan yang indah di KHDTK Aek Nauli (23%). 76% responden setuju jika manajemen ANECC mengenakan tiket masuk dan sekitar 43% bersedia membayar Rp.5.000,-. Namun demikian, manajemen ANECC perlu menetapkan harga tiket yang terjangkau bagi para pengunjung. Hampir semua pengunjung (92%) bersedia membayar untuk membantu konservasi gajah. Apabila terdapat atraksi menunggang gajah, mayoritas pengunjung bersedia mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp.30.000 - Rp. 39.000 selama 10-15 menit, diluar tiket masuk. Kesiapan membayar mayoritas pengunjung untuk melihat pertunjukan atraksi gajah berkisar antara Rp.10.000 - Rp.15.000-, meskipun 33% responden bersedia membayar Rp.20.000 - Rp.25.000. Kondisi ini menunjukkan bahwa atraksi gajah memiliki daya tarik yang cukup tinggi bagi para pengunjung. Namun demikian, pengunjung mengharapkan juga manajemen ANECC untuk meningkatkan fasilitas, menjaga kualitas lingkungan untuk meningkatkan daya tarik pengunjung sehingga ANECC bisa menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

**Kata kunci:** persepsi, kesiapan membayar, gajah, ANECC, Aek Nauli

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine visitor perceptions toward facilities, ecological quality, and willingness to pay at ANECC (Aek Nauli Elephant Conservation Camp), Special Purpose Forest of Aek Nauli. The study was conducted from September to November 2018. This study applied a qualitative approach. The data were collected from primary data (interviews with ANECC visitors). Respondents selection was carried out by purposive random sampling, and the data were analyzed using qualitative descriptive techniques. Visitor's perceptions toward the facilities at ANECC are good, although there were several things needed to be improved. The main reasons for visitors came to ANECC are seeing the elephants (72%), enjoying the natural*

atmosphere (27%), and enjoying the beautiful scenery at the KHDTK of Aek Nauli (23%). 76% of respondents agreed that ANECC management needs to charge an entry ticket and around 43% were willing to pay 5,000 IDR. However, management of ANECC needs to set the price of the ticket that is affordable to all visitors. Almost all visitors (92%) were willing to spend extra money on elephant conservation. If elephant riding attractions are available, most visitors were willing to pay 30,000 IDR – 39,000 IDR, - for 10-15 minutes of riding, excluding the entry ticket. The willingness to pay for most visitors who want to see the elephant attraction was 10,000 IDR - 15,000 IDR, although 33% of respondents were willing to pay 20,000 IDR - 25,000 IDR. This information reveals that elephant attraction is quite attractive to the visitors. Nevertheless, visitors expected ANECC management to improve its facilities, and maintain the environmental quality so that ANECC can become a source of non-tax revenue.

**Keywords:** perception, willingness to pay, elephant, ANECC, Aek Nauli

## PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 menetapkan Danau Toba sebagai salah satu kawasan yang ditetapkan pemerintah sebagai kawasan strategis nasional (KSN). Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Danau Toba kedepannya diarahkan sebagai destinasi wisata prioritas di Indonesia. Proses pencapaian hal di atas, pemerintah terus menggalakkan berbagai program, baik dalam bentuk penambahan destinasi wisata baru maupun berbagai fasilitas pendukungnya seperti bandara, jalan raya dan lainnya (Kuswanda, 2019; Sitorus & Sitorus, 2017).

Aek Nauli Elephant Conservation Camp (ANECC) merupakan salah satu program yang dibangun oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Aek Nauli dan *Veterinary Society for Sumatran Wildlife Conservation* (Vesswick) pada tahun 2017 untuk mendukung upaya konservasi terhadap gajah Sumatera (*Elephas maximus*) yang populasinya di alam semakin menurun (Kuswanda et al., 2018; Rospita & Kuswanda, 2019).

Kawasan ANECC juga di desain sebagai destinasi wisata yang dapat mendukung keberadaan Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas. Satu tahun setelah dibuka pada tahun 2017, jumlah pengunjung yang mengunjungi ANECC sudah mencapai puluhan ribu orang (Kuswanda, 2019). Namun demikian, ANECC ini masih perlu untuk dikembangkan sehingga berbagai studi sangat penting sebagai bahan rekomendasi dalam optimalisasi pengelolaan ANECC.

Persepsi pengunjung terhadap suatu sarana/obyek wisata merupakan aspek yang perlu dikaji dalam rangka pengembangan dan promosi suatu obyek wisata (Agustina et al., 2018; Nisa et al., 2014) untuk menuju pengelolaan yang lebih baik. Menurut Sayangbatti & Baiquni (2013), sarana dan prasarana merupakan salah satu elemen penting

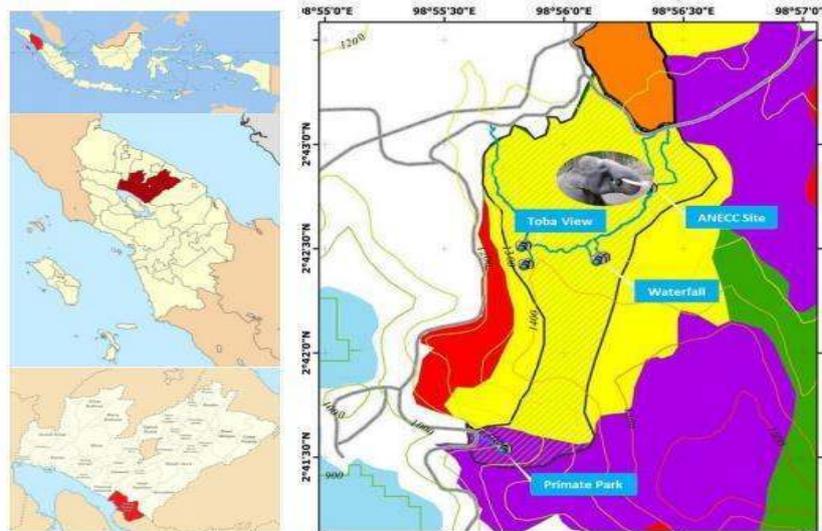
dalam membentuk suatu kesatuan destinasi wisata.

Kuswanda (2019) telah mencoba melakukan studi untuk melihat persepsi pengunjung terhadap ANECC. Namun demikian, studi ini masih sangat terbatas pada pengetahuan masyarakat terhadap ANECC dan persepsi mereka terhadap keberadaan ANECC. Studi ini belum melihat secara komprehensif bagaimana persepsi pengunjung terhadap aspek lain yang dimiliki oleh ANECC seperti fasilitas dan kualitas ekologisnya.

Kami melakukan penelitian lanjutan sampai menggali informasi kesediaan membayar pada pengunjung. Fauzi (2004) mendefinisikan *willingness to pay* (keinginan membayar) / WTP adalah kesediaan seseorang akan barang atau jasa yang dihasilkan oleh lingkungan dan suatu sumberdaya alam. Haban et al. (2017) melalui penelitiannya mendefinisikan WTP adalah kesediaan seseorang atau individu untuk membayar terhadap suatu kondisi lingkungan atau penilaian terhadap sumberdaya alam dan jasa alami dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan. Studi ini sangat penting untuk menambah rekomendasi pada pengelola ANECC sebagai salah satu destinasi ekowisata di Sumatera Utara.

## METODE

Penelitian dilaksanakan di kawasan ANECC KHDTK Aek Nauli (Gambar 1) dari bulan September sampai November 2018. Secara geografis, KHDTK Aek Nauli terletak pada koordinat 2°41'-2°44' LU dan 98°57'-98°58'. Secara administratif, KHDTK ini terletak di Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Secara topografis, KHDTK Aek Nauli berada pada daerah pegunungan dengan ketinggian berkisar antara 1.000-1.750 mdpl, dengan kemiringan sekitar 3-65% (Kuswanda et al., 2018).



**Gambar 1.** Peta kawasan dan prasarana ANECC di KHDTK Aek Nauli.  
Sumber: Situmorang & Kuswanda (2019)

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Erickson (2012), tujuan penting pendekatan kualitatif adalah untuk mendokumentasikan secara detail perilaku kehidupan sehari-hari dan mengidentifikasi maknanya bagi mereka yang terlibat didalamnya dan menyaksikannya. Taylor *et al.* (2016) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif bersifat induktif. Dengan kata lain, penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif untuk membangun pengetahuan yang ditujukan untuk menghasilkan pemahaman (Leavy, 2017).

Menurut Raco (2010), hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut diinterpretasikan oleh peneliti.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan responden. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah para wisatawan yang sedang mengunjungi ANECC.

Pemilihan responden dilakukan secara *purposive random sampling*. Jumlah responden yang terpilih adalah 75 orang. Data sekunder diambil dari berbagai pustaka atau referensi lain seperti buku dan jurnal mengenai kondisi umum lokasi penelitian. Analisis data menggunakan table frekuensi yang disajikan dalam diagram dan selanjutnya diinterpretasikan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Karakteristik Responden.** Karakteristik responden sebagai pengunjung ANECC cukup beragam. Karakteristik responden diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori seperti kelas umur, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, dan asal/tempat tinggal. Berdasarkan kelas umur, responden dalam penelitian ini didominasi oleh kelompok umur 16-25 tahun (Gambar 2). Jika dilihat dari kelas umur, responden yang terpilih didominasi oleh generasi muda.



**Gambar 2.** Karakteristik responden berdasarkan kelas umur dan jenis kelamin.



**Gambar 3.** Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dan penghasilan

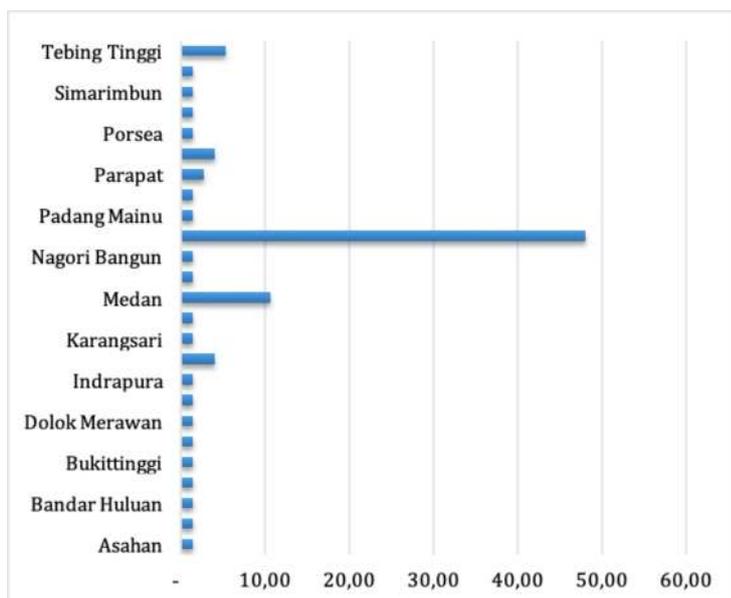
Hal ini sangat sejalan dengan perubahan tren saat ini dimana *traveling* dan mengabadikan momen dalam bentuk foto dan video serta membagikannya dalam media sosial merupakan gaya hidup generasi muda saat ini (Cahyanti et al., 2017; Isnaini & Abdillah, 2018). Disamping itu, rasa ingin tahu yang tinggi untuk melihat dan mempelajari keunikan di tempat lain juga memotivasi generasi muda untuk berwisata (Keliwar & Nurcahyo, 2015).

Menurut jenis kelamin, pengunjung yang terpilih sebagai responden sebanyak 49% laki-laki dan 51% perempuan (Gambar 2). Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki motivasi yang hampir sama untuk melaksanakan kegiatan wisata, termasuk berkunjung ke ANECC.

Profesi sebagian besar responden adalah wiraswasta (31%) dan karyawan swasta (28%). Penghasilan sebagian besar responden di atas 3 juta rupiah (37%) (Gambar 3). Pekerjaan yang layak dan penghasilan yang cukup menyebabkan responden dengan mudah melakukan perjalanan wisata di saat hari libur. Menurut Keliwar & Nurcahyo (2015), orang yang

memiliki pekerjaan tetap memiliki kesempatan yang lebih banyak dalam melakukan perjalanan wisata dibandingkan orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Istiqomah *et al.* (2019) juga mengatakan bahwa tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam membuat pilihan wisata.

Jika dilihat dari daerah asal pengunjung (Gambar 4), hampir 50% responden berasal dari Pematangsiantar. Pengunjung ANECC saat ini masih sangat didominasi oleh pengunjung dari Sumatera Utara yang umumnya sangat dekat dengan lokasi ANECC. Kondisi ini menunjukkan bahwa jarak merupakan salah satu pertimbangan dalam melaksanakan perjalanan wisata. Menurut Keliwar & Nurcahyo (2015), jarak merupakan salah satu pertimbangan dalam melakukan perjalanan wisata karena faktor ini sangat berkaitan dengan jumlah biaya yang akan dikeluarkan. Walaupun demikian pengunjung dari luar Sumatera dan wisatawan internasional juga banyak yang telah mengunjungi ANECC (Kuswanda et al., 2018).



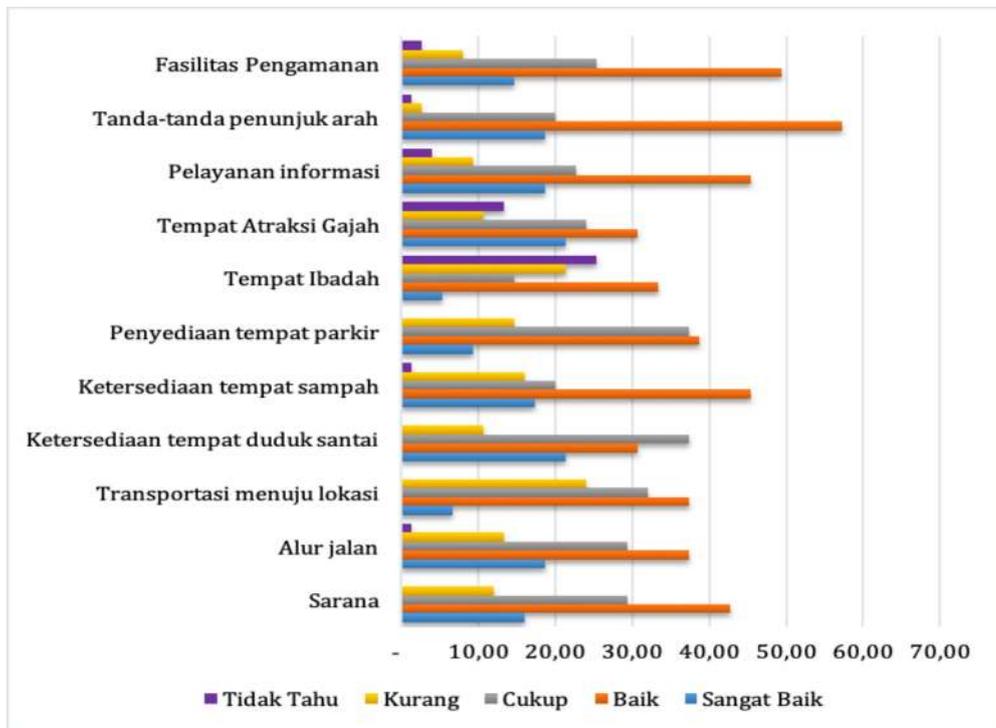
**Gambar 4.** Karakteristik responden berdasarkan daerah asal

Diluar karakteristik di atas, tingkat pendidikan responden merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu sarana wisata (Haban *et al.*, 2017). Studi ini tidak melihat tingkat pendidikan responden karena faktor ini sebelumnya telah diteliti oleh Situmorang *et al.* (2020). Dalam penelitiannya, Situmorang *et al.* (2020) menyatakan bahwa pengunjung ANECC Aek Nauli memiliki tingkat pendidikan Diploma-Sarjana (40,78%), SLTP-SLTA (33,98%), Pascasarjana (S2-S3) (23,30%), dan tidak sekolah-SD (1,94%).

Studi ini juga menambahkan bahwa pengunjung dengan Pendidikan sampai tingkat sarjana umumnya merupakan masyarakat umum, sedangkan pengunjung yang memiliki tingkat Pendidikan sampai pascasarjana merupakan pengunjung yang berasal dari instansi pemerintah seperti pemerintah daerah (Dinas Kehutanan) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengunjung yang berpendidikan S1 sampai S3 umumnya memiliki persepsi yang tinggi terhadap ANECC dan mereka berharap pengembangan ANECC lebih difokuskan untuk menjadi lokasi/sarana wisata, pendidikan, dan konservasi. Pengunjung dengan tingkat pendidikan sampai SLTA lebih memfokuskan pada pengembangan prasarana pendukung wisata dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitarnya.

**Persepsi pengunjung terhadap Sarana dan Prasarana di ANECC.** Menurut Qiong (2017), persepsi merupakan suatu proses untuk mendapatkan kesadaran atau pemahaman dari informasi sensorik. Dengan kata lain, persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsirkan informasi yang diperoleh melalui alat indra (Sahidin & Jamil, 2013). Menurut Sarwono (2010), persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perhatian, kesiapan mental seseorang, kebutuhan, sistem nilai, dan tipe kepribadian. Keterkaitannya dengan pariwisata, persepsi masyarakat tentang suatu obyek wisata menggambarkan pendapat, keinginan, harapan, dan tanggapan mereka tentang suatu obyek wisata (Latupapua, 2011).

Setiap pengunjung memiliki persepsi yang berbeda terhadap objek wisata yang dikunjungi, yang umumnya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman mengunjungi tempat-tempat wisata, tingkat pendidikan, kondisi lingkungan, kondisi sosial budaya daerah asal pengunjung, dan pengaruh psikologis (Keliwar & Nurcahyo, 2015). Persepsi ini memegang peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu tempat wisata. Persepsi yang positif akan membuat pengunjung merasa puas dan memiliki keinginan untuk mengulangi kunjungannya (Nisa *et al.*, 2014).



**Gambar 5.** Persepsi pengunjung terhadap sarana dan prasarana yang terdapat di ANECC

Persepsi pengunjung terhadap fasilitas yang terdapat di ANECC dapat dilihat pada Gambar 5. Secara umum, fasilitas pengunjung yang terdapat di ANECC Aek Nauli yang meliputi fasilitas pengamanan, tanda penunjuk arah, pelayanan informasi, tempat atraksi gajah, tempat ibadah, penyediaan tempat parkir, ketersediaan tempat sampah, ketersediaan tempat duduk santai, transportasi menuju lokasi, alur jalan, dan sarana sudah tergolong baik. Responden mengusulkan juga beberapa sarana dan prasarana yang perlu ditambah untuk menambah daya tarik ANECC, seperti arena bermain untuk anak-anak, kantin dan *coffee shop*, taman hewan, *flying fox*, angkutan di dalam ANECC, *spot selfie*, toilet, dan musholla.

Masukan dari pengunjung menunjukkan bahwa pengelola ANECC masih perlu menambah beberapa fasilitas yang dapat menambah daya tarik pengunjung. Menurut Keliwar & Nurcahyo (2015), fasilitas yang terdapat dalam suatu objek wisata merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengunjungi suatu objek wisata.

**Persepsi Pengunjung Terhadap Kondisi Lingkungan ANECC.** Persepsi pengunjung yang terkait dengan kondisi lingkungan adalah mencakup seluruh daya tarik wisata yang terdapat di kawasan ANECC. Daya tarik wisata yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dinikmati oleh pengunjung ANECC seperti: pemandangan alam, gajah, hutan pinus, dan udara yang segar. Hasil analisis menunjukkan mayoritas pengunjung mendatangi area ANECC dan KHDTKAek Nauli untuk melihat gajah (54 orang atau 72 %) dan dapat menikmati suasana yang hijau berupa hutan pinus (20 orang atau 27 %). Pemandangan/*view*/panorama adalah daya

tarik wisata lainnya yang sangat dinikmati oleh pengunjung sekitar 17 orang (23 %).

Gajah di KHDTK Aek Nauli merupakan sesuatu yang unik karena dekat dengan pintu gerbang menuju kawasan wisata Danau Toba. Kuswanda (2019) menyebutkan bahwa ANECC adalah salah satu ekowisata gajah yang dipadukan dengan nuansa keindahan hutan dan baru dibuka pada tahun 2017. Destinasi yang memadukan wisata alam dengan hewan yang dilindungi isangat langkah ditemukan terutama sekitar Kawasan Danau Toba. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan yang indah sehingga dapat menghilangkan kepenatan dari rutinitas pekerjaan. Persepsi pengunjung secara lengkap terhadap lingkungan yang menjadi daya tarik wisata di ANECC seperti pada Tabel 1.

**Persepsi pengunjung saat pertama memasuki kawasan ANECC.** Informasi kesan pertama kali memasuki kawasan ANECC sangat diperlukan terutama bagi manajemen pengelola ANECC sebagai umpan balik untuk perbaikan kedepannya. Kesan pertama kali ketika memasuki kawasan ANECC secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2. Tiga teratas persepsi pengunjung terkait kesan memasuki kawasan ANECC, yaitu: nuansa sejuk yang ada di lokasi, rasa nyaman yang dirasakan dan rasa senang. Hal ini menunjukkan bahwa Kawasan Aek Nauli telah sesuai dengan latar belakang dan motivasi pengunjung berwisata ke kawasan ANECC dan KHDTK Aek Nauli. Wisata dalam hal ini erat kaitannya untuk menikmati pemandangan yang sejuk, nyamantentram dan tenang sehingga memberikan kedamaian. Nuansa alami yang ditawarkan kawasan ANECC dengan beragam jenis tumbuhan sudah semakin sulit ditemukan di wilayah perkotaan.

**Tabel 1.** Persepsi pengunjung terhadap lingkungan di ANECC

No	Daya Tarik Wisata	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Keberadaan gajah	54	72
2	Udara	11	15
3	Lingkungan alami	9	12
4	Pemandangan/ <i>view</i> /panorama	17	23
5	Hutan Pinus	20	27
6	<i>Camping</i>	1	1
7	Tracking	1	1
8	Jembatan cinta	4	5
9	Air terjun	3	4
10	Foto	3	4
11	Atraksi Gajah	5	7
12	Tempat duduk	1	1
13	Kandang gajah	1	1
14	Aksesibilitas	2	3
15	Nyaman	3	4

Sumber: Data Penelitian (2018)

**Tabel 2.** Kesan pertama kali pengunjung memasuki kawasan ANECC

No.	Kesan Pertama Kali	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Nyaman	13	17
2	Sejuk	23	31
3	Mengesankan	1	1
4	Kagum	4	5
5	Puas	2	3
6	Capek	3	4
7	Damai/tenang	5	7
8	Biasa/tidak ada apa-apa	8	11
9	Penasaran	2	3
10	Suasana	1	1
11	Tenteram	2	3
12	Pemandangan	1	1
13	Asri	3	4
14	Senang	10	13
15	Segar	4	5
16	Menarik	1	1
17	Jarak tempuh jauh	1	1
18	Hutan alami	1	1

Sumber: Data Penelitian (2018)

### Persepsi Pengunjung terkait Kenyamanan ANECC untuk Kegiatan Wisata.

Rasa nyaman adalah salah satu tolak ukur penentu keberhasilan sektor wisata (Tiani & Baiquni, 2018). Secara rinci, persepsi pengunjung terkait kenyamanan ANECC untuk kegiatan wisata dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Persepsi pengunjung terhadap kenyamanan ANECC

No.	Kenyamanan ANECC	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Kurang nyaman	3	4
2	Cukup nyaman	22	29
3	Nyaman	35	47
4	Lebih dari nyaman	5	7
5	Sangat nyaman	9	12
6	Abstain	1	1

Sumber: Data Penelitian (2018)

Secara garis besar, pengunjung memiliki persepsi yang baik terhadap kenyamanan ANECC untuk kegiatan wisata dimana sebanyak 35 orang (47 %) menyatakan aman, 22 orang (29 %) menyatakan cukup nyaman dan 9 orang (12%) menyatakan sangat nyaman. Persepsi positif ini menandakan bahwa Kawasan Aek Nauli sangat layak dikembangkan sebagai obyek

wisata alternatif selain Danau Toba. Namun demikian, persepsi negatif yang dikemukakan sebagian kecil responden (4%) dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen ANECC dalam meningkatkan kenyamanan ANECC sebagai salah satu destinasi wisata alternative di sekitar Danau Toba.

**Persepsi pengunjung terhadap isu dan masalah di ANECC.** Persepsi terkait isu dan masalah di ANECC adalah kata kunci untuk pengelola ANECC dalam meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan dan mencari solusi terkait masalah yang dihadapi. Tabel 4 secara rinci mendeskripsikan isu dan masalah yang ada di ANECC berdasarkan persepsi pengunjung.

Isu terbesar yang menjadi perhatian sebagian besar pengunjung (47%) adalah transportasi. Lokasi ANECC yang cukup jauh dari Bandara dan pusat Kota Medan merupakan masalah bagi pengunjung, terutama yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Hal ini diperparah dengan kondisi transportasi umum yang masih jarang dan biaya menyewa kendaraan yang tinggi dari luar Kabupaten Simalungun dan Pematang Siantar.

Isu dan masalah lain yang dikemukakan oleh 23% responden adalah kurangnya informasi terkait ANECC dan Kawasan Aek Nauli. Selama ini, informasi terkait ANECC dan Kawasan Aek Nauli masih dari mulut ke mulut dan dari internet atau media sosial. Manajemen ANECC sebaiknya lebih menggiatkan promosi dan pemasaran melalui media lainnya yang

disebar di tempat-tempat umum. Manajemen ANECC juga kedepannya dapat bekerjasama dengan para pelaku usaha dan jasa wisata Danau Toba. Masalah mengenai ketersediaan rambu penunjuk jalan yang dikemukakan oleh sekitar 15 persen (11 orang) responden juga perlu menjadi perhatian majamen ANECC dalam meningkatkan kenyamanan dan kualitas ANECC.

**Tabel 4.** Persepsi pengunjung terhadap isu dan masalah di ANECC

No.	Isu dan Masalah	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Transportasi	35	47
2	Kurangnya informasi	17	23
3	Kurangnya rambu penunjuk jalan	11	15
4	Kurangnya rasa nyaman	5	7
5	Fasilitas umum	1	1
6	Tidak ada	6	8

Sumber: Data Penelitian (2018)

**Kesediaan Membayar.** Pengunjung yang berwisata ke area ANECC sampai saat ini belum dibebankan harga tiket masuk maupun menikmati fasilitas lainnya. Kondisi ini merupakan kebijakan pengelola ANECC sebagai bagian dari promosi, terlebih selama masih dalam tahap penyempurnaan berbagai fasilitas lain di ANECC. Namun demikian, kami mencoba mengobservasi harga tiket masuk yang bersedia dibayar oleh pengunjung ketika mengunjungi ANECC sehingga kedepannya ada rekomendasi bagi pengelola ANECC. Dalam studi ini kami menawarkan beberapa alternative harga tiket sesuai dengan hasil studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa harga tiket yang mau dibayar oleh pengunjung suatu daerah wisata alam adalah sekitar Rp. 20.000,- (Octaria *et al.*, 2017). Dengan demikian, kami mencoba membuat beberapa alternative harga tiket dengan kelipatan Rp. 5.000,- dimulai dari harga Rp. 0,-, hingga 25.000, seperti terdapat pada Apriawan *et al.* (2020).

Hasil wawancara dengan pengunjung (Tabel 5) menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung (76%) bersedia membayar jika dikenakan tiket masuk. Harga tiket masuk minimum yang bersedia dibayar oleh responden ini adalah Rp. 5.000,- (43%). Sekitar 24%

responden bersedia membayar tiket masuk ANECC hingga Rp. 10.000, meskipun 21% responden berharap harga tiket masuk ANECC gratis.

Pada umumnya, semakin tinggi harga tiket masuk suatu daerah wisata maka akan semakin sedikit jumlah pengunjung yang mengunjungi lokasi wisata tersebut (Premono & Kunarso, 2008; Isnan, 2016; Sari & harti, 2020). Oleh sebab itu, manajemen ANECC perlu memperhatikan hal ini supaya ANECC bisa menjadi destinasi wisata favorit, yang terjangkau bagi para pengunjung. Selain itu juga, diharapkan pengembangan wisata ANECC menjadi tempat hiburan dan pembelajaran bagi masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah dan tidak hanya berorientasi pada skala bisnis. Nilai manfaat lain adalah terbangunnya motivasi masyarakat untuk turut serta dalam konservasi satwa langka, khususnya gajah.

**Tabel 5.** Nominal kesediaan membayar pengunjung terhadap lokasi ANECC, Aek Nauli

No	Kesediaan Membayar (Rp.)	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	0	16	21
2	5.000	32	43
3	10.000	18	24
4	15.000	5	7
5	20.000	2	3
6	25.000	2	3

Sumber: Data Penelitian (2018)

**Kesediaan Membayar Pengunjung dalam Pertunjukan Atraksi Gajah.** Kesediaan responden dalam mengeluarkan biaya tambahan jika ada pertunjukan atraksi gajah, dapat dilihat pada Tabel 6. Biaya minimum yang bersedia dikeluarkan oleh mayoritas responden (41%) untuk menikmati atraksi gajah adalah Rp.10.000- Rp. 15.000. Menariknya, sekitar 24% responden bersedia membayar sampai sampai dengan harga Rp. 30.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa atraksi gajah memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.

Meskipun atraksi gajah merupakan daya tarik bagi pengunjung ANECC, namun manajemen ANECC perlu berhati-hati dalam menetapkan harga tiket untuk menikmati atraksi gajah karena sebagian besar responden (37%) tidak bersedia membayar maksimum. Dari Tabel 6 terlihat bahwa harga tiket maksimum untuk atraksi gajah di ANECC sebaiknya berada di kisaran Rp. 20.000-25.000,-.

**Tabel 6.** Kesiapan membayar pengunjung dalam pertunjukan atraksi gajah

No.	Kesiapan membayar pengunjung dalam pertunjukan atraksi gajah	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
<b>a. Kesiapan membayar minimum</b>			
1	10.000-15.000	31	41
2	16.000-20.000	3	4
3	21.000-25.000	13	17
4	26.000 – 30.000	18	24
5	Tidak bersedia	10	13
<b>b. Kesiapan membayar maksimum</b>			
1	20.000-25.000	25	33
2	26.000-30.000	0	0
3	31.000-35.000		0
4	36.000 – 40.000	1	1
5	50.000 – 59.000	21	28
6	Tidak bersedia	21	37

Sumber: Data Penelitian (2018)

## KESIMPULAN

Persepsi pengunjung terhadap sarana dan prasarana yang ada di ANECC sudah tergolong baik. Namun demikian, pengunjung berharap pengelola ANECC dapat menambahkan berbagai sarana dan prasarana yang dapat menambah daya tarik ANECC seperti arena bermain untuk anak-anak, kantin dan *coffee shop*, taman hewan, *flying fox*, angkutan di dalam ANECC, *spot selfie*, toilet, dan musholla. Persepsi pengunjung terkait kondisi lingkungan ANECC juga sudah tergolong baik dimana sebagian besar pengunjung sangat senang menikmati gajah, hutan pinus, dan pemandangan yang indah. Saat pertama kali mengunjungi ANECC dan KHDTK Aek Nauli, para pengunjung merasa nyaman dan senang. Pengunjung bersedia membayar hingga Rp. 10.000 untuk mengunjungi ANECC dan KHDTK Aek Nauli, dan bersedia mengeluarkan biaya tambahan Rp. 10.000–25.000, apabila pengunjung bisa menikmati atraksi gajah. Beberapa isu dan masalah yang dihadapi pengunjung ketika berkunjung ke ANECC dan KHDTK Aek Nauli adalah transportasi dan kurangnya brosur dan papan informasi terkait Kawasan Aek Nauli.

## REKOMENDASI

1. Manajemen ANECC Aek Nauli perlu memperbaiki beberapa hal terkait sarana prasarana dan kualitas lingkungan untuk meningkatkan daya tarik ANECC bagi para pengunjung sehingga pengunjung memiliki motivasi untuk mengunjungi kembali dan merekomendasikan ANECC sebagai alternatif destinasi wisata yang mendukung Danau Toba. Hasil studi kami menunjukkan bahwa pengunjung bersedia membayar lebih jika

ada atraksi/ sarana lebih yang diberikan oleh ANECC. Kesiapan membayar lebih dari para pengunjung ini tentunya akan berkorelasi positif dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dapat dihasilkan oleh ANECC dan KHDTK Aek Nauli.

2. Pengelola ANECC agar meningkatkan kualitas promosi ANECC sehingga ANECC bisa didengar dan dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Aek Nauli yang mendukung pelaksanaan penelitian ini dari awal hingga akhir. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M., Winarno, G. D., & Darmawan, A. 2018. Polarisasi persepsi para pihak dalam pengembangan hospitalitas ekowisata di Unit Pengelola Wisata Kubu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). *Jurnal Hutan Tropis* 6(2), hal, 154-160.
- Annisa, T. M., dan Harini, R. 2017. Analisis Kesiapan Membayar (WTP) Untuk Mendukung Ekowisata Berkelanjutan di Kawasan Wisata Gua Pindul, Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Bumi Indonesia* 6(4), hal. 1-9.
- Cahyanti, M. M., & Anjaningrum, W. D. 2017. Meningkatkan niat berkunjung pada generasi muda melalui citra destinasi dan daya tarik kampung wisata. *Jurnal JIBEKA* 11(1), hal. 35-41.

- Erickson, F. 2012. Qualitative research methods for science education. Dalam: B. J. Fraser, K. G. Tobin, dan C. J. McRobbie. editor. *Second International Handbook of Science Education*. Volume 1. New York: Springer.
- Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumber Daya alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia.
- Haban, Y., Koleangan, R.A.M., Kawung, G.M.V. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Kunjungan Dan Nilai Ekonomi Kebun Raya Bogor. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 19 (1), hal. 1-19.
- Isnaini, P. R., & Abdillah, Y. 2018. Pengaruh citra merek destinasi terhadap keputusan berkunjung dan kepuasan pengunjung serta dampaknya pada minat kunjung ulang. *Jurnal Administrasi Bisnis* 55(2), hal. 122-129.
- Keliwar, S., & Nurcahyo, A. 2015. Motivasi dan persepsi pengunjung terhadap obyek wisata Desa Budaya Pampang di Samarindu. *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure* 12(2), hal. 10-27.
- Kuswanda, W., Situmorang, R. O. P., Berliani, K., Barus, S. P., dan Silalahi. J. 2018. *Konservasi dan Ekowisata Gajah: Sebuah Model dari KHDTK Aek Nauli*. Bogor: IPB Press.
- Kuswanda, W. 2019. Pengetahuan, Persepsi dan Kebijakan Pengelolaan Ekowisata Gajah di Kawasan Aek Nauli, Danau Toba. *Inovasi* 16(2), hal. 129-137.
- Latupapua, Y. T. 2011. Persepsi masyarakat terhadap potensi objek daya tarik wisata pantai di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Agroforestry* 6(2), hal. 92-102.
- Leavy, P. 2017. *Research design: quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches*. New York: The Guilford Press.
- Nisa, K., Fauzi, H., & Abrani. 2014. Persepsi wisatawan dan masyarakat terhadap wisata alam di areal hutan Pendidikan Unlam Mandiangin, Kalimantan Selatan. *Jurnal Hutan Tropis* 2(2), hal. 119-126.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 *Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba Dan Sekitarnya*. 13 Agustus 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191. Jakarta.
- Raco, J. R. 2010. *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik, dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Sahidin, L., & Jamil, D. 2013. Pengaruh motivasi berprestasi dan persepsi siswa tentang cara guru mengajar terhadap hasil belajar matematika. *Jurnal Pendidikan Matematika* 4(2), hal. 211-222.
- Sarwono, S. W. 2010. *Pengantar psikologi umum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sayangbatti, D. P., & Baiquni, M. 2013. Motivasi dan persepsi wisatawan tentang daya tarik destinasi terhadap minat kunjungan kembali di Kota Wisata Batu. *Jurnal Nasional Pariwisata* 5(2), hal. 126-136.
- Sitorus, B., dan Sitorus, C. N. 2017. Peran transportasi dalam mendukung kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba. *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik* 4(1), hal. 9-23.
- Situmorang, R. O. P., dan Kuswanda, W. 2019. Networking mapping in the development of elephant conservation center in North Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas* 20(10), hal. 2858-2867.
- Taylor, S. J., Bogdan, R., dan DeVault, M. L. 2016. *Introduction to qualitative research methods: a guidebook and resource*. Edisi 4. Kanada: Wiley.
- Tiani, I. M., dan Baiquni, M. 2018. Penerapan Prinsip Ekowisata di Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran. *Jurnal Bumi Indonesia*. 7(3), hal. 1-9.
- Qiong, O. 2017. A brief introduction to perception. *Studies in Literature and Language* 15(4), hal. 18-28.

# Pedoman Penulisan Naskah Ilmiah Jurnal INOVASI

Jurnal INOVASI memuat karya tulis ilmiah hasil penelitian atau tinjauan kepustakaan dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, sumberdaya alam dan maritim sebagai bahan kebijakan dan wawasan berpolitik. Jurnal INOVASI terbit dua kali dalam setahun setiap bulan Mei dan Oktober.

Naskah yang akan diterbitkan dalam Jurnal INOVASI Balitbang Provinsi Sumatera Utara, harus memenuhi ketentuan berikut :

1. Naskah berupa karya asli yang belum pernah dipublikasikan di tempat lain dan tidak sedang diajukan ke tempat lain.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia sesuai kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan.
3. Komponen utama naskah setidaknya memuat hal-hal berikut:
  - a. **Judul**, ditulis dengan jelas menggambarkan isi tulisan.
  - b. **Identitas Penulis**, dimuat di bawah judul tulisan, memuat nama, nama instansi, asal negara, alamat korespondensi dan e-mail.
  - c. **Abstrak** ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris beserta kata kuncinya. Abstrak ditulis dalam 1 alinea berisi masalah, tujuan penelitian, hasil dan saran/usulan, dengan jumlah kata 200-300 kata.
  - d. **Pendahuluan**, tidak menggunakan subjudul, berisi penjelasan padat dan ringkas tentang latar belakang penelitian, studi pustaka yang mendukung dan relevan, serta tujuan penelitian.
  - e. **Metode Penelitian** berisikan disain penelitian yang digunakan, populasi/sampel atau subjek/objek, sumber data, instrumen, analisis dan teknik analisis yang digunakan.
  - f. **Hasil dan Pembahasan**. Hasil adalah temuan penelitian yang disajikan apa adanya tanpa pendapat penulis, pembahasan adalah argumentasi penulis tentang temuan penelitian serta relevansinya dengan penelitian terdahulu. Pembahasan hasil penelitian diarahkan pada ranah kebijakan untuk semua disiplin ilmu. Disajikan tanpa subjudul.
  - g. **Kesimpulan** menjawab tujuan penelitian tanpa melampauinya, disajikan dalam bentuk narasi.
  - h. **Rekomendasi** berupa alternatif-alternatif kebijakan dalam bentuk pointer, berisi bentuk dan telaahtannya untuk dilaksanakan mengacu pada prinsip tepat-guna, logis dan relevan.

- i. **Ucapan terimakasih**. Memuat pihak-pihak yang berkontribusi dalam kegiatan penelitian.
4. Tabel, gambar dan grafik dapat terbaca dengan jelas dan hendaknya agar dilampirkan secara terpisah serta diberi penjelasan yang memadai.
5. Penulisan rujukan sesuai dengan model Harvard. Pada isi tulisan, nama penulis ditulis disertai dengan tahun penulisannya. Pada bagian Daftar Pustaka, penulisan diurut sesuai dengan abjad.
6. Referensi 50% hasil penelitian relevan terdahulu. Beberapa contoh bentuk referensi dalam jurnal ini adalah:

#### Buku

Abel, R. 2004. Revolusi Kesehatan Mata: Pencegahan dan Pengembalian Masalah Penglihatan. New York: Kensington Book

Chaniago, A. 2010. Studi Pustaka dan Konseptualisasi Penelitian. Dalam: Zaluchu, F. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Bandung: Citapustaka Media, hal 79-92.

#### Artikel dari Jurnal

Ang, L. dan Taylor, B. 2005. Memanajemen Keuntungan Konsumen Menggunakan Matriks Portofolio. *Jurnal Pemasaran dan Manajemen Konsumen Strategik* 12 (5), hal 298-304

#### Bagian di dalam buku

Ballinger, A. dan Clark, M. 2001. Nutrisi, Pengendalian Nafsu Makan dan Penyakit. Dalam: Payne-James, J. dkk. editor. *Dukungan Artifisial bagi Praktik Klinik*. Edisi kedua. London: Greenwich Medical, hal 225-239

#### Koran

Benoit, B. 2007. Peran G8 dalam Pemanasan Global. *Harian Kompas* 29 Mei 2007, hal 9.

#### Laporan

Komisi Eropa. 2004. *Laporan Pendahuluan terhadap Implementasi dari Strategi Pemasaran Internal 2003-2006*. Luxemburg: Unit Publikasi Komisi Eropa.

#### Konferensi

Fiedelius, H.C. 2000. Miopi dan Penurunan Visual: Aspek Global. Dalam: Lin, L.L.K. dkk. editor. *Miopia Terbaru II: Prosiding Konferensi Internasional ke-7*. Taipei, 17-20 Nopember 1998. Tokyo: Springer, hal 31-37.

#### Tesis

Garcia-Sierra, A. 2000. Investigasi Penyebab Ca-Serviks pada Wanita Usia Subur di Perkotaan. Tesis PhD, Universitas Indonesia.

#### Jurnal Artikel Elektronik

Merchant, A.T. 2009. Diet dan Aktifitas Fisik pada Anak-Anak di Kawasan Kumuh Perkotaan: sebuah Studi Cross Sectional. *Jurnal Nutrisi* [Online] Edisi 6. Dari: <http://www.nutritionj.com/content/pdf/1475-2891-6.1.pdf> [Diakses: 10 Mei 2007].

**Web Page**

Thompson, B. 2006. Mengapa Balita Butuh ASI [Online]. Dari: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/459876> [Diakses: 10 Mei 2007].

Depkes RI. 2006. Panduan Imunisasi [Online]. Dari: [http://www.depkes.go.id/bayi\\_panduan\\_imunisasi/2345](http://www.depkes.go.id/bayi_panduan_imunisasi/2345) [Diakses: 19 Februari 2011].

7. Naskah dituliskan dengan menggunakan Times New Roman 12, maksimal 20 halaman A4 spasi ganda, ditulis dengan program komputer Microsoft Word.
8. Naskah yang masuk hendaknya diterima 2 (dua) bulan sebelum waktu penerbitan untuk *direview* oleh anggota dewan redaksi dan *reviewer* (mitra bestari) yang ditunjuk oleh Dewan Redaksi.
9. Dewan Redaksi berhak menolak naskah ilmiah yang dianggap tidak layak muat di Jurnal Inovasi. Pengiriman naskah ke alamat redaksi melalui Open Journal System (OJS) pada laman: <http://jurnal.balitbang.sumutprov.go.id>
10. Redaksi berhak menolak naskah yang isi dan formatnya tidak sesuai dengan pedoman penulisan naskah di atas dan redaksi tidak berkewajiban untuk mengembalikan naskah tersebut.
11. Setiap penulis yang karya tulisnya telah diterbitkan, akan mendapat satu buah cetak lepas dan satu buah *full print*.
12. Setiap penulis menyetujui untuk mengalihkan hak ciptanya ke Jurnal Inovasi jika naskahnya diterima untuk diterbitkan.